

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN, DAN *RETURN* DAN  
RISIKO INVESTASI DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**(Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**gelar Magister Manajemen**

**Disusun oleh :**

**Yulina**

**NIM. 015635869**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
2011**

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER MANAJEMEN

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul " Analisis Kinerja Keuangan dan *Return* dan Risiko Investasi Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah" adalah hasil kerja saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjirokan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang, Desember 2011

Yang Menyatakan



YULINA  
NIM. 015635869

## ABSTRAK

### Analisis Kinerja Keuangan dan *Return* dan Risiko Investasi Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Yulina

Universitas Terbuka

icha\_rox@yahoo.com

Kata Kunci : Kinerja keuangan, *return* dan risiko investasi, pendapatan asli daerah.

Penelitian dilakukan guna melihat gambaran kondisi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk *return* dan risiko investasinya serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah. Analisis kinerja keuangan dan *return* dan risiko investasi bertujuan untuk melihat tingkat kinerja pemerintah daerah, untuk mengetahui hasil kerja perusahaan emiten serta besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko yang terjadi atas investasi serta portofolio yang optimal dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang dipadu penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 8 tahun sejak tahun 2003 – 2010 ditambah sebagian laporan keuangan perusahaan emiten. Metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis vertikal, analisis horizontal (analisis pertumbuhan dan analisis perbandingan realisasi dan anggaran), analisis rasio, analisis *financial* perusahaan, analisis *return* dan risiko, uji *kovarian* dan *koefisien korelasi* serta uji asumsi dasar berikut uji hipotesis penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh nilai F hitung sebesar 0,032 dengan probabilitas 0,969<sup>a</sup> dan nilai signifikansi p value 0,969 lebih dari nilai 0,05 yang telah menguji pengaruh antara variabel independen (*return* dan risiko) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah), karena probabilitas lebih dari  $\alpha$  0,05 maka dapat dikatakan bahwa *return* dan risiko secara baik simultan dan parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## ABSTRACT

*Analysis of Financial Performance and Investment Risk and Return  
In Revenue Optimization Framework*

Yulina

*The Open University*

*icha\_rox@yahoo.com*

*Keywords: Financial performance, return and investment risk, revenue.*

*The study was conducted to see the picture of the financial performance of the Provincial Government of Island Pacific Islands including return and investment risk and its effect on local revenues. Analysis of financial performance and stock returns and investment risks aims to look at the performance level of local government, to know the work of the issuer company and the level of expected benefits and risks that occur on investment and the optimal portfolio and its effect on local revenues.*

*This research is descriptive quantitative research combined with explanatory research using secondary data through literature study on the financial statements of the Provincial Government of the Pacific Islands during the 8 years since the year 2003 to 2010 plus some of the issuer company's financial statements. Data analysis methods used, namely the analysis of vertical, horizontal analysis (analysis of growth and the realization of comparative analysis and budget), ratio analysis, corporate financial analysis, analysis of return and risk, covariance and correlation coefficient test and test the basic assumption of the following research hypothesis test.*

*The results obtained F value calculated with a probability of 0.032 and 0.969 a significance value p value 0.969 is more than the value of 0.05 which has examined the effect of the independent variable (return and risk) on the dependent variable (revenue), because the probability of more than a 0.05 it can be said that the return and risk are both simultaneous and partial no effect on local revenues.*

## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Kinerja Keuangan dan *Return* dan Risiko Investasi Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Penyusunan TAPM : YULINA  
 NIM : 015635869  
 Program Studi : Magister Management  
 Hari/Tanggal : Minggu, 18 Desember 2011

Menyetujui :

Pembimbing I,

Dr. DEWI HANGGRAENI, SE, M.BA  
 NIP. 19670108 200003 2 001

Pembimbing II,

Dr. SRI LISTYARINI, MEd  
 NIP. 19610407 198602 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Magister Manajemen, Direktur Program Pascasarjana,

Drs. C. SUPARTOMO, M.Si.  
 NIP. 19521022 198203 1 001



SUCIATI, M.Sc., Ph.D.  
 NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN**

**PENGESAHAN**

Nama : Yulina

NIM : 015635869

Program Studi : Magister Manajemen

Judul Tesis : Analisis Kinerja Keuangan dan *Return* dan Risiko Investasi  
Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana,  
Program Studi Magister Manajemen, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu/ 18 Desember 2011  
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB.

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua Komisi Penguji : SUCIATI, M.Sc., Ph.D.

Penguji Ahli : Dr. CHAIRY, MM.

Pembimbing I : Dr. DEWI HANGGRAENI, SE, M.BA

Pembimbing II : Dr. SRI LISTYARINI, MEd

## KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan dan *Return* dan Risiko Investasi Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah” merupakan satu syarat untuk mendapat gelar Magister Managemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Suciati, M.Sc. Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Dr. Maman Rukmanta selaku Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Ibu Dr. Dewi Hanggraeni, MBA selaku pembimbing I dan Ibu Dr.Sri Listyarini,MEd selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberi semangat bagi peneliti dalam penyusunan TAPM ini;
4. Bapak Drs. C. Supartomo, M.Si selaku Kepala Bidang Program Pascasarjana Magister Manajemen selaku penanggung jawab program Pascasarjana Magister Manajemen;
5. Ibunda tercinta Roaini, yang selalu memberi dukungan, bantuan serta perhatian serta doa bagi peneliti dalam setiap saat;
6. Suamiku Ir. Muherman beserta putra-putri yang sangat kukasihi dan sayangi Miftah Fadhilah dan Mona Varisha yang selalu penuh perhatian mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan pascasarjana ini;
7. Teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Peneliti menyadari, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan peneliti, untuk saran dan kritik yang membangun guna perbaikan penulisan hasil penelitian sangat peneliti harapkan dan haturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT, membalsas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pangkalpinang, 18 Desember 2011

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak .....	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Keaslian Penelitian .....	8
G. Sistematika .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Kajian Teori .....	12
B. Kerangka Pernikir .....	60
1. Kerangka Konseptual Penelitian .....	60
2. Hipotesis Penelitian .....	61
3. Definisi Operasional .....	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	63
A. Desain Penelitian .....	63
B. Lokasi Penelitian .....	63
C. Populasi dan Sampel, .....	63
D. Instrumen Penelitian .....	64
E. Prosedur Pengumpulan Data .....	65
F. Variabel Penelitian .....	65
G. Metode Analisis Data .....	66
H. Tahapan Penelitian .....	83
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....	85
A. Gambaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	85
B. Hasil penelitian dan Pembahasan.....	89
C. Ringkasan Hasil .....	251

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	256
	A. Kesimpulan .....	256
	B. Saran .....	258
	DAFTAR PUSTAKA .....	261

UNIVERSITAS TERBUKA

## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.1	Investasi Aset Keuangan dan Pendapatan .....	4
3.1	Bentuk Transformasi Data .....	79
4.1	Analisis Proporsi Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2003 – 2010 .....	90
4.2	Analisis Proporsi Kewajiban dan Ekuitas Dana Periode 31 Desember Tahun Anggaran 2003 – 2010 .....	95
4.3	Struktur Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010 .....	98
4.4	Struktur Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010 .....	100
4.5	Struktur Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010 .....	102
4.6	Struktur Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010 .....	107
4.7	Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	111
4.8	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 .....	112
4.9	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2008 – 2010 .....	115
4.10	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung & Deviden yang Diterima dari Bank Sumsel Bangka Belitung .....	116
4.11	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung & Deviden yang Diterima dari PT. BPR Syariah Bangka Belitung .....	117

4.12	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Riau Airlines .....	118
4.13	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Belum Ada Kontribusi Dividen .....	118
4.14	Giro dan Jasa Giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	119
4.15	Deposito dan Bunga Deposito Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	120
4.16	Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (Suku Bunga SBI) Jangka Waktu 1 Bulan Sejak 2003 – 2010 .....	121
4.17	Analisis Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003-2010 .....	136
4.18	Analisis Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003 – 2010 .....	140
4.19	Analisis <i>Current Ratio</i> .....	144
4.20	Analisis <i>Quick Ratio</i> .....	147
4.21	Analisis <i>Cash Ratio</i> .....	149
4.22	Analisis <i>Ratio Leverage</i> .....	150
4.23	Analisis <i>Debt Ratio</i> .....	151
4.24	Analisis DER .....	152
4.25	Rasio Utang terhadap Aset Modal .....	153
4.26	Analisis <i>Solvabilitas</i> .....	154
4.27	Analisis Kemandirian .....	155
4.28	Analisis <i>Earning Performance Ratio</i> .....	157
		158

4.29	Derajat Kontribusi BUMD .....	160
4.30	<i>Earning Pershare</i> Saham PT. Bank Sumsel Babel .....	162
4.31	<i>Earning Pershare</i> Saham PT. BPR Syariah Babel.....	
4.32	<i>Earning Per sahre</i> Saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....	164
4.33	<i>Earning Persahre</i> Saham PT. Bank Sumsel Babel .....	166
4.34	<i>Earning Persahre</i> Saham PT. BPR Syariah Babel .....	167
4.35	<i>Earning Persahare</i> Saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....	168
4.36	<i>Price Earning</i> Rasio Saham PT. Bank Sumsel-Babel .....	170
4.37	<i>Price Earning</i> Rasio PT. BPR Syariah Babel .....	171
4.38	<i>Price Earning</i> Rasio PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....	172
4.39	<i>Return</i> Jasa Giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	174
4.40	<i>Return</i> Bunga Deposito Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	176
4.41	<i>Return Total</i> Saham PT. Bank Sumsel-Babel .....	178
4.42	<i>Return</i> yang diharapkan dari Penyertaan Modal Bank Syariah Babel .....	180
4.43	<i>Return Total</i> Saham PT. Sumatera Shipping Lines .....	182
4.44	<i>Return Total</i> Saham PT. Sumatera Promotion Centre .....	183
4.45	<i>Return Total</i> Penyertaan Modal pada PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....	184
4.46	<i>Return Total</i> Penyertaan Modal pada PT. Riau Airlines .....	186

4.47	<i>Return Total Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Kota Pangkalpinang.....</i>	188
4.48	<i>Return Total atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Kabupaten Belitung .....</i>	189
4.49	<i>Return yang diharapkan dari Giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....</i>	190
4.50	<i>Return yang diharapkan dari Deposito Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....</i>	192
4.51	<i>Return yang diharapkan dari Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumsel Babel .....</i>	193
4.52	<i>Return yang diharapkan dari Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines .....</i>	195
4.53	<i>Return yang diharapkan dari Penyertaan Modal Bumi Bangka Sejahtera .....</i>	196
4.54	<i>Return yang diharapkan dari Penyertaan Modal Bank Syariah Babel .....</i>	197
4.55	Pendapatan Investasi Jasa Giro, Bunga Deposito, Dividen Pendapatan Asli Daerah .....	198
4.56	<i>Varian dan Standar Deviasi Jasa Giro Pemerintah Provinsi Kep. Babel .....</i>	200
4.57	<i>Varian dan standar deviasi Bunga Deposito Pemerintah Provinsi Kep. Babel .....</i>	202
4.58	<i>Varian dan standar deviasi saham PT. Bank Sumsel Babel .....</i>	203
4.59	<i>Varian dan standar deviasi saham PT. Sumatera Shiping Lines ....</i>	204
4.60	<i>Varian dan standar deviasi saham PT. Sumatera Promotion Centre .....</i>	205
4.61	<i>Varian dan standar deviasi saham PT. Riau Airlines .....</i>	206
4.62	<i>Varian dan standar deviasi saham PT. Riau Airlines .....</i>	207
		208

4.63	<i>Varian</i> dan standar deviasi saham Bank Syariah Babel .....	209
4.64	<i>Varian</i> dan Standar Deviasi Saham PDAM Kota Pangkalpinang	209
4.65	<i>Varian</i> dan Standar Deviasi Saham PDAM Kabupaten Belitung.	
4.66	<i>Return</i> yang diharapkan, Varian, Deviasi Standar & Korelasi Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	210
4.67	<i>Return</i> Giro, Deposito & Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2003 – 2010 .....	214
4.68	<i>Kovarian</i> dan <i>Korelasi</i> Portofolio Sekuritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	216
4.69	Alokasi Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	225
4.70	<i>Return</i> yang Diharapkan dan Risiko Portofolio Sekuritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	226
4.71	Data <i>Return</i> , Standar Deviasi Saham .....	235
4.72	Alokasi Dana setiap Asset dalam Portofolio .....	236
4.73	Kombinasi Aset Portofolio .....	237
4.74	Alokasi Kombinasi Asset Portofolio .....	241
4.75	Uji Autokorelasi .....	241
4.76	Uji Multikolinearitas .....	243
4.77	Nilai R square hipotesis .....	244
4.78	Nilai Hitung Signifikansi Hipotesis .....	245
4.79	Uji Hipotesis .....	

## DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
2.1	Hubungan <i>return</i> dan risiko yang diharapkan .....	25
2.2	Portofolio yang Efisien dan Portofolio yang Optimal .....	33
2.3	Proses Keputusan Investasi .....	45
2.4	Kerangka Konsptual.... .....	60
3.1	Tahapan Penelitian .....	83
4.1	Diagram Pie Proporsi Asset Lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	92
4.2	Diagram Pie Proporsi Rata-rata Asset .....	93
4.3	Diagram Batang Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010.....	103
4.4	Diagram Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 – 2010. ....	104
4.5	Diagram Pie Proporsi Rasio Rata-rata Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	105
4.6	Diagram XY Surplus dan Defisit Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010.....	109
4.7	Diagram Garis Analisis Pertumbuhan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003-2010 .....	127
4.8	Diagram Batang <i>Earning Pershare</i> Saham PT. Bank Sumsel Babel .....	161
4.9	Diagram Batang <i>Earning Pershare</i> Saham PT. BPR Syariah Babel .....	163
4.10	Hubungan <i>Return</i> dan Resiko yang diharapkan .....	211

4.11	Diversifikasi Sekuritas dengan Koefisien Korelasi Positif Sempurna .....	218
4.12	<i>Expected Return</i> dan Risiko Portofolio .....	228
4.13	Diagram Batang <i>Expected Return</i> Portofolio .....	228
4.14	Diagram Pie Risiko Portofolio Investasi Pemerintah Prov.Kep.Babel .....	229
4.15	<i>Expected Return</i> dan Risiko Investasi serta <i>Expected Return</i> dan Risiko Portopolio .....	232
4.16	<i>Expected Return</i> dan Risiko Portofolio Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....	234
4.17	<i>Efficient Frontier</i> Markowitz Portofolio .....	238
4.18	Hasil Uji Normalitas .....	240
4.19	Uji Heterokedastisitas .....	242

## DAFTAR LAMPIRAN

No.		Halaman
L.1	Laporan Realisasi Anggaran .....	Lampiran 1
L.2	Neraca .....	Lampiran 2
L.3	Laporan Arus Kas .....	Lampiran 3
L.4	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010.....	Lampiran 4
L.5	Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010.....	Lampiran 5
L.6	Analisis Proporsi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 – 2010.....	Lampiran 6
L.7	Analisis Horizontal Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010.....	Lampiran 7
L.8	Analisis Pertumbuhan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003-2010.....	Lampiran 8
L.9	<i>Return</i> yang diharapkan dari Penyertaan Modal PT. Sumatera Shiping Lines .....	Lampiran 9
L.10	<i>Return</i> yang diharapkan dari Penyertaan Modal pada PT. Sumatera Promotion Centre .....	Lampiran 10
L.11	<i>Return</i> yang diharapkan dari Penyertaan Modal pada PDAM Kota Pangkalpinang .....	Lampiran 11
L.12	<i>Return</i> yang diharapkan dari Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Belitung .....	Lampiran 11

L.13	<i>Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro dan Giro</i> .....	Lampiran 12
L.14	<i>Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro dan Deposito</i> .....	Lampiran 12
L.15	<i>Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro dan Saham Bank Sumsel Babel</i> .....	Lampiran 13
L.16	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham Shiping Lines</i> .....	Lampiran 14
L.17.	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham Sumatera Promotion Centre</i> .....	Lampiran 15
L.18	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham Riau Airlines</i> .....	Lampiran 16
L.19	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera</i> .....	Lampiran 17
L.20	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham BPR Syariah Babel</i> .....	Lampiran 18
L.21	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Penyertaan Modal PDAM Pangkalpinang</i> .....	Lampiran 19
L.22	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Penyertaan Modal PDAM Belitung</i> .....	Lampiran 20
L.23	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Deposito &amp; Deposito</i> .....	Lampiran 21
L.24	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Deposito &amp; Saham Sumsel Babel</i> .....	Lampiran 22
L.25	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Deposito dengan Sumatera Shiping Lines</i> .....	Lampiran 23
L.26	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham Sumatera Promotion Centre</i> .....	Lampiran 24
L.27	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham Riau Airlines</i> .....	Lampiran 25
L.28	<i>Kovarian dan Korelasi Giro &amp; Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera</i> .....	Lampiran 26

L.29	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Saham BPR Syariah Babel .....</i>	Lampiran 27
L.30	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Penyertaan Modal PDAM Pangkalpinang .....</i>	Lampiran 28
L.31	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Giro &amp; Penyertaan Modal PDAM Belitung .....</i>	Lampiran 29
L.32	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Sumsel-Babel dan Sumsel Babel .....</i>	Lampiran 30
L.33	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Sumsel Babel dan Sumatera Shiping Airlines.....</i>	Lampiran 31
L.34	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Sumsel-Babel dan Sumatera Promotion Centre .....</i>	Lampiran 32
L.35	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Sumsel-Babel dan Riau Airlines .....</i>	Lampiran 33
L.36	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Sumsel Babel dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....</i>	Lampiran 34
L.37	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Sumsel Babel dan BPR Syariah Babel .....</i>	Lampiran 35
L.38	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Sumsel Babel dengan PDAM Pangkalpinang .....</i>	Lampiran 36
L.39	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Bank Sumsel-Babel dengan Saham PDAM Belitung .....</i>	Lampiran 37
L.40	<i>Kovarian dan Koefisien Korelasi Nol .....</i>	Lampiran 38
L.41	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Riau Airlines dan Riau Airlines .....</i>	Lampiran 39
L.42	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Riau Airlines dan BPR Syariah .....</i>	Lampiran 40
L.43	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Riau Airlines dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....</i>	Lampiran 41

L.44	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham BPR Syariah dan BPR Syariah .....</i>	Lampiran 42
L.45	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham BPR Syariah dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....</i>	Lampiran 43
L.46	<i>Kovarian dan Koefisein Korelasi Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera .....</i>	Lampiran 43
L.47	Return Portofolio Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	Lampiran 44

UNIVERSITAS TERBUKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lahir sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 pada tanggal 4 Desember 2000, yang sebelumnya tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau disebut Negeri Serumpun Sebalai atau sekarang lebih dikenal dengan Negeri Laskar Pelangi yang terdiri atas 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi bahan timbang yang cukup besar berupa timah dan merupakan penghasil timah utama di Indonesia. Selain itu memiliki kekayaan alam lain berupa hasil perkebunan berupa lada, kelapa sawit karet, cengkeh dan coklat dan potensi sumber daya perikanan dan kelautan berupa ikan, udang, kepiting dan biodata laut lainnya serta potensi pariwisata berupa pantai yang memiliki garis sepanjang 1200 km. (Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 : II-15).

Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan daerah meliputi hak daerah dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.

Sedangkan kewajiban daerah yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, melaksanakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, serta melakukan pengelolaan kekayaan daerah baik sendiri atau oleh pihak lain. Pengelolaan atas kekayaan daerah dapat berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Daerah tidak hanya dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah namun juga diharapkan dapat mengelola keuangan tersebut dengan baik. Pengelolaan keuangan dijalankan melalui fungsi pertabaharaan yang meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran dan penyimpangan, pencarian sumber-sumber pembiayaan yang paling murah, dan pemanfaatan dana menganggur (*idle cash*) serta melakukan investasi daerah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan daerah.

“Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memuat arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah, arah pengelolaan pembiayaan daerah serta kebijakan umum anggaran.” (Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 :V-1-19). Arah pengelolaan pendapatan daerah adalah mengupayakan kemandirian fiskal dengan meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat serta meningkatkan pendapatan melalui

sumber-sumber pendapatan lainnya antara lain bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012 bahwa kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2007-2012 diarahkan kepada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. Peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui terbentuknya perbaikan manajemen, peningkatan investasi serta optimalisasi asset daerah, sedangkan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil dilakukan melalui penyusunan program unggulan untuk dapat diajukan agar dapat dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat serta pajak dan retribusi sedemikian besar dibanding dengan hasil dari pengelolaan kekayaan dan investasi dari daerah. Hal ini tergambar dalam Tabel 1.1. dimana pendapatan yang diterima dari investasi pemerintah daerah dianggap relatif belum memberi kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan modal yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Setiap investasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta, tentunya tidak selalu menghasilkan keuntungan, karena berhubungan dengan ketidakpastian. Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk dilakukan estimasi terhadap *return* dan risiko yang diperoleh perusahaan sehingga perusahaan dapat

menentukan pilihan dari berbagai alternatif dari investasi dengan tujuan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Tabel 1.1  
Investasi Aset Keuangan dan Pendapatan

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Investasi Permanen		Pendapatan	
	2008	2009	2008	2009
Giro & Deposito	315,465.87	264,030.03	8,023.96	10,811.65
Bunga Deposito	-	-	9,062.50	3,750.00
Kupem	4,942.93	4,926.09		16.84
Investasi Jk Pendek	320,408.80	268,956.12	17,086.46	14,578.49
-PT.Bank Sumsel	8,000.00	8,000.00		1,309.36
-PT.Sumatera Shipping Lines	100.00	100.00	-	-
-PT.Sumatera Promotion Centre	100.00	100.00	-	-
-PT. Bangka Belitung Sejahtera	4,000.00	3,097.44	-	-
- Riau Air Lines	1,000.00	1,000.00	-	-
- Bank Syariah Bangka	1,600.00	1,600.00	-	462.19
-PDAM Kota Pangkalpinang	8,216.75	8,216.75	-	-
-PDAM Kabupaten Belitung	731.25	731.25	-	-
Jumlah Investasi Jk Panjang	23,718.00	22,845.44	1,023.52	1,771.55

Sumber : Neraca dan Laporan Realisasi APBD 2008-2009

Tandelilin (2008:1.3) mendefinisikan investasi “sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) dikemudian hari (*in future*).” Investasi dapat dihubungkan dengan penanaman uang atau barang pada berbagai macam alternatif aset, baik dalam bentuk *real asset* seperti tanah, emas, pengadaan proyek pemerintah misalnya pembangunan pabrik, jalan raya, irigasi, rumah sakit sekolah atau lainnya serta dalam bentuk *financial asset* seperti surat berharga (saham, obligasi ataupun reksadana). Sedangkan bentuk investasi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 terdiri atas investasi surat berharga yang meliputi pembelian saham dan surat hutang serta investasi langsung berupa penyertaan modal dan pemberian pinjaman.

Menurut Nugroho, Saragih & Umanto (2008:191) ‘Dalam pengambilan keputusan, perusahaan (bisnis/publik) akan dihadapkan pada masalah ketidakpastian karena tidak sempurnanya informasi.’ Ketidakpastian ini sangatlah berpengaruh terhadap keputusan yang berhubungan dengan pengembalian (*return*) dan risiko yang akan dihadapi/diperoleh oleh perusahaan. Nugroho, Saragih, Umanto (2008: 191) menyatakan “Risiko diukur sebagai hasil deviasi yang diharapkan dari imbal hasil rata-rata. Risiko dapat pula diukur sebagai suatu kemungkinan untuk mendapatkan kerugian ataupun keuntungan dalam melakukan investasi terhadap aset maupun proyek.”

Setiap keputusan investasi haruslah didasari untung rugi terhadap perusahaan, dalam hal ini perusahaan harus mempertimbangkan pengembalian (*return*) dan *benefit* serta risiko dari investasi tersebut karena semakin besar risiko dari suatu investasi maka semakin besar tingkat *return* yang diharapkan dari investasi tersebut atau semakin kecil risiko dari suatu investasi makin semakin kecil pula *return* yang diharapkan.

Tandeliin (2008:1.6) menyatakan bahwa “*Return* yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (*opportunity cost*) dari risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Sedangkan risiko diartikan sebagai kemungkinan *return* aktual yang berbeda dengan *return* yang diharapkan.”

Sejalan dengan arah kebijakan umum pendapatan asli daerah yaitu perbaikan manajemen, peningkatan investasi dan optimalisasi aset serta melihat fenomena dimana sebagian dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum mendatangkan pengembalian (*return*), hal ini menjadi suatu yang hal

menarik untuk dikaji dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah melalui analisis *return* dan risiko investasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Analisis Kinerja Keuangan, *Return* dan Risiko Investasi Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.”

## B. Rumusan Masalah

*Return* dan risiko bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berdampingan. Artinya dalam berinvestasi disamping menghitung *return* yang diharapkan, investor juga harus memperhatikan risiko yang harus ditanggung. *Return* merupakan tingkat keuntungan investasi sedangkan risiko merupakan kemungkinan *return* aktual berbeda dengan *return* yang diharapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat masalah penting yang harus diteliti yaitu dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan masih lemahnya manajemen investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berdampak pada rendahnya tingkat *return* investasi secara keseluruhan yang belum menunjukkan hasil yang optimal, pemerintah provinsi sendiri masih tergantung terhadap dana dari pemerintah pusat sehingga penerimaan atas pendapatan asli daerah belum maksimal, demikian pula penyertaan modal pada PT. Bank Sumsel, pada 2004 – 2006 harga belinya lebih tinggi dari nominal sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian (*disagio*) saham. Berakar dari permasalahan-permasalahan tersebut pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk *return* dan risiko investasinya?

2. Apakah *return* dan risiko investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan sebagai konsep penerapan fungsi keilmuan yang dilaksanakan guna :

1. Mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk *return* dan risiko investasi.
2. Mengetahui pengaruh *return* dan risiko investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Penelitian diharapkan menjadi sumbangan bagi pemerintah sebagai *public services* khusus Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan investasi guna peningkatan pendapatan asli daerah serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengelola investasi daerah dan penyusunan peraturan di bidang Investasi Pemerintah Daerah.

2. Bagi Teoritis

Manfaat yang diharapkan peneliti adalah hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai konsep analisis kinerja keuangan, *return* dan risiko investasi daerah.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengarahkan pada tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan dan pengaruh *return* dan risiko investasi terhadap pendapatan asli daerah dengan ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Investasi yang menjadi obyek penelitian ini berupa investasi aset keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa giro, deposito, penyertaan modal dan pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendaftaran asli daerah yang sah.
3. Periode penelitian dimulai dari tahun 2003 sampai 2010 didasarkan pada tahun pertama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan investasi pada perusahaan.

## F. Keaslian Penelitian

Judul Penelitian	Peneliti dan Tahun	Uraian	Metode Penelitian
Analisis Perbandingan Risiko dan Tingkat Pengembalian Reksa dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional	Saltian, 2006	Hasil kinerja Reksa Dana Anggrek dengan <i>multiple benchmark index</i> maupun <i>single benchmark index</i> adalah sama, karena IHSG sebagai pasar yang dijadikan <i>benchmarknya</i> adalah pasar umum yang digunakan di Indonesia	Penggunaan <i>multiple benchmark index</i> untuk menghitung risiko <i>beta</i> dan <i>risk adjut performance</i> dengan metode indeks Sharpe untuk menghitung hasil
Analisis Faktor Fundamental Keuangan dan Risiko Sistematik terhadap Harga Saham Perusahaan Customer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Abidin, 2009	Secara simultan atau bersama-sama semua faktor fundamental <i>Earning per Share (EPS)</i> , <i>Book Value per Share (BVS)</i> , <i>Return on Assets (ROA)</i> , <i>Dividend Payout Ratio (DPR)</i> dan risiko sistematis (Beta) berpengaruh terhadap harga saham.	Model Persamaan Regresi, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Regresi Serentak (uji F), Uji Regresi Parsial (uji t).

Analisis dan Desain Proses Pembentukan Portofolio yang Optimal Perusahaan yang Go Publik pada PT. Bursa Efek Jakarta	Sulistiono, 2006	Memberi gambaran risiko <i>portofolio</i> dan <i>return ekspektasi portofolio</i> dan <i>portofolio</i> yang optimal	Menentukan <i>portofolio</i> yang optimal melalui garis <i>efficient frontier</i> berdasar preferensi investor dalam menghadapi risiko
Analisis Pengaruh Beta dan Varian <i>Return</i> Saham terhadap <i>Return</i> Saham	Utomo, 2007	Beta Saham dan Varian Saham berpengaruh terhadap <i>Return</i> Saham	Uji Asumsi klasik, analisis regresi, Uji hipotesis dengan uji F dan Uji T dan koefisien determinasi.
Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas dan Profitabilitas terhadap <i>Return</i> Saham (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman dengan Kategori Industri Barang Konsumsi di BEJ ).	Ulupuy, 2005	<i>Current ratio, return on asset, debt to equity ratio</i> berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham, sebaliknya <i>total asset turn over</i> berpengaruh negatif terhadap <i>return</i> saham.	Uji Statistik F dan uji T statistik
Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Daerah	Thesaurianto, 2007	Transfer pembiayaan pusat, pajak kendaraan bermotor, dan investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah.	Analisis Kualitatif, Analisis kuantitatif, Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Penyimpangan Asumsi Klasik, Uji T, Uji F, Koefisien Determinasi,

Pada umumnya penelitian terhadap *return* dan risiko, mengambil sampel terhadap salah perusahaan pada pasar modal, hal ini tergambar dari hasil penelitian Saltian (2006), menggunakan metode Sharpe, Treynor dan Jensen serta *multiple benchmark index* menunjukkan *return* dan risiko reksadana syariah dengan *multiple benchmark index* dengan *single benchmark index* berbeda, sedangkan hasil reksadana anggrek adalah sama. Penelitian Abidin (2009) menunjukkan bahwa secara simultan faktor fundamental keuangan dan beta saham berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan *customer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sulistiono (2006) sendiri melakukan penelitian terhadap proses dan desain pembentukan portofolio yang optimal

dengan hasil bahwa *portofolio* yang optimal dapat dilihat dari persepsi investor terhadap risiko yang bakal dihadapi. Desain pembentukan *portofolio* digunakan pendekatan CAPM (*Capital Assets Pricing Model*). Utomo (2007), dalam Analisis Pengaruh Beta dan Varian *Return* Saham terhadap *Return* Saham menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi, uji hipotesis dengan uji F dan Uji T dan koefisien determinasi dengan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel beta saham dan varian *return* saham secara parsial signifikan berpengaruh terhadap *return* saham. Ulupuy (2005) melakukan penelitian analisis pengaruh rasio *liquidity, leverage, aktivitas* dan *profotabilitas* terhadap *return* saham (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman dengan Katagori Industri Barang Konsumsi di BEJ) dengan hasil penelitian menunjukkan *current ratio, return on asset, debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap *return* saham, sebaliknya *total asset turn over* berpengaruh negatif terhadap *return* saham. Thesaurianto, (2007) Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kemandirian Daerah melakukan penelitian dengan variabel berupa transfer pemerintah pusat, pajak kendaraan bermotor, dan investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis regresi linier berganda, uji penyimpangan asumsi klasik, uji T, uji F, dan koefisien determinasi.

Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya memberikan gambaran kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetapi juga analisis financial dari perusahaan emiten termasuk *return* dan risiko investasi serta bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan investasi dengan hasil yang paling

optimal melalui proses keputusan investasi serta menentukan garis *efficient frontier* dan memilih aset bebas risiko.

#### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki lima bab yang tersusun secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan hasil penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat kajian teori, kerangka berpikir dan definisi operasional.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kajian teori dan teknik analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran kepada praktisi dan teoritis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Keuangan publik

Pada tataran implementasi terdapat perbedaan antara kegiatan keuangan sektor swasta dengan sektor pemerintah (publik). Kegiatan sektor swasta lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang lebih mempetimbangkan kepentingan individu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan kegiatan sektor publik lebih banyak ditentukan atau diputuskan melalui keputusan-keputusan politis yang didasarkan pada preferensi pemilih.

Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:1.22) menyatakan bahwa “Keuangan publik pada dasarnya membahas cara-cara bagaimana pemerintah menggali dana dan menggunakannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah.” Publik diartikan secara sempit sebagai pemerintah (*government*). Keuangan publik sering disebut sebagai keuangan negara. Pengertian keuangan publik secara luas menurut Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:1.25-1.26) “Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan swasta maupun lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan sebagainya.”

Menurut Arsjad, Nurdjaman, Kusumanto, Prawirosetoto (1992:6) mengatakan ruang lingkup keuangan publik:

Pengeluaran negara (*publik expenditure*); sumber penerimaan negara dimana pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terpenting

(*government revenue and taxes*); pinjaman negara dan pelunasanya (*government borrowing and indebtedness*); administrasi fiskal atau teknik fiskal (*fiscal administration or technique*) yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara; perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*intergovernment fiscal relationship*); kebijakan fiskal (*fiscal policy*) yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara terhadap pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, serta efisiensi alokasi sumber daya.

Menurut Sumarsono (2009:4) definisi keuangan negara dapat dipahami atas tiga interpretasi atau penafsiran terhadap pasal 23 UUD 45 yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara yaitu,

- a. Penafsiran pertama adalah pengertian keuangan negara diartikan secara sempit, hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN sebagai sub sistem keuangan negara dalam arti sempit;
- b. Penafsiran kedua adalah berkaitan dengan metode dan sistematik dan historis yang menyatakan keuangan negara dalam arti luas yang meliputi keuangan negara yang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu sistem keuangan negara;
- c. Penafsiran ketiga dilakukan melalui pendekatan sistematik dan teleologis atau sosiologis terhadap keuangan negara yang dapat memberikan penafsiran yang relatif lebih akurat sesuai dengan tujuannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 bahwa Keuangan Negara adalah “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan

milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.” Dari pengertian tersebut, keuangan negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Sejak dikeluarkan undang-undang otonomi daerah, daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan roda pemerintah dan mengelola sumber-sumber keuangan secara transparan dan akutabel sesuai dengan prinsip *Good Governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pengertian keuangan daerah adalah “Hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah yang berhubungan dan hak dan

kewajiban.” Struktur azaz pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 4 dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Reformasi akutansi pemerintah daerah ditandai sejak dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dimana terdapat paradigma baru dalam akutansi pemerintah daerah yaitu perubahan sistem *single entry* menjadi *double entry* serta perubahan sistem akutansi berbasis kas (*cash basis*) menjadi berbasis akrual (*accrual basic*). Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD , disusunlah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang menggambarkan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan. Format laporan realisasi anggaran seperti tercantum pada Tabel L.1 (lampiran 1).

b. Neraca

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban,dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format Neraca sebagaimana tercantum pada Tabel L.2 (lampiran 2)

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas untuk

memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Analisis laporan keuangan sering dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap masalah keuangan, demikian pula terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya. Menurut Ekawati (2009:3.12) “Analisis laporan keuangan berguna untuk memprediksi laba, dividen dan *free cash flow* di masa yang akan datang.”. Sedangkan Warsidi dan Bambang dalam Fahmi (2010:121) mendefinisikan “Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan

tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.”

Litelatur yang mengulas analisis terhadap laporan keuangan sektor publik lebih sedikit dibandingkan dengan sektor bisnis, tetapi ada beberapa litelatur yang mengulas tentang sektor publik atau pemerintah daerah. Prasetya (2004:20) mengemukakan terdapat beberapa teknis analisis laporan keuangan yaitu analisis perubahan laporan keuangan, analisis perbandingan antar perkiraan, analisis trend, analisis rasio, analisis ketataan terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis sumber dan penggunaan dana. Di sisi lain, analisis laporan keuangan di sektor pemerintahan hampir tidak pernah dilakukan. Kalaupun dilakukan perhitungan-perhitungan melalui pembandingan beberapa pos laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, itu pun dengan perhitungan sederhana dengan penggunaan yang terbatas. Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik mendefinisikan Analisis Laporan Keuangan (2010:68) “Analisis laporan keuangan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan suatu entitas tertentu.” Untuk itu, seseorang yang melakukan analisis atas laporan keuangan perlu menguraikan pos-pos laporan tersebut menjadi unit informasi yang lebih rinci dan melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya guna mengetahui kondisi keuangan entitas tersebut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor (2007:76) menggunakan 3 (tiga) teknik yang akan digunakan dalam analisis

laporan keuangan, tetapi dalam ini peneliti hanya menggunakan 2 (dua) teknik analisis yaitu :

a. Analisis perbandingan pos-pos laporan keuangan

Teknik analisis perbandingan dilakukan dengan membanding satu atau beberapa pos dengan satu atau beberapa pos lainnya dalam satu periode.

Analisis ini dalam sektor bisnis disebut juga analisis *horizontal & vertikal*.

Tujuan untuk menilai kondisi atau kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada sektor publik (pemerintahan), beberapa perbandingan pos-pos laporan keuangan, berdasarkan data yang diperoleh dari :

1) Laporan realisasi APBD

- a) Perbandingan realisasi dengan anggaran;
- b) Perbandingan realisasi tahun ini dengan tahun lalu.

2) APBD yang dikembangkan oleh Widodo dalam Halim (2007)

- a) Kemandirian keuangan daerah;
- b) Efektifitas pendapatan asli daerah;
- c) Efisiensi pendapatan asli daerah;
- d) Keserasian belanja.

3) Dari adaptasi rasio keuangan sektor bisnis.

- a) Likuiditas;
- b) Solvabilitas;
- c) *Leverage*.

b. Analisis kecenderungan pos-pos laporan keuangan

Teknik analisis kecenderungan dilakukan dengan membandingkan pos yang sama untuk periode lebih dari dua tahun, sehingga diperoleh gambaran mengenai kecenderungan dari suatu pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis ini digunakan untuk membuat prediksi keuangan.

1) Analisis kecenderungan dengan tahun dasar;

2) Analisis kecenderungan dengan hubungan antar variabel.

2. Investasi

Seiring sejak dikeluarkan baik Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Daerah/Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang melakukan investasi.

Pengertian investasi menurut peraturan perundang-undangan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa Investasi adalah “Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.”

- b. Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 bahwa Investasi Pemerintah adalah “Penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.”

Motif orang atau badan/lembaga melakukan investasi untuk mencari keuntungan atau meningkatkan nilai dari usaha pada waktu yang akan datang.

Beberapa definisi investasi menurut para pakar :

- a. Jogyianto (2000:5) mendefinisikan “Investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.”
- b. Relly dan Brown (2003:5) mendefinisikan Investasi

Sebagai komitmen sejumlah uang saat ini selama suatu periode waktu tertentu untuk mendapatkan pembayaran di masa depan yang akan dapat mengkompensasi investor atas waktu dari dana yang dikomitmenkan, tingkat inflasi yang diharapkan, dan pembayaran di masa depan yang tidak pasti.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penggunaan aset saat ini guna mendapatkan keuntungan dimasa mendatang.

Dasar keputusan investasi terdiri dari *return* yang diharapkan, tingkat risiko serta hubungan antara *return* dan risiko. *Return* merupakan tingkat keuntungan investasi sedangkan risiko diartikan sebagai kemungkinan *return aktual* yang berbeda dengan *return* yang diharapkan. Hubungan risiko dan *return* yang diharapkan diharapkan mempunyai hubungan yang searah dan linear. Selain dilihat *return* dan risiko, yang harus diperhatikan pada investasi pemerintah

analisa sosial profitabilitas (*social profitability*) yang menekankan manfaat investasi tersebut bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

a. *Return*

Beberapa pengertian *return* :

- 1) Fahmi (2010:169) *return* adalah “Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu dan intitusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya.”
- 2) R.J Shook (2002:519) “*Return* merupakan laba investasi”

*Return* adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi tertentu yang merupakan kompensasi atas biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang dikeluarkan oleh investor dan risiko penurunan daya beli akibat pengaruh merupakan tingkat *return* yang diantisipasi oleh investor dimasa datang sedangkan *return* yang terjadi atau *return* aktual merupakan tingkat *return* yang benar-benar diperoleh oleh investor.

- 3) Nugroho (2008:191) imbal hasil (*return*) adalah “Sesuatu yang diharapkan akan diperoleh atau *cash flow* yang diantisipasi dari setiap investasi yang dilakukan.”
- 4) Horne & Wachowicz (2005:145) mendefinisikan *return* sebagai pengembalian yaitu “Penghasilan yang diterima dari suatu investasi ditambah dengan perubahan harga pasar, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase dari harga pasar awal dari investasi tersebut.”

Pengertian *return* yang umumnya dipakai dalam dunia investasi, menurut R.J Shook dalam Fahmi (2002:519), yaitu :

- 1) “*Return on equity* atau imbal hasil atas *equitas* merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham;”

- 2) “*Return of capital* atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dividen. Investor mengurangi biaya investasi dengan jumlah pembayaran;”
- 3) “*Return on investment* atau imbal hasil atas investasi merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba;”
- 4) “*Return on invested capital* atau imbal hasil atas modal investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan;”
- 5) “*Return on network* atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan pemegang saham dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya.”

Selain itu terdapat beberapa pengertian *return* menurut Jogiyanto (2008:195-240):

- 1) “*Return Realisasi (Realized Return)* merupakan *return* yang terjadi;”
- 2) “*Return Ekspektasi (Expected Return)* merupakan *return* yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang;”
- 3) “*Return Total (Total Return)* merupakan *return* keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu;”
- 4) “*Return Realisasi Portofolio (Portfolio Realized Return)* merupakan rata-rata tertimbang dari *return-return* realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut;”

- 5) “*Return Ekspektasi Portofolio (Portfolio expected return)* merupakan rata-rata tertimbang dari *return-return* ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio.”

Sulistiono (2006:21) menyatakan bahwa *return* realisasi (*realized return*) diperhitungkan berdasarkan data historis dan *return* itu penting karena digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja dari perusahaan. *Return* realisasi digunakan sebagai dasar penentuan *return ekspektasi* (*expected return*). 

Tandellin (2010:3.3) menyatakan sumber *return* investasi terdiri dari dua komponen yaitu *yield* dan *capital gain (loss)*. *Yield* merupakan komponen *return* yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. *Capital gain (loss)* sebagai komponen kedua dari *return* merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga, yang bisa memberi keuntungan (kerugian) bagi investor. *Capital gain (loss)* dapat diartikan sebagai selisih perubahan harga sekuritas pada saat sekuritas bersangkutan dijual dengan harga pembelian awal sekuritas bersangkutan.

1) *Return* total investasi

Penjumlahan *yield* dan *capital gain (loss)* yang diperoleh dari suatu investasi

$$Return\ Total = Yield + Capital\ Gain\ (loss) \quad \dots \quad 2.1$$

2) *Return* yang diharapkan

$$E(R) = \sum_{i=1}^n R_i p_i \quad \dots \quad 2.2$$

dimana :

E(R) = *return* yang diharapkan dari suatu sekuritas

- R<sub>i</sub> = *return* ke i yang mungkin terjadi  
 pri = probabilitas kejadian *return* ke-i  
 n = banyaknya *return* yang mungkin terjadi.

### b. Risiko

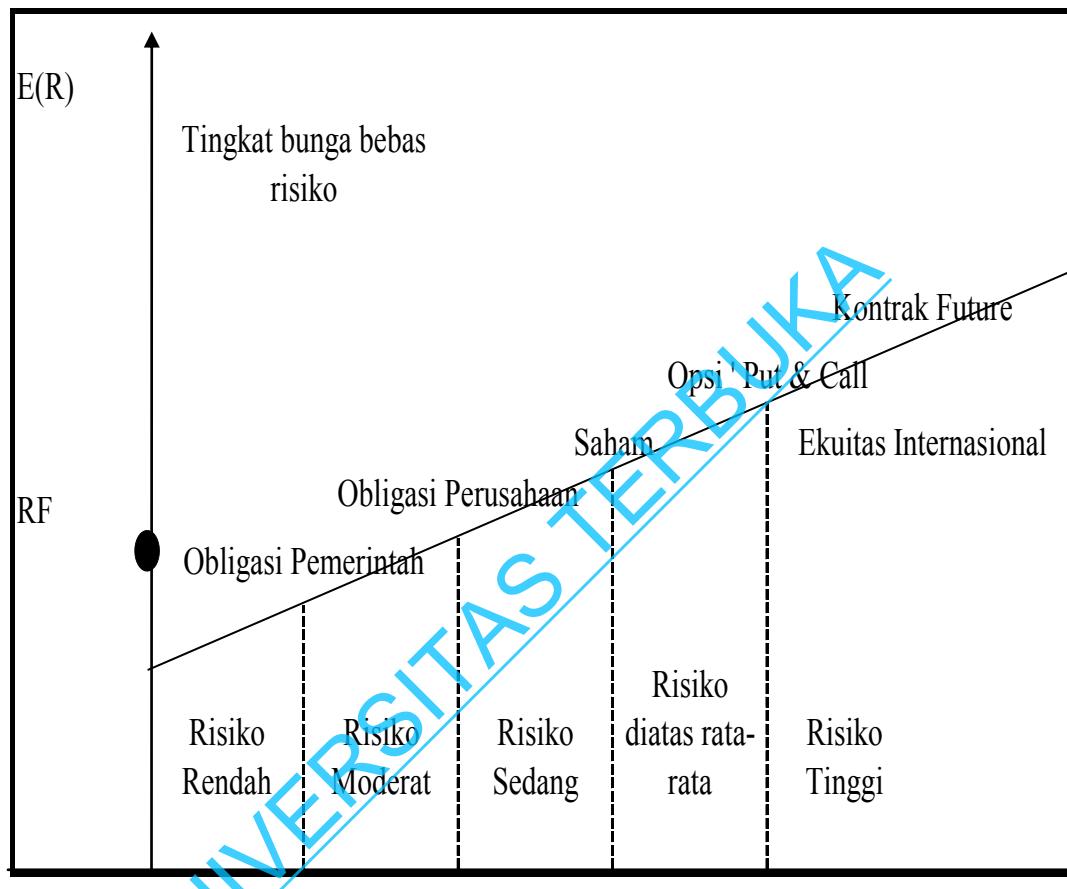
Tandelilin (2008:1.7) menyatakan bahwa risiko bisa diartikan “Sebagai kemungkinan *return* aktual yang berbeda dengan *return* yang diharapkan.” Investor yang tidak menyukai ketidakpastian atau risiko disebut sebagai *risk-averse investors*. Investor tidak akan melaksanakan suatu investasi jika investasi tersebut tidak memberikan *return* yang layak sebagai kompensasi atas risiko yang harus ditanggung. Semakin tinggi *return* yang diberikan semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung oleh investor.

Horne & Wachowicz (2005:1450 menyatakan bahwa

“Untuk Semua sekuritas, kecuali sekuritas yang bebas risiko, pengembalian yang diharapkan dapat berbeda dari pengembalian yang diterima. Untuk sekuritas yang berisiko, tingkat pengembalian aktualnya dapat dipandang sebagai variabel acak pada distribusi probabilitas (*probability distribution*).” Sedangkan Distribusi probabilitas adalah ”Sekumpulan kemungkinan nilai yang dapat diasumsikan oleh variabel acak dan probabilitas kejadiannya.” Pengembalian yang diharapkan adalah “Rata-rata tertimbang dari kemungkinan pengembalian, dimana bobotnya adalah probabilitas kejadiannya.” Deviasi Standar adalah “Ukuran statistik dari variabilitas suatu distribusi terhadap rata-ratanya.” Akar dari varian.”

Dalam prakteknya obligasi pemerintah mempunyai risiko paling rendah, dan risiko yang paling tinggi adalah *future* dan equititas internasional. Dilihat dari hubungan risiko dan *expected return* dapat dijelaskan mengenai posisi “*government protection* yaitu : Pertama, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dianggap investor sebagai investasi bebas risiko (*risk free*), kedua, obligasi pemerintah

pusat dan obligasi pemerintah daerah, ketiga obligasi pemerintah asing dan keempat time deposit dan saving yang dijamin oleh Pemerintah dalam jumlah tertentu.



Gambar 2.1  
Hubungan *Return* dan risiko yang diharapkan

Sumber : Farrel, James., L (1997)

Risiko dapat digolongkan kedalam beberapa jenis risiko. Ada beberapa pendapat tentang penggolongan risiko dalam Hanggraeni (2010:10-11).

- 1) Menurut bank Indonesia risiko dikelompokan menjadi delapan jenis meliputi :
  - a) Risiko kredit/investasi
 

Risiko yang timbul akibat dari kegagalan pemenuhan kewajiban oleh *counterparty* atau debitur;

- b) Risiko pasar  
Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar yang bervariasi, seperti akibat suku bunga, nilai tukar dan komoditas;
  - c) Risiko likuiditas  
Risiko yang muncul karena ketidakmampuan dalam menempatkan/mengelola liability (kewajiban);
  - d) Risiko kepatuhan  
Risiko yang disebabkan oleh kegagalan mematuhi dengan atau tanpa menerapkan hukum, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lainnya;
  - e) Risiko operasional  
Risiko ini relatif masih baru diatur dalam perbankan yang biasanya muncul karena ketidakmampuan dan/atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau masalah-masalah eksternal lainnya;
  - f) Risiko hukum  
Risiko ini akibat kelemahan masalah hukum, mulai dari tuntutan hukum, tidak adanya kerangka hukum, dan kelemahan perjanjian;
  - g) Risiko reputasi  
Risiko ini relatif baru yang biasanya muncul terkait dengan masalah publikasi atau persepsi-persepsi negatif.
  - h) Risiko strategi  
Risiko yang timbul akibat lemahnya pembentukan dan penerapan strategi perusahaan, lemahnya pengambilan keputusan dalam dunia bisnis atau kesenjangan reaksi dalam menghadapi perubahan.
- 2) Menurut Lam (2007) risiko digolongkan menjadi :
- a) Risiko pasar; risiko pergerakan harga yang berdampak negatif terhadap perusahaan;
  - b) Risiko kredit; risiko kegagalan pelanggan, pihak ketiga atau pemasok dalam memenuhi kewajibannya;
  - c) Risiko operasional; risiko kegagalan orang, proses dan sistem, atau risiko terjadinya suatu peristiwa eksternal (misalnya gempa bumi, dan kebakaran) yang berdampak negatif pada perusahaan;
  - d) Risiko bisnis; risiko tidak tercapainya sasaran hasil-hasil operasi;
  - e) Risiko organisasional, risiko yang timbul dari buruknya rancangan struktur organisasi atau tidak memadainya sumber daya manusia.

Tandelilin (2008:3.5-3.6) menyatakan bahwa :

Ada beberapa sumber risiko yang bisa mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut, antara lain berikut ini :

1) Risiko bisnis

Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut sebagai risiko bisnis, misalnya perusahaan pakaian jadi yang bergerak pada industri tekstil, akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik industri tekstil itu sendiri;

2) Risiko *financial*

Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan utang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan perusahaan, semakin besar risiko financial yang dihadapi perusahaan;

3) Risiko suku bunga

Perubahan suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, *ceteris paribus*. Artinya, apabila suku bunga meningkat maka harga saham akan turun. Demikian pula sebaliknya apabila suku bunga turun, harga saham naik;

4) Risiko pasar

Fluktuasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu investasi disebut sebagai risiko pasar. Fluktuasi pasar biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Perubahan pasar dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti munculnya resesi ekonomi, kerusuhan, ataupun perubahan politik;

5) Risiko inflasi

Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan. Oleh karenanya, risiko inflasi juga bisa disebutkan sebagai risiko daya beli. Jika inflasi mengalami peningkatan, investor biasanya menuntut tambahan premium inflasi untuk mengompensasi penurunan daya beli yang dialaminya;

6) Risiko likuiditas

Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, semakin likuid sekuritas tersebut, demikian sebaliknya. Semakin tidak likuid suatu sekuritas semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi perusahaan;

7) Risiko nilai tukar mata uang

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik (negara perusahaan tersebut) dengan nilai mata uang negara lainnya. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko mata uang (*currency risk*) atau risiko nilai tukar (*exchange rate risk*);

8) Risiko negara

Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik karena sangat berkaitan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Bagi perusahaan yang beroperasi di luar negeri, stabilitas politik dan ekonomi negara bersangkutan sangat penting diperhatikan untuk menghindari risiko negara yang terlalu tinggi.

Selain risiko-risiko sebagaimana tersebut di atas, terdapat risiko yang tidak kalah pentingnya yaitu risiko *fraud* (kecurangan yang sengaja). Fahmi (2010:134) mendefinisikan “*Fraud* (kecurangan) merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.” Siegel dan Shim (1999:200) mendefinisikan “*Fraud* (kecurangan) merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian. Khususnya terjadi penyajian yang keliru (*misrepresentation*) untuk merusak, atau dengan maksud menahan data bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan yang terdahulu.” Pengertian dari risiko *fraud* sendiri adalah

Risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan *fraud* atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non materi, dimana kerugian materi diukur dari segi nilai *financial* dengan mengacu pada mata uang yang dipakai (rupiah, dollar, ringgit, yen, euro, dan sebagainya) dan kerugian non material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik pada perusahaan. Fahmi (2010:135)

Disamping terdapat beberapa sumber risiko, dalam manajemen investasi modern dikenal pembagian risiko total investasi ke dalam dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis (*Systematic Risk*) atau dikenal sebagai risiko pasar, merupakan risiko yang berkaitan dengan

perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan pasar tersebut akan mempengaruhi *variabilitas return* suatu investasi. Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan seperti perubahan ekonomi suatu negara, perubahan pajak atau perubahan harga minyak dunia. Dalam hal ini semua risiko yang mempengaruhi sekuritas secara keseluruhan tidak bisa didiversifikasi. Risiko ini sering disebut *market risk*.

Van & Wachowicz (2005:155) menyatakan “Risiko sistematis merupakan *variabilitas* pengembalian saham atau portofolio yang tidak disebabkan oleh pergerakan pasar secara umum.” Risiko tidak sistematis (*Unsystematic Risk*) atau dikenal risiko spesifik (*specifik risk*) adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan *diversifikasi*.” Horne & Wachowicz (2005:145) menyatakan risiko tidak sistematis merupakan “*Variabilitas* pengembalian saham atau portofolio yang tidak disebabkan oleh pergerakan pasar secara umum. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan diversifikasi.” *Portofolio* adalah kombinasi dari dua sekuritas atau aktiva.

### c. *Diversifikasi Portofolio*

“*Diversifikasi* dapat diartikan sebagai usaha investor dengan membentuk *portofolio* sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi *return* yang diharapkan.” Tandelilin (2008:3.15). Diversifikasi dilakukan dengan mengkombinasikan sekuritas dengan cara tertentu guna mengurangi risiko.

Pesan Markowitz dalam diversifikasi portofolio adalah “jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang karena kalau keranjang tersebut jatuh maka

semua telur yang ada dalam keranjang tersebut akan pecah.” Pesan tersebut mengandung arti bahwa janganlah menginvestasikan semua dana yang kita miliki hanya pada satu aset saja karena jika aset tersebut gagal maka semua dana yang telah diinvestasikan akan hilang.

Dalam ajaran Markowitz risiko *portofolio* tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontibusi risiko aset terhadap risiko *portofolio* atau *kovarians*.

### 1) *Koefisien korelasi*

Tandelilin (2008:3.17) menyatakan bahwa “*Koefisien korelasi* adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersama relatif (*relatif comovement*) antara dua variabel.” Ukuran *koefisien korelasi* dilambangkan dengan ( $\rho_{ij}$ ) dan berjarak (berkorelasi) + 1,0 sampai – 1,0 dimana :

Jika  $\rho_{ij} = + 1,0$ ; berarti korelasi positif sempurna;

Jika  $\rho_{ij} = - 1,0$ ; berarti korelasi negatif sempurna;

Jika  $\rho_{ij} = 0,0$ ; berarti tidak ada korelasi.

- a) Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna (+1,0) tidak akan memberi manfaat pengurangan risiko;
- b) Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi nol, akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan;
- c) Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna (-1,0), akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut.

## 2) Kovarian

"Kovarian adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecendrungan untuk bergerak secara bersama-sama."

Tandelilin (2008:3.18) mengatakan bahwa :

*Kovarian* menunjukkan sejauh mana *return* dari dua sekuritas mempunyai kecendrungan bergerak bersama-sama. Kovarian positif menunjukkan kecendrungan dua sekuritas bergerak ke arah yang sama, sebaliknya kovarian negatif berarti *return* dua buah sekuritas cenderung bergerak menuju arah yang berkebalikan. Sedangkan *kovarian nol* mengindikasikan bahwa pergerakan dua buah sekuritas bersifat independen satu dengan lainnya.

$$\sigma_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^m [RA,i - E(RA)][RB,i - E(RB)]}{n-1} \quad \dots \quad 2.3$$

dimana :

$\sigma_{AB}$  = kovarian antara sekuritas A dan B

$R_{A,i}$  = return sekuritas A pada saat i

$\sum(RA) = \text{nilai yang diharapkan dari } return \text{ sekuritas A}$

m = jumlah hasil sekuritas yang mungkin terjadi pada periode tertentu

n = jumlah sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio

### 3) Estimasi *return* dan risiko portofolio

Estimasi terhadap return dan risiko portofolio mengandung pengertian yaitu menghitung *return* yang diharapkan dan risiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset. *Return* yang diharapkan dari suatu portofolio dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang dari *return* yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio.

Rumus menghitung *return* yang diharapkan dari *portofolio* adalah :

dimana :

E (Rp) = *return* yang diharapkan dari portofolio

W<sub>i</sub> = bobot portofolio sekuritas ke-i

$\sum W_i = \text{jumlah total bobot portofolio} = 1,0$

$E(R_i)$  = *return* yang diharapkan dari sekuritas ke-i

n = jumlah sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio.

Sedangkan risiko *portofolio* dilakukan dengan menggunakan ukuran kovarian baik yang terdiri dari dua buah sekuritas maupun n sekuritas. Rumus yang digunakan untuk menghitung risiko portofolio dua sekuritas yaitu melalui standar deviasi *return* kedua sekuritas tersebut yaitu :

$$\sigma_p = [W^2 A \sigma^2 A + W^2 B \sigma^2 B + 2(WA)(WB)(\rho_{AB}) \sigma_A \sigma_B]^{1/2} \quad ..... 2.5$$

dimana :

$\sigma_p$  = standar deviasi portofolio

WA = bobot portofolio pada aset A

$\rho_{AB}$  = koefisien korelasi aset A dan B

Sedangkan rumus untuk menghitung risiko portofolio yang terdiri dari n sekuritas adalah :

$$\sigma^2 p = \sum_{i=1}^n W_i^2 \sigma^2 i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_i W_j \sigma_{ij} \quad ..... 2.6$$

dimana

$\sigma^2 p$  = varian *return* portofolio

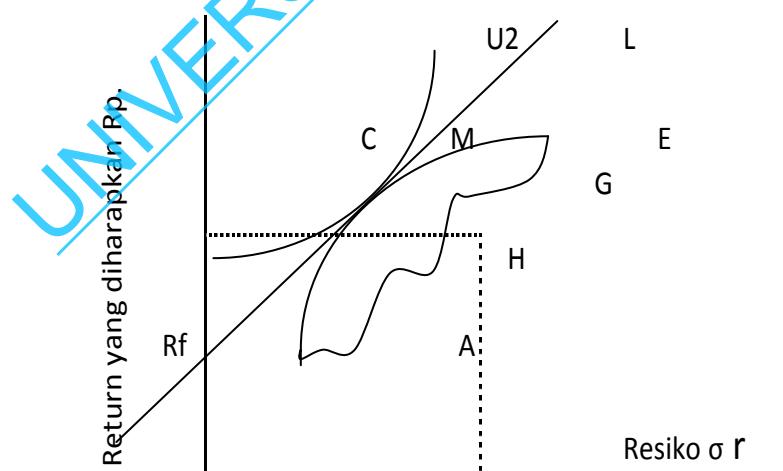
$\sigma^2_i$  = varian *return* sekuritas i

$\sigma_{ij}$  = kovarian antara *return* sekuritas i dan j

$W_i$  = bobot atau porsi dana yang diinvestasikan pada sekuritas i

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n$  = tanda penjumlahan ganda, berarti angka  $n^2$  akan ditambahkan secara bersamaan (semua nilai pasangan i dan j yang mungkin dipasangkan)

Menurut Tandelilin (2008:8.3) menyatakan “Berdasarkan model Markowitz, masing-masing investor diasumsikan, akan mendiversifikasi portofolionya dan memilih portofolio yang optimal atas dasar preferensi investor terhadap *return* dan risiko pada titik-titik portofolio yang terletak di sepanjang garis portofolio efisien.” Pada kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih *portofolio* pasar, yaitu *portofolio* yang terdiri dari semua aset-aset berisiko yang optimal. Portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva *efficient frontier* seperti tercantum pada gambar 2.2



Gambar 2.2  
Portofolio yang Efisien dan Portofolio yang Optimal

Sumber : Eduardus Tandelilin (2008:1.11)

Terdapat beberapa sikap investor dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam hubungan *return* dan risiko, karakteristik tersebut menurut Fahmi (2010:184) adalah sebagai berikut :

- 1) Takut pada risiko atau *risk avoider*;
- 2) Hati-hati pada risiko atau *risk indifference*;
- 3) Suka pada risiko atau Risk seeker atau *risk lover*.

d. Bentuk investasi

Praktek investasi yang berkembang, aktivitas investasi terkait dengan penanaman berbagai macam alternatif aktiva baik sebagai real aktiva atau pun berbentuk aktiva keuangan. Investasi dalam bentuk real aktiva dapat berupa pembelian tanah, emas, pembangunan kantor, irigasi, jembatan, rumah sakit, sekolah serta proyek lainnya. Sedangkan Investasi dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang (*money market*), pasar modal (*capital market*), atau di pasar turunan (*derivative market*) ataupun aktiva yang diperoleh dari bank komersial seperti tabungan dan deposito. Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi (yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan lagi ke dalam portofolionya).

Bentuk dari investasi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 terdiri dari investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi surat berharga meliputi pembelian saham dan surat hutang sedangkan investasi

langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Investasi Langsung berupa pemberian pinjaman dilaksanakan melalui kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*). Kerjasama antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan selain pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Non Public Private Partnership*).

Menurut Horne & Machowicz (2005:115) “Saham preferen adalah jenis saham yang (biasanya) menjanjikan dividen tetap, akan tetapi jumlahnya bergantung pada dewan direksi. Saham tersebut memiliki preferensi atas saham biasa dalam hal pembayaran dividen dan klaim atas berbagai aktiva perusahaan.” Saham biasa adalah “Surat berharga yang mencerminkan posisi kepemilikan (dan risiko) dalam sebuah perusahaan.” Horne & Machowicz (2005:116)

Nilai selembar saham biasa dapat dilihat sebagai nilai diskonto dari semua perkiraan dividen kas yang diberikan oleh perusahaan penerbitnya, hingga berakhirnya zaman. Model ini dikembangkan oleh John B. Williams dalam *The Theory of Investment Value*, digambarkan dalam bentuk puisi “*A cow her milk/A hen for eggs/And a stock, by heck/For her devidends.*”

Tandelilin (2008:5.3) menyatakan bahwa :

Ada dua karakteristik utama yang tekait dengan hak kepemilikan yang diberikan oleh saham, yaitu :

- 1) Hak pengawasan terhadap perusahaan (*control of the firm*);

Semakin besar persentase kepemilikan saham seorang investor berarti semakin besar pula hak kontrol investor terhadap perusahaan. Hak kontrol biasanya diterjemahkan sebagai hak suara (*voting right*). Hak suara berguna dalam pengambilan keputusan pada saat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham

- (RUPS) seperti pemilihan jajaran manajemen (direksi) perusahaan ataupun dalam penentuan pembagian laba bersih (*dividen*);
- 2) Hak untuk didahulukan dalam penerbitan saham baru (*preemptive right*).

Dengan adanya hak ini maka jika emiten suatu saat menerbitkan kembali saham baru maka yang diberikan hak untuk didahulukan dalam membeli saham baru tersebut adalah pemegang saham lama yang sudah memiliki saham perusahaan bersangkutan. Keistimewaan ini ditujukan untuk melindungi hak kepemilikan pemegang saham lama agar tidak terkurangi oleh masuknya investor baru yang akan ikut menjadi pemilik perusahaan.

Di Indonesia sendiri kelebihan kas negara bisa ditempatkan di bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku umum atau digunakan untuk membeli kembali Surat Utang Negara. Berbeda dengan sektor publik, di sektor privat biasanya kelebihan kas diinvestasikan. Salah satu alternatif yang sering dipilih adalah investasi jangka pendek (kurang dari setahun). Selain kemudahannya untuk kembali dikonversikan ke kas, beberapa jenis investasi ini juga memberikan *return* yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Investasi dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang termasuk dalam komponen aset non lancar.

### 1) Investasi Jangka Pendek

Pasal 70 dan 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan. Investasi

jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Dari pengertian tersebut dapat disebutkan karakteristik investasi jangka pendek pemerintah adalah :

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas :

- 1) Deposito Jangka Pendek;

Deposito adalah simpanan berjangka waktu tertentu yang hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo. Dalam sistem akuntansi pemerintah dibedakan antara deposito jangka waktu kurang dari 3 bulan dan deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 12 bulan. Deposito berjangka waktu kurang dari 3 bulan diklasifikasikan dalam akun kas dan setara kas, sedangkan deposito berjangka Waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diklasifikasikan dalam investasi jangka pendek.

- 2) Obligasi Jangka Pendek;

Investasi yang dilakukan pemerintah dengan membeli obligasi/SUN yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah, Negara/lembaga Internasional lainnya. Obligasi/SUN merupakan investasi negara kepada pihak ketiga yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

### 3) Investasi Jangka pendek lainnya

Investasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk selain dari deposito dan obligasi yang berjangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Di Indonesia sendiri kelebihan kas negara bisa ditempatkan di bank sentral/bank umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku umum atau digunakan untuk membeli kembali Surat Utang Negara. Berbeda dengan sektor publik, di sektor privat biasanya kelebihan kas diinvestasikan. Salah satu alternatif yang sering dipilih adalah investasi jangka pendek (kurang dari setahun). Selain kemudahannya untuk kembali dikonversikan ke kas, beberapa jenis investasi ini juga memberikan *return* yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku umum. Selain kemudahannya untuk kembali dikonversikan ke kas, beberapa jenis investasi ini juga memberikan *return* yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku umum. Namun demikian terdapat perbedaan pada pemerintah daerah dimana Investasi jangka pendek yang dapat dilakukan mencakup deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan duabelas bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara (SPN).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, menyatakan Surat Utang Negara adalah “Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.” Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat

atau tanpa warkat yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Surat utang negara terdiri dari :

- a) Surat Perbendaharaan Negara;

SPN memiliki jangka waktu sampai dengan dua belas bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

- b) Obligasi Negara;

Berjangka waktu lebih dari 12 dua belas bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, Pasal 3 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia. SBI memiliki karakteristik nilai satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berjangka waktu sekurang-kurangnya satu bulan dan paling lama dua belas bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu, Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto, diterbitkan tanpa warkat (*scripless*), dan dapat dipindah tanggalkan (*negotiable*).

Dengan mempertimbangkan *return* yang ditawarkan, investasi jangka pendek layak dijadikan sebagai salah satu alternatif pemanfaatan kelebihan kas daerah. Investasi jangka pendek membutuhkan analisis yang tepat dan teliti agar

menghasilkan *return* yang maksimal dan terhindar dari risiko-risiko investasi.

Untuk itulah diperlukan unit khusus untuk menganalisis jenis investasi.

## 2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 duabelas bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. Investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi jangka panjang menurut penanamannya terbagi atas investasi non permanen dan investasi permanen.

### a) Investasi Non Permanen;

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Adapun bentuk dari investasi non permanen adalah :

#### (1) Pinjaman kepada perusahaan negara;

Pinjaman kepada perusahaan negara merupakan investasi yang timbul dari pemberian pinjaman kepada perusahaan negara yang dimaksudkan untuk ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo.

- (2) Pinjaman kepada perusahaan daerah;

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah merupakan investasi yang timbul dari pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah yang dimaksudkan untuk ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo.

- (3) Pinjaman kepada pemerintah daerah;

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah merupakan investasi yang timbul dari pemberian pinjaman kepada Pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk ditagih kembali pada tanggal jatuh tempo.

- (4) Dana bergulir;

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan kepada sekelompok masyarakat, perusahaan negara/daerah, untuk ditarik kembali setelah berjangka waktu tertentu, dan kemudian disalurkan kembali.

- (5) Investasi dalam penyertaan modal dalam proyek pembangunan.

Merupakan akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu.

- b) Investasi permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang mempunyai masa investasi lebih dari dua belas bulan. Investasi Permanen meliputi :

### (1) Penyertaan modal pemerintah

Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian perseroan terbatas dan / atau pengambilalihan perseroan terbatas. Penyertaan modal/investasi merupakan salah satu komponen pengeluaran pemberian yang digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam perusahaan baik itu bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005:19) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dapat membentuk perusahaan yang pengelolaan asetnya dilakukan secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetor modal tertentu dan dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah, baik didalam dan diluar negeri. Perusahaan disebut sebagai perusahaan negara/daerah jika pemerintah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud.

Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Apabila kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 20%, maka penyertaan modal pemerintah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah serta BUMN/BUMD merupakan strategi lain yang lazim dilakukan untuk memanfaatkan kelebihan kas. Penerimaan dari keuntungan perusahaan negara dan atau perusahaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara dan daerah melalui laba yang diperoleh.

Pendirian BUMN merupakan implementasi dari konstitusi negara, yaitu pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:4.5) menyatakan bahwa “terdapat dua fungsi yang harus dilaksanakan oleh perusahaan negara, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.”

Dilihat dari sumber modalnya perusahaan daerah terdiri dari dua jenis, yaitu perusahaan daerah yang seluruh modalnya bersumber dari pemerintah, dan perusahaan daerah patungan yakni perusahaan daerah yang sebagian modalnya bersumber dari pemerintah dan sebagian lagi bersumber dari berbagai pihak di luar pemerintah. Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:4.5). Namun pada kenyataannya modal perusahaan daerah selain dari pemerintah dapat bersumber dari pihak lain (swasta) dengan bentuk kerjasama dengan pihak swasta (*joint venture*).

Dewasa ini perusahaan daerah dituntut untuk dapat bersaing di pasar dan mampu meningkatkan kinerja keuangannya, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi terhadap keuangan daerah. Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:4.13-

4.14) menyatakan bahwa bidang usaha perusahaan daerah di Indonesia meliputi berbagai sektor dan dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

- (a) Perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan perbankan, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemda;
- (b) Perusahaan daerah yang bergerak di bidang penyediaan air bersih (PDAM);
- (c) Perusahaan daerah lainnya yang bergerak diluar kedua bidang tersebut.

Sedangkan dilihat dari sasarannya maka perusahaan daerah dapat dibedakan antara perusahaan daerah yang bersifat memberikan jasa pelayanan umum dan perusahaan daerah yang mengejar keuntungan.

Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:4.14) "Apapun jenis usaha yang dipilih untuk dikelola perusahaan negara/daerah, hal yang terpenting adalah usaha itu harus sesuai untuk dikelola oleh suatu unit bisnis dalam rangka memperoleh keuntungan." Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah dalam memilih jenis usaha yang sesuai untuk dikelolah oleh perusahaan

#### (2) Investasi Permanen Lainnya.

Investasi Permanen yang tidak dapat dikategorikan ke dalam katagori penyertaan modal pemerintah, diklasifikasikan sebagai investasi permanen lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan ditambah biaya lainnya yang dikeluarkan untuk investasi permanen lainnya.

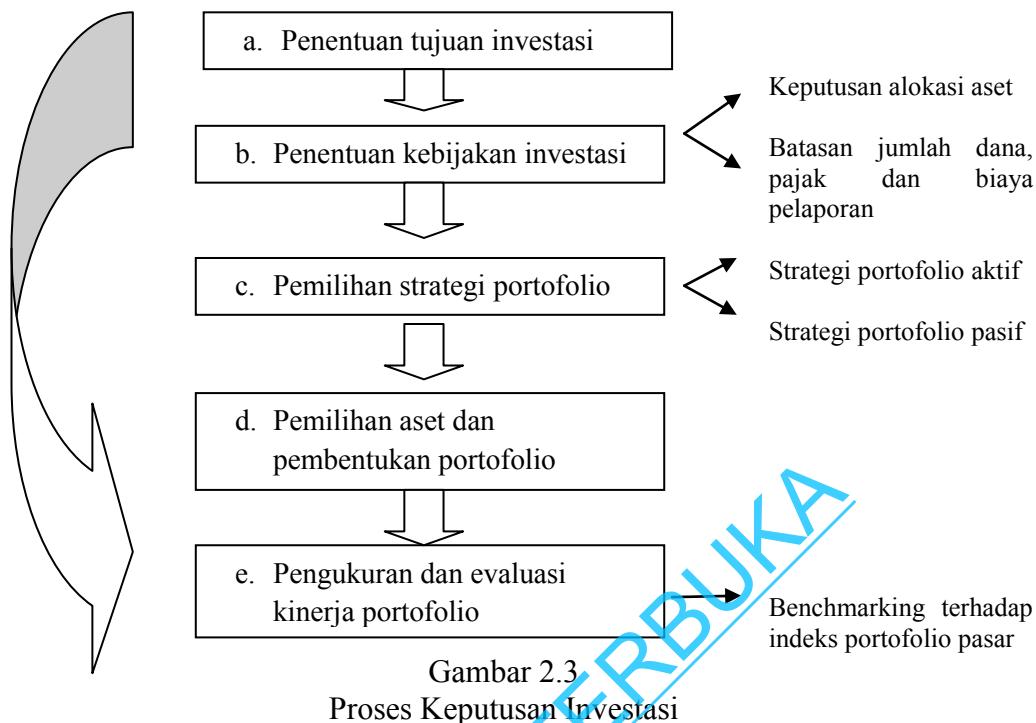
Pada tataran pemerintah yang sangat perlu diperhatikan dalam investasi adalah manfaat ekonomi, manfaat sosial serta manfaat lainnya dari investasi tersebut. Tujuan investasi itu sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Manfaat ekonomi berhubungan dengan peningkatan perekonomian suatu daerah atau negara sedangkan manfaat sosial berhubungan kesejahteraan masyarakat disekitar. Sulit untuk mengukur dari manfaat sosial dari investasi, seperti penyediaan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, perbaikan tingkat pendidikan atau kesehatan serta perbaikan sistem atau struktur.

e. Proses Keputusan Investasi

Tandelilin (2008:1.9) menyatakan bahwa proses keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapainya keputusan investasi yang terbaik. Tahap-tahap keputusan investasi meliputi lima tahap keputusan, yaitu meliputi :

- 1) Penentuan tujuan;
- 2) Penentuan kebijakan investasi;
- 3) Pemilihan strategi portofolio;
- 4) Pemilihan aset dan pembentukan portofolio; dan
- 5) Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio.

Sebagaimana tercantum pada gambar 2.3 di bawah ini



Sumber : Eduardus Tandililin (2008:1.11)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008, menyatakan lingkup pengelolaan investasi meliputi :

- 1) Perencanaan;
- 2) Pelaksanaan investasi;
- 3) Penatausahaan dan pertanggungjawab investasi;
- 4) Pengawasan; dan
- 5) Divestasi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/ swasta harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### f. Analisis sekuritas

Nilai intrinsik saham ditentukan dengan menghitung nilai saat ini dari semua aliran kas yang diterima dari suatu investasi saham. Aliran kas suatu saham diukur dari besarnya dividen dan *earning* yang diharapkan dari perusahaan emiten saham dimasa mendatang, dimana prospek keuntungan perusahaan sangat tergantung dari keadaan ekonomi secara keseluruhan, kinerja industri serta perkembangan mikro perusahaan tersebut.

Analisis fundamental merupakan teknik analisis terhadap prospek perusahaan dimasa depan dengan melakukan analisis perubahan ekonomi, industri, maupun perusahaan. Analisis ini disebut sebagai analisis dengan pendekatan dari atas ke bawah. (*top-down approach*). Sedangkan analisis teknikal dipakai untuk memprediksi pergerakan harga saham dimasa mendatang dengan mengamati pola pergerakan harga di masa lalu (historis).

Pada tahap analisis ekonomi dan pasar modal, investor melakukan analisis terhadap berbagai alternatif keputusan tentang dimana alokasi investasi akan dilakukan serta dalam bentuk apa investasi tersebut dilakukan (saham, obligasi, kas, properti dan lainnya). Selanjutnya berdasarkan hasil analisis ekonomi dan pasar dilakukan analisis industri guna menentukan jenis-jenis industri mana saja yang akan dipilih (industri yang berprospek baik dan menguntungkan). Sedangkan pada tahap ketiga yaitu analisis perusahaan yang bertujuan untuk menentukan perusahaan-perusahaan atau saham mana saja yang menguntungkan sehingga layak dijadikan pilihan investasi.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) meliputi “Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.” Adapun komponen dari pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### a. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atas badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pada dasarnya pajak di Indonesia di bedakan atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) guna membiayai rumah tangga pemerintahan pusat dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran pajak pusat ditetapkan melalui undang-undang dan PP/Perpu. Adapun Jenis-Jenis Pajak Pusat :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- 6) Bea Materai.

Sebagai negara hukum, Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak di Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang, tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Dasar pemungutan pajak ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang."

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan daerah.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli dalam Santoso (2007 : 11) diantaranya adalah :

- 1) Menurut Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2) Menurut Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

3) Sedangkan menurut Ray, Herschel & Horace yang diterjemahkan oleh Moh.

Zain kemudian dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:22) :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (1987) :

Merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
- 5) Selain fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada tanggal 15 September 2009 terjadi perubahan terhadap jenis pajak daerah antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral bukan logam dan batuan;

- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan.

Davey (1988 :10.10) mengatakan :

Dalam beberapa hal pemerintah regional dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan memungut, menaksir atau mengumpulkan pajak pendapatan, bersifat pararel akan tetapi berbeda dengan pajak pendapatan nasional. Secara keseluruhan pembagian administrasi pajak dan perhitungan yang dipakai atas kekayaan di daerah tidak sama dengan pengenaan, pembebasan atau keringanan yang diberikan kepada perorangan untuk tingkat nasional.

Sedangkan menurut Halim (2007:1997)

Pemerintah daerah menghadapi dilema, di satu sisi mereka harus meningkatkan terus jumlah PAD-nya untuk mengimbangi semakin meningkatnya kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, di sisi lain potensi di daerah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah relatif kecil. Kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengoptimalkan PAD secara efektif dan efisien melalui manajemen kas serta mencari sumber-sumber pendapatan lain selain dari pajak daerah.

#### b. Retribusi daerah

Pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan :

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

Pajak yang harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum tanpa mempertimbangkan apakah secara pribadi mereka mendapat

manfaat langsung dari pembayaran pajak tersebut. Namun tidak demikian halnya dengan retribusi. Retribusi daerah, termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk mendiami wilayah yurisdiksinya. Perbedaan yang tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pada pajak daerah kontraprestasi tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah kontribusi diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.

Menurut Soemitro (1987:15) Retribusi adalah “ Pembayaran negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa.” Diperjelaskan oleh Manullang (1993:80) Retribusi daerah adalah “Pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung.”

Redjo (1998:89) berpendapat bahwa retribusi ialah “Suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut, misalnya : uang langganan air minum, uang langganan listrik.” Koswara (2001:191) menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah “Imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa pelayanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.”

Berdasarkan pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Obyek retribusi terdiri atas jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu dan golongan retribusi yang dikenakan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha serta retribusi perizinan tertentu.

Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Terdapat 14 jenis retribusi jasa umum yang dapat tidak dipungut apabila potensi penerimanya kecil dan atau kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Obyek retribusi jasa adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Terdapat 11 jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Obyek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat 5 jenis retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi izin mendirikan bangunan,

retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN serta pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat merupakan bentuk investasi berupa usaha patungan pemerintah daerah dalam upaya memperbanyak sumber pendapatan asli daerah. Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:4.1) menyatakan “Di Indonesia penerimaan dari perusahaan negara/daerah merupakan salah satu sumber pendapatan negara/daerah yakni melalui laba yang diperolehnya. Namun demikian permasalahan yang terjadi terkait dengan perusahaan daerah/BUMD.”

Menurut Suradinata (1998:86) Perusahaan Daerah adalah “Suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya untuk menambah penerimaan daerah.” Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD)

telah berjalan sejak lama. BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998n). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Jenis usaha yang dapat dikelola oleh Pemerintah daerah melalui BUMD beraneka ragam tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah. Semakin banyak potensi dan peluang usaha yang dapat dikembangkan, maka semakin besar pula kesempatan untuk meningkatkan kontibusi laba usaha. Berdasarkan kategori sasarannya BUMD dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam pendapatan asli daerah. BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain.

Jenis usaha yang dipilih untuk dikelola perusahaan daerah yang terpenting adalah usaha itu harus sesuai dengan unit bisnis yang mengelola dalam rangka memperoleh keuntungan. Pertimbangan yang harus diperhatikan pemerintah daerah dalam memilih jenis usaha menurut Greytak dalam Ikhsan, Santosa & Harmanti (2007:4.14) adalah :

- 1) Harus ada pemisahan antara kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan negara/daerah dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah;
- 2) Barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan negara/daerah haruslah barang dan jasa oleh perusahaan negara/daerah haruslah barang dan jasa yang dapat dijual, karena dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi terbatas jumlahnya;
- 3) Adanya kemungkinan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut.

Adapun ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha;
- 2) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan;
- 3) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan;
- 4) Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang;
- 5) Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan;
- 6) Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat;
- 7) Sebagai sumber pemasukan negara;
- 8) Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara;
- 9) Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go publik;
- 10) Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank;
- 11) Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan.

Tujuan Pendirian BUMD:

- 1) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara;

- 2) Mengejar dan mencari keuntungan;
- 3) Memenuhi hajat hidup orang banyak;
- 4) Merintis kegiatan-kegiatan usaha;
- 5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja BUMN dalam melaksanakan strategi yang didasarkan pada visi dan misinya, dilakukan dengan mengaudit kinerja.

Audit kinerja merupakan suatu audit yang obyektif dan sistematis terhadap bukti-bukti untuk dapat melaksanakan penilaian secara independen atas kinerja suatu organisasi/perusahaan. Audit kinerja bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengaudit dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan ekonomis, memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab (Deputi Bidang Akuntan Negara, 2001: 2).

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah selain penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

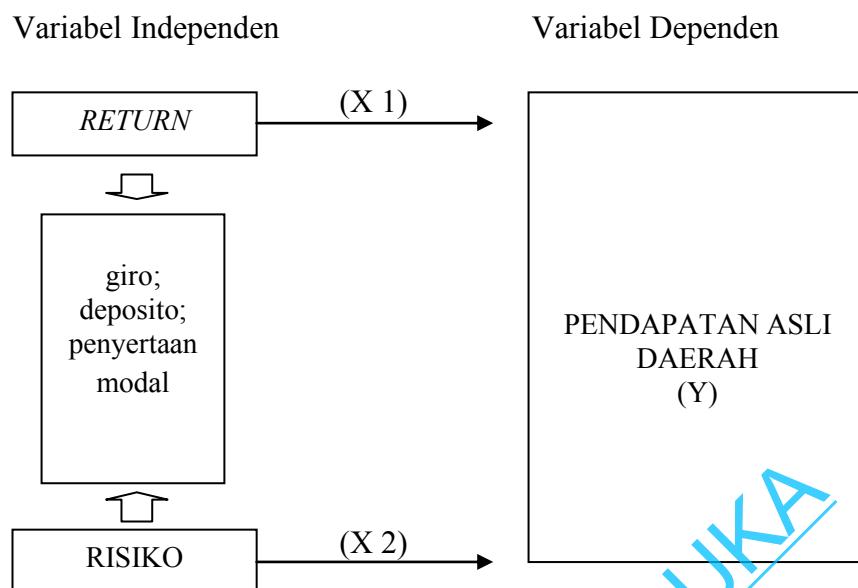
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

## B. Kerangka Berpikir

### 1. Kerangka Konseptual Penelitian

*Return* setiap investasi tentunya akan berbeda, hal ini tergantung dengan terhadap risiko *financial*, risiko suku bunga, risiko kemampuan membeli serta pertimbangan pajak. Semakin besar *return* yang diterima, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung investor. Dengan mengetahui tingkat *return* dan risiko investasi seperti giro, deposito dan penyertaan modal dapat dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah sehingga disusun kerangka konsepsual sebagai berikut :



Gambar 2.4  
Kerangka Konsepsual

## 2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya atas penelitian guna mempermudah dalam melakukan analisis. Guna menganalisis kerangka teori tersebut di atas maka disusunlah hipotesis sebagai berikut.

- Ha 1 : *Return* (X1) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- Ha 2 : Risiko (X2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Ha 3 : *Return* dan Risiko (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### C. Definisi Operasional

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Variabel	Skala Pengukuran
Variabel Independen	Return	Kompensasi atas biaya kesempatan dari risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi <i>Return</i> dimaksud adalah return atas giro, deposito dan penyertaan modal.	<i>Expected Return</i>
	Risiko	Kemungkinan <i>return</i> aktual yang berbeda dengan <i>return</i> yang diharapkan. Risiko dimaksud adalah risiko atas giro, deposito dan penyertaan modal.	Standar Deviasi
Variabel dependen	Pendapatan Asli Daerah	Semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dipadu penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder guna menjelaskan hipotesis pengaruh variabel independen *return* dan risiko Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap variable dependen pendapatan asli daerah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan lokus penelitian pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemilihan lokasi didasarkan fungsi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Dinas DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

#### C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (1998:115) "Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian." Populasi dalam setiap penelitian

harus disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang dicakup.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi terbatas berupa pendapatan giro, pendapatan deposito, dan pendapatan penyertaan modal (dividen), dengan sampel berupa laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 8 (delapan) tahun dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Persemesteran dari tahun 2003 sampai dengan 2010.

#### D. Instrumen Penelitian

Ketepatan hasil pengujian dalam penelitian sangat tergantung dari instrumen penelitiannya, sedangkan analisis statistika yang digunakan tergantung dari skala pengukuran data yang digunakan. Mansoer (2005:2.19) menyatakan “Data sekunder adalah data yang dikumpul serta dicatat oleh seseorang yang tidak berdasarkan pada tujuan keperluan peneliti.” Data sekunder berfungsi dalam pengumpulan informasi guna pengambilan keputusan. Data merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, keakuratan hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang digunakan.

Data yang digunakan peneliti bersumber dari data sekunder internal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa berupa Laporan Keuangan dan Investasi Aset Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta bersumber dari eksternal seperti buku dan majalah, publikasi dari pemerintah dan swasta. Guna menunjang data sekunder tersebut, peneliti juga

menggunakan wawancara langsung dengan menggunakan pertanyaan semi struktur. Menurut Esterberg (2002) “Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”

#### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan teknik studi kepustakaan dan survei instansi
2. Survei primer, yaitu dengan teknik observasi lapangan berupa wawancara langsung;

Survei ditujukan untuk mengeksplorasi dan mengukur bagaimana keputusan investasi diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mengukur pengaruh *return* dan risiko investasi terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah menggunakan data sekunder.

#### **F. Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen berupa *return* dan risiko atas investasi aset keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator penelitian berupa jasa giro, bunga deposito dan dividen penyertaan modal, sedangkan variabel independen berupa pendapatan asli daerah.

## G. Metode Analisis Data

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Perbedaan analisis laporan keuangan bisnis dan sektor publik terletak pada objeknya.

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  - a. Analisis *vertikal* (Analisis Proporsi)

Menurut Lesmana & Surjanto (2003:22) “Analisa proporsi item-item laporan keuangan terhadap sesuatu nilai dalam laporan keuangan, yang umum dipergunakan adalah penjualan bersih untuk laporan laba rugi dan total aktiva untuk neraca.” Dalam manajemen keuangan pemerintahan analisis ini disebut juga dengan analisis proporsi. Analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih komprehensif, yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar.

$$\text{Proporsi Nilai Tiap Element Asset} = \frac{\text{Nilai Tiap Element Asset}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \dots\dots\dots 3.1$$

- b. Analisis *horizontal*.

Analisis horizontal adalah membuat perbandingan antar tahun, untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam Manajemen Keuangan Daerah analisa *horizontal* terbagi atas :

### 1) Analisis pertumbuhan

Analisis pertumbuhan yaitu perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca adalah untuk mengetahui persentase perubahan posisi aset pemerintah daerah selama dua perioda berurutan.

Pertumbuhan Aset =

## 2) Analisis Varian (Perbandingan realisasi dan anggaran)

Perbandingan ini untuk mengukur realisasi pos-pos APBD yang meliputi realisasi pendapatan, belanja, surplus (defisit) dan pembiayaan. Perbandingan ini pada dasarnya untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target pendapatan dan mengevaluasi ketaatan dalam pelaksanaan belanja dan pembiayaan.

Realisasi APBD – Anggaran x 100% ..... 3.3  
Anggaran

### c. Analisis Ratio

Analisis rasio keuangan, menghubungkan unsur-unsur neraca dan laporan realisasi anggaran satu dengan yang lainnya, dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini.

Menurut Warsidi dan Bambang yang dikutip Sukrisno (2005) bahwa :

Analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.

Analisis rasio dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok dasar :

### 1) Ratio likuiditas.

Halim (2007: 159) menyatakan bahawa :

"Ratio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya bila jatuh tempo. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin mampu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang segera harus dibayar. Namun, bila terlampaui tinggi akan berpengaruh jelek terhadap kemampuan labaan perusahaan, karena ada sebagian dana yang tidak produktif yang diinvestasikan dalam *current assets*, akhirnya profitabilitas perusahaan tidak optimal."

Rasio ini meliputi rasio-rasio sebagai berikut :

a) Rasio lancar (*current ratio*).

Menurut Sawir (2000:8) bahwa :

*“Current ratio merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang.”*

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \quad ..... 3.4$$

dimana :

*Current Asset* : Aktiva Lancar

#### *Current Liabilities* : Kewajiban Lancar

b) Rasio cepat (*quick ratio atau acid test ratio*).

Prasetya (2004 : 49) berpendapat bahwa “*quick ratio* atau *acid test ratio* menunjukkan hubungan antara *quick assets* atau aset yang sangat likuid dengan hutang lancar. *Quick asset* adalah aset yang langsung dapat diubah menjadi kas dalam periode waktu yang sangat pendek, terdiri atas kas di kas daerah, kas di pemegang kas dan piutang.

dimana :

*Quick Assets* : Kas di kas daerah + kas di pemegang kas + piutang

- c) Rasio kas (*cash ratio*).

Sawir (2000 : 10) menyatakan bahwa rasio kas untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan kas atau setara dengan kas.

dimana

*Cash ratio* : Rasio kas

*Cash* : Kas

Marketable Securities : Sekuritas lancar

- ### 2) Ratio leverage.

Menurut Sawir (2000 : 13) “Rasio *leverage* mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya seadanya perusahaan tersebut pada saat likuidasi.” Sedangkan Tim Penyusun Modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:98) mengatakan bahwa “Perhitungan *leverage* digunakan untuk mengukur perbandingan antara ekuitas dana (kekayaan bersih pemerintah daerah) dengan total utang.”

Sawir (2000:13) Rasio-rasio leverage yang umum digunakan adalah :

- a) Rasio utang atau *debt ratio* (*debt to total asset ratio*).

dimana :

*Debt ratio* : Rasio Utang

*Total Debt* : Total Utang

*Total Asset* : Total Aktiva

Rasio ini memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya, cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham.

- b) Rasio utang terhadap ekuitas atau DER (*debt to equity ratio*).

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad ..... 3.9$$

dimana :

*Total Equity* : Total Aktiva

Rasio ini menggambarkan perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

c) Rasio utang terhadap modal aset.

PPA-LPA FE UNDI menyatakan bahwa rasio utang terhadap total aset modal digunakan untuk mengetahui berapa bagian dari aset modal yang dapat digunakan untuk menjamin utang

### 3) Rasio solvabilitas.

Tim Penyusun Modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:98) menyatakan bahwa “Perhitungan solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio utang terhadap aktiva atau rasio utang terhadap ekuitas dana.”

#### 4) Ratio *earning performance.*

Menurut Prasetya (2000: 52) "Rasio ini mengindikasikan tingkat pendapatan per aset yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah, dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki guna memperoleh pendapatan."

### 5) Kemandirian.

Tim Penyusun Modul Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:98) berpendapat bahwa :

Perbandingan ini digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan aktivitasnya. Rasio ini dapat diukur dengan membandingkan jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap jumlah DAU (Dana Alokasi Umum) ditambah jumlah pinjaman [selain utang PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) dan utang pajak PPn/PPh (Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan)]. Di samping itu, tingkat kemandirian dapat juga dibaca sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, indikator perkembangan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

#### 6) Derajat kontribusi BUMD

Menurut Mahmudi (2010: 145) "Rasio derajat kontribusi BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah."

## 2. Analisis finansial perusahaan/BUMD

Analisis finansial perusahaan dilakukan untuk menilai apakah saham suatu perusahaan emiten layak dijadikan alternatif investasi. Analisis ini memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik, kualitas perusahaan, kinerja manajemen serta prospek perusahaan di masa mendatang.

Alat analisis yang digunakan berupa :

a. Rasio penilaian pasar.

Sawir (2000:20) menyatakan bahwa “Rasio penilaian (*valuation ratio*) adalah ukuran yang paling komprehensif untuk menilai hasil kerja perusahaan, karena ratio ini mencerminkan kombinasi pengaruh rasio-risiko dan rasio hasil pengembalian. Rasio penilaian yang umum digunakan adalah :

- 1) Rasio harga terhadap laba atau PER (*price earning ratio*).

Sawir (2000:21) berpendapat bahwa investor dalam pasar modal yang sudah maju menggunakan PER untuk mengukur apakah suatu saham *underpriced* atau *overpriced*.

- 2) Analisis laba per lembar saham (*earning per share*).

Tandelilin (2008:6.47) mengatakan bahwa “Informasi EPS (*Earning Per Share*) suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan.”

$$\text{EPS} = \text{ROE} \times \frac{\text{Nilai Buku}}{\text{per lembar saham}} \quad 3.16$$

b. Analisis *return* dan risiko

Estimasi terhadap *return* dan risiko suatu investasi diperlukan karena sulit untuk mengetahui secara pasti berapa *return* yang akan diperoleh dari suatu investasi dimasa mendatang.

a. *Return.*

Merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Tandellin (2010:3.3) menyatakan bahwa :

“Sumber *return* investasi terdiri dari dua komponen yaitu *yield* dan *capital gain (loss)*. *Yield* merupakan komponen *return* yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi.” ... “*Capital gain (loss)* sebagai komponen kedua dari *return* merupakan kenaikan (penurunan) harga

suatu surat berharga, yang bisa memberi keuntungan (kerugian) bagi investor. *Capital gain (loss)* dapat diartikan sebagai selisih perubahan harga sekuritas pada saat sekuritas bersangkutan dijual dengan harga pembelian awal sekuritas bersangkutan.”

1) *Return* total investasi.

Penjumlahan *yield* dan *capital gain (loss)* yang diperoleh dari suatu investasi

$$Return\ Total = Yield + Capital\ Gain\ (loss) \quad \dots \quad 3.17$$

2) *Return* yang diharapkan.

dimana :

**E(R)** = *return* yang diharapkan dari suatu sekuritas

Ri = *return* ke i yang mungkin terjadi

pri = probabilitas kejadian ~~return~~ ke-i

n = banyaknya *return* yang mungkin terjadi.

#### b. Risiko.

Menurut Tandelilin (2008:3.4) "Risiko bisa diartikan kemungkinan perbedaan antara *return* aktual yang diterima dengan *return* yang diharapkan."

Tandelilin (2008:3.10) mengatakan bahwa “Untuk menghitung besarnya risiko total yang dikaitkan dengan *return* yang diharapkan dari suatu investasi, dapat dilakukan dengan menghitung besarnya ukuran *varian* dan *standar deviasi return* investasi bersangkutan.” Rumus *varian* dan *standar deviasi* sebagai berikut :

di mana :

$\sigma^2$  = *varian return*

$\sigma$  = standar deviasi

$E(R)$  = *return* yang diharapkan dari suatu sekuritas

Ri = return ke - i yang mungkin terjadi

Pri = probabilitas kejadian *return* ke-*i*

Tandelilin (2008:3.10) berpendapat bahwa “Varian maupun standar deviasi merupakan ukuran besarnya penyebaran distribusi probabilitas, yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara nilai rata-rata; semakin besar penyebarannya, semakin besar *varian* atau standar deviasi investasi tersebut.”

Selain itu dalam pengukuran sekuritas, perlu dihitung risiko relatif sekuritas tersebut. Tandelilin (2008:3.11) menyatakan bahwa “Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit *return* yang diharapkan.” Dan Ukuran yang dipakai dalam menghitung risiko relatif adalah *koefisien varian*.

### c. Risiko portofolio.

Menurut Tandelilin (2008:3.12) “Portofolio diartikan kumpulan aset-aset yang dimasukkan dalam suatu investasi. Manfaat yang diharapkan dari investasi dalam bentuk portofolio aset adalah agar investor bisa mengurangi risiko tanpa mengurangi tingkat *return* yang diharapkan.”

Varian Portofolio

Investor dalam menurunkan risiko portofolio melalui diversifikasi.

Tandelilin (2008:3.15) menyatakan bahwa “Diversifikasi bisa diartikan sebagai usaha investor dengan membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi *return* yang diharapkan.”

#### 7. Analisis *koefisien korelasi*

##### a. *Koefisien korelasi*.

Tandelilin (2008:3.17) menyatakan bahwa “*Koefisien korelasi* adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersama relatif (*relatif comovement*) antara dua variabel.” Ukuran *koefisien korelasi* dilambangkan dengan ( $\rho_{i,j}$ ) dan berjarak (berkorelasi) + 1,0 sampai – 1,0 dimana :

Jika  $\rho_{i,j} = + 1,0$ ; berarti korelasi positif sempurna

Jika  $\rho_{i,j} = - 1,0$ ; berarti korelasi negatif sempurna

Jika  $\rho_{i,j} = 0,0$ ; berarti tidak ada korelasi

a) Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna (+1,0)

tidak akan memberi manfaat pengurangan Risiko;

b) Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi nol, akan mengurangi Risiko

portofolio secara signifikan;

c) Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna (-1,0),

akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut.

##### b. *Kovarian*.

Menurut Tandelilin (2008:3.18) “*Kovarian* adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecendrungan untuk bergerak secara bersama-sama. Dalam konteks manajemen portofolio, *kovarian*

menunjukkan sejauh mana *return* dari dua sekuritas mempunyai kecendrungan bergerak bersama-sama.”

Tandelilin (2008:3.18) berpendapat bahwa : Kovarian positif menunjukkan kecendrungan dua sekuritas bergerak ke arah yang sama, sebaliknya kovarian negatif berarti *return* dua buah sekuritas cenderung bergerak menuju arah yang berkebalikan. Sedangkan kovarian nol mengindikasikan bahwa pergerakan dua buah sekuritas bersifat independen satu dengan lainnya.

$$\sigma_{AB} = \sum_{i=1}^m [R_A,i - E(R_A)][RB,i - E(RB)]$$

$\sigma_{AB}$  = kovarian antara sekuritas A dan B

R A,i = return sekuritas A pada saat i

$\Sigma(RA)$  = nilai yang diharapkan dari *return* sekuritas A

m = jumlah hasil sekuritas yang mungkin terjadi pada periode tertentu

### 8. Uji asumsi klasik

Mengingat penelitian menggunakan data sekunder, dalam menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Penyimpangan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji *normalitas*, uji *autokorelasi*, uji *heterokedastisitas* dan uji *multikolineartitas* yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji normalitas.

Menurut Ghozali (2009:107) "Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan nilai residual

mengikuti distribusi normal.” Supaya dapat diuji data harus berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas dengan pengamatan melalui residual atau dengan melihat distribusi dari variabel-variabel yang diteliti. Normalitas suatu variabel pada umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik.

Terdapat dua komponen normalitas yaitu skewness dan kurtosis. Skewness berhubungan dengan simetris distribusi. Skewed variabel (variabel melenceng) adalah variabel yang nilai mean-nya tidak di tengah-tengah distribusi. Kurtosis berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Menurut Ghazali (2009) “Jika variabel terdistribusi secara normal maka nilai skewness dan kurtosis sama dengan nol.” Ghazali dalam Prastiso (2009) “Normalitas variabel dideteksi juga dengan menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan cara melihat nilai probabilitas signifikan yang bernilai di atas nilai 0,05 maka data berdistribusi normal dan selain itu juga dengan metode grafik histogram data.”

Jika data tidak berdistribusi normal, maka dapat dilakukan transformasi agar menjadi normal. Untuk menormalkan data harus diketahui terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang ada apakah *moderate positive skewness, subtansial positive skewness, severe positive skewness* dengan bentuk L Bentuk transformasi yang dapat dilakukan sesuai dengan grafik histogram

Tabel. 3.1  
Bentuk Transformasi Data

Bentuk Grafik Histogram	Bentuk Transformasi
<i>Moderate positive skewness</i>	SQRT (x) atau akar kuadrat
<i>Subtansial positive skewness</i>	LGI (x) atau logaritma 10 atau LN
<i>Severe positive skewness</i> dengan bentuk L	1/x atau inverse
<i>Moderate negative skewness</i>	SQRT (k-x)
<i>Subtansial negarive skewness</i>	LG10 (k-x)
<i>Severe negative skewness</i> dengan bentuk L	1/(k-x)

Sumber : Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS

Menurut Ghazali dalam Prastisto (2009) “dimana k adalah konstanta yang berasal dari setiap skor dikurangkan sehingga skor terkecil adalah 1.” Setelah dilakukan transformasi data, maka normalitas data dapat dilihat kembali dengan menggunakan metode grafik normalitas P-P Plot dengan aturan melihat sebaran data yang mengikuti garis diagonal maka data berdistribusi normal untuk mendekati distribusi normal.

b. *Uji autokorelasi.*

Menurut Ghazali (2009:79) “Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan penganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).” Cara mendeteksi adanya gejala autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW). Ghazali (2009:80) “Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel bebas.”

Ghazali (2009:80) menyatakan bahwa pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

- 1) Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau *upper bound* (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif;
- 3) Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif;
- 4) Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tak dapat disimpulkan.

Arief (2006) menyatakan bahwa :

“Cara untuk mengatasi autokorelasi diantaranya adalah dengan menggunakan metode Hidrent-Lu, yaitu jika menemukan autokorelasi yang positif atau negatif dari model yang diteliti maka dapat menggunakan  $\rho$  dimulai dari -0,9, -0,8,...,0,8,0,9. Untuk setiap nilai  $\rho$  yang dicoba, dilakukan proses transformasi yang diikuti dengan perhitungan regresi yang bersangkutan. Dari setiap hasil regresi kemudian diperoleh dan dipilih yang terbaik dengan melihat jumlah kuadrat yang terkecil (*sum of square residuals*) dari model regresinya.”

c. *Uji heterokedastisitas.*

Menurut Ghazali (2006:125) “Uji *heterokedastisitas* bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain.” Jika *varians* residual dari pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda maka disebut *heteroskedastisitas*. Dalam perhitungan *heteroskedastisitas* dapat dilakukan dalam banyak model salah satunya adalah menggunakan *chart* (diagram pencar), dengan dasar pemikiran bahwa :

- 1) Jika ada pola tertentu, terdapat titik-titik (poin) yang ada membentuk suatu pola yang beraturan (bergelombang, kemudian menyempit) maka terjadi *heteroskedastisitas*;
  - 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar ke atas dan di bawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

d. Uji *multikolinearitas*.

Ghozali (2009: 25) mengatakan bahwa “Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan koefisien korelasi antarvariabel bebas. Kriteria yang digunakan :

- 1) Jika nilai VIF di sekitar angka 1 atau memiliki toleransi mendekati 1, maka dikatakan tidak terdapat permasalahan *multikolinearitas*;
  - 2) Jika koefisien korelasi antarvariabel bebas kurang dari 0,5, maka tidak terdapat masalah *kolinearitas*.

e. Uji hipotesis penelitian.

Model analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh *return* dan risiko terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan regresi linier berganda, dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e \quad \dots \quad 3.24$$

dimana :

**Y** = Pendapatan Asli Daerah

$\alpha$  = konstanta

$b_{1-n}$  = koefisien regresi

$X_1$  = *Return*

$X_2$  = Risiko

$e_i$  = kesalahan pengganggu.

Besarnya konstanta tercermin dalam  $\alpha$ , dan besarnya koefisien dari masing-masing variabel indepeden ditunjukkan  $b_1, \dots b_n$ . Variabel bebas merupakan *return* dan risiko investasi, sedangkan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah.

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) adalah menggunakan regresi linier berganda. Adapun langkah-langkah analisis sebagai berikut :

a) Uji Regresi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Prosedur yang digunakan untuk melakukan uji F adalah :

(1) Merumuskan hipotesis

$H_1 : b_1 : b_n \neq 0$ , artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial.

(2) Menentukan tingkat signifikansi

Hipotesis ini diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 0,05$

(3) Menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitian

Hipotesis diterima jika  $F_{\text{signifikan}} < 0,05$

Hipotesis ditolak jika  $F_{\text{signifikasi}} > 0,05$

b) Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji – t ini digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa nilai rata-rata pada beberapa variable akan berbeda secara signifikan untuk dua sampel atau kelompok yang independen. Dalam hal ini hipotesis nol dinyatakan sebagai  $\mu_1 = \mu_2 = 0$ .

$$t = \frac{x_1 - x_2}{Sx_1 - X_2} \quad \dots \quad 3.25$$

dimana :

x1 =rata-rata kelompok 1

x2 =rata-rata kelompok 2

$SX_1 - X_2$  = kumpulan *standard error of difference* antar nilai rata-rata masing-masing kelompok

## H. Tahapan Penelitian

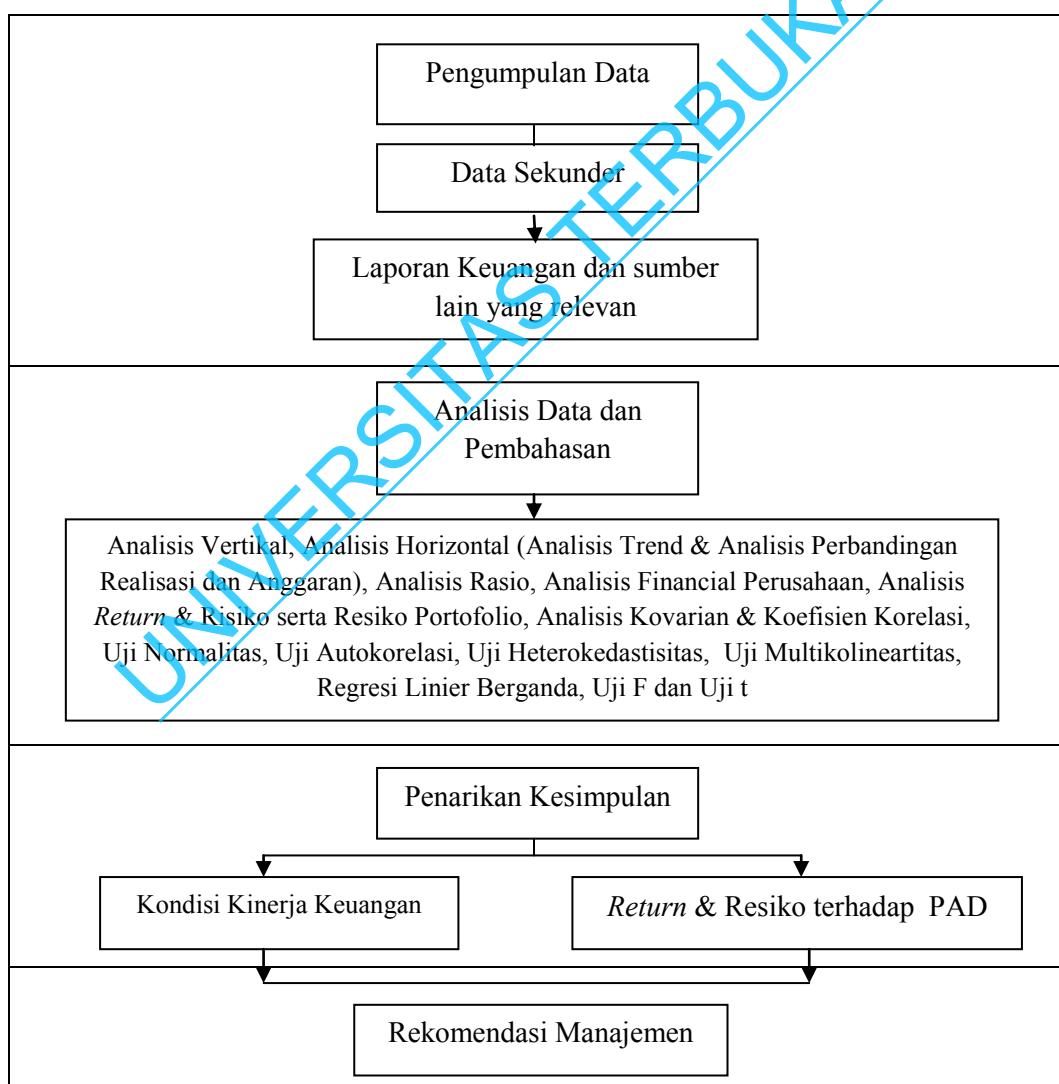
Penelitian ini bermula dari proses pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Hukum dan Biro Ekonomi Sekretariat Daerah, PT. BPR Syariah Bangka Belitung seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Arus Kas, Peraturan Daerah, Laporan Keuangan Emiten, serta informasi-informasi dari situs internet.

Tahap kedua setelah proses pengumpulan data dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data sendiri terbagi dua :

1. Analisis laporan keuangan pemerintah provinsi dan analisis perusahaan serta *return* dan resiko investasi sendiri;

2. Hasil dari *return* dan resiko itu selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik dan uji t-hitung dan uji F.

Pada tahap akhir, setelah dilakukan analisis data dilanjutkan dengan proses penarikan kesimpulan terhadap hipotesis penelitian yang meliputi pengaruh *return* terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruh resiko terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari kesimpulan dirumuskan sebagai bahan rekomendasi kebijakan publik dalam menginvestasikan dana.



Gambar 3.1  
Tahapan Penelitian

Sumber : Diolah peneliti

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

##### 1. Sejarah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi ketiga puluh satu yang lahir di Pemerintah Republik Indonesia dengan ditandai Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 pada tanggal 4 Desember 2000. Bab II Lampiran Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 (2008:II-1-2) memuat luas wilayah dan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah Provinsi Kepulauan terbagi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayahnya mencapai  $\pm 81.724,14 \text{ km}^2$ . Luas daratan mencapai  $\pm 16.424,140 \text{ km}^2$  atau 20,10% dari luas total wilayah provinsi. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada posisi  $104^\circ 5' \text{ bujur timur}$  sampai dengan  $108^\circ 18' \text{ bujur timur}$   $1^\circ 2' \text{ Lintang Selatan}$  sampai dengan  $3^\circ 15' \text{ Lintang Selatan}$ , dengan batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna, Sebelah Timur dengan Selat Karimata, Sebelah Selatan dengan Laut Jawa dan Sebelah Barat dengan Selat Bangka.

##### 2. Visi dan Misi

Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau disebut dengan istilah

Dasa Bhakti Era Emas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2007-2012 adalah sebagai berikut :

- a. Membangun komitmen bersama pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 45;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya insan masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya daerah/nasional serta pembinaan generasi muda;
- c. Meningkatkan kapasitas pengayoman dan pelayanan publik baik kepada masyarakat pada umumnya maupun pelayanan investasi dalam segala sektor dengan menerapkan sekurang-kurangnya standar pelayanan minimum (SPM) dan secara bertahap mengupayakan penguatan kapasitas melalui pengaplikasian *e-Government* di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk kabupaten/kota;
- d. Meningkatkan kapabilitas infrastruktur dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas infrastruktur yang berkaitan dengan investasi seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, instalasi Air bersih, rumah sakit dan perbankan;
- e. Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan *income* per kapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 6 sektor unggulan daerah yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa serta

menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global;

- f. Memperhatikan masalah lingkungan hidup sebagai salah satu azas dalam mengambil keputusan publik pada semua sektor pembangunan sekaligus melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi;
- g. Meneruskan penyusunan peraturan-peraturan Daerah (perda) sebagai penjabaran dari aturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar penetapan kebijakan publik Pemerintah Daerah yang *legitimite* serta melakukan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuensi baik di lingkup internal pemerintah maupun masyarakat;
- h. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan kapabilitas lembaga ekonomi rakyat seperti usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah;
- i. Meningkatkan kapabilitas aparatur pemerintah untuk menciptakan *good governance* dan *clean government* secara tersistem dan menyeluruh dengan melakukan gerakan bersama dalam pemberantasan KKN berbasis kultur dan agama. Melakukan penerapan prinsip *reward and punishment* dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan profesionalisme dengan

tidak menyampingkan jiwa pengabdian sebagai “Abdi Negara” dan semangat patriotisme sebagai bagian anak bangsa yang senantiasa berupaya melestarikan semangat kejuangan 17 Agustus 1945. Penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan secara konsisten dan konsekuensi tanpa pandang bulu, menyeluruh “ tidak tebang pilih” berdasarkan kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya;

- j. Melakukan upaya pembangunan infrastruktur pada proyek-proyek strategis dalam rangka meningkatkan daya saing regional dan global melalui pengupayaan pembangunan International *Entry Port* ( Pelabuhan Samudra) di Belitung yang dilengkapi dengan kawasan *Free Trade Zone* atau sekurang-kurangnya *Bounded Zone* sekaligus melakukan penguatan infrastruktur di tingkat regional *entry port* (Pelabuhan Samudera) di Bangka Belitung serta meningkatkan status Bandara Pangkalpinang untuk dapat mengakomodasi jalur penerbangan internasional dengan route Singapura-Bangka-Bali (SIBABA) sekaligus memperkuat jalur penerbangan regional yang menghubungkan secara rutin Jakarta-Bangka, Jakarta-Belitung, Jakarta-Bangka-Belitung, Batam-Bangka-Belitung-Palembang serta mengupayakan percepatan realisasi Belitung sebagai etalase kelautan dan merintis konsep pengembangan Zona Karimata ( Karimata *Growth Zone*).

### 3. Tata Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh seorang gubernur dan dibantu oleh seorang wakil gubernur. Gubernur bertanggung jawab

dan kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah di provinsi sejak tahun 2001 – 2007 dilaksanakan oleh biro keuangan sekretariat daerah. Sejak dilakukannya reformasi organisasi seiring dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pada tahun 2008, biro keuangan dan dinas pendapatan daerah bergabung menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Laporan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka ditunjukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Neraca Daerah sebagaimana terlampir dalam tabel L.3 dan L.4 pada lampiran 3, dan lampiran 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengambarkan jumlah pendapatan daerah, jumlah belanja dan transfer dan menunjukkan surplus dan defisit daerah serta penerimaan dan pengeluaran pemiyaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Analisis kinerja keuangan dilakukan guna melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dimasa lalu, sehingga diperoleh potensi-potensi kinerja yang perlu dikembangkan.

a. Analisis *vertikal*

Analisis *vertikal* atau disebut analisis proporsi, guna mengetahui proporsi masing-masing aset dan kewajiban dengan cara membandingkan setiap elemen asset dalam neraca sebagaimana tergambar pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Analisis Proporsi Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Periode 31 Desember 2003 – 2010**

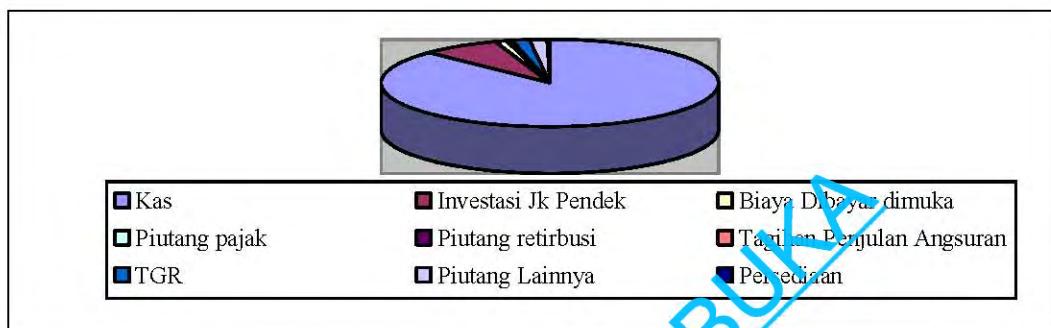
URAIAN	Analisis Proporsi (dalam %)								Rasio rata-rata
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Asset									
Asset Lancar									
Kas di Kas Daerah	98.44	98.46	80.54	49.86	95.38	91.46	80.31	91.90	85.79
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.56	1.05	0.91	0.36	0.21	0.00	6.00	0.16	1.28
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0	0.26	0.19	0	0	0.06
Investasi Jangka Pendek	0	0	15.60	44.60	0	0	0	0	7.53
Biaya dibayar dimuka	0	0	0	0	0	4.1	6.1	0.01	1.28
Piutang Pajak	0	0.27	0.26	0.00	0.00	2.80	0.06	0	0.42
Piutang Retribusi	0	0.01	0.02	0.02	0.15	0.52	0.03	0	0.09
Bagian Lancar Tagihan Penjualan	0	0	0	0	0.07	0.02	0.01	0.09	0.02
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0	0	0	6.49	7.2	1.71
Piutang Lainnya	0	0	2.63	5.16	3.18	0.83	0.04	0.02	1.48
Persediaan	0	0.22	0.0	0	0.75	0.09	1.01	0.63	0.34
Jumlah Asset Lancar	7.61	10.28	15.55	17.82	14.16	15.74	12.85	9.70	12.96
Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	100	100	100	37.50
Jumlah Investasi Non Permanen	0	0	0	0	0	0.23	0.21	0.18	0.08
Investasi Permanen									
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Jumlah Investasi Permanen	100	100	100	100	100	82.77	83.45	86.66	94.11
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0.12	0.18	0.21	0.63	1.05	1.31	1.25	1.37	0.77
Asset Tetap									0.00
Tanah	47.61	43.44	39.91	36.42	32.30	29.31	27.47	24.70	35.15
Peralatan & Mesin	0.00	2.76	0.55	6.17	6.80	8.22	7.91	7.10	4.94
Gedung & Bangunan	22.40	21.00	23.97	23.63	21.40	22.62	20.20	21.95	22.15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.64	27.78	28.64	33.02	35.55	38.94	38.93	37.08	33.07
Asset Tetap Lainnya	5.34	2.98	5.95	0.55	0.71	0.91	0.93	0.81	2.27
Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	2.05	0.97	0.21	3.24	0.00	4.54	8.36	2.42
Jumlah Asset Tetap	92.28	89.54	84.23	81.56	84.69	82.86	85.82	87.84	86.10
Asset Lainnya									
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0	13.62	0	0	1.56	1.90
Tuntutan Perbenbendaharaan	0	0	0	0	0	12.1	10.7	0	2.84
Asset lain-lain	0	0	0	0	86.38	88.0	89.3	98.4	45.27
Jumlah Asset Lainnya	0	0	0	0	0.10	0.09	0.08	0.40	0.08
Jumlah Asset	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00

Sumber : Neraca Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah.

Tabel 4.1 mengambarkan potret hasil analisis *vertikal* berupa jumlah proporsi masing-masing aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2003–2010. Dilihat dari jumlah proporsi, aset tetap memiliki proporsi terbanyak dibandingkan aset lainnya yaitu rata-rata sebesar 86,10% terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan kontruksi dalam penggerjaan. Proporsi aset tetap terbesar terjadi pada tahun 2003 sebesar 92,3%, sedangkan aset yang memiliki proporsi terkecil rata-rata sebesar 0,08% adalah aset lainnya yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran, tuntutan perpendaharaan dan aset lain-lain. Jumlah rata-rata aset lancar sebesar 13,05% dan investasi jangka panjang sebesar 0,76%.

Secara kuantitatif aset tetap mengalami peningkatan, namun dilihat dari proporsinya terdapat penurunan. Pada tahun 2003 jumlah aset tetap sebesar Rp.1.041.124,95 juta dan mengalami peningkatan di tahun 2010, dengan jumlah aset tetap sebesar Rp. 2.384.926,24 juta. Demikian pula aset lainnya secara kuantitatif mengalami peningkatan namun secara proporsi mengalami penurunan. Aset tetap yang memiliki proporsi terbesar berupa tanah dengan rata-rata 35,15%. Aset lancar yang memiliki proporsi terbesar pada kas daerah dengan proporsi rata-rata sebesar 85,79% pertahun dan diikuti investasi jangka pendek berupa deposito sebesar 7,53%. Asset lancar yang proporsi terkecil pada bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar 0,02% pertahun. Sedangkan jumlah proporsi rata-rata asset lancar lainnya yaitu kas dibendahara pengeluaran sebesar 1,28%, kas dibendahara penerima sebesar 0,06%, investasi jangka pendek sebesar 7,53%, biaya dibayar dimuka sebesar 1,28%, piutang pajak 0,42%, piutang retribusi 0,09%,

bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar 1,71%, piutang lainnya sebesar 1,48% dan persediaan sebesar 0,34%. Jumlah rata-rata proporsi asset lancar keseluruhan sebesar 12,96%. Proporsi aktiva lancar terlihat pada gambar 4.1 diagram pie di bawah ini.

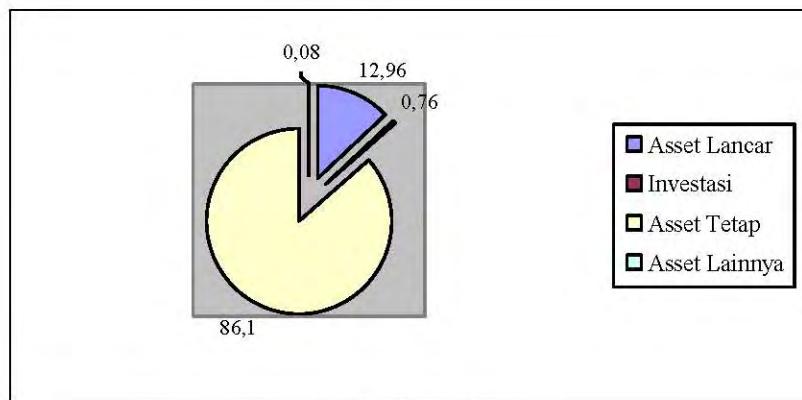


Gambar 4.1

Diagram Pie Proporsi Asset Lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Neraca Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah.

Proporsi investasi permanen pemerintah daerah sebesar rata-rata 94,11% pertahun, tetapi jumlah proporsi investasi jangka panjang rata-rata 0,76% pertahun. Rata-rata proporsi pertahun terbesar dari aset tetap yaitu tanah sebesar 35,15% dan yang kedua jalan, irigasi dan jaringan sebesar 33,07%, sementara asset tetap lainnya hanya memiliki proporsi sebesar 2,27% pertahun. Asset lainnya, proporsi terbesar pada asset lain-lain sebesar 45,27% dan tagihan penjualan angsuran dan tuntutan perbendaharaan sebesar 1,90% dan 2,84% pertahun. Alokasi rata-rata proporsi aset tergambar pada diagram pie 4.2.



Gambar 4.2

Diagram Pie Proporsi Rata-Rata Asset

Sumber : Neraca Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah.

Gambar 4.2 menerangkan bahwa aset terbesar milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berupa aset tetap dengan proporsi rata-rata sebesar 86,1%, aset lancar sebesar 12,96% sementara investasi pemerintah sendiri masih kecil yaitu sebesar 0,76% diikuti aset lainnya sebesar 0,08%. Besarnya aset tetap dibandingkan aset lainnya disebabkan salah satu fungsi dari pemerintah yaitu memberikan pelayanan dasar kemasayarakat berupa sarana dan prasarana serta infrastruktur.

Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2010 menunjukkan total investasi sebesar Rp. 35.872,03 juta yang terdiri dari investasi non permanen lainnya sebesar Rp. 4.926,09 juta dan penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 30.945,94 juta. Pendapatan yang diterima dari atas investasi berupa bagian laba atas penyertaan modal sendiri sebesar 1,08% dari investasi tersebut. Ini dikarenakan dari total investasi yang dilakukan hanya dua buah perusahaan yang membagikan laba perusahaan, yaitu PT.BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung dan PT. BPR Syariah Bangka Belitung.

Analisis proporsi kewajiban, mengambar jumlah masing-masing proporsi kewajiban dan ekuitas dana baik itu ekuitas dana lancar maupun ekuitas investasi. Sedangkan kewajiban yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya berupa kewajiban jangka pendek. Gambaran proporsi masing kewajiban dan ekuitas di tunjukan dalam tabel 4.2 di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Tabel 4.2**  
**Analisis Proporsi Kewajiban dan Ekuitas Dana Periode 31 Desember 2003 - 2010**  
**(dalam prosentase)**

URAIAN	Analisis Proporsi (dalam %)								Ratio rata-rata
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kewajiban									
Kewajiban Jangka Pendek									
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	0	84,94	0	0	0	0	0	0	10,62
Utang Pajak	0	0	100,00	100,00	100,00	0	0	0	37,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	15,06	0	0	0	100,00	100,00	100,00	39,38
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87,50
Jumlah Kewajiban		1,01	1,27	1,06	0,32	1,61	1,04	1,53	0,98
Ekuitas Dana									
Ekuitas Dana Lancar	100	100	100	100	100	100	100	100	37,50
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	0	0	100,83	97,79	14,42	93,89	109,28	52,03
Pendapatan yang ditangguhkan	0	0	0	0	0,28	0	0	0	0,04
Cadangan Piutang	0	0	0	5,50	3,48	1,30	13,81	8,68	4,10
Cadangan Persediaan	0	0	0	0	0,77	0,01	1,10	0,75	0,33
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	0	0	0	(6,33)	(2,31)	(1,61)	(8,79)	(18,72)	-4,72
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	100	100	100	16,94	13,89	14,36	11,94	9,18	45,79
Ekuitas Dana Investasi									
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0	0	0	0,77	1,22	1,56	1,43	1,52	0,81
Diinvestasikan dlm Aset Tetap	0	0	0	99,23	98,66	98,34	98,47	98,04	61,59
Diinvestasikan dlm Aset Lainnya	0	0	0	0	0,12	0,1	0,09	0,45	0,10
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	83,06	86,11	85,64	88,06	91,71	54,32
Jumlah Ekuitas Dana	100	98,99	98,73	98,94	99,68	98,39	98,96	98,47	99,02
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Neraca Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah.

Tabel 4.2 merupakan potret hasil analisis *vertikal* dengan cara membandingkan setiap elemen kewajiban dan ekuitas dengan total kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan

APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas. Analisis proporsi kewajiban dan ekuitas dana periode 2003 – 2010, dilihat dari rasio kewajiban, utang jangka pendek lainnya mempunyai rasio rata-rata tertinggi yaitu sebesar 39,38%, kemudian utang pajak sebesar 37,50% dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK) sebesar 10,62%. Rata-rata total kewajiban dibanding total utang sebesar 0,96% sedangkan rata-rata proporsi kewajiban jangka pendek sebesar 87,50%.

Rendahnya rata-rata proporsi kewajiban disebabkan rendahnya tingkat kewajiban lancar pemerintah kepada pihak ketiga. Kewajiban lancar tersebut terdiri dari utang perhitungan Fihak Ketiga (PK), utang pajak dan utang jangka pendek lainnya dan tidak terjadi terus menerus. Kewajiban jangka panjang sejak 2003-2010 tidak ada transaksi pemerintah. Hal ini bukan disebabkan daerah tidak diperbolehkan meminjam dana, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, bahwa pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan sedangkan pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Dilihat dari proporsi ekuitas dana lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2003 – 2005 sebesar 100%. Proporsi rata-rata pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 52,03%, pendapatan yang ditangguhkan sebesar 0,04%, cadangan piutang sebesar 4,10% dan cadangan persediaan sebesar 0,33%. Sedangkan proporsi rata-rata dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar – 4,72%. Rata-rata jumlah ekuitas

dana lancar sebesar 45,79%. Ekuitas dana investasi rata-rata sebesar 54,32% yang terdiri dari diinvestasikan dalam investasi jangka panjang sebesar 0,81%, diinvestasikan dalam aset tetap 61,59% dan diinvestasikan dalam aset lainnya sebesar 0,10%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi ekuitas sebagian besar pada aset tetap. Jumlah rata-rata total ekuitas dana sebesar 99,02% dengan jumlah rata-rata rasio kewajiban dan ekuitas dana sebesar 100%.

Analisis vertikal selain digunakan untuk melihat proporsi aset dan kewajiban dapat digunakan juga untuk mengevaluasi laporan Realisasi Anggaran yang terdiri atas struktur pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah. Analisis proporsi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah menunjukkan berapa proporsi masing-masing pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada tabel L.5 pada lampiran 5 tulisan ini.

### 1) Struktur Pendapatan

Struktur pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer-dana perimbangan, pendapatan transfer lainnya serta lain-lain pendapatan yang sah. Dilihat dari sumber pendapatan yang diperoleh, sumber pendapatan terbesar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal penerimaan transfer dana perimbangan dan diikuti pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah masih didominasi pendapatan yang berasal dari pajak daerah, sedangkan sumber pendapatan dari transfer bersumber dari dana alokasi umum. Adapun gambaran perolehan Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun dari tahun 2003 – 2010 tergambar pada diagram di bawah ini.

Tabel 4.3  
Struktur Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun Anggaran 2003 – 2010

(dalam rupiah)

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Transfer lainnya	Lain-lain Pendapatan yang sah	Jumlah Pendapatan
Semester 1 2003	33.282.709.149	101.174.681.191		1.625.061.037	136.082.451.376
Semester II 2003	38.497.409.103	102.368.516.174	-	8.076.493.366	148.942.418.643
Semester 1 2004	47.629.321.576	107.957.494.248		1.660.256.119	157.247.071.942
Semester II 2004	66.832.308.663	101.993.516.004	-	1.585.338.126	170.411.162.794
Semester 1 2005	84.295.163.632	125.098.818.606	-	-	209.393.982.238
Semester II 2005	104.009.209.974	121.901.173.857	-	1.424.000.000	227.334.383.831
Semester 1 2006	94.138.534.917	173.606.971.048	-	-	267.745.505.965
Semester II 2006	104.034.776.924	162.393.356.240	-	-	266.428.133.163
Semester 1 2007	93.991.211.979	191.461.734.684	-	-	285.452.946.663
Semester II 2007	109.550.690.495	214.864.219.551	-	-	324.414.910.046
Semester 1 2008	135.202.364.757	228.393.518.553			363.595.883.310
Semester II 2008	158.982.203.452	317.544.351.952	-	-	476.526.555.404
Semester 1 2009	108.577.379.085	299.781.509.118	-	-	408.358.888.203
Semester II 2009	138.222.465.872	258.094.663.672	169.125.000	-	396.486.254.544
Semester 1 2010	148.697.126.191	283.534.927.77	164.512.500		432.396.562.468
Semester II 2010	179.425.353.888	235.753.651.888	450.000.000	-	415.629.005.576
Jumlah	1.612.085.520.508	2.924.748.419.172	783.637.500	12.746.087.610	4.550.363.664.790
Rata-rata rasio	35%	64%	0,02%	0,28%	100%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep. Babel

Dilihat dari struktur pendapatan sebagaimana tercantum pada tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa rasio penerimaan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat mempunyai andil yang cukup besar yaitu sebesar 64% pertahun, sementara rasio pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah hanya mampu memberi kontribusi terhadap total penerimaan daerah sebesar 35% pertahun. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya kemampuan keuangan daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah.

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan publik yang dituntut untuk bagaimana menggali dana dan menggunakananya untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah. Rendahnya penerimaan daerah menyebabkan daerah

mengalami kesulitan dalam membiayai operasionalnya. Dana perimbangan sendiri dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jika ketergantungan daerah terhadap pusat dibiarkan, daerah akan menjadi beban bagi pemerintah pusat. Otonomi daerah seharusnya membuat daerah dapat mengelola sumber-sumber keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pendapatan asli daerah sebesar 35% pertahun tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sementara 64% dana perimbangan bersumber dari APBN yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Tabel 4.4 dan 4.5 menyajikan Struktur Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Transfer Dana Perimbangan dari tahun 2003 sampai dengan 2010.

**Tabel 4.4**  
**Struktur Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010**

(dalam rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	Lain-lain PAD yang sah	Jumlah
Smst I 2003	29.990.195.922	364.152.830	-	2.928.360.397	33.282.709.149
Smst II 2003	34.815.021.134	308.342.925	80.988.427	3.374.045.045	38.578.397.530
Smst I 2004	44.096.122.221	617.746.555	-	2.915.452.799	47.629.321.576
Smst II 2004	62.791.273.608	(36.377.130)	93.407.208	3.984.004.978	66.832.308.663
Smst I 2005	77.000.307.812	697.443.885	-	6.597.411.935	84.295.163.632
Smst II 2005	95.163.987.362	(59.395.363)	137.018.941	8.767.599.034	104.009.209.974
Smst I 2006	80.879.486.789	505.633.823	-	12.753.414.305	94.138.534.917
Smst II 2006	92.695.417.328	437.261.541	-	10.902.098.055	104.034.776.924
Smst I 2007	81.364.700.000	789.302.475	-	11.837.209.504	93.991.211.979
Smst II 2007	91.927.431.932	476.490.407	-	17.146.768.156	109.550.690.495
Smst I 2008	120.630.925.325	397.934.675	-	14.173.504.757	135.202.364.757
Smst II 2008	139.454.937.713	2.603.012.789	1.025.524.053	15.900.728.896	158.982.203.451
Smst I 2009	94.686.878.025	2.209.228.813	360.687.778	11.320.584.469	108.577.379.085
Smst II 2009	120.937.106.805	1.833.818.860	1.410.859.681	14.040.680.520	138.222.465.872
Smst I 2010	135.458.231.933	595.000.950	603.696.949	12.040.187.358	148.697.126.191
Smst II 2010	160.756.556.814	2.033.014.111	2.473.630.860	14.161.697.069	179.424.898.854
Jumlah	1.432.658.384.801	12.408.468.322	6.183.813.897	159.915.386.880	1.612.166.053.899
Rata-rata	89.541.149.050	838.029.270	386.488.369	9.994.711.680	100.760.378.369
Rasio rata-rata	88,87%	0,83%	0,38%	9,92%	100,00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Babel

Pada sektor penerimaan pendapatan asli daerah, sektor pajak daerah memiliki andil terbesar yaitu rata-rata sebesar Rp. 89.541.149.050 pertahun atau 88,87% pertahun, diikuti lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 9,92% pertahun atau Rp.9.994.711.680,- serta retribusi daerah sebesar Rp.838.029.270,- pertahun atau 0,83% pertahun. Sedangkan hasil penerimaan terhadap pengelolaan kekayaan daerah masih sangat rendah yaitu sebesar 0,38% pertahun atau sebesar Rp. 6.183.813.897,-. Tingginya kontribusi pajak sebesar 88,87% kepada pendapatan asli daerah sehingga pengaruh return tidak signifikan

kepada pendapatan asli daerah. Ini menunjukkan masih rendahnya kinerja pemerintah provinsi mengelola sumber-sumber kekayaan daerah.

Rendahnya penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah disebabkan lemahnya manajemen investasi pemerintah provinsi. Hal ini ditunjukkan bahwa penerimaan rata-rata hasil pengelolaan kekayaan daerah berupa bagian laba yang diterima atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD sebesar Rp.386.488.369,- pertahun. Sementara ini pemerintah provinsi belum melakukan penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BCUIN dan perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Perolehan pajak daerah berasal pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan air bawah tanah. Tetapi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 maka terjadi perubahan terhadap pajak provinsi dimana pajak air tanah menjadi pajak kabupaten/kota dan pajak rokok menjadi pajak provinsi.

Pendapatan retribusi daerah berasal dari beberapa SKPD seperti Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Perwakilan dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Sementara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri yang memiliki bagian retribusi tidak memberi sumbangan terhadap penerimaan retribusi daerah. Retribusi daerah tersebut terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi izin trayek, retribusi ketinggian mendirikan bangunan, retribusi izin usaha ekspedisi muatan pesawat udara.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh dari jasa giro, bunga deposito, fasilitas umum dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bagian akutansi tidak merinci secara jelas obyek pendapatan selain jasa giro, bunga deposito dan fasilitas umum.

**Tabel 4.5**  
**Struktur Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**  
**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2003 – 2010**

(dalam rupiah)

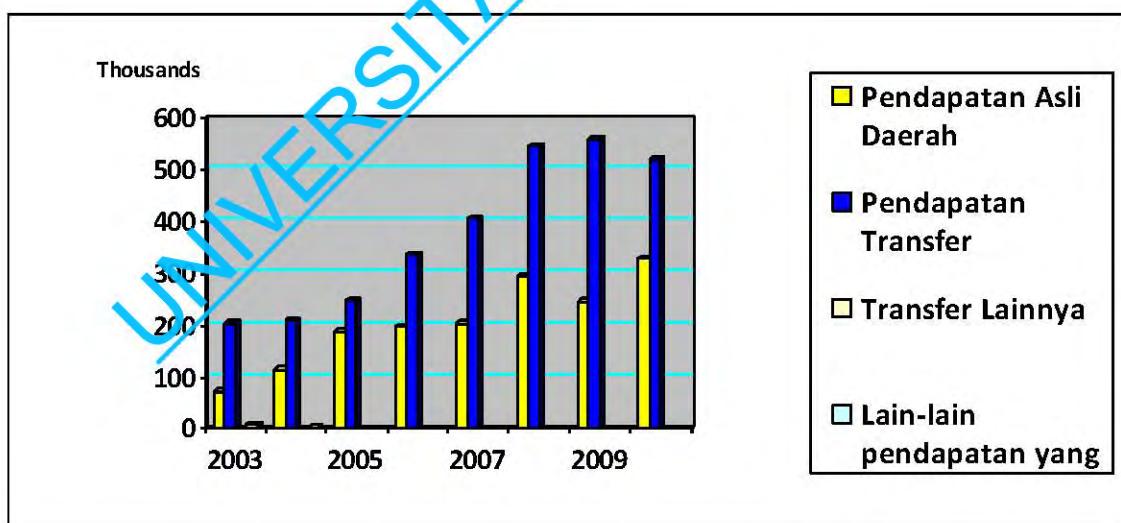
Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak	Dana Bagi Hasil SDA	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus	Jumlah
Sms I 2003	4.673.987.714	1.714.862.477	94.783.831.000		101.174.681.191
Sms II 2003	10.103.789.836	18.660.557.338	67.704.169.000	5.900.000.000	102.368.516.174
Sms I 2004	4.958.236.511	2.891.407.737	104.107.850.000		107.957.494.248
Sms II 2004	12.609.442.316	19.264.923.688	79.119.150.000	-	101.993.516.004
Sms I 2005	5.113.847.608	10.692.920.998	109.292.050.000		125.098.818.606
Sms II 2005	17.630.474.811	26.204.749.046	78.065.950.000	-	121.901.173.857
Sms I 2006	3.510.650.413	9.132.632.917	160.819.162.000	-	173.461.975.330
Sms II 2006	21.859.880.150	25.807.633.808	114.870.838.000	-	162.538.351.958
Sms I 2007	2.375.770.572	2.794.964.112	186.291.000.000	-	191.461.734.684
Sms II 2007	30.635.468.072	51.162.751.479	133.066.000.000	-	214.864.219.551
Sms I 2008	12.122.169.102	14.139.929.444	195.522.720.000	6.608.700.000	228.393.518.553
Sms II 2008	29.449.651.046	79.354.572.906	195.522.720.000	13.217.400.000	317.544.351.952
Sms I 2009	6.687.191.950	41.428.427.168	237.996.990.000	13.668.900.000	299.781.509.118
Sms II 2009	37.320.748.507	18.881.961.165	169.997.854.000	31.894.100.000	258.094.663.672
Sms I 2010	15.615.600.014	26.026.906.763	239.470.877.000	2.421.540.000	283.534.923.777
Sms II 2010	36.141.906.972	22.490.053.716	171.171.431.000	5.650.260.000	235.753.651.688
Jumlah	246.434.835.887	368.933.922.285	2.230.018.761.000	79.360.900.000	2.924.748.419.172
Rasio rata-rata	8,43%	12,61%	76,25%	2,71%	100,00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Babel

Realisasi penerimaan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan didominasi oleh penerimaan dana alokasi umum yaitu sebesar 76,25% pertahun, sedangkan yang lainnya yaitu dana bagi hasil pajak sebesar 8,43% pertahun, dana bagi hasil sumber daya alam sebesar 12,61% pertahun dan dana alokasi khusus 2,71% pertahun.

DAU (Dana Alokasi Umum) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah, yang penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah. DAK (Dana Alokasi Khusus) diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan dana pendamping 10% yg berasal dari penerimaan umum APBD. Bagi hasil pajak merupakan bagian daerah dari PBB (Pajak Bumi Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan), PPh (Pajak Penghasilan) Perseorangan, dan SDA (Sumber Daya Alam) yang dikembalikan ke daerah.

Gambar struktur perdapatan daerah sejak tahun 2003 – 2010 dapat dilihat pada gambar 4.3, sedangkan gambar struktur pendapatan asli daerah tersaji pada gambar 4.4.

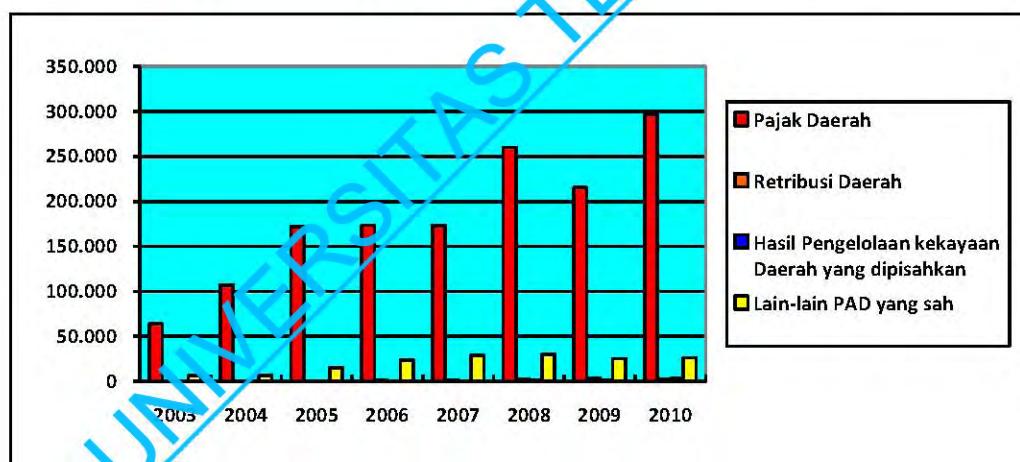


Gambar 4.3  
Diagram Batang Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah.

Dilihat dari diagram batang tersebut di atas, pertumbuhan pendapatan dari tahun 2003 – 2010 secara umum mengalami kenaikan, walaupun pendapatan terbesar masih didominan dari pendapatan transfer dana perimbangan. Terdapat tahun di mana pendapatan mengalami penurunan seperti pendapatan asli daerah pada tahun 2009 dan pendapatan transfer pada tahun 2010. Sedangkan transfer lainnya dan lain-lain pendapatan yang sah belum menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi dari kedua pendapatan tersebut.

Perkembangan sektor pendapatan asli daerah, dapat digambarkan pada diagram batang gambar 4.4 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.



Gambar 4.4  
Diagram Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2003 – 2010

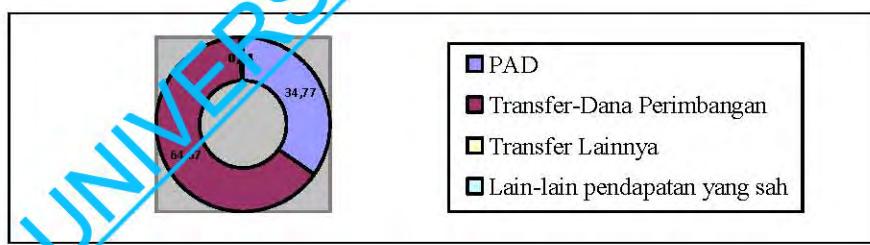
Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah.

Pendapatan terbesar dari pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah. Perkembangan pajak daerah dari tahun 2003 – 2010 mengalami fluktuasi, namun di tahun 2007 dan 2009 sektor pajak daerah mengalami penurunan. Demikian pula halnya dengan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah tertinggi dicapai pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan. Untuk retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah masih sangat minim. Sebagaimana arah kebijakan umum pendapatan asli daerah yaitu perbaikan manajemen, peningkatan investasi dan optimalisasi aset belum dapat terpenuhi.

Dilihat dari rata-rata pendapatan asli daerah dibandingkan rata-rata pendapatan, nilai rata-rata proporsi pendapatan asli daerah sebesar 34,77%. Sumbangan terbesar diperoleh dari pajak daerah rata-rata selama delapan tahun rata-rata sebesar 89,23%. Kemudian diikuti penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 39,24% sedangkan proporsi terendah sebesar 0,27% dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Proporsi pendapatan transfer dan dana perimbangan dapat dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini.



Gambar 4.5  
Diagram Pie Proporsi Rasio Rata-rata Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah.

Besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pemerintah pusat tergambar dari jumlah rata-rata proporsi pendapatan transfer dan dana perimbangan dibandingkan jumlah pendapatan yaitu sebesar 64,67%. Penerimaan terbesar diperoleh dari dana alokasi umum (DAU) dengan

rasio rata-rata sebesar 77,66% dan diikuti dana bagi hasil pajak sebesar 15,65%, sedangkan proporsi dana alokasi kasih khusus memiliki rasio terendah sebesar 2,03%. Rasio rata-rata penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 0,54%.

## 2) Pengeluaran Daerah

Dilihat dari analisis proporsi tabel L. 5 pada lampiran 5, menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih besar dibandingkan rasio belanja modal dalam pengeluaran belanja. Besarnya rasio belanja operasi dibandingkan belanja modal menunjukkan masih rendahnya tingkat pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemandirian daerah ditunjukkan dari kemampuan daerah dalam pendanaan aktifitasnya melalui perbandingan pendapatan asli daerah terhadap dana dana alokasi umum. Sementara ini besarnya ketergantungan terhadap dana alokasi umum tidak diringi kebijakan pada sisi pengeluaran/belanja. Struktur pengeluaran daerah menggambarkan pengeluaran belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer sebagaimana tabel 4.6. di bawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Struktur Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun Anggaran 2003 – 2010**

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Transfer	Jumlah Pengeluaran
Smst I 2003	37.206.428.877	1.987.018.917	-	5.151.550.500	44.344.998.294
Smst II 2003	53.193.120.758	93.056.659.436	420.000.000	49.928.843.549	196.598.623.743
Smst I 2004	43.718.517.675	5.679.963.193	1.585.957.133	23.204.036.071	74.188.474.072
Smst II 2004	49.748.033.770	84.540.193.843	306.300.000	72.176.226.307	206.770.753.920
Smst I 2005	39.368.858.133	2.710.834.050	162.000.000	15.954.021.792	58.195.713.975
Smst II 2005	65.683.976.985	113.046.008.764	-	119.271.854.299	298.001.840.048
Smst I 2006	46.461.793.125	15.908.977.043	445.000.000	28.729.964.763	91.545.734.931
Smst II 2006	96.751.738.505	126.426.552.437	488.977.545	148.168.815.090	371.836.083.577
Smst I 2007	72.915.670.804	1.095.600.500	-	-	74.011.271.304
Smst II 2007	274.975.979.584	193.413.809.750	2.162.176.000	91.861.990.257	562.413.955.591
Smst I 2008	137.976.592.036	25.998.991.270	-	29.614.664.968	193.590.248.273
Smst II 2008	300.083.708.975	209.192.243.434	-	72.482.790.863	581.758.743.273
Smst I 2009	140.185.342.267	43.585.171.382	-	48.408.186.295	232.178.699.945
Smst II 2009	344.171.118.438	194.534.873.463	500.000.000	82.876.583.804	622.082.575.704
Smst I 2010	123.149.431.403	54.453.941.166	-	54.752.241.115	232.355.613.684
Smst II 2010	243.625.811.971	258.908.062.958	899.150.000	126.927.134.837	630.360.160.766
Jumlah	2.032.009.694.429	1.422.551.883.689	6.969.560.678	964.357.354.009	4.425.888.492.805
Rata-rata	127.000.605.902	88.909.492.731	435.597.542	60.272.334.626	276.618.030.800
Rasio rata-rata	45,91%	32,14%	0,16%	21,79%	100%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Babel

Tabel 4.6 menggambarkan bahwa sektor belanja operasi yang terdiri dari (belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja subsidi + belanja hibah + belanja bantuan sosial) memiliki rasio rata-rata sebesar 45,91% pertahun sedangkan belanja modal sebesar 32,14% pertahun, diikuti belanja transfer yaitu berupa bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar 21,79% pertahun dan belanja tak terduga sebesar 0,16% pertahun. Jumlah pengeluaran terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.630.360.160.766,- dan terkecil pada tahun 2003 sebesar Rp.44.344.998.294,- sedangkan rasio rata-rata pengeluaran sebesar Rp.276.618.030.800,- pertahun.

Rasio rata-rata belanja operasi sebesar 42,26%, pertahun, sementara rasio belanja modal sebesar 32,67% dan rasio belanja tak terduga sebesar 0,20% pertahun. Rata-rata rasio transfer bagi hasil ke kabupaten/kota sebesar 24,87%. Proporsi pengeluaran terbesar pada belanja operasi terdapat pada belanja pegawai yaitu sebesar 46,64%, sementara belanja barang dan jasa sebesar 37,40% dan disertai belanja hibah dan bantuan sosial sebesar 10,33% dan 5,57% menunjukkan tingginya proporsi belanja pegawai dibandingkan belanja barang dan jasa.

Subsidi pemerintah kepada perusahaan terbilang sangat kecil atau sebesar 0,07%. Belanja subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Subsidi yang dilakukan pemerintah provinsi berupa subsidi kepada PT. Asuransi Kesehatan guna membantu pelayanan kesehatan pegawai.

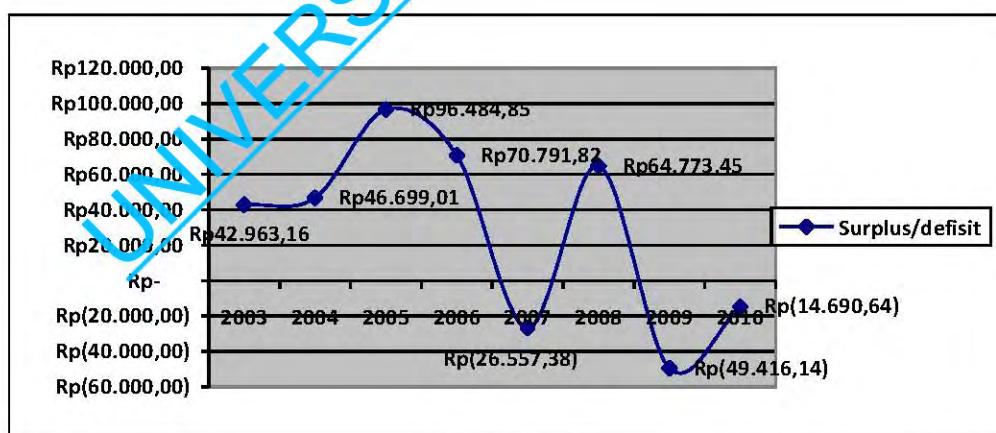
Proporsi pengeluaran belanja modal tertinggi pada belanja modal tanah sebesar 28,92% dan Jaringi belanja irigasi dan jaringan sebesar 26,90% dan belanja gedung dan bangunan sebesar 13,49%, proporsi terkecil pada belanja asset tetap lainnya sebesar 0,75%. Tahun 2003-2004 proporsi terbesar yaitu pada belanja modal, namun tidak dapat dijelaskan proporsi peritem karena Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri tidak menggambarkan jumlah pengeluaran masing-masing item.

Rasio penerimaan pembiayaan rata-rata pertahun sebesar 69,04%, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar -30,96% sehingga diperoleh rasio pembiayaan neto sebesar 74,72% pertahun. Penerimaan pembiayaan berasal dari

SILPA tahun lalu dan pada tahun 2009 terdapat penerimaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah. Pengeluaran pembiayaan terbesar pada penyertaan modal dengan proporsi rata-rata sebesar 75,35% dan pada tahun 2009 terdapat pembayaran pinjaman dengan proporsi sebesar 11,18%. Dilihat sisi regulasi bahwa pada kondisi defisit, penyertaan modal menjadi suatu fenomena yang kurang baik bagi pemerintah provinsi jika tidak disertai analisis finansial terhadap perusahaan maupun tingkat *return* yang diharapkan.

### 3) Surplus dan Defisit

Surplus dan defisit terjadi apabila terjadi selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah. Surplus terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran pengeluaran sebaliknya defisit terjadi jika pendapatan lebih kecil dari pengeluaran. Gambar 4.6 menggambarkan surplus dan defisit Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010.



Gambar 4.6  
Diagram XY Surplus dan Defisit Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003 – 2010

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Kep. Bangka Belitung, diolah.

Defisit terjadi pada tahun 2007 sebesar Rp.26.557,38 juta, tahun 2009 sebesar Rp49.416,14 juta dan tahun 2010 sebesar Rp.14.690,64. Sedangkan surplus terjadi sejak tahun 2003 sampai 2006 dan kemudian pada tahun 2008. Suplus terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp.96.484,85 juta dan defisit terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp.49.416,14. Jumlah batas kumulatif defisit sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan untuk tahun 2007 sebesar 5% dari pendapatan daerah, tahun 2009 sebesar 3,5% dan tahun 2010 sebesar 4,5%. Jumlah kumulatif defisit tahun 2007 masih lebih rendah dibandingkan batas yang diperbolehkan oleh pemerintah yaitu sebesar 4,35%, tetapi tahun 2009 dan 2010 defisit yang terjadi melampaui batas yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 6,14% dan sebesar 11,38%.

#### 4) Pembiayaan

Dalam akutansi pemerintah daerah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran merupakan pembiayaan. Penyertaan modal merupakan salah satu bentuk dari pengeluaran pembiayaan. Adapun pengeluaran pembiayaan atau penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 tergambar pada tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.7  
Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Penyertaan Modal
Smst I 2003	1.000.000.000
Smst II 2003	1.300.000.000
Smst I 2004	1.200.000.000
Smst II 2004	2.200.000.000
Smst I 2005	2.200.000.000
Smst II 2005	3.200.000.000
Smst I 2006	3.200.000.000
Smst II 2006	10.800.000.000
Smst I 2007	10.800.000.000
Smst II 2007	19.748.000.000
Smst I 2008	20.748.000.000
Smst II 2008	23.748.000.000
Smst I 2009	25.748.000.000
Smst II 2009	25.748.000.000
Smst I 2010	33.748.000.000
Smst II 2010	33.748.000.000
Jumlah	33.748.000.000,00

Sumber : Laporan Realisasi APBD 2003-2010

Tahun 2003 merupakan tonggak awal dimulainya investasi pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru melakukan investasi berupa penyertaan modal di beberapa perusahaan. Namun demikian penyertaan modal tersebut tidak melalui proses keputusan investasi karena baik dasar hukum, penentuan kebijakan, strategi dan pemilihan aset serta pengukuran dan evaluasi dari penyertaan modal tersebut belum dilakukan oleh pihak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada saat penelitian ini dilakukan ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi tidak memiliki bukti penyertaan modal berupa saham pada beberapa perusahaan.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 menunjukkan jumlah penyertaan modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 1.300 juta, dan ditempatkan pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003

Uraian	Jumlah	Dasar Hukum	Lembar Saham
PT. Bank Sumatera Selatan	Rp. 1.000.000.000	tidak ada	1.000
PT. Sumatera Shipping Lines	Rp. 100.000.000	tidak ada	tidak ada
PT. Sumatera Promotion Centre	Rp. 100.000.000	tidak ada	tidak ada
PT. Sumatera Air Lines	Rp. 100.000.000	tidak ada	tidak ada
Total	Rp. 1.300.000.000		

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyertaan modal pada PT. Sumatera Air Lines sendiri pada tahun tersebut tidak jadi disetor/dilaksanakan sehingga sebenarnya jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke perusahaan hanya sebesar Rp. 1.200 juta, namun jumlah ini berbeda dengan Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada Tahun 2004, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menambah penyertaan modalnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan sebesar Rp.1 miliar sebanyak 687 lembar saham dan pada tahun 2005 sebesar Rp. 1 miliar sebanyak 688 lembar, tetapi kedua investasi tersebut tidak dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Pada tahun 2006, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, pemerintah provinsi kembali menambah investasinya sebesar Rp.2 miliar yang terdiri dari 1375 lembar saham. Peraturan Daerah ini pun dijadikan dasar

hukum penyertaan modal tahun sebelumnya pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.

Selain melakukan penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan, Tahun 2006 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyertaan modal pada Bank Syariah Bangka sebesar Rp. 600 juta dengan jumlah saham sebanyak 59.701 lembar saham. Dasar hukum dari penyertaan modal ini yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2006.

Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT.) Bangka Belitung Sejahtera, merupakan dasar hukum atas penyertaan modal pemerintah provinsi kepada BUMD PT. Bangka Belitung Sejahtera. Adapun investasi milik pemerintah ini sebesar Rp. 4 miliar dengan jumlah saham sebanyak 4.000 lembar. PT. Bangka Belitung Sejahtera didirikan pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT.) Bangka Belitung Sejahtera pada tanggal 30 Nopember 2005. Kemudian perusahaan ini pun berubah nama menjadi PT.Bumi Bangka Belitung Sejahtera melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Bangka Belitung Sejahtera.

Kemudian Tahun 2006, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 1 miliar tanpa disertai bukti kepemilikan saham PT. Riau Air Lines hanya berupa berita acara akta notaris. Satu tahun kemudian baru disahkan dasar hukum terhadap penyertaan modal ini sendiri berupa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Riau Air Lines.

Pada tahun yang sama dilakukan pula investasi kepada 2 (dua) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung. PDAM Kota Pangkalpinang mendapat penyertaan modal sebesar Rp.8.216.750.000 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2007 dan PDAM Kabupaten Belitung mendapat penyertaan modal sebesar Rp.731.250.000 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2007.

Melihat dividen yang diberikan, pada tahun 2008 dan 2009, Pihak Pemerintah Provinsi kembali menambah modalnya pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung. PT. BPR Syariah Babel sendiri merupakan perubahan nama dari Bank Syariah Bangka. Dalam rangka menyerap sumber dana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI CFR SK No. UHU-56914.AH.0102 Tahun 2009 Tanggal 20 November 2009 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan berganti nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung disingkat Bank Sumsel

Babel. Pada tahun 2010, pihak provinsi kembali melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung. Adapun rincian penyertaan modal dan jumlah dari tahun 2008 – 2010 sebagaimana tercantum pada tabel 4.9.

**Tabel 4.9**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun Anggaran 2008 – 2010**

Uraian	2008	2009	2010
1 PT.BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung	Rp 3.000.000.000	Rp -	Rp 8.000.000.000
Lembar saham	2.064		5.502
Dasar hukum	Perda No.12 Thn 2008		Perda No.12 Thn 2008
2. PT. BPR Syariah Babel	Rp 1.000.000.000	Rp 2.000.000.000	
Lembar saham	99.502	199.005	
Dasar Hukum	Perda No.11 Thn 2008	Perda No.3 Thn 2009	

Sumber : Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kep. Babel

Dilihat dari sisi manajemen keuangan masih lemahnya pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini tercermin dari ketidakpunningan bukti kepemilikan modal atau saham pemerintah pada beberapa perusahaan, pembelian saham di atas nilai buku serta masih rendahnya tingkat penerimaan terhadap hasil pengelolaan kekayaan daerah dan tak kalah penting adalah masih terdapat kesalahan pencatatan pada Laporan Realisasi APBD. Hal ini ditunjukkan tabel 4.10, 4.11 dan 4.12 Penyertaan modal dan pendapatan dividen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun anggaran 2003 – 2010 sebagaimana di bawah ini :

Tabel 4.10  
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
& Dividen yang diterima dari Bank Sumsel-Babel Bangka Belitung  
(dalam rupiah)

Tahun	Modal	Lembar saham	Harga Beli/lbr saham	Nilai Buku	Disagio	Deviden
2003	1.000.000.000	1000	1.000.000	1.000.000	0	80.988.427,00
2004	1.000.000.000	687	1.455.604	1.000.000	313.000.000	98.709.428,00
2005	1.000.000.000	688	1.453.488	1.000.000	312.000.000	137.018.941,21
2006	2.000.000.000	1375	1.454.545	1.000.000	625.000.000	260.372.329,79
2007					0	618.926.790,81
2008	3.000.000.000	2064	1.453.488	1.000.000	936.000.000	826.510.553,23
2009					0	1.309.360.059,41
2010	8.000.000.000	5502	1.454.017	1.000.000	2.498.000.000	2.450.463.809,00
Jumlah	16.000.000.000	11.316			4.684.000.000	5.782.350.338,45

Sumber : DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 4.10 menunjukkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung (BPD Sumsel-Babel) mengalami peningkatan dari tahun 2003 – 2010 sebanyak 11.316 saham dengan jumlah modal yang dikeluarkan sebesar Rp.16 miliar. Harga beli per lembar saham berflutuasi dan di bawah nilai buku yang berakibat terjadinya disagio bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2004 terjadi disagio sebesar Rp. 313 juta, tahun 2005 disagio sebesar Rp.312 juta, tahun 2006 kembali mengalami disagio sebesar 625 juta dan terus meningkat pada tahun 2008 dan 2010 yaitu sebesar Rp.936 juta dan sebesar Rp. 2,498 miliar. Total disagio atau kerugian yang dialami pemerintah sebagai akibat penyertaan modal sebesar Rp.4,684 miliar. Jumlah dividen yang diterima sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp.5,782 miliar atau terus mengalami kenaikan seiring bertambahnya jumlah saham milik pemerintah provinsi.

Gambaran investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. BPR Syariah Babel tergambar pada tabel 4.11 di bawah ini

**Tabel 4.11  
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
& Dividen yang Diterima dari PT. BPR Syariah Bangka Belitung**

Tahun	Modal	Lembar Saham	Nilai beli / lbr saham	Nilai Buku	Disagio	Deviden
2006	600.000.000	59.701	10.050	10.000	2.990.000	-
2007						59.701.000
2008	1.000.000.000	99.502	10.050	10.000	1.080.000	197.013.500
2009	2.000.000.000	199.005	10.050	10.000	9.050.000	462.187.400
2010						626.864.000
Jumlah	3.600.000.000	358.208			17.920.000	1.345.765.900

Sumber : DPPKAD Prov Kep. Bangka Belitung

Tabel 4.11 menceritakan jumlah penyertaan modal milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. BPR Syariah Bangka Belitung sebesar Rp. 3,6 miliar dengan saham sebanyak 358.208 lembar dan dividen yang diperoleh sampai tahun 2010 sebesar Rp. 1,345 miliar. Sama halnya dengan penyertaan modal pada Bank Sumsel Babel, dari penyertaan modal pada PT. BPR Syariah Bangka Belitung pun mengalami kerugian/disagio saham sebesar Rp.17,920 juta.

Pada tahun 2006 dilakukan penyertaan modal atau investasi yang dilakukan pada PT.Riau Air Lines sebesar Rp.1 miliar, namun sampai sekarang perusahaan ini hanya memberi kontibusi dividen pada tahun 2007 sebesar Rp.24.115.523,- hal ini sebagaimana dijelaskan dalam tabel 4.12.

**Tabel 4.12**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi**  
**Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Riau Air Lines**

Modal	Lembar Saham	Dividen	Tahun
Rp. 1.000.000.000	tidak ada	-	2006
		Rp. 24.115.523	2007

Sumber : DPPKAD Prov.Kep.Babel

Selain penyertaan modal tersebut di atas, terdapat beberapa penyertaan modal pada beberapa perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak pemerintah provinsi dan belum memberi kontribusi dividen sebagaimana tercantum pada tabel 4.13 di bawah ini.

**Tabel 4.13**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Yang Belum Ada Kontribusi Dividen**

Perusahaan	Modal	Lembar	Tahun
PT. Sumatera Shipping Lines	Rp. 100.000.000,-	tidak ada	2003
PT. Sumatera Promotion Centre	Rp. 100.000.000,-	tidak ada	2003
PT. Bangka Belitung Sejahtera	Rp. 4.000.000.000,-	tidak ada	2006
PDAM Kota Pangkajene	Rp. 8.216.750.000,-	tidak ada	2007
PDAM Kabupaten Belitung	Rp. 731.250.000,-	tidak ada	2007
Jumlah	Rp. 13.148.000.000,-		

Beberapa penyertaan modal sebagaimana tercantum pada tabel 4.13 tidak disertai kepemilikan dalam bentuk saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan perusahaan-perusahaan ini pun belum pernah memberi kontribusi baik berupa bagi hasil keuntungan maupun dividen. Total dana yang diinvestasikan ke perusahaan tersebut sebesar Rp. 13.148 juta

yang terdiri dari PT. Sumatera Shipping Lines sebesar Rp. 100 juta, PT. Sumatera Promotion Center sebesar Rp. 100 juta, PT. Bangka Belitung Sejahtera sebesar Rp. 4. Milyar, PDAM Kota Pangkalpinang sebesar Rp.8.216.750.000,- dan PDAM Kabupaten Belitung sebesar Rp. 731.250.000,-

Selain mendapat *return* berupa dividen terhadap investasi yang dilakukannya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun memperoleh *return* yang berasal dari giro dan deposito. Adapun jasa giro dan bunga deposito serta saldo masing-masing sebagaimana tercantum pada tabel 4.14 dan 4.15.

**Tabel 4.14  
Giro dan Jasa Giro Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
(dalam rupiah)**

Tahun	Giro Akhir Tahun	Jasa Giro
Smt I 2003	1.746.566.475	2.900.128.197
Smt II 2003	84.482.293.902	3.293.056.618
Smt I 2004	166.358.012.161	2.816.273.799
Smt II 2004	130.130.497.478	3.956.425.657
Smt I 2005	275.447.219.492	4.506.590.864
Smt II 2005	188.381.173.841	6.322.627.342
Smt I 2006	357.208.446.666	7.002.964.160
Smt II 2006	152.585.311.073	6.931.938.999
Smt I 2007	363.600.685.860	5.407.050.213
Smt II 2007	254.159.813.434	5.778.688.940
Smt I 2008	249.447.648.956	3.600.562.433
Smt II 2008	264.821.528.195	4.423.396.488
Smt I 2009	394.673.045.839	5.096.441.314
Smt II 2009	195.779.468.087	5.715.207.930
Smt I 2010	352.678.880.753	5.853.492.837
Smt II 2010	190.019.472.651	6.557.341.000
Jumlah	3.762.520.064.863	80.162.186.789
Rata-rata	235.157.504.054	5.010.136.674
Prosentase	6,25%	6,25%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Prov.Kep.Babel

Dilihat dari tabel tersebut di atas, bahwa jumlah giro dan jasa giro selama enam belas semesteran sejak tahun 2003 sampai dengan tahun berfluktuasi dengan

jumlah rata-rata giro sebesar Rp. 235.157.504.054 dan rata-rata jasa giro sebesar Rp. 5.010.136.674 atau sebesar 6,25%. Sedangkan jasa giro tertinggi di peroleh pada semester II tahun 2006 sebesar Rp.7.002.964.160,- dan jasa giro terendah sebesar Rp.2.816.273.799,- pada semester I tahun 2004.

**Tabel 4.15**  
**Deposito & Bunga Deposito Pemerintah**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
(dalam rupiah)

Tahun	Jumlah Deposito	Bunga Deposito
Smst I 2005	36.500.000.000	1.162.500.010
Smst II 2005	36.500.000.000	1.330.836.777
Smst I 2006	36.500.000.000	1.985.806.802
Smst II 2006	136.500.000.000	4.465.410.121
Smst I 2007	136.500.000.000	5.537.311.383
Smst II 2007	136.500.000.000	4.296.616.604
Smst I 2008	50.000.000.000	3.312.499.920
Smst II 2008	50.000.000.000	5.749.999.770
Smst I 2009	50.000.000.000	1.874.999.880
Smst II 2009	50.000.000.000	1.874.999.880
Smst I 2010	50.000.000.000	1.882.705.364
Smst II 2010	50.000.000.000	1.880.136.876
Jumlah	819.000.000.000	34.353.823.387
rata-rata	68.250.000.000	2.862.818.616

Sumber : Laporan Realisasi APBD Prov.Kep.Babel

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baru menempatkan dananya pada rekening deposito dimulai pada semester I tahun 2005 sebesar Rp.36,5 miliar. Jumlah deposito Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 sebesar Rp.50 miliar dengan rata-rata bunga deposito sebesar Rp. 2.862.818.616,-. Posisi jumlah deposito terbesar pada semester II tahun 2006 sampai dengan Semester II 2007 yaitu sebesar Rp.136,5 miliar, namun bunga deposito terbesar pada semester II 2008 sebesar Rp.5.749.999.770,-. Hal ini dimungkinkan karena adanya perubahan tingkat suku bunga.

Pada saat suku bunga mengalami kenaikan, harga saham mengalami penurunan. Tingkat suku bunga bebas risiko dapat diketahui melalui tingkat suku bunga bank Indonesia. Adapun data mengenai tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) periode 2003 sampai 2010 tercantum pada tabel 4.16.

**Tabel 4.16**  
**Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (Suku Bunga SBI)**  
**Jangka waktu 1 bulan sejak 2003-2010**

Tanggal dikeluarkan	Suku Bunga
11-Jun-03	10,07%
29 Desember 2003	8,31%
16 Juni 2004	7,31%
22 Desember 2004	7,43%
29 Juni 2005	8,25%
28 Desember 2005	12,75%
28 Juni 2006	12,50%
28 Desember 2006	9,75%
27 Juni 2007	8,50%
19 Desember 2007	8,00%
25 Juni 2008	8,73%
31 Desember 2008	10,83%
24 Juni 2009	6,95%
20 Desember 2009	6,46%
24 Maret 2010	6,32%
03 Desember 2010	6,50%

Sumber : Bank Indonesia

Dilihat dari tingkat Suku Bunga Bank Indonesia jangka waktu 1 bulan, suku bunga tertinggi pada tanggal 28 Desember 2005 sebesar 12,75% sedangkan tingkat suku bunga terendah pada tanggal 24 Maret 2010 sebesar 6,32%. Berbeda halnya dengan bunga deposito yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana bunga deposito tertinggi pada semester II 2008 pada saat tingkat suku bunga 10,83%.

b. *Analisis horizontal*

Analisis ini memberikan gambaran terhadap pertumbuhan asset dengan cara membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil *analisis horizontal* terhadap Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan dalam tabel L.6 pada lampiran 6 tulisan ini.

1) Analisis Trend (Pertumbuhan)

Dilihat dari rasio pertumbuhan, jumlah aset lancar tahun 2004 meningkat sebesar 35,07% dibandingkan tahun 2003, tahun 2005 meningkat sebesar 43,49% dibandingkan tahun 2004, tahun 2006 meningkat 14,82% dibanding tahun 2005, tahun 2007 meningkat sebesar 14,16% dibanding tahun 2006, tahun 2008 meningkat sebesar 15,74% dan tahun 2009 meningkat sebesar 12,85% dibanding tahun 2008 serta sebesar 10,90% meningkat pada tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan aset lancar pertahan selama 8 tahun adalah sebesar 21,43%.

Rasio pertumbuhan terbesar tahun 2004 pada piutang pajak, piutang retribusi dan persediaan yang meningkat sebesar 100% dibanding tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2005 terjadi penurunan persediaan sebesar -176,46% dibanding tahun 2004. Kas di kas daerah setiap tahun mengalami fluktuasi setiap tahun. Tahun 2004 sampai tahun 2005 terjadi peningkatan sebesar 35,08%, dan sebesar 30,92%, tetapi di tahun 2007 terjadi penurunan sebesar - 23,46%. Tahun 2007, 2008 kembali meningkat sebesar 39,96% dan 19,27% tetapi di tahun 2009 dan 2010 kembali mengalami penurunan sebesar -28,09% dan -2,40%. Rata-rata pertumbuhan kas di kas daerah selama 8 tahun sebesar 10,18% dan rata-rata pertumbuhan persediaan sebesar -58,90%.

Kas di bendahara pengeluaran yang seharusnya posisi nol pada akhir tahun, tetapi pada prakteknya tidak terwujud. Saldo nol terjadi pada tahun 2008, tetapi di tahun 2009 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 100%. Peningkatan ini disebabkan bendahara pengeluaran belum menyetor sisa uang persediaan. Selain itu terdapat belanja bantuan hibah, belanja dana bea siswa, dana BOP (Bantuan Operasional Provinsi) dan belanja modal barang yang belum disetor kepada pihak ketiga. Total kas pada bendahara pengeluaran sebesar Rp.18.350,27 juta. Peraturan peundang-undang mengamanatkan bahwa belanja dimaksud seharusnya langsung masuk ke rekening pihak ketiga bukan ke rekening bendahara pengeluaran. Ini menunjukkan kurangnya ketaatan pemerintah provinsi terhadap peraturan perundang-undangan. Tahun 2010 kas di bendahara pengeluaran mengalami penurunan yang fantatis yaitu sebesar – 4.344,46% tetapi tetap mensisakan saldo sebesar Rp.412,88 juta.

Penurunan tersebut disebabkan sisa uang persediaan telah di setor kembali ke kas daerah dan belanja hibah, bantuan dana beasiswa, dana BOP serta belanja modal barang telah di bayar kepada pihak yang berhak. Sisa dana sebesar Rp.412,88 juta merupakan sisa kas pada bendahara pengeluaran tahun 2010. Selain itu pada tahun 2007 kas di bendahara penerima mengalami peningkatan sebesar 100% sebagai akibat belum disetornya penerimaan tahun 2007 ke kas daerah sebesar Rp.700,01 juta.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicAirkan dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka pendek berupa deposito berjangka 3 bulan ini dilakukan pada tahun 2005 sehingga rata-

rata pertumbuhan investasi jangka pendek pemerintah provinsi meningkat sebesar 100% dan kembali mengalami peningkatan sebesar 73,26% tahun 2006. Investasi ini dilakukan dalam bentuk deposito jangka pendek 3 bulan, walaupun dalam prakteknya deposito ini terus diperpanjang secara terus menerus. Dilihat dari investasi jangka pendek baru pada tahun 2005 meningkat sebesar 100% dan tahun 2006 investasi deposito meningkat sebesar 73,26%, untuk tahun selanjutnya tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan terdapatnya kesalahan dalam pencatatan deposito dalam Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana digambarkan pada tabel 4.13. bahwa tahun 2005 jumlah deposito pemerintah provinsi sebesar Rp. 36,500 juta, tahun 2006 sebesar Rp.136,500 juta dan di tahun 2008 mengalami penurunan sebesar 63,37% dengan saldo deposito sebesar Rp. 50.milya.

Tahun 2008 biaya dibayar dinuka mengalami peningkatan sebesar 100% karena adanya pembayaran uang muka proyek *multiyears* sebesar Rp.14.087 juta dan kembali meningkat sebesar 24,85 % di tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar – 105.861,73 juta, karena telah selesainya beberapa proyek *multiyears*. Investasi non permanen baru meningkat sebesar 0,23% dibanding tahun 2007, dan 0,21% dibanding tahun 2008 serta 0,09% dibanding tahun 2009. Sedangkan investasi permanen mengalami pertumbuhan 43,48% pada tahun 2004, 28,13% pada tahun 2005, 70,37% pada tahun 2006, 45,31% pada tahun 2007, 16,84% pada tahun 2008, 4,42% pada tahun 2009 serta 22,35% pada tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 32,98%.

Secara keseluruhan jumlah aset mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, baik aset lancar maupun aset lainnya. Penurunan terjadi pada aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerajan, dimana pada tahun 2004 terjadi penurunan aset tetap lainnya sebesar -62,30% dan -872,98% pada tahun 2006. Demikian pula halnya dengan kontruksi dalam pengerajan sebesar -91,06% dan -315,29%. Penurunan aset terbesar yaitu aset tetap lainnya dengan penurunan rata-rata sebesar -114,71%, dan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2006 pada alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, buku perpustakaan, barang bercorak seni dan hewan termak dan tanaman. Penurunan rasio pertumbuhan pada aset tetap lainnya yang terjadi pada selama 1(satu) menunjukkan masih lemahnya manajemen aset pada pemerintah provinsi yang menyebabkan aset tetap lainnya milik pemerintah provinsi berkurang atau hilang, karena laporan arus kas pada tahun 2006, tidak menggambarkan aliran masuk yang berasal dari penjualan aset.

Tahun 2007 terjadi kenaikan tagihan penjualan angsuran sebesar 100% karena adanya penjualan rumah dinas, kendaraan dinas dan barang inventaris secara kredit dan di tahun 2008 – 2010 terdapat penurunan tagihan penjualan angsuran sebesar -14,81%, -15,11% dan -18,62% karena adanya pelunasan atas penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas. Saldo akhir tagihan penjualan angsuran tahun 2010 sebesar Rp.169,69 juta.

Total pertumbuhan kewajiban jangka pendek berfluktuasi, pada tahun 2004 terjadi kenaikan sebesar 100%, dan pada tahun 2005 terjadi kenaikan namun kenaikan tersebut tidak signifikan seperti tahun 2004 yaitu sebesar 32,15%. Di

tahun 2006-2007 kewajiban lancar mengalami penurunan karena adanya perlunasan utang pajak dengan rasio sebesar -4,90% dan -203,01% dan pada tahun 2009 terdapat penurunan utang jangka pendek sebesar -42,69%. Kenaikan terjadi pada tahun 2008 pada pos utang jangka pendek lainnya sebesar 82,96% dan 2010 sebesar 39,96%.

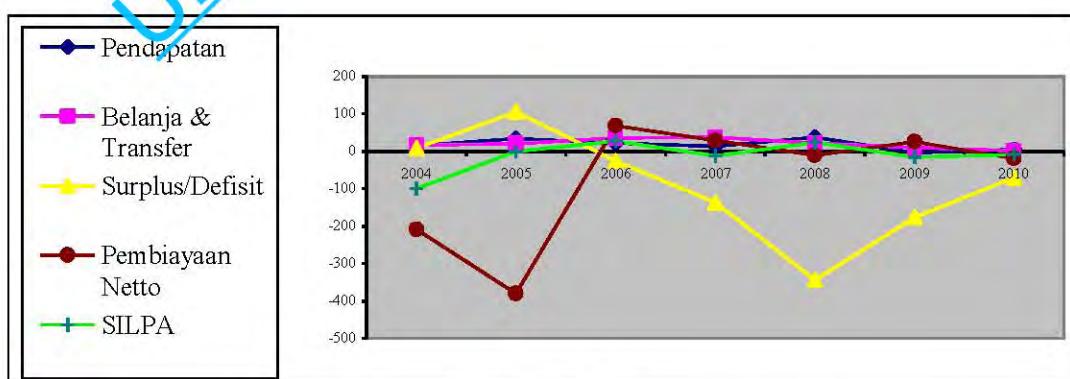
Secara kuantitatif jumlah kewajiban jangka pendek mendominasi jumlah kewajiban dengan rata-rata rasio proporsi sebesar 87,50% sedangkan sampai dengan sekarang kewajiban jangka panjang tidak dimiliki pemerintah provinsi sehingga dilihat dari rasio proporsi kewajiban dibandingkan dengan jumlah kewajiban dan equitas, proporsi hutang hanya sebesar 0,96%.

Penurunan terbesar dari rasio pertumbuhan *equitas* terjadi pada tahun 2006 sebesar -415,86 % karena adanya pendanaan yang diperoleh dari SILPA, cadangan piutang dan harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sedangkan pada tahun 2007 dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek mengalami penurunan sebesar -203,01%, dan tahun 2008 cadangan persediaan mengalami penurunan sebesar -525,50%. Dilihat dari ekuitas dana lancar, pada tahun 2004 ekuitas mengalami rasio kenaikan sebesar 11,33% dan sebesar 14,30% pada tahun 2005 serta sebesar 15,69% pada tahun 2008. Namun kenaikan tidak terjadi di tahun yang lain seperti tahun 2006 rasio ekuitas mengalami puncak penurunan yaitu -415,86%, 2007 sebesar -10,51%, 2009 sebesar -9,81% dan -27,87% pada tahun 2010.

Ekuitas dana dalam investasi jangka panjang pada tahun 2004 – 2005 tidak mengalami perkembangan, sementara pada tahun 2006 terjadi kenaikan sebesar

100% karena Pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan investasi berupa penyertaan modal pada beberapa perusahaan seperti Bank Sumsel-Babel sebesar Rp. 2 milyar, PT. BPR Syariah Babel sebesar Rp. 600 juta dan Rp. 1.milyar pada PT. Riau Air Lines serta sebesar Rp. 4 miliar pada PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Dilihat dari analisis *horizontal*, *equitas* dana investasi selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dimulai tahun 2006, baik itu *equitas* dalam investasi jangka panjang maupun diinvestasikan dalam aset tetap rata-rata sebesar 21,42%. Demikian pula secara keseluruhan kewajiban dan *equitas* dana mengalami rasio pertumbuhan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010.

Tabel L.7 pada lampiran 7 menggambarkan analisis *horizontal* Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2003-2010. Rasio pertumbuhan diukur melalui rasio perbandingan dengan tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan pendapatan, belanja dan transfer, surplus dan defisit, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta SILPA tergambar pada gambar 4.7 di bawah ini.



Gambar 4.7  
Diagram Garis Analisis Pertumbuhan Realisasi APBD  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003-2010

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja dan transfer setiap tahun tidak lebih dari 40%, sedangkan rasio pertumbuhan surplus dan defisit, mengalami peningkatan kurang dari 106,61% dan penurunan lebih dari 300% atau sebesar -343,90%. Sama halnya dengan pembiayaan netto dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dimana pembiayaan netto naik tidak lebih dari 68,10% dan penurunan sebesar -379,49% dan SILPA naik sebesar 27,84% serta turun lebih dari 100%.

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah sendiri rata-rata pertahun sebesar 27,61%. Rasio pertumbuhan terbesar pada tahun 2005 sebesar 64,51% dan terkecil tahun 2009 sebesar -16,11%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan asli daerah sendiri mengalami fluktuatif setiap tahun. Tingginya pertumbuhan pada tahun 2005 dibanding tahun 2004 disebabkan terdapat peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 122,70% oleh adanya pendapatan bunga deposito dan kenaikan penerimaan jasa giro. Sedangkan pada tahun 2009 rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun 2008 karena adanya penurunan terhadap pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jumlah rasio pertumbuhan transfer dana perimbangan dari tahun 2004-2006 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya tetapi di tahun 2010 rasio pertumbuhan mengalami penurunan. Pertumbuhan pendapatan transfer dana perimbangan tahun 2004 naik sebesar 3,15% dibandingkan tahun 2003, dan tahun 2005 naik sebesar 17,65% dibanding tahun 2004, kemudian di tahun 2006 kembali meningkat sebesar 36,03% dari tahun 2005. Tahun 2007 pertumbuhan

transfer dan dana perimbangan sebesar 20,93% atau lebih kecil dibandingkan pertumbuhan dari tahun 2006. Tahun 2008 pertumbuhan tersebut kembali meningkat sebesar 34,36% dibanding tahun 2007, tahun 2009 rasio pertumbuhan naik sebesar 2,19% tetapi di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -6,92%.

Jumlah kenaikan terbesar dari pendapatan transfer pada tahun 2006 sebesar 36,03% karena adanya kenaikan dana alokasi umum yang sebelumnya sebesar Rp.187.358 juta menjadi Rp. 275.690 juta. Sedangkan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam mengalami penurunan. Rasio pertumbuhan sendiri mengalami penurunan di tahun 2010 disebabkan adanya penurunan bagi hasil pajak dan dana alokasi umum. Dilihat dari rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 15,34% pertahun. Lain - lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan negatif sejak tahun 2003 sampai tahun 2006, dari tahun 2007 dan sampai sekarang tidak mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan belanja dan transfer selalu mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2004 terjadi kenaikan sebesar 16,61% dibanding tahun 2003, demikian pula tahun 2005 terjadi kenaikan sebesar 21,10%, tahun 2006 sebesar 36,19% dan tahun 2007 sebesar 37,34%. Di tahun 2008-2010 tetap terjadi kenaikan pertumbuhan walaupun kenaikan tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 sebesar 21,83% dan tahun 2009 sebesar 10,18% kemudian di tahun 2010 sebesar 0,99%.

Pertumbuhan belanja operasi mengalami kenaikan signifikan yaitu pada 2007 sebesar 121,18% dan mengalami penurunan di tahun 2010 sebesar -24,28%. Di tahun 2008 tetap mengalami kenaikan belanja operasi tetapi tidak sebesar

tahun 2007. Kenaikan belanja operasi pada tahun 2008 sebesar 38,30%, hal ini disebabkan adanya penurunan belanja bantuan sosial sejak tahun 2008 – 2010 yaitu sebesar -37,74%, -37,40% dan 37,47%. Untuk belanja pegawai sejak tahun 2005-2010 selalu mengalami kenaikan yaitu sebesar 5,91% pada tahun 2005, sebesar 19,41% pada tahun 2006, dan kenaikan terbesar sebesar 75,68% tahun 2007. Tahun 2008-2010 belanja operasi mengalami kenaikan sebesar 43,37%, 4,69% dan 8,50%. Belanja hibah pada tahun 2008 naik sebesar 160,44% dan 26,90% di tahun 2009, tetapi di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -83,14%.

Besarnya rasio pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2007 disebabkan adanya kenaikan belanja pegawai berupa kenaikan tambahan penghasilan. Sedangkan penurunan rasio pertumbuhan belanja operasi pada tahun 2010 disebabkan adanya penurunan belanja hibah -83,14% dan belanja bantuan sosial sebesar -37,47%. Rata-rata kenaikan belanja operasi pertahun sebesar 28,27% dengan rasio pertumbuhan belanja pegawai sebesar 21,10%, belanja barang 23,01%, belanja subsidi sebesar 3,71%, belanja hibah sebesar 14,89% dan penurunan pada belanja bantuan sosial sebesar -16,09%.

Rasio pertumbuhan belanja modal mengalami perkembangan setiap tahun dari tahun 2005-2010 kecuali tahun 2003. Pertumbuhannya belanja modal tahun 2004 lebih kecil dari tahun 2003 yaitu sebesar -5,08%. Tahun 2005 rasio pertumbuhan lebih tinggi sebesar 28,30% dari tahun 2004, dan 22,96% tahun 2006 lebih besar dari tahun 2005 pada pos belanja modal tanah, tahun 2007 naik sebesar 36,66%, tahun 2008 naik sebesar 20,92%, tahun 2009 naik sebesar 1,25%

dan tahun 2010 naik sebesar 31,60% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,51%.

Penurunan rasio pertumbuhan belanja modal pada tahun 2004 disebabkan adanya penurunan belanja modal. Sedangkan rasio pertumbuhan terbesar di tahun 2007 bukan keseluruhan disebabkan adanya kenaikan belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya sebesar 100%, tetapi akibat perbedaan pencatatan dalam penyusunan laporan realisasi APBD pada tahun 2007 sejak izhirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2005 secara total terlihat belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar 28,30% namun dilihat dari pos belanja modal terjadi penurunan sebesar 100%, demikian halnya dengan belanja modal tahun 2007 naik sebesar 36,66% tetapi dilihat dari masing-masing pos belanja terjadi penurunan pada belanja modal tanah sebesar -26,72%, serta kenaikan sebesar 100% pada pos belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Fenomena ini diakibatkan terjadi perbedaan dalam penyusunan laporan realisasi APBD, dan kurang konsistensinya Pemeritah Provinsi terhadap standar akutansi.

Tahun 2008 terjadi kenaikan hampir disemua pos belanja kecuali belanja irigasi dan jaringan turun sebesar -14,27%. Belanja tanah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 251,55%, belanja peralatan dan mesin sebesar 95,30%, belanja gedung dan bangunan 109,42% serta belanja aset

tetap lainnya sebesar 1,82%. Tahun 2009 terjadi penurunan belanja peralatan dan mesin sebesar -69,56% dan belanja aset tetap lainnya sebesar -52,12%. Sedangkan belanja tanah naik sebesar 108,34%, belanja gedung dan bangunan sebesar 15,97% dan belanja irigasi dan jaringan sebesar 7,84%.

Dilihat dari tahun 2008 – 2009, belanja tanah mengalami kenaikan yang cukup besar, namun di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar -30,41%. Kenaikan terbesar pada belanja gedung dan bangunan sebesar 139,50%, untuk peralatan dan mesin naik sebesar 10% serta belanja irigasi dan jaringan naik sebesar 1,06% sementara belanja aset tetap lainnya turun sebesar pada tahun 2010 sebesar -94,88% .

Belanja tak terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak dilakukan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup. Rasio pertumbuhan belanja tak terduga pada tahun 2004 sangat tinggi yaitu sebesar 350,54%, tetapi di tahun 2005 terjadi penurunan sebesar -91%, dan meningkat di tahun 2006 sebesar 476,53%, tahun 2007 naik sebesar 131,50% serta tahun 2010 naik sebesar 79,83%. Untuk tahun 2008 terjadi penurunan sebesar - 100% dan di tahun 2009 tidak mengalami pertumbuhan. Fluktuasi rasio pertumbuhan belanja tak terduga disebabkan belanja tak terduga dikeluarkan secara temporer untuk keadaan yang mendesak.

Bagi hasil pajak ke pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa pun setiap tahun dari tahun 2003-2010 mengalami pertumbuhan turun naik.

Peningkatan terbesar tahun 2004 sebesar 73,71% dibanding tahun 2003, tahun 2005 meningkat sebesar 25,05%, diikuti tahun 2006 sebesar 48,32%. Tahun 2007 dan 2008 turun sebesar -30,47% dan sebesar -16,99%, tetapi setahun kemudian tahun 2009 kembali meningkat sebesar 28,59% dan tahun 2010 sebesar 38,39%.

Rasio pertumbuhan rata-rata bagi hasil pajak ke kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar 23,72% pertahun dengan rasio tertinggi sebesar 73,17% pada tahun 2003 dan rasio terendah sebesar -30,47%. Rasio pertumbuhan belanja dan transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,01% pertahun, dengan rasio tertinggi pada tahun 2007 sebesar 37,34% sebagai akibat kenaikan belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Rasio terendah sebesar 0,99% pada tahun 2010 dikarenakan adanya penurunan belanja operasi.

Dilihat dari rata-rata surplus dan defisit, maka Pemerintah Provinsi lebih sering mengalami defisit dari pada surplus. Rasio pertumbuhan menunjukkan rata-rata defisit pemerintah provinsi setiap tahun sebesar -91,33%. Surplus hanya terjadi pada tahun 2004 dan 2005 dengan rasio pertumbuhan sebesar 8,70% dan 106,61%. Di tahun 2006 – 2010 rasio pertumbuhan surplus dan defisit selalu cenderung mengalami penurunan atau negatif. Tahun 2006 turun sebesar -26,63%, tahun 2007 turun sebesar -137,51%, tahun 2008 turun sebesar -343,90%, tahun 2009 turun sebesar -176,29% dan di tahun 2010 turun -70,27%. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2008, hal ini disebabkan adanya reorganisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru, serta terdapat pembangunan beberapa

proyek *multiyears* sehingga memerlukan pendanaan yang cukup besar bagi untuk biaya operasi dan biaya modal.

Penerimaan pembiayaan mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2004 – 2007 serta tahun 2009, sementara tahun 2008 dan 2010 mengalami pertumbuhan negatif. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pembiayaan tahun 2004 sebesar 62,93%, tahun 2005 sebesar 53,25%, tahun 2006 sebesar 72,60% dan tahun 2007 sebesar 27,84% serta di tahun 2009 sebesar 23,89%. Penurunan pertumbuhan tahun 2008 sebesar -12,23% dan tahun 2010 -16,29%.

Rasio pertumbuhan penerimaan pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2006 sebesar 72,60% dan rasio terendah sebesar -16,29 pada tahun 2010. Rasio penerimaan pembiayaan sebagai akibat adanya kenaikan penerimaan pembiayaan yang diperoleh dari surplus pada tahun tersebut sebesar Rp. 70.791,82 juta. Rasio pertumbuhan mengalami penurunan karena adanya penggunaan SILPA untuk menutup defisit yang terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp.49.416,14 juta.

Disisi pertumbuhan pengeluaran pembiayaan terlihat lebih tinggi dari rasio penerimaan pembiayaan yang rata-rata sebesar 30,28%. Sedangkan rata-rata rasio pertumbuhan pengeluaran pembiayaan sebesar 296,25%. Rasio pertumbuhan tahun 2004 sebesar 1250,24%, tahun 2005 turun sebesar -99,25%, tahun 2006 sebesar 660%, tahun 2007 sebesar 17,74%, tahun 2008 kembali turun sebesar -55,30%, tahun 2009 kembali turun -50% dan tahun 2010 kembali naik 350,34%.

Rasio pertumbuhan pengeluaran pembiayaan terbesar pada tahun 2004 sebesar 1250,24% disebabkan adanya perbedaan pencatatan pada tahun 2003 dan

2004 dengan tahun yang akan datang serta kenaikan Silpa tahun berkenaan pada tahun 2004. Rasio pertumbuhan pengeluaran pемbiayaan mengalami penurunan sebesar -55,30% pada tahun 2008 karena adanya penurunan penyertaan modal pemerintah provinsi dibanding tahun sebelumnya.

Sejak tahun 2003-2010 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan investasi pada beberapa perusahaan namun dilihat dari rasio pertumbuhan penyertaan modal pemerintah daerah tersebut tahun 2004 turun -23,08%, tahun 2005 tidak mengalami pertumbuhan, tahun 2006 sebesar 660%, tahun 2007 sebesar 17,74%, tahun 2008 sebesar -55,30%, tahun 2009 sebesar -50% dan tahun 2010 sebesar 300%.

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Rasio pertumbuhan pembiayaan netto berfluktuasi setiap tahun. Di tahun 2004 rasio pertumbuhan sebesar -208,96%, tahun 2005 sebesar -379,49%, tahun 2006 sebesar 68,10%, tahun 2007 sebesar 28,19%, tahun 2008 sebesar -10,86%, tahun 2009 sebesar 25,07% dan tahun 2010 sebesar -18,63%. Demikian pula sisi SILPA pun rasio pertumbuhan mengalami fluktuasi, tahun 2004 sebesar -100%, tahun 2005 stagnasi, tahun 2006 naik sebesar 27,84%, tahun 2007 turun sebesar -12,23%, tahun 2008 kembali naik sebesar 23,86%, tahun 2009 turun sebesar -16,27% dan tahun 2010 turun sebesar -8,97%.

## 2) Analisis Varian (Perbandingan Realisasi dan Anggaran)

Analisis perbandingan bertujuan untuk melihat perbandingan sejauh mana anggaran telah dilaksanakan dan mengetahui keberhasilan Pemerintah.

**Tabel 4.17**  
**Analisis Perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003 - 2010**

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rasio rata-rata
Pendapatan									
Pendapatan Asli Daerah									
Pendapatan Pajak Daerah	108	136	125	103	91	117	90	111	110
Pendapatan Retribusi Daerah	127	89	58	87	111	202	182	106	120
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	0	180	312	172	83
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	149	163	339	167	188	271	215	99	199
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	111	138	131	108	99	125	97	110	115
Pendapatan Transfer									
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dana Bagi Hasil Pajak	184	175	226	216	202	121	109	119	169
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	127	353	152	224	146	92	112	151
Dana Alokasi Umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Dana Alokasi Khusus	100	0	0	0	0	90	100	100	49
Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan	109	106	119	108	113	107	100	103	108
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya									-
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	45	6
Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	61	8
Lain-Lain Pendapatan yang sah	0	0	100	0	0	0	0	0	13
Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah	103	0	100	0	0	0	0	0	25
Jumlah Pendapatan	109	117	124	108	108	113	99	105	110

Sumber : Laporan Realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 4.17 menggambarkan analisis perbandingan realisasi dan anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Rata-rata rasio perbandingan antara realisasi

pendapatan asli daerah dan anggaran sebesar 115%, menunjukkan terjadinya over target pada pendapatan asli daerah sebesar 15%. Over target terjadi apabila realisasi pendapatan melebihi anggaran.

Rasio pendapatan asli daerah melampaui anggaran terjadi pada tahun 2003– 2006, 2008 dan 2010. Over target terbesar terjadi pada tahun 2005 sebesar 131% dan pada tahun 2007 dan 2009 realisasi pendapatan di bawah target atau menurunnya kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan asli daerah. Rasio perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan anggaran tahun 2007 sebesar 99% dan sebesar 97% pada tahun 2009.

Dilihat secara rata-rata pertahun pendapatan asli daerah melebihi anggaran, tetapi pada pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih di bawah target atau sebesar 83%, sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki rata-rata sebesar 199% pertahun atau over target. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 312%. Hal ini disebabkan kecilnya anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah. Anggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2009 disusun sama dengan tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 568,42 juta, sedangkan realisasi untuk tahun 2008 sebesar Rp. 1.023,52 juta dan modal yang diinvestasikan sebesar Rp. 28.690,93 juta atau 31,17% lebih besar dibandingkan tahun 2007 dilihat dari analisis pertumbuhan. Dilihat dari analisis proporsi realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah tahun 2009

hanya sebesar 0,72% dari pendapatan asli daerah. Ini membuktikan masih lemahnya pemerintah dalam menyusun anggaran.

Ditinjau dari analisis perbandingan realisasi dan anggaran, lain-lain pendapatan asli daerah pada tahun 2008 mengalami over target yang cukup signifikan atau sebesar 271%. Analisis vertikal dan horizontal pada tahun 2008 menunjukkan bahwa rasio proporsi lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 72,34% dari pendapatan asli daerah dan rasio pertumbuhan sebesar 3,76% dari tahun 2007. Pada kenyataannya meningkatnya rasio tersebut karena anggaran tahun 2008 lebih kecil dibandingkan tahun 2007. Jumlah anggaran lain-lain pendapatan asli daerah tahun 2007 sebesar Rp. 15.432 juta sedangkan anggaran tahun 2008 sebesar Rp. 11.095,- juta.

Pendapatan transfer dana perimbangan jika dibandingkan dengan anggaran memiliki nilai perbandingan terbesar pada tahun 2005 sebesar 119% dan terkecil tahun 2010 sebesar 103% serta rata-rata sebesar 108%. Over target tersebut terjadi karena adanya peningkatan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Dilihat dari analisis vertikal rasio pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 56,56%. Dilihat dari rasio horizontal pendapatan transfer dana perimbangan sebesar 17,65% atau pertumbuhannya lebih kecil dari pendapatan asli daerah tahun tersebut.

Dana alokasi umum secara umum mengalami perbandingan yang tetap dengan anggaran atau sebesar 100%, karena pada saat penyusunan anggaran telah diberitahu jumlah dana alokasi umum yang diterima masing-masing daerah oleh Dirjen Keuangan Daerah. Dana alokasi khusus sendiri memiliki rata-rata rasio

perbandingan yang kecil karena dana alokasi umum hanya disalurkan pada tahun 2003, 2008, 2009 dan 2010.

Dana pendapatan transfer lainnya memiliki rasio perbandingan terkecil dibandingkan anggaran sebesar 61% pada tahun 2010 dan lain-lain pendapatan yang sah mempunyai rasio sebesar 100% pada tahun 2005. Ditahun lainnya tidak ada anggaran maupun realisasi yang diperoleh dari kedua elemen pendapatan tersebut. Jumlah rata-rata rasio realisasi pendapatan dibandingkan anggaran sebesar 110% pertahun.

UNIVERSITAS TERBUKA

**Tabel 4.18**  
**Analisis Perbandingan Realisasi dan Anggaran Belanja & Pembiayaan**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003 - 2010**

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rasio Rata-rata
Belanja									
Belanja Operasi									
Belanja Pegawai	70	69	84	79	81	77	87	89	80
Belanja Barang	72	77	71	78	64	69	81	81	74
Belanja Bunga									-
Belanja Subsidi							99	83	23
Belanja Hibah					100	120	72	75	46
Belanja Bantuan Sosial					100	83	95	71	44
Bantuan Keuangan					0	0	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>37</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>84</b>	<b>57</b>
Belanja Modal	88	71							20
Belanja Tanah			88	85	2	0	0	100	34
Belanja Peralatan & Mesin						253	38	37	41
Belanja Gedung & Bangunan						99	401	83	73
Belanja Irigasi & Jaringan						157	99	82	42
Belanja Asset Tetap lainnya						4	1	35	5
Belanja Asset Lainnya						0	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>88</b>	<b>71</b>	<b>88</b>	<b>85</b>	<b>69</b>	<b>80</b>	<b>64</b>	<b>79</b>	<b>78</b>
Belanja Tak Terduga	13	46	3	19	43	0	27	90	30
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>13</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>90</b>	<b>30</b>
Transfer									-
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa	97	92	84	87	84	83	84	86	87
Jumlah Transfer Bagi hasil Pendapatan ke Kab/Kota	97	92	84	87	84	83	84	86	87
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>81</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>83</b>	<b>71</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>-121</b>	<b>-56</b>	<b>-242</b>	<b>-217</b>	<b>-30</b>	<b>-116</b>	<b>15,8</b>	<b>6</b>	<b>(95)</b>
Pembiayaan									
Penggunaan SILPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Pengeluaran Pembiayaan									
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100	100	10	40	90	100	100	100	80
Silpa Tahun berkenaan			6576						822
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>755</b>	<b>4417</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>38</b>	<b>694</b>
Pembiayaan Netto	83	-56	107	106	100	100	100	106	81
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	539	0	475	244	-4915	891	0	0	(346)

Sumber : laporan Realisasi APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Analisis perbandingan antara realisasi dengan anggaran menunjukkan secara total belanja dan transfer memiliki rata-rata rasio sebesar 71% atau tidak

melampaui anggaran. Rasio terbesar pada tahun 2010 sebesar 83% dan terendah sebesar 61% pada tahun 2009. Rendahnya rasio perbandingan antara belanja dan anggaran menunjukkan ketataan pemerintah provinsi terhadap peraturan karena realisasi belanja tidak diperkenakan melebihi plafon anggaran. Selain itu hal ini dapat menggambarkan dua kejadian, pertama terjadinya efisiensi pada setiap belanja dan yang kedua terdapat kegiatan atau pekerjaan yang tidak selesai.

Rata-rata rasio perbandingan belanja operasi dan anggaran sebesar 57% dengan rasio tertinggi pada tahun 2010 sebesar 84% dan rasio terendah sebesar 37% pada tahun 2005. Tahun 2010, meskipun realisasi belanja tidak melampaui anggaran, tetapi penyerapan belanja operasi yang memiliki rasio tertinggi adalah belanja pegawai sebesar 89% atau hampir optimal. Dilihat dari analisis vertikal dan horizontal, maka rasio proporsi belanja operasi sebesar 42,51% dari total belanja dan transfer sedangkan rasio pertumbuhan negatif dari tahun 2009 atau mengalami penurunan sebesar -24,28%.

Belanja modal dilihat dari analisis perbandingan realisasi dengan anggaran menunjukkan rasio sebesar 78% artinya dari anggaran yang disediakan guna kebutuhan belanja modal, dana yang terserap hanya 78%. Secara rata-rata penyerapan dana belanja modal masih rendah, akan tetapi dilihat pada rasio perbandingan pos peralatan dan mesin pada tahun 2008 sebesar 253%, belanja gedung dan bangunan tahun 2009 sebesar 401% serta belanja irigasi dan jaringan tahun 2008 sebesar 157% atau melampaui plafon anggaran.

Tingginya belanja modal tersebut dibandingkan dengan anggaran, menunjukkan lemahnya pengendalian intern mulai dari level bawah sampai ke

level atas. Tidak adanya kontrol pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), kuasa pengguna anggaran, Bagian verifikasi dan perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga terjadinya pemborosan pada pos belanja tersebut. Ini juga menunjukkan ketidaktaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dan rendahnya kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari penyusunan anggaran maupun dalam pengelolaan belanja.

Hal yang sama pun terjadi pada pos surplus/defisit, dimana tahun 2003 rasio perbandingan dengan anggaran sebesar -121%, tahun 2005 sebesar -242%, tahun 2006 sebesar -217% dan tahun 2008 sebesar -116%. Rata-rata rasio perbandingan penerimaan pemberian setiap tahun 100% dikarenakan penerimaan ini merupakan penerimaan atas SILPA tahun sebelumnya. Ini disebabkan dalam kesalahan dalam penyusunan anggaran yang memperkirakan terjadinya defisit anggaran setiap tahun, tetapi pada pelaksanaan terjadi surplus. Defisit terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp.14.690,64. Juta.

Realisasi pengeluaran pemberian tahun 2003 dan 2004 melebihi anggaran karena adanya pencatatan SILPA tahun berkenaan. Pada tahun 2004 rasio perbandingan pemberian netto mengalami angka fantastis atau sebesar - 56% sebagai akibat ketidaktepatan perencanaan. Direncanakan pada tahun tersebut pemberian netto mengalami surplus tetapi pada praktek, realisasi menunjukkan terjadinya defisit pemberian netto. Demikian pula halnya rasio perbandingan sisanya lebih pemberian anggaran (SILPA) Tahun 2007 sebesar -4.915, karena hasil

perhitungan dianggarkan SILPA Tahun 2007 sebesar minus Rp.7.494,27 juta, dan realisasi menunjukkan pada tahun tersebut SILPA sebesar Rp.368.368,51.

Fenomena di atas, menunjukkan masih rendahnya tingkat kinerja pemerintah provinsi dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan belanja, walaupun dilihat dari sisi rasio perbandingan pendapatan melebihi anggaran, tetapi dilihat dari realisasi belanja, masih rendahnya capai kinerja yang ditetapkan. Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007:101) “Analisis rasio realisasi belanja 100% menunjukkan ketataan pada peraturan. Sementara rata-rata tingkat penyerapan adalah lebih 90%, hal ini menunjukkan tingkat penyerapan dana yang optimal.”

Hasil analisis perbandingan Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan masih rendahnya kinerja keuangan. Pencapaian over target disebabkan karena karena anggaran yang disusun terlalu rendah dan tidak memperhatikan anggaran sebelumnya dan perkembangan ekonomi daerah. Dilihat dari rata-rata rasio belanja operasi sebesar 57% dan belanja modal sebesar 78% menggambarkan tingkat penyerapan dana yang belum optimal.

a. Analisis Rasio

1) Ratio likuiditas

Rasio ini menunjukkan bagaimana tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Rasio likuiditas yang digunakan oleh peneliti dalam analisis keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah *current ratio*, rasio cepat dan rasio kas.

a) *Current ratio*

Current rasio didapat dengan cara membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Dilihat dari tabel 4.19 di bawah menunjukkan tingginya *current ratio* pemerintah provinsi, hal ini menunjukkan kesanggupan pemerintah provinsi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Namun demikian, hal ini sangat berbeda dengan sektor swasta, walaupun memiliki *current ratio* yang tinggi, jika kewajiban jangka pendek tersebut tidak dianggarkan dalam APBD, sulit bagi pihak ketiga untuk memperoleh perlunasan. Gambaran *Current ratio* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditunjukkan dalam tabel 4.19 di bawah ini.

Tabel 4.19  
Analisis *Current Ratio*

Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar	<i>Current Ratio</i>
2003	85.822,13	0	0%
2004	122.171,15	12.962,05	1020%
2005	235.904,41	19.104,16	1224%
2006	306.024,14	18.211,41	1680%
2007	266.461,84	6.010,07	4434%
2008	344.210,78	35.279,59	976%
2009	306.056,17	24.724,41	1238%
2010	261.187,34	41.178,79	634%

Sumber : Neraca Pemerintah Prov.Kep. Babel, diolah

Melihat gambaran tersebut di atas bahwa rata-rata proporsi kas di kas daerah sebesar 85,79% dari aset lancar. Tinggi ratio *current asset* disebabkan terlalu besarnya aktiva lancar yang dimiliki, seperti kas, piutang, serta persediaan. Dilihat dari rasio aktiva lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar, Pemerintah Provinsi memiliki rasio sangat tinggi dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan rasio tertinggi pada tahun 2007 sebesar 4.434% dan

rasio terendah sebesar 634% pada tahun 2010. Rasio yang tinggi bukan disebabkan terlalu *liquid*, tetapi disebabkan rendahnya *current liabilities* pemerintah provinsi. Jumlah kewajiban dibanding dengan total asset tahun 2007 proporsi *current liabilities* pemerintah provinsi sebesar 0,32%, dan sebesar 1,53% tahun 2010, sementara proporsi *current asset* sebesar 14,2% tahun 2007 dan sebesar 91,90% tahun 2010.

Rendahnya kewajiban disebabkan pemerintah lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman daerah. Kewajiban lancar pemerintah provinsi terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga (PK), utang pajak dan utang jangka pendek lainnya. Tahun 2007 merupakan tahun tingkat kewajiban paling rendah atau sebesar Rp. 6.010,07 juta berupa utang pajak yaitu utang bagi hasil pajak ke kab/kota. Pada tahun 2010 jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp.41.178,79 juta berupa utang jangka pendek lainnya yang terdiri atas utang perhitungan pihak ketiga dan utang bagi hasil pajak.

Rasio *current asset* Tahun 2004 menunjukkan setiap rupiah kewajiban lancar dari pemerintah provinsi dapat dijamin sebesar 1.020% asset lancar, tahun 2005 – 2007 rasio kewajiban lancar yang dijamin aktiva lancar naik dengan nilai sebesar 1.224% pada tahun 2005, sebesar 1.680% tahun 2006 dan sebesar 4.434% tahun 2007. Pada tahun 2008 dan 2010 *current ratio* sebesar 976% dan 759% atau turun dari tahun sebelumnya, sedangkan *current ratio* tahun 2009 sebesar 1.238% atau naik dari tahun 2008. Gambaran tersebut menunjukan tingginya likuiditas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Proporsi *current asset* sebesar 14,2% terdiri kas di kas daerah sebesar Rp. 254,159,81 juta, kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 550,23 juta, kas di bendahara penerima sebesar Rp. 700,01 juta, piutang retribusi sebesar Rp. 393,98 juta, bagian lancar tagihan penjualan angsuran Rp. 191,48 juta, piutang lainnya sebesar Rp. 8.468,68 juta dan persediaan sebesar Rp. 1.997,65 juta. Proporsi aset lancar tahun 2010 terdiri kas di kas daerah sebesar Rp. 240.019,47 juta, kas di bendahara pengeluaran Rp. 412.879,68 juta, piutang pajak sebesar Rp. 90,15 juta, bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar Rp. 259,18 juta, bagian lancar tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 18.689,54 juta, piutang lain-lain sebesar Rp. 40,22 juta, persediaan sebesar Rp. 1.658,12 juta serta biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 17,69 juta.

Melihat proporsi aset lancar dari kedua tahun tersebut, dapat diketahui bahwa kas di kas daerah mendominasi jumlah aset lancar atau sebesar 95,38% pada tahun 2007 dan sebesar 91,90% pada tahun 2010. Menurut H.G Guthman bahwa jumlah kas yang ada di perusahaan yang “*well finance*” sebaiknya tidak kurang dari 5%-10% dari jumlah aktiva lancar. Kas merupakan modal kerja yang paling *liquid* akan tetapi apabila menyimpan terlalu besar menjadi tidak produktif dan mengandung risiko. Pentingnya manajemen kas yang efektif bagi pemerintah daerah guna memperkecil risiko tanpa mengorbankan likuiditas pemerintah daerah.

Melihat gambaran tersebut bahwa proporsi kas di kas daerah sendiri sebesar 95,4% dari aset lancar. Tinggi ratio *current asset* disebabkan terlalu besarnya aktiva lancar yang dimiliki, seperti kas, piutang, serta persediaan. Rasio

*current asset* Tahun 2004 menunjukkan setiap rupiah kewajiban lancar dari pemerintah provinsi dapat dijamin sebesar 1.020% asset lancar, tahun 2005 – 2007 rasio kewajiban lancar yang dijamin aktiva lancar naik dengan nilai sebesar 1.224% pada tahun 2005, sebesar 1.680% tahun 2006 dan sebesar 4.434% tahun 2007. Pada tahun 2008 dan 2010 *current ratio* sebesar 976% dan 759% atau turun dari tahun sebelumnya, sedangkan *current ratio* tahun 2009 sebesar 1.238% atau naik dari tahun 2008. Gambaran tersebut menunjukkan tingginya likuiditas yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b) Rasio cepat (*quick ratio atau acid test ratio*)

Analisis *quick ratio* sama halnya dengan *current ratio*, tetapi rasio ini hanya membandingkan aset yang sangat likuid dengan utang lancar. Sebagaimana tercermin dalam tabel 4.20 di bawah ini.

Tabel 4.20  
Analisis *Quick Ratio*

Tahun	<i>Quick Assets</i>	<i>Current Liabilities</i>	<i>Quick Ratio</i>
2003	85.822,13	0	0%
2004	131.884,71	12.962,1	1017%
2005	227.650,80	19.104,2	1192%
2006	290.247,56	18.211,4	1594%
2007	264.464,19	6.010,1	4400%
2008	343.891,41	35.279,6	975%
2009	302.974,00	24.724,4	1225%
2010	259.529,22	41.178,8	630%

Sumber : Neraca Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Rasio cepat ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar hutang jangka pendek Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari aset-aset yang sangat likuid seperti kas dan piutang. *Acit Test Ratio* tertinggi pada tahun 2007 sebesar 4.400% dan yang terendah pada tahun 2010 sebesar 630%. Besaran *Quick*

*ratio* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2004 – 2010 adalah sebesar 1.017% pada tahun 2004, sebesar 1.192% pada tahun 2005, sebesar 1.594% pada tahun 2006, sebesar 4.400%, sebesar 975% pada tahun 2007, sebesar 975% tahun 2008, sebesar 1.225% tahun 2009 dan 755% tahun 2010. Tahun 2003 *acid test ratio* sebesar 0% disebabkan pemerintah provinsi tidak mempunyai kewajiban.

Sama halnya dengan *current ratio*, rasio cepat berfungsi sebagai pelengkap rasio lancar. Rasio cepat terbesar terjadi pada tahun 2007 sebesar 4.400% dan rasio terendah sebesar 630% pada tahun 2010. Rasio cepat ini diukur dengan membandingkan aset lancar selain persediaan dengan kewajiban lancar. Jumlah persediaan tahun 2007 sebesar Rp.1.997,65 juta dan tahun 2010 sebesar Rp.1.658,12 juta. Pertumbuhan aset lancar selain persediaan sebesar 14,07% tahun 2007 dan sebesar 10,83% tahun 2010. Gambar tersebut menunjukkan meskipun tanpa disertai persediaan, *quick ratio* pemerintah provinsi sangat tinggi karena terlalu besarnya kas yang mengendap pada kas daerah.

c) Rasio kas (*cash ratio*)

Dilihat dari rasio kas, berupa perbandingan antara uang kas dan surat hutang jangka pendek dengan hutang lancar, menunjukkan terlalu besar uang yang mengendap di kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini terlihat dari tingkat rasio kas pemerintah provinsi pada tabel 4.21.

Tabel 4.21  
Analisis Cash Ratio

Tahun	<i>Cash</i>	<i>Marketable Securities</i>	<i>Current Liabilities</i>	<i>Cash Ratio</i>
2003	85.822,13	0	0	0%
2004	131.521,14	0	12.962,05	1015%
2005	190.505,97	36.500,00	19.104,16	1188%
2006	153.697,79	136.500,00	18.211,41	1593%
2007	255.410,05	0	6.010,07	4250%
2008	315.465,87	0	35.279,59	894%
2009	264.130,03	0	24.724,41	1068%
2010	240.432,35	0	41.178,79	584%

Sumber : Neraca Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Tabel 4.21 menunjukkan tingginya rasio kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau terlalu banyaknya kas yang mengendap pada aktiva lancar. Tahun 2004 rasio kas sebesar 1.015%, tahun 2005 sebesar 1.188%, tahun 2006 sebesar 1.593%, tahun 2007 sebesar 4.250%, tahun 2008 sebesar 894%, tahun 2009 sebesar 1.068% dan tahun 2010 sebesar 584%. Rasio tertinggi sebesar 4.250% pada tahun 2007 dan rata-rata proporsi kas pemerintah provinsi sebesar 87,07% terdiri atas kas daerah dan kas di bendahara pengeluaran.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan ketiga alat ukur tersebut di atas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki likuiditas sangatlah tinggi. Namun rasio likuiditas yang terlalu tinggi, tidak cukup baik bagi pihak pemerintah sendiri, karena hal ini akan mempengaruhi kemampuan pemerintah provinsi dalam memperoleh pendapatan dan meningkatkan *return*. Dana yang terlalu tinggi pada kas daerah dan kas bendahara akan menjadi tidak produktif dibandingkan jika diinvestasi pada aset yang mendatangkan *return* yang tinggi dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Hal ini disebabkan kurang efektif dan efisien arus kas dan saldo kas yang ada pada pemerintah provinsi sebagai

akibat pegawai yang bekerja dibidang keuangan kurang profesional dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan serta kurang memahami manajemen kas yang baik. Mike Williams yang dikutip oleh Murwanto,Insyafiah dan Subkhan (2006:5) mendefinisikan “Manajemen kas pemerintah sebagai strategi dan proses-prosesnya untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintahan maupun antara pemerintah dengan sektor-sektor lain”.

b. *Ratio Leverage*

*Ratio Leverage* merupakan perbandingan antara ekuitas dengan total hutang. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pemerintah dibiayai utang. Hasil *analisis ratio leverage* Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan oleh tabel 4.22 di bawah ini.

Tabel 4.22  
Analisis Rasio Leverage

Tahun	Ekuitas dana	Total Utang	Rasio Leverage
2003	1.128.247,08	0	0%
2004	1.272.463,21	12.962,05	9817%
2005	1.484.711,21	19.104,16	7772%
2006	1.699.467,42	18.211,41	9332%
2007	1.875.649,09	6.010,07	31208%
2008	2.152.003,74	35.279,59	6100%
2009	2.356.410,74	24.724,41	9531%
2010	2.652.715,11	41.178,79	6442%

Sumber : Neraca Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah

Tabel 4.22 menunjukkan pada tahun 2003, rasio solvabilitas pemerintah provinsi sangat rendah yaitu sebesar 0%, disebabkan pemerintah provinsi tidak memiliki kewajiban. Tahun 2004 – 2010, *ratio leverage* mengalami lonjatan yang sangat tinggi dengan puncak pada tahun 2007, *ratio leverage* mencapai 31.208%. Ini menunjukkan setiap rupiah kewajiban dapat dijamin oleh ekuitas dana

pemerintah provinsi sebesar 31.208%. Rasio *leverage* tahun 2005 sebesar 7.772%, tahun 2006 sebesar 9.332%, tahun 2008 sebesar 6.100% dan tahun 2009 sebesar 9.531% serta tahun 2010 sebesar 5.908%.

Tingginya *ratio leverage* disebabkan rendahnya tingkat kewajiban pemerintah provinsi. Rasio proporsi kewajiban sebesar 0,32% dari aktiva sedangkan pertumbuhan kewajiban mengalami penurunan sebesar -203,01% dibandingkan tahun 2006.

Selain menggunakan rumus tersebut di atas *leverage* dapat pula diukur menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan rasio utang terhadap modal aset. Adapun hasil analisis tercantum pada tabel 4.23, 4.24 dan 4.25

#### 1) Rasio utang atau *debt ratio* (*debt to total asset ratio*)

Rasio ini menunjukkan proporsi antara kewajiban dan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam tabel 4.23 di bawah ini.

Tabel 4.23  
*Analisis Debt Ratio*

Tahun	Total Debt	Total Assets	Debt Ratio
2003	0	1.128.247,08	0%
2004	12.962,05	1.285.425,29	1,01%
2005	19.104,16	1.503.815,34	1,27%
2006	18.211,41	1.717.678,83	1,06%
2007	6.010,07	1.881.659,16	0,32%
2008	35.279,59	2.187.283,33	1,61%
2009	24.724,41	2.381.135,16	1,04%
2010	41.178,79	2.395.783,89	1,72%

Sumber : Neraca Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Tabel 4.23 menggambarkan analisis *debt ratio* atau rasio utang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2003-2010 sangat rendah. Hal ini

sangat baik bagi para investor dalam memberikan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pinjaman daerah tidak dapat dijamin oleh aset daerah. Rata-rata rasio utang pemerintah provinsi sebesar 1%. Semakin rendah *debt ratio* semakin rendah risiko keuangan pemerintah.

2) Rasio utang terhadap ekuitas atau DER (*debt to equity ratio*)

Tabel 4.24  
Analisis DER

Tahun	Total Debt	Total Equity	DER
2003	-	1.128.247,08	0,00%
2004	12.962,05	1.272.463,21	1,02%
2005	19.104,16	14.947.111,21	1,29%
2006	18.211,41	1.699.467,42	1,07%
2007	6.010,07	1.875.649,09	0,32%
2008	35.279,59	2.152.003,74	1,64%
2009	24.724,41	2.356.410,74	1,05%
2010	41.178,79	2.652.715,11	1,55%

Sumber : Neraca Pemerintah Prov. Kep. Babel. diolah

*Debt to equity ratio* menunjukkan perbandingan antara utang dan ekuitas.

Tabel 4.24 menggambarkan kemampuan modal sendiri pemerintah provinsi dalam memenuhi kewajibannya. Rasio DER Pemerintah provinsi pada tahun 2003 sebesar 0% hal ini karena pada tahun tersebut pemerintah provinsi tidak memiliki kewajiban, namun pada tahun 2004 rasio DER pemerintah provinsi sebesar 1,02%, tahun 2005 sebesar 1,29%, tahun 2006 sebesar 1,07%, tahun 2007 sebesar 0,32%, tahun 2008 sebesar 1,64%, tahun 2009 sebesar 1,05% dan tahun 2010 sebesar 1,55% dan merupakan rasio tertinggi. *Debt to equity ratio* menggambarkan proporsi relatif kontribusi modal kreditor sebesar rata-rata 0,99% dan sebesar 99,01 % milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3) Rasio utang terhadap modal aset

Tabel 4.25  
Rasio Utang terhadap Aset Modal

Tahun	Total Utang	Total Aset Modal	Rasio Utang terhadap Aset Modal
2003	0	1.300,00	0%
2004	12.962,05	2.300,00	564%
2005	19.104,16	3.200,00	597%
2006	18.211,41	10.800,00	169%
2007	6.010,07	19.748,00	30%
2008	35.279,59	23.748,00	149%
2009	24.724,41	24.845,44	100%
2010	41.178,79	31.996,57	129%

Sumber : Neraca Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Tabel 4.25 merupakan analisis utang terhadap modal aset yang menggambarkan seberapa bagian dari modal aset yang digunakan untuk menjamin utang. Tahun 2004 dari setiap rupiah utang pemerintah provinsi dijamin sebesar 564% dari modal aset, tahun 2005 sebesar 597%, tahun 2006 sebesar 169%, tahun 2007 sebesar 30%, tahun 2008 sebesar 149%, tahun 2009 sebesar 100% dan tahun 2010 sebesar 129%.

Rata-rata utang dijamin sebesar 217% modal aset pemerintah provinsi, tetapi pemerintah sendiri sulit dalam mengelola modal aset yang dimilikinya, karena dari sebagian aset modal berupa investasi jangka panjang tersebut, yang bukti kepemilikannya tidak dimiliki serta kurangnya pengawasan oleh pemerintah provinsi sehingga menyebabkan sebagian perusahaan emiten mengalami kerugian.

4) Rasio *solvabilitas*.

Rasio *solvabilitas* digunakan guna mengukur kemampuan dalam membayar utang yang jatuh tempo. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik tingkat pengembalian hutang pemerintah.

Tabel 4.26  
Analisis *Solvabilitas*

Tahun	Total Aset	Total Utang	Rasio <i>Solvabilitas</i>
2003	1.128.247,08	0	0%
2004	1.285.425,29	12.962,05	9917%
2005	1.503.815,34	19.104,16	7872%
2006	1.717.678,83	18.211,41	9432%
2007	1.881.659,16	6.010,07	31308%
2008	2.187.283,33	35.279,59	6200%
2009	2.381.135,16	24.224,41	9631%
2010	2.687.920,63	36.916,29	7281%

Sumber : Neraca Pemerintah Provinsi Kep. Babel, diolah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat tinggi (*oversovable*), hal ini sangat baik bagi investor dalam menanamkan modalnya/memberi pinjaman, karena setiap rupiah kewajiban dapat dijamin oleh Aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 9.917% pada tahun 2004, sebesar 7.872% pada tahun 2005, sebesar 9.432% pada tahun 2006, sebesar 31.308% pada tahun 2007, sebesar 6.200% pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sebesar 9.631% serta sebesar 7.281% pada tahun 2010.

Rasio *solvabilitas* tertinggi tahun 2007 sebesar 31.308% artinya setiap satu rupiah hutang pemerintah provinsi dapat dijamin sebesar 31.308% aset pemerintah. Sementara tahun 2010 setiap hutang pemerintah provinsi dijamin sebesar 7.281% aset pemerintah provinsi. Tingginya rasio *solvabilitas*, disebabkan

rendanya tingkat *liabilities* pemerintah. Selain itu pemerintah provinsi sendiri tidak mempunyai hutang jangka panjang. Hutang pemerintah sendiri terdiri hutang bagi hasil pajak dan hutang terhadap pihak ketiga karena keterlambatan pemerintah pada tahun sebelumnya dalam pencAiran dana kegiatan.

Meskipun *solvabilitas* pemerintah provinsi tinggi, tetapi akibat kurang maksimalnya pelayanan dan lemahnya pengawasan pelaksanaan kegiatan menyebabkan pemerintah provinsi harus menganggarkan dana guna melunasi kewajiban tahun berikutnya. Ditambah panjangnya mekanisme birokrasi menyebabkan kreditor mengalami keterlambatan dalam memperoleh piutangnya.

#### d. Kemandirian

Tingkat kemandirian suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mendanai aktivitasnya. Sebagaimana tercantum pada tabel 4.27 memberi gambaran tentang tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4.27  
Analisis Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Pinjaman	Kemandirian
2003	71.780,14	162.490,00	0	44,18%
2004	114.461,64	170.227,00	1.952,20	66,48%
2005	188.304,37	187.358,00	0	100,51%
2006	198.173,30	275.690,00	0	71,88%
2007	203.541,90	319.357,00	0	63,73%
2008	294.184,56	391.045,44	35.279,59	69,00%
2009	246.799,84	407.994,84	24.724,41	57,03%
2010	328.122,02	410.642,31	36.906,23	73,32%

Sumber : Laporan Realisasi & Neraca Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Bertolok ukur dari rasio kemandirian Pemerintah Provinsi, nampaknya ketergantungan pihak pemerintah provinsi ke pemerintah pusat masih cukup

tinggi. Di tahun 2003, tingkat kemandirian pemerintah dalam mendanai kegiatannya sebesar 44,18%, tahun 2004 sebesar 66,48%, tahun 2005 sebesar 100,51%, tahun 2006 sebesar 71,88%, tahun 2007 sebesar 63,73%, tahun 2008 sebesar 69% dan ditahun 2009 serta 2010 sebesar 57,03% dan sebesar 73,32%.

Rata-rata tingkat kemandirian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 68,27%, dengan tingkat kemandirian terbesar sebesar 100,51% dan terkecil sebesar 44,18%. Tingkat kemandirian 68,27% pertahun menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah provinsi dalam mendanai aktivitasnya bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 68,27 % dan sisinya berasal dari dana alokasi umum dan pinjaman daerah.

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya setiap tahun, dana alokasi umum meningkat sebesar 15,03% pertahun dan proporsinya sebesar 50,22% pertahun. Pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan sebesar 27,61% dengan proporsi sebesar 34,77% dari pendapatan atau lebih kecil dari dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah provinsi terhadap dana alokasi umum.

Tingginya tingkat kemandirian tahun 2005 sangat tinggi disebabkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah sebesar 61,07%, pendapatan retribusi sebesar 9,75%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 46,69% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 122,70%. Rendahnya tingkat kemandirian tahun 2003, mengingat umur pemerintah provinsi yang relatif muda serta tonggak dimulainya investasi sehingga belum ada *return* yang didapat dari investasi pemerintah.

e. *Earning performance ratio*

*Earning performance ratio* digunakan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dengan mengukur tingkat surplus. Rasio ini mengindikasikan tingkat pendapatan per aset yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki demi memperoleh pendapatan.

Tabel 4.28  
Analisis *Earning Performance Ratio*

Tahun	Surplus	Rata-rata Total Aset	<i>Earning Performance</i>
2003	42.963,16	161.178,15	27%
2004	46.699,01	107.118,77	44%
2005	96.484,85	107.415,38	90%
2006	70.791,82	143.139,90	49%
2007	(26.557,38)	117.603,70	-23%
2008	64.773,45	128.663,73	50%
2009	(49.416,14)	125.322,90	-39%
2010	(14.690,64)	133.099,11	-11%

Sumber : Neraca & Laporan Realisasi APBD Pem Prov.Kep. Babel, diolah

Hasil analisis *earning performance*, menunjukkan masih rendahnya performa kinerja Pemerintah provinsi sebagaimana tercantum pada tabel 4.28. Surplus terjadi pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 dan 2008. Sedangkan defisit anggaran dialami pada tahun 2007, 2009 dan 2010. Berdasarkan analisis *earning performance* dapat dijelaskan bahwa rasio pendapatan yang digunakan dalam menilai kinerja pemerintah melalui penggunaan sumber daya pada tahun 2003 sebesar 27%, tahun 2004 sebesar 44%, tahun 2005 sebesar 90%, tahun 2006 sebesar 49%, tahun 2007 sebesar -23%, tahun 2008 sebesar 50%, tahun 2009 sebesar -39% dan tahun 2010 sebesar -11%.

Tingkat *performance* terbaik pemerintah provinsi pada tahun 2005, dimana surplus sebesar Rp. 96.484,85 juta dengan tingkat kemandirian sebesar 100,51%,

tingkat pertumbuhan surplus sebesar 106,61%. *Performance* terburuk dari pemerintah provinsi terjadi tahun 2009, defisit sebesar Rp. 49.416,14 juta, dengan tingkat kemandirian 57,03% atau lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, demikian pula tingkat pertumbuhan surplus mengalami penurunan sebesar -176,29% dari tahun 2008.

Hal ini disebabkan pendapatan pajak daerah dan bagi hasil sumber daya alam tidak mencapai target atau anggaran yang ditetapkan. Tahun 2009, analisis perbandingan realisasi dan APBD menunjukkan, realisasi pajak daerah sebesar 89,58% dan bagi hasil sumber daya alam sebesar 91,99%.

#### f. Derajat kontribusi BUMD

Tabel 4.29  
Derajat Kontribusi BUMD

(Dalam rupiah)

Tahun	Bagian laba BUMD	Pendapatan Asli Daerah	Derajat Kontribusi BUMD
2003	80.938.427	71.780.118.252	0,11%
2004	94.709.428	114.461.630.239	0,09%
2005	137.018.941	188.304.373.606	0,07%
2006	260.372.270	198.173.311.841	0,13%
2007	702.743.314	203.541.902.474	0,35%
2008	1.089.195.153	294.184.568.209	0,37%
2009	1.771.547.459	246.799.844.957	0,72%
2010	3.077.327.809	328.122.480.079	0,94%
Jumlah	7.217.902.801	1.645.368.229.657	0,44%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Tabel 4.29 menggambarkan sangat rendahnya tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pandapatan asli daerah. Derajat kontribusi terbesar sebesar 0,94% pada tahun 2010 dan terendah sebesar 0,07% pada tahun 2005. Derajat kontribusi secara keseluruhan sebesar 0,44%. Rendahnya derajat kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah disebabkan dari 8

perusahaan daerah dan swasta, hanya 25% perusahaan daerah yang membagikan labanya kepada pemerintah provinsi, yaitu PT. Bank Sumsel Babel dan PT. BPR Syariah Babel. Perusahaan daerah yang tidak menyumbangkan laba kepada pemerintah provinsi sebanyak 75% yang disebabkan perusahaan tersebut belum memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian.

##### 5. Analisis *financial* perusahaan

Selain melakukan analisis terhadap berbagai variabel ekonomi dan pasar modal serta analisis industri, dalam melaksanakan proses keputusan investasi tak kalah penting adalah analisis financial perusahaan. Analisis *financial* perusahaan merupakan tahap analisis *fundamental top-down* dengan tujuan memilih alternatif perusahaan yang menjanjikan prospek yang paling menguntungkan. Analisis perusahaan dapat memberikan gambaran tentang nilai, kualitas dan kinerja manajemen perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis menggunakan rasio *price*, dengan melakukan perbandingan antara harga terhadap laba, laba terhadap jumlah saham yang beredar serta harga saham.

Penanaman modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluruhnya dalam bentuk saham, tetapi hanya beberapa perusahaan saja yang dapat dilakukan analisis *earning per share* dan *price earning ratio*, disebabkan beberapa perusahaan yang menjadi emiten tidak/belum menerbitkan saham sebagai bentuk jaminan keikutsertaan investor sebagai penanam modal. Selain itu disebabkan emiten tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan terdapat perusahaan yang keberadaannya tidak diketahui oleh Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung. Adapun perusahaan yang dapat dilakukan analisis *financial* adalah Bank Sumsel-Babel, PT. BPR Syariah Babel dan PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera.

a. Analisis laba per lembar saham (*earning per share*)

*Earning per share* menunjukkan laba bersih yang diterima investor atas kepemilikan saham. Semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan, semakin besar pula laba yang diterima perusahaan dan semakin baik pula perusahaan tersebut.

Tabel 4.30 mengambarkan earning pershare Bank Sumsel-Babel

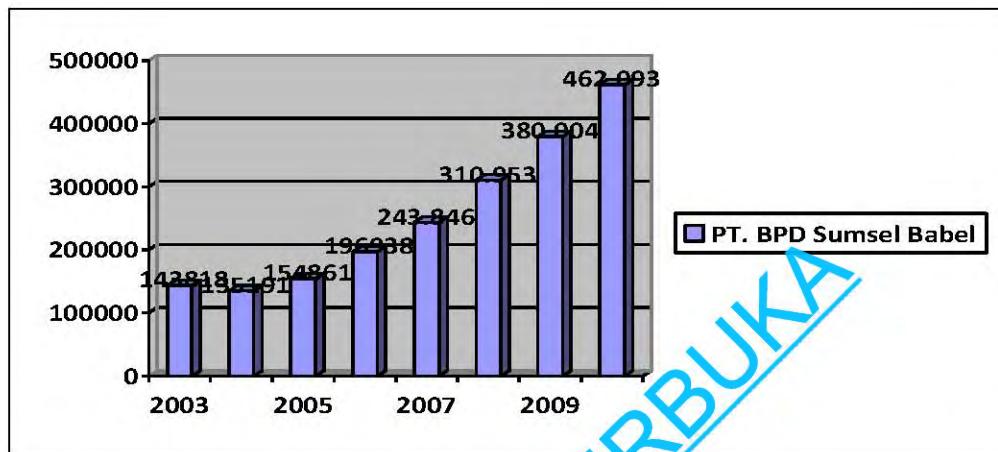
Tabel 4.30  
*Earning Pershare* Saham PT. BPD Sumsel Babel  
(dalam rupiah)

Tahun	Laba bersih	Jumlah lembar saham yang beredar	EPS
2003	23.147.000.000	160.946	143.818
2004	23.575.000.000	174.383	135.191
2005	29.187.000.000	188.472	154.861
2006	46.751.465.979	237.392	196.938
2007	59.844.493.160	286.429	243.846
2008	99.544.893.848	320.128	310.953
2009	140.923.361.094	370.847	380.004
2010	201.483.112.687	436.023	462.093

Sumber : Laporan Tahunan PT.BPD Sumsel Babel, diolah

Hasil penelitian terhadap analisis *earning per share* saham PT.Bank Sumsel Babel sebagaimana tercantum pada tabel 4.30 menunjukkan, laba bersih yang dibagikan oleh PT. Bank Sumsel Babel kepada para pemegang saham. Besarnya keuntungan per lembar saham sejak tahun 2003 – 2010 menunjukkan kecendrungan peningkatan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan laba bersih dari PT. Bank Sumsel Babel. EPS yang dibagikan setiap tahun dimulai tahun 2003 sebesar Rp. 143.818,- tahun 2004 sebesar Rp.135.191,- tahun 2005 sebesar

Rp.154.861,- tahun 2006 sebesar Rp.196.938,- tahun 2007 sebesar Rp243.846, tahun 2008 sebesar Rp. 310.953,- tahun 2009 sebesar Rp.380.004,- dan tahun 2010 sebesar Rp. 462.093,-.



Gambar 4.6  
Diagram Batang *Earning Pershare* Saham PT. Bank Sumsel Babel

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank Sumsel Babel, diolah.

Rasio pertumbuhan rata-rata laba bersih PT. Bank Sumsel-Babel sebesar 37,47% dengan rasio tertinggi sebesar 60,18% tahun 2006 dan terendah sebesar 1,85% tahun 2003. Sementara rasio pertumbuhan saham yang beredar lebih rendah dibandingkan pertumbuhan laba perusahaan. Rata-rata rasio pertumbuhan saham sebanyak 15,46% dengan rasio tertinggi sebanyak 25,96% tahun 2006 dan terendah sebanyak 8,08% tahun 2005. Rasio *earning pershare* tertinggi sebesar 27,52% dan terendah sebesar -6% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,70%.

Rasio pertumbuhan profitabilitas dan *earning pershare* Bank Sumsel-Babel sangat tinggi, tetapi tidak diiringi rasio kecukupan modal perusahaan. Sebagaimana surat permohonan tambahan penyertaan modal Bank Sumsel No.014/PKP/4/B/2010 tanggal 12 Januari 2010.

Melihat pergerakan *earning pershare* Bank Sumsel-Babel menunjukkan pergerakan yang meningkat, tetapi berbeda dengan EPS yang diperoleh oleh PT. BPR Syariah Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada tabel 4.30. Pergerakan *earning pershare* saham PT. BPR Syariah Babel tercantum pada tabel 4.31

**Tabel 4.31**  
***Earning Pershare* Saham PT. BPR Syariah Babel**  
 (dalam rupiah)

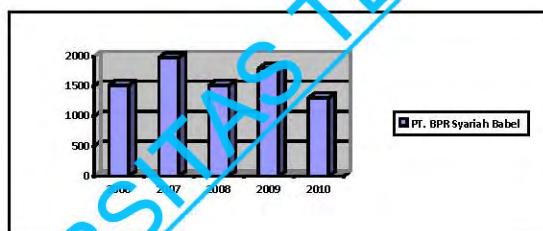
Tahun	Laba bersih	Jumlah saham Yang Beredar	EPS
2006	842.570.629	555.944	1.516
2007	1.346.208.685	631.414	1.976
2008	1.797.378.268	1.136.665	1.515
2009	2.791.419.209	1.551.650	1.799
2010	3.538.411.155	2.699.658	1.311

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Babel, diolah

*Earning pershare* PT. BPR Syariah Babel tertinggi diperoleh pada tahun 2007 sebesar Rp.1.976,- dan terendah pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.311,-. Terjadi fluktuasi terhadap EPS PT. BPR Syariah Babel setiap tahun, walaupun tingkat keuntungan (laba bersih) perusahaan cenderung meningkat setiap tahun, namun *earning pershare* perusahaan menurun. Pada saat laba bersih PT. BPR Syariah Babel sebesar Rp.842.570.629,-, *earning pershare* sebesar Rp. 1.516,-, pada saat laba bersih sebesar Rp.1.346.208.685,- *earning pershare* sebesar Rp.1.976,-, pada saat laba bersih Rp. 1.797.378.268,- *earning pershare* sebesar Rp. 1.515,- pada saat laba bersih Rp.2.791.419.209,- *earning pershare* sebesar Rp.1.799,- dan pada saat laba bersih Rp.3.538.411.155,- *earning pershare* sebesar Rp.1.311,-. Penurunan EPS saham sebagai akibat terlalu banyaknya saham yang

beredar. Semakin banyak saham yang beredar dapat menyebabkan penurunan *earning per share* saham perusahaan.

Dilihat dari rasio pertumbuhan laba bersih PT. BPR Syariah Babel rata-rata sebesar 43,8%, dengan rasio tertinggi sebesar 59,8% pada tahun 2007 dan terendah sebesar 26,8% pada tahun 2010. Sementara rata-rata jumlah saham yang beredar meningkat sebanyak 50,4% pertahun atau lebih tinggi dari rasio pertumbuhan laba bersih. Rasio perbandingan pertumbuhan laba bersih dengan jumlah saham yang beredar 1 : 1,15. Tingginya rasio pertumbuhan jumlah saham yang beredar dibandingkan pertumbuhan laba bersih perusahaan menyebabkan turunnya *earning per share* yang dibagikan kepada investor.



Gambar 4.9  
Diagram Batang *Earning Pershare* Saham PT. BPR Syariah Babel

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Babel, diolah.

*Earnings per share* PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera sendiri seperti tersebut dalam tabel 4.32 di bawah ini.

Tabel 4.32  
*Earning per sahre* Saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera  
 (dalam rupiah)

Tahun	Rugi bersih (Rp)	Jumlah Saham yang Beredar	EPS (Rp)
2006	0	4.000	0
2007	(92.077.436)	4.000	(23.019)
2008	(363.395.721)	4.000	(90.849)
2009	(248.281.670)	4.000	(62.070)
2010	(1.362.009.356)	4.000	(340.502)

Sumber : Laporan Keuangan PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, diolah

Tabel 4.32 menggambarkan laba bersih dan *earning per sahre* saham PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, dimana pada tahun 2006 tidak ada laba yang dibagikan, karena perusahaan belum beroperasi. Sejak tahun 2007, perusahaan daerah yang memiliki visi “Terywujadnya peningkatan perekonomian Bangka Belitung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang maksimal” terus mengalami kerugian. Rugi tahun 2007, sebesar Rp.92.077.436,- dengan EPS sebesar minus Rp. 23.019,-, tahun 2008 rugi sebesar Rp. 363.395.721,- dengan EPS sebesar minus Rp. 90.849,-, tahun 2009 rugi sebesar Rp.248.281.670 dengan EPS sebesar minus Rp. 62.070,- dan tahun 2010 kerugian terus meningkat sebesar Rp. 1.362.009.356,- dengan EPS sebesar minus Rp. 340.502,- .

Perusahaan ini menjadi beban pemerintah provinsi, karena sejak berdiri sampai dengan tahun 2010, perusahaan daerah ini belum menghasilkan pendapatan dari hasil usahanya. Selain itu modal yang disetor oleh pemerintah, hanya untuk membayar biaya usaha perusahaan. Hal ini menunjukkan rendahnya kinerja dari BUMD ini sendiri dan kurangnya pengawasan dari pemerintah provinsi selaku pemilik perusahaan yang memiliki 100% saham perusahaan serta tidak bekerjanya para komisaris perusahaan daerah tersebut.

Badan Usaha Milik Daerah ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan cara membentuk perusahaan yang pengelolaannya aset secara terpisah dengan sasaran memberi jasa pelayanan umum dan atau mengejar keuntungan. Umumnya perusahaan daerah di Indonesia bergerak pada bidang jasa keuangan dan perbankan, penyediaan Air bersih atau bergerak diluar bidang keuangan dan Air bersih. Sebaliknya yang terjadi pada PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera memiliki core bisnisnya berupa industri dan perdagangan hasil-hasil alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dilihat dari penyertaan modal pemerintah provinsi menggambarkan bahwa BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semestinya pemerintah provinsi memiliki kendali yang signifikan atas perusahaan daerah ini karena 100% saham milik pemerintah provinsi, namun dalam pelaksanaanya pemerintah provinsi tidak mempunyai kendali atas perusahaan daerah ini yang berdampak semakin terpuruknya perusahaan daerah ini. Selama lima tahun sejak didirikan belum pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.

Disatu sisi perusahaan daerah dituntut untuk dapat bersaing di pasar dan mampu meningkatkan kinerja keuangan, dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi terhadap keuangan daerah dengan sasaran bersifat memberikan jasa pelayanan umum dan mengejar keuntungan. Sebaliknya yang terjadi pada PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera sejak didirikan sampai dengan sekarang terus mengalami kerugian serta pelayanan kepada masyarakat belum

terlihat kiprahnya yang diakibatkan tidak adanya tata kelola perusahaan dan perusahaan daerah ini sendiri tidak menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* dalam Indra dan Ivan (2006) adalah “Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.” Sakai dan Asaoka (2003) bahwa penerapan *good corporate governance* akan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan.

Selain menggunakan analisis tersebut *earning per share* Saham (EPS) perusahaan dapat pula dicari dengan melihat *return on equity* (ROE) perusahaan sebagaimana tercantum pada tabel 4.33.

Tabel 4.33  
*Earning Per Share* Saham  
 PT. Bank Sumsel Babel

(dalam rupiah)

Tahun	ROE	Nilai Buku	EPS
2003	0,10	1.457.998	143.818
2004	0,09	1.458.347	135.191
2005	0,10	1.518.948	154.861
2006	0,12	1.623.569	196.938
2007	0,14	1.731.642	243.846
2008	0,16	1.897.271	310.953
2009	0,19	1.976.325	380.004
2010	0,22	2.134.275	462.093

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank Sumsel Babel, diolah

*Return on equity* (ROE) merupakan rasio *profitabilitas* yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat diperoleh oleh pemegang saham. Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan terhadap ROE

dan nilai buku PT. Bank Sumsel Babel, pada tahun 2003 ROE sebesar 0,10 nilai buku saham Rp. 1.457.998,-. Tahun 2004 ROE mengalami penurunan tetapi nilai buku mengalami peningkatan, dimana ROE sebesar 0,09 nilai buku saham sebesar Rp.1.458.347,- dan tahun 2005, ROE sebesar 0,10 nilai buku saham sebesar Rp.1.518.948,-. Pada tahun 2006, ROE sebesar 0,12 dan nilai buku saham Rp.1.623.569,- dan tahun 2007 ROE sebesar 0,14 dan nilai buku saham sebesar Rp.1.731.642,-. Di tahun 2008, ROE sebesar 0,16, nilai buku saham sebesar Rp.1.897.271,-. Pada tahun 2009, ROE sebesar 0,19, nilai buku saham sebesar Rp1.976.325,- dan tahun 2010, ROE sebesar 0,22 nilai buku saham sebesar Rp. 2.134.275,-.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat *return on equity* Bank Sumsel-Babel terus meningkat. *Return on equity* terbesar tahun 2010 sebesar 0,22 karena adanya peningkatan laba bersih perusahaan. *Return on equity* terendah sebesar 0,09 tahun 2004 disebabkan adanya penurunan profitabilitas perusahaan.

Berbeda halnya dengan *return on equity* PT. BPR Syariah Babel yang selalu berfluktiasi setiap tahun, walaupun nilai buku dari tahun 2006 sampai 2009 mengalami peningkatan, di tahun 2010 terjadi penurunan nilai buku yaitu sebesar Rp. 10.706 juta. Hal ini tergambar dalam tabel 4.34 di bawah ini.

Tabel 4.34  
*Earning Persahare* Saham PT. BPR Syariah Babel  
(dalam rupiah)

Tahun	ROE	Nilai Buku	EPS
2006	0,13	11.955	1.516
2007	0,15	12.815	1.976
2008	0,12	12.152	1.515
2009	0,11	15.778	1.799
2010	0,12	10.706	1.311

Sumber : Laporan Keuangan PT.BPR Syariah Babel, diolah

Pada tahun 2006, ROE PT. BPR Syariah Babel sebesar 0,13 dengan nilai buku saham sebesar Rp. 11.955,-, tahun 2007, ROE sebesar 0,15 dengan nilai buku sebesar Rp.12.815,-, tahun 2008, ROE sebesar 0,12 dengan nilai buku sebesar Rp. 12.152,-, tahun 2009, ROE sebesar 0,11 dengan nilai buku sebesar Rp. 15.778 dan tahun 2010, ROE sebesar 0,12, nilai buku sebesar Rp.10.706,-.

*Return on equity* tertinggi dan EPS terbesar pada tahun 2007, yang menunjukkan ROE sebesar 0,15 dan EPS sebesar Rp. 1.976,- sedangkan nilai buku terbesar terjadi tahun 2009 sebesar Rp.15.778. Berdasarkan hal tersebut, bahwa *earning per share* sangatlah dipengaruhi *return on equity* dan nilai buku saham perusahaan. Semakin tinggi tingkat *return on equity* dan nilai buku perusahaan semakin besar pula *earning per share*.

*Earning per share* dari PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera terus mengalami penurunan atau EPS yang negatif sebagaimana tercantum pada tabel 4.35 di bawah ini.

Tabel 4.35  
*Earning Per Share* Saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera  
(dalam rupiah)

Tahun	ROE	Nilai Buku	EPS
2006	0	1.000.000	0
2007	(0,02)	976.981	(23.019)
2008	(0,10)	887.138	(90.849)
2009	(0,08)	825.068	(62.070)
2010	(0,70)	484.565	(340.502)

Sumber : Laporan Keuangan PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, diolah.

Tabel 4.35 mendeskripsikan *return on equity* (ROE), nilai buku dan *earning per share* PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, dimana nilai buku saham terus mengalami penurunan dengan jumlah saham sebanyak 4.000 lembar. Tahun 2006, ROE sebesar 0 dengan nilai buku sebesar Rp. 1.000.000 dan EPS sebesar 0,

tahun 2007, ROE sebesar 0,02 dengan nilai buku sebesar Rp. 976.981,- dan EPS sebesar minus Rp 23.019,-, tahun 2008, ROE sebesar 0,10 dengan nilai buku sebesar Rp. 887.138,- dan EPS sebesar minus Rp.90.849,-, tahun 2009, ROE sebesar 0,08 dengan nilai buku Rp.825.068,- dan EPS sebesar minus Rp.62.070,- dan tahun 2010, ROE sebesar 0,70 dengan nilai buku Rp.484.565,- dan EPS sebesar minus Rp.340.502,-.

Penurunan ini disebabkan semakin rendahnya tingkat *return on equity* perusahaan dan nilai buku perusahaan. Penurunan nilai buku saham, berpengaruh terhadap jumlah ekuitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingat jumlah kepemilikan sahamnya lebih dari 50% atau mencapai 100%. Namun neraca provinsi tidak menggambarkan jumlah yang sebenarnya, jumlah investasi pada PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar Rp.4 miliar berbeda dengan jumlah *equities* PT. BUMD Bumi Bangka Belitung dari tahun 2006-2010. Tahun 2005 sebesar Rp. 4 miliar, tahun 2007 sebesar Rp.3.907.922.564,- tahun 2008 sebesar Rp. 3.548.551.843,- tahun 2009 sebesar Rp.3.300.272.000,- dan tahun 2010, sebesar Rp. 1.938.260.817,-.

Jika dilihat penggolongan menurut Bank Indonesia, gambaran tersebut dapat dikategorikan sebagai risiko investasi yaitu berupa kegagalan pemenuhan kewajiban oleh emiten. Selain itu hal ini dapat dikategorikan sebagai risiko operasional yaitu ketidakmampuan dan /atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau masalah-masalah eksternal lainnya.

Rendahnya kinerja manajemen BUMD dalam mengelola perusahaan daerah tersebut, disebabkan perusahaan belum mempunyai tata kelola yang baik

(*good corporate governance*). Menurut Daniri (2005:9) prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

- (1) akuntabilitas (*accountability*);
- (2) transparansi (*transparency*);
- (3) pertanggungjawaban (*responsibility*);
- (4) kemandirian (*Independency*);
- (5) kesetaraan dan kewajaran (*FAirness*)”.

Tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik dimungkinkan terjadinya *fraud* dalam perusahaan. Ditinjau dari kerugian perusahaan daerah secara terus menerus, hal ini dapat dikategorikan sebagai risiko *fraud* yaitu risiko perusahaan karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi yang diukur secara financial maupun non materi berupa penurunan kepercayaan publik. Jika dibiarkan lebih lanjut, dimungkinkan perusahaan daerah ini mengalami likuidasi dan pemerintah daerah mengalami kehilangan investasinya.

b. Rasio harga terhadap laba atau PER (*price earning ratio*).

Tabel 4.36  
*Price Earning* Rasio Saham PT. Bank Sumsel-Babel  
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Nilai Buku Saham	Earning Per lembar	PER
2003	1.457.998	143.818	10,14
2004	1.458.347	135.191	10,79
2005	1.518.948	154.861	9,81
2006	1.623.569	196.938	8,24
2007	1.731.642	243.846	7,10
2008	1.897.271	310.953	6,10
2009	1.976.325	380.004	5,20
2010	2.134.275	462.093	4,62

Sumber : Laporan Tahunan PT.BPD Sumsel-Babel, diolah.

Merujuk hasil penelitian terhadap rasio PER, mengindikasikan terjadinya penurunan terhadap besarnya rupiah yang dibayar oleh Pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memperoleh *earning* Bank Sumsel-Babel. Rasio PER PT. Bank Sumsel-Babel tersaji dalam tabel 4.36 dimana rasio PER tahun 2003 sebesar 10,14, tahun 2004 sebesar 10,79, tahun 2005 sebesar 9,81, tahun 2006 sebesar 8,24, tahun 2007 sebesar 7,10, tahun 2008 sebesar 6,10, tahun 2009 sebesar 5,20 dan 4,62 tahun 2010.

Penurunan nilai PER disebabkan meningkatnya nilai *buku* dan *earning per share* saham Bank Sumsel-Babel. Rasio PER terbesar pada tahun 2004 sebesar 10,79 dan terendah sebesar 4,62.

Tabel 4.37  
*Price Earning Ratio* PT. BPR Syariah Babel  
(dalam rupiah)

Tahun	Nilai Buku Saham	Earning Per lembar	PER
2006	11.955	3.031	3,94
2007	12.815	1.976	6,49
2008	12.152	1.515	8,02
2009	15.778	1.799	8,77
2010	10.706	1.311	8,17

Sumber : Laporan Keuangan PT. BPR Syariah Babel, diolah

Sebaliknya jika dilihat *price earning ratio* PT. BPR Syariah Babel terdapat peningkatan rasio PER pertahun mulai tahun 2006 – 2009 yaitu sebesar 3,94; 6,49; 8,02; 8,77 dan pada tahun 2010 sebesar 8,17 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Rasio PER terendah tahun 2006 sebesar 3,94 dan tertinggi tahun 2009 sebesar 8,77. Peningkatan rasio PER pada PT. BPR Syariah Babel disebabkan terjadinya penurunan terhadap *earning per share* perusahaan, meskipun dilihat dari tingkat keuntungan perusahaan terus meningkat, tetapi

diiringi dengan banyak saham yang dikeluarkan sehingga menyebabkan semakin rendahnya tingkat *return on equity* perusahaan.

Tabel 4.38  
*Price Earning Rasio* PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera  
(dalam rupiah)

Tahun	Nilai Buku Saham	<i>Earning</i> Per lembar	PER
2006	1.000.000	0	0
2007	976.981	(23.019)	(42,44)
2008	887.138	(90.849)	(9,76)
2009	825.068	(62.070)	(13,29)
2010	484.565	(340.502)	(1,42)

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Sumsel-Babel, diolah

Tabel 4.38 menggambarkan rasio harga terhadap kerugian perusahaan dimana pada tahun 2006 dengan nilai buku sebesar Rp. 1.000.000,- dan *earning* perlembar sebesar 0 dan PER sebesar 0. Di tahun 2007 nilai buku per lembar saham BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar Rp. 976.981,- dengan *earning* berupa kerugian sebesar Rp. 23.019,- dan PER sebesar minus 42,44 dan di tahun 2008 nilai buku saham sebesar Rp.887.138,- rugi perlembar saham sebesar Rp. 90.849,- dan PER sebesar minus 9,76. Tahun 2009 nilai buku saham sebesar Rp.825.028,- rugi per lembar saham sebesar Rp. 62.070,- dan PER minus 13,29 dan pada tahun 2010 nilai buku saham sebesar Rp. 484.565,- rugi perlembar saham Rp. 340.502,- dan PER sebesar 1,42.

Analisis sekuritas terhadap analisis *financial* perusahaan menunjukkan bahwa diantara perusahaan emiten atas investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Saham Bank Sumsel Babel memiliki tingkat *earning per share* saham yang lebih tinggi dibandingkan BPR Syariah Babel yaitu sebesar Rp. 462.093 dan PER lebih rendah yaitu sebesar 4,62. Namun

dilihat dari rasio pertumbuhan laba bersih, BPR Syariah lebih unggul dibandingkan Bank Sumsel-Babel yaitu memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 43,8% dengan PER sebesar 8,17 BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, memiliki kerugian atas *earning per sahare* sebesar Rp. 340.502 per lembar saham dengan tingkat pertumbuhan rata-rata – 53% dan PER – 1,42.

Atas dasar ini pemerintah provinsi dapat memilih/mengetahui dividen dan *earning* yang diharapkan dari perusahaan emiten saham di masa mendatang dan menentukan perusahaan atau saham mana saja yang menguntungkan untuk dijadikan pilihan investasi. Selain itu diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan dan langkah-langkah kongkrit dalam rangka penyehatan perusahaan daerah. Mengadakan rapat umum pemegang saham, memanggil para manager perusahaan daerah dan meminta pertanggungjawabannya serta memperbaiki neraca daerah. Tujuan dari investasi pemerintah sendiri adalah pengunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, royalti, manfaat sosial/lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

## 6. *Analisis return dan risiko*

### a. *Return total investasi.*

*Return* total investasi merupakan kompensasi atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. *Return* total terdiri dari *yield* dan *capital gain (loss)*. Pada penelitian ini *return* total dibagi jenis yaitu, *return* total atas investasi pada perusahaan yang memberi kontribusi keuntungan dan

*return* atas investasi terhadap perusahaan yang bermasalah atau mengalami kerugian.

1) *Return* investasi terhadap perusahaan yang *profit*

Nilai instrinsik saham ditentukan nilai saat ini dari semua aliran kas yang diterima dari suatu investasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat aliran kas dividen kepada pemerintah provinsi dari perusahaan yang *profit*, seperti Bank Sumsel-Babel, PT. BPR Syariah dan PT.Riau Air Lines sebanyak satu kali. Selain itu aliran kas masuk juga berasal dari jasa giro dan bunga deposito. Adapun gambaran *return* dari investasi tersebut tercantum dalam tabel 4.39 di bawah ini.

Tabel 4.39  
Return Jasa Giro Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Giro Akhir Tahun	Jasa Giro	Return (%)
Smt I 2003	142.746.568.475	2.900.128.197	2,03%
Smt II 2003	84.482.293.902	3.293.056.618	3,90%
Smt I 2004	160.358.012.161	2.816.273.799	1,69%
Smt II 2004	130.130.497.478	3.956.425.657	3,04%
Smt I 2005	175.447.219.492	4.506.590.864	1,64%
Smt II 2005	188.381.173.841	6.322.627.342	3,36%
Smt I 2006	357.208.446.666	7.002.964.160	1,96%
Smt II 2006	152.585.311.073	6.931.938.999	4,54%
Smt I 2007	363.600.685.860	5.407.050.213	1,49%
Smt II 2007	254.159.813.434	5.778.688.940	2,27%
Smt I 2008	249.447.648.956	3.600.562.433	1,44%
Smt II 2008	264.821.528.195	4.423.396.488	1,67%
Smt I 2009	394.673.045.839	5.096.441.314	1,29%
Smt II 2009	195.779.468.087	5.715.207.930	2,92%
Smt I 2010	352.678.880.753	5.853.492.837	1,66%
Smt II 2010	190.019.472.651	6.557.341.000	3,45%
Jumlah	3.762.520.064.863	80.162.186.789	38,35%
Rata-rata	235.157.504.054	5.010.136.674	2,40%

Sumber : Laporan Realisasi APBD & Neraca Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio *return* rata-rata (*return ekspektasi*) diperoleh Pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung dari *return*

realisasi berdasarkan data historis terhadap jasa giro periode 2003 – 2010 adalah sebesar 2,40%. *Return* tertinggi sebesar 4,54% pada semester II 2006 dan masih di bawah Suku bunga Bank Indonesia sebesar 12,50%, sedangkan *return* terendah sebesar 1,29% pada tahun semester I 2009.

Rata-rata kas yang mengedap pada rekening giro per semesteran sebesar Rp.235.157.504.054,- dengan saldo terbesar pada tahun semester I 2007 sebesar Rp.363.600.685.860 dengan jumlah jasa giro sebesar Rp.5.407.050.213 dan rasio *return* sebesar 1,49%. Posisi giro terendah pada semester II 2003 sebesar Rp.84.482.293.902 dengan *return* sebesar 3,90%.

Hal ini sangatlah berbeda pada saat saldo giro dan suku bunga tinggi, seharusnya *return* yang diperoleh lebih tinggi dan pada saat ini giro rendah *return* yang diperoleh seharusnya lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena saldo giro pemerintah berfluktuasi setiap hari serta turun naik nya tingkat suku bunga giro yang diberikan oleh bank. Bila giro dan deposito, bunga yang diperoleh dihitung berdasarkan saldo harian dikalikan tingkat bunga yang diberikan oleh perbankan.

*Return* jasa giro setiap semesteran ditunjuk pada tabel 4.39. dimana *return* realisasi pada semester I 2003 sebesar 2,03%, semester II 2003 sebesar 3,90%, semester I 2004 sebesar 1,69%, semester II 2004 sebesar 3,04%, semester I 2005 sebesar 1,64%, semester II 2005 sebesar 3,36%, semester I 2006 sebesar 1,96%, semester II 2006 sebesar 4,54%, semester I 2007 sebesar 1,49%, semester II 2007 sebesar 2,27%, semester I 2008 sebesar 1,44%, semester II 2008 sebesar 1,67%, semester I 2009 sebesar 1,29%, semester II 2009 sebesar 2,92%, semester I 2010

sebesar 1,66% dan sebesar 3,45% pada semester II 2010. *Return realisasi* persemesteran ini terlihat lebih kecil dibandingkan dari suku bunga yang berlaku.

Ini disebabkan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank lebih rendah dari tingkat Suku Bunga Bank Indonesia. Selisih suku bunga tersebut menjadi keuntungan bagi pihak bank. Semakin besar perbedaan antara suku bunga yang diberikan dengan suku bunga Bank Indonesia semakin besar pula tingkat keuntungan bagi bank. Selain dipengaruhi tingkat suku bunga juga dipengaruhi saldo harian yang mengendap pada bank tersebut.

Tabel 4.40  
*Return* Bunga Deposito Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jumlah Deposito	Bunga Deposito	<i>Return</i>
Semester I 2005	36.500.000.000	162.500.010	0,45%
Semester II 2005	36.500.000.000	1.330.836.777	3,65%
Semester I 2006	36.500.000.000	1.985.806.802	5,44%
Semester II 2006	136.500.000.000	4.465.410.121	3,27%
Semester I 2007	136.500.000.000	5.537.311.383	4,06%
Semester II 2007	136.500.000.000	4.296.616.604	3,15%
Semester I 2008	50.000.000.000	3.312.499.920	6,62%
Semester II 2008	50.000.000.000	5.749.999.770	11,50%
Semester I 2009	50.000.000.000	1.874.999.880	3,75%
Semester II 2009	50.000.000.000	1.874.999.880	3,75%
Semester I 2010	50.000.000.000	1.882.705.364	3,77%
Semester II 2010	50.000.000.000	1.880.136.876	3,76%
Jumlah	819.000.000.000	34.353.823.387	53,16%
Rata-rata	68.250.000.000	2.862.818.616	4,43%

Sumber : Laporan Realisasi APBD & Neraca Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Perkembangan perkiraan deposito beserta bunga deposito yang diberikan tersaji dalam tabel 4.40. Investasi pada deposito merupakan salah satu investasi jangka pendek dan merupakan elemen aktiva lancar, yang disetor pada semester I tahun 2005. Namun saldo deposito sendiri belum sepenuhnya tergambar dalam

Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukan masih lemahnya sistem akuntansi yang ada.

Pencatatan saldo deposito sendiri hanya ada pada tahun 2005 dan 2006 sebesar Rp.36.500 juta dan Rp.136.500 juta. *Return* rata-rata deposito selama 12 semesteran sebesar 4,43% dengan rata-rata bunga deposito sebesar Rp.2.862.818.616,- dan *return* tertinggi pada semester II tahun 2008 sebesar 11,50% atau di atas suku bunga bank Indonesia sebesar 8,73% dengan bunga deposito sebesar Rp. 5.749.999.770,- sedangkan *return* terendah sebesar 0,45% dengan bunga deposito sebesar Rp.162.500.010,- dan saldo deposito sebesar Rp.36.500.000.000,-.

*Return realisasi* setiap semester adalah pada semester I 2005 sebesar 0,45%, semester II 2005 sebesar 3,05%, semester I 2006 sebesar 5,44%, semester II 2006 sebesar 3,27%, semester I 2007 sebesar 4,06%, semester II 2007 sebesar 3,15%, semester I 2008 sebesar 6,62%, semester II 2008 sebesar 11,50%, semester I 2009 sebesar 3,75%, semester II 2009 sebesar 3,75%, semester I 2010 sebesar 3,77% dan semester II 2010 sebesar 3,76%.

Tabel 4.41  
*Return Total* Saham PT. Bank Sumsel-Babel

Tahun	Harga Beli Per lembar saham (Rp)	Dividen (Rp)	Nilai Buku Perlembar Saham (Rp)	Dividen Yield (%)	Capital Gains/Loss (%)	Return Total (%)
Semester I 2003	1.000.000	0	1.457.998	0,00%	45,80%	45,80%
Semester II 2003	1.000.000	80.988	1.457.998	8,10%	45,80%	53,90%
Semester I 2004	1.000.000	5.302	1.457.998	0,53%	45,80%	46,33%
Semester II 2004	1.455.604	55.369	1.458.347	3,80%	0,19%	3,99%
Semester I 2005	1.455.604	10.442	1.458.347	0,72%	0,19%	0,91%
Semester II 2005	1.453.488	50.275	1.469.980	3,46%	1,13%	4,59%
Semester I 2006	1.453.488	34.059	1.469.980	2,34%	1,13%	3,48%
Semester II 2006	1.454.545	47.862	1.623.569	3,20%	11,62%	14,91%
Semester I 2007	1.454.545	53.394	1.623.569	3,20%	11,62%	15,29%
Semester I 2007	1.454.545	111.653	1.731.642	6,30%	19,05%	26,73%
Semester I 2008	1.454.545	42.173	1.731.642	2,30%	19,05%	21,95%
Semester II 2008	1.453.488	114.958	1.897.271	7,91%	30,53%	38,44%
Semester I 2009	1.453.488	44.153	1.897.271	3,04%	30,53%	33,57%
Semester II 2009	1.453.488	181.055	1.976.325	12,46%	35,97%	48,43%
Semester I 2010	1.453.488	57.627	1.976.325	3,96%	35,97%	39,94%
Semester II 2010	1.454.017	186.941	2.134.275	12,86%	46,78%	59,64%
Jumlah	21.904.333	1.076.250	20.822.538	76,71%	381,18%	457,89%
Rata-rata	1.369.021	67.260	1.676.409	4,79%	23,82%	28,62%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep. Bangka & Laporan Tahunan PT. Bank Sumsel-Babel, diolah.

Tabel 4.41 menunjukkan *return total* yang diperoleh dari penanaman modal pemerintah provinsi ke Bank Sumsel-Babel. Adapun informasi yang dapat disajikan tidak hanya aliran kas dari dividen, tetapi termasuk harga pembelian saham serta nilai buku saham. Rata-rata *return total* yang diperoleh oleh investor sebesar 28,62% dengan dividen *yield* sebesar 4,79% dan *capital gain* sebesar 23,82%. Perolehan *capital gain* pada semester I 2003 sebesar 45,80%, dan tidak disertai dividen. *Return total* semester pertama cenderung lebih kecil dibandingkan semester kedua, hal ini disebabkan pada semester pertama Bank Sumsel-Babel hanya memberikan persekot dividen.

Pada semester II 2003, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dividen *yield* yang diperoleh sebesar 8,10% menunjukan dividen yang diterima

dari Saham Bank Sumsel-Babel dan *capital gain* sebesar 45,80%, menunjukkan apabila saham PT. Bank Sumsel-Babel tersebut dijual pada saat tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memperoleh keuntungan sebesar 45,80% atau sebesar Rp. 458.000,- sebesar selisih perubahan harga saham. Semester I 2004 *dividen yield* yang diperoleh sebesar 0,53% dan *capital gain* sebesar 45,80%, semester II 2004 *dividen yield* sebesar 3,80% dan *capital gain* sebesar 0,19% atau lebih rendah dari semester II 2003, semester I 2005, *dividen yield* sebesar 0,72% dan *capital gain* sebesar 0,19%, semester II 2005, *dividen yield* sebesar 3,46% dan *capital gain* sebesar 1,13%, semester I 2006, *dividen yield* sebesar 2,34% dan *capital gain* sebesar 1,13%, semester II 2006, *dividen yield* sebesar 3,29% dan *capital gain* sebesar 11,62%, semester I 2007, *dividen yield* sebesar 3,67% dan *capital gain* sebesar 11,62%, semester II 2007, *dividen yield* sebesar 7,68% dan *capital gain* sebesar 19,05%, semester I 2008, *dividen yield* sebesar 2,90% dan *capital gains* sebesar 19,05%, semester II 2008, *dividen yield* sebesar 7,91% dan *capital gains* sebesar 30,53%, semester I 2009, *dividen yield* sebesar 2,04% dan *capital gain* sebesar 30,53%, semester II 2009, *dividen yield* sebesar 12,46% dan *capital gain* sebesar 35,97%, semester I 2010, *dividen yield* sebesar 3,96% dan *capital gain* sebesar 35,97% serta semester II 2010, *dividen yield* sebesar 12,86% dan *capital gain* sebesar 46,78%.

Dilihat dari tabel 4.41 adanya kecendrungan peningkatan *dividen yield* dan *capital gain* pada semester II setiap tahun, walaupun *dividen yield* semester I lebih kecil dibanding semester II. *Dividen yield* dan *capital gain* tertinggi pada semester II tahun 2010 sebesar 12,86% dan 46,78% sehingga *return total* sebesar 59,64%.

*Dividen yield* terendah pada semester I 2004 sebesar 0,53% dan *capital gain* terendah sebesar 0,19% tahun semester II 2004 dan semester I 2005, hal ini diakibatkan pada waktu melakukan pembelian saham harga belinya lebih tinggi dari nilai nominal saham, sehingga terjadi disagio sebesar Rp. 313 juta pada semester II 2004 dan sebesar Rp. 312 juta pada semester I 2005 atas pembelian saham tersebut.

Tingginya *return total* tahun 2010 disebabkan kenaikan nilai buku Saham Bank Sumsel-Babel sebesar Rp.2.134.275,- dan *earning per share* yang dibagikan perusahaan sebesar Rp.462.093,-. Rendahnya *dividen yield* pada semester I 2004, disebabkan pemerintah provinsi hanya diberikan persekot dividen, dengan nilai EPS sebesar Rp.135.191,-. *Capital gain* pada semester II 2004 dan semester I 2005 sebesar 0,19% menunjukan tinggi harga pembelian saham pada waktu itu.

Tabel 4.42  
*Return Total Penyertaan Modal PT. BPR Syariah Babel*

Tahun	Harga Beli Saham per lembar	Deviden per Lembar	Nilai Buku Perlembar Saham (Rp)	Deviden Yield	Capital Gain/Loss	Return Total
Sms II 2006	10.050	-	11.955	0%	18,95%	18,95%
Sms I 2007	10.050	-	11.955	0%	18,95%	18,95%
Sms II 2007	10.050	1.000	12.815	9,95%	27,51%	37,46%
Sms I 2008	10.050	660	12.815	6,57%	27,51%	34,07%
Sms II 2008	10.050	1.980	12.152	19,70%	20,92%	40,62%
Sms I 2009	10.050	522	12.152	5,20%	20,92%	26,12%
Sms II 2009	10.050	1.800	15.778	17,91%	56,99%	74,90%
Sms I 2010	10.050	1.350	15.778	13,43%	56,99%	70,43%
Sms II 2010	10.050	1.800	10.706	17,91%	6,52%	24,43%
Jumlah	90.450	9.112	116.104	90,67%	255,27%	345,94%
X bar	10.050	1.012	12.900	10,07%	28,36%	38,44%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel & Laporan Keuangan BPR Syariah Babel, diolah.

Tabel 4.42 menggambarkan *return* total yang diperoleh dari Saham PT.BPR Syariah Babel. Rata-rata total *return* yang diperoleh atas penyertaan modal pada PT. BPR Syariah sebesar 38,44% dengan tingkat *return* tertinggi sebesar 74,90% pada semester II tahun 2009. *Return* total terendah pada semester II tahun 2006 dan semester I tahun 2007 sebesar 18,95%, sedangkan tingkat *capital gain* terendah pada semester II tahun 2010 sebesar 6,52%.

Rendahnya *return* total pada saat ini dikarenakan PT. BPR Syariah Babel belum memberikan dividen atas penyertaan modal, meskipun dilihat dari *capital gain* yang diperoleh cukup besar atau sebesar 18,95%. Penyebab belum diterimanya dividen oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disebabkan setoran modal tersebut belum mendapat pengesahan dari bank Indonesia, meskipun PT. BPR Syariah Babel telah melakukan perubahan modal melalui akta Notaris Wahyu Dwicaryono, SH tanggal 28 April 2007.

Tingginya *return* total pada semester II tahun 2009 disebabkan meningkatnya *capital gain* saham PT. BPR Syariah yang mana terdapat kenaikan nilai buku per lembar saham sebesar Rp. 15.778,- atau selisih sebesar 56,99% dari harga beli saham. Sementara itu *dividen yield* perusahaan, walaupun mengalami penurunan dibanding semester II tahun 2008 tetapi cukup menjanjikan. *Dividen yield* pada semester II tahun 2009 sebesar 17,91%.

Sama halnya dengan semester II tahun 2010, *dividen yield* sebesar 17,91%, tetapi nilai buku saham mengalami penurunan yang cukup signifikan, atau sebesar 6,52%. Penurunan *capital gain* ini disebabkan adanya turunnya nilai buku saham PT.BPR Syariah Babel yang disebabkan terlalu banyaknya saham yang beredar,

sehingga mengakibatkan nilai buku perusahaan menjadi turun. Jumlah ekuitas meningkat sebesar 18,06% sedangkan saham yang beredar meningkat sebesar 73,99%.

2) *Return* terhadap investasi yang tidak mendatangkan profit

Investasi yang dilakukan tidak seluruhnya mendatangkan *return* yang menggembirakan, ini sebagai akibat adanya ketidakpastian. Sebagian besar investasi dari pemerintah provinsi sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel di bawah ini, menggambarkan prospek yang kurang menguntungkan. Ini disebabkan karena proses keputusan investasi dan pengelolaan investasi tidak dilaksanakan. Tahapan proses keputusan investasi dimulai dari penetapan tujuan, kebijakan investasi, strategi portofolio dan pemilihan aset pembentukan portofolio serta pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio tidak dijalankan.

Tabel 4.43  
Return Total Saham PT. Sumatera Shipping Lines

Tahun	Penyertaan Modal	Deviden (Rp)	Nilai Buku Perlembar Saham (Rp)	Deviden Yield (%)	Capital Gains/Loss (%)	Return Total (%)
Semester II 2003	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2004	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2004	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2005	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2005	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2006	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2006	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2007	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2007	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2008	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2008	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2009	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2009	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2010	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2010	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Jumlah	1.500.000.000	0	0	0%	-1500%	-1500%
Rata-rata	100.000.000	0	0	0%	-100%	-100%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah

Hasil pengolahan data terhadap Saham PT. Sumatera Shiping Lines, diketahui bahwa sejak disertakan modal, perusahaan ini belum pernah memberikan keuntungan (dividen) kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil wawancara terhadap beberapa orang pejabat dan pegawai pada Bidang Akutansi dan Pelaporan, Bidang Retribusi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Biro Ekonomi diperoleh informasi bahwa keberadaan perusahaan ini tidak diketahui alamatnya. Sebagaimana tercantum pada tabel 4.43 menunjukkan bahwa terjadinya *return total* atas penyertaan modal sebesar minus 100% sebagai akibat *capital loss* sebesar Rp. 100 juta atas modal yang disetor ke perusahaan tersebut.

Tabel 4.44  
Return Total Saham PT. Sumatera Promotion Centre

Tahun	Penyertaan Modal	Deviden (Rp)	Nilai Buku Perlakuan Saham (Rp)	Deviden Yield (%)	Capital Gains/Loss (%)	Return Total (%)
Smst II 2003	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2004	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2004	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2005	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2005	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2006	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2006	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2007	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2007	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2008	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2008	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2009	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2009	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2010	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2010	100.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Jumlah	1.500.000.000	-	-	0%	-1500%	-1500%
Rata-rata	100.000.000	-	-	0%	-100%	-100%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Sama halnya dengan PT. Sumatera Shiping Lines, penyertaan modal pada PT. Sumatera Promotion Center yang berlokasi di Kota Batam pun, tidak ada

aliran kas masuk yang berasal dari dividen perusahaan tersebut. Investasi ini dilakukan atas dasar rapat koordinasi gubernur Se-Sumatera dalam rangka mempromosi Provinsi di Wilayah Sumatera. Dampak dari investasi ini sendiri menyebabkan daerah mengalami *capital loss* sebesar Rp.100 juta atau 100%. Gambaran *return total* pada PT. Sumatera Promotion Centre tercantum pada tabel 4.44. dimana sejak tahun 2003 sampai tahun 2010 rata-rata *dividen yield* sebesar 0% dan *capital loss* sebesar 100%.

Dikatakan *capital loss*, mengingat keberadaan kedua perusahaan tersebut sudah tidak diketahui, sehingga daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 200 juta atas biaya kesempatan yang dikeluarkan dan risiko sebagai akibat terjadinya perbedaan *return* yang diharapkan dengan *return* aktual. Ini menunjukkan risiko bisnis yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena kurangnya pengawasan terhadap investasi yang dilakukan.

Tabel 4.45  
*Return Total* Penyertaan Modal pada PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera

Tahun	Nilai Buku Saham	Dividen (Rp)	Nilai Buku Perlembar Saham (Rp)	Dividen Yield (%)	Capital Gains/Loss (%)	Return Total (%)
Smst II 2006	1.000.000	-	1.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
Smst I 2007	1.000.000		1.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
Smst II 2007	1.000.000	-	976.981	0,00%	-2,30%	-2,30%
Smst I 2008	1.000.000		976.981	0,00%	-2,30%	-2,30%
Smst II 2008	1.000.000	-	887.138	0,00%	-11,29%	-11,29%
Smst I 2009	1.000.000		887.138	0,00%	-11,29%	-11,29%
Smst II 2009	1.000.000	-	825.068	0,00%	-17,49%	-17,49%
Smst I 2010	1.000.000		825.068	0,00%	-17,49%	-17,49%
Smst II 2010	1.000.000	-	484.565	0,00%	-51,54%	-51,54%
Jumlah	9.000.000	-	7.862.937	0,00%	-113,71%	-113,71%
Rata-rata	1.000.000	-	873.660	0,00%	-12,63%	-12,63%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Babel & Laporan Keuangan PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, diolah

PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera merupakan satu-satunya perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, sejak mulai berdiri sampai dengan sekarang perusahaan ini terus merugi dan mengakibatkan terjadinya kerugian daerah. BUMD ini sendiri telah mengalami dua kali pergantian pengurus atau direksi. Hasil penelitian sebagaimana tersaji dalam tabel 4.45 dan menunjukkan terjadinya penurunan terhadap harga perlembar saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera dari Rp 1 juta, turun menjadi Rp. 976.981 pada semester II 2007 dan kemudian turun kembali pada tahun 2008 menjadi Rp. 887.138 dan kembali turun di tahun 2009 Rp.825.068 dan pada tahun 2010 harga perlembar saham hanya Rp.484.565,-.

Tidak ada aliran kas masuk atas investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera sejak tahun 2006, namun diperkirakan dihadapi pemerintah provinsi setiap tahun berupa *capital loss*. Kerugian pemerintah provinsi pada semester II 2007 dan semester I 2008 sebesar -2,30%, semester II 2008 dan semester I 2009 sebesar -11,29%, semester II 2009 dan semester I 2010 sebesar -17,49% dan sebesar -51,54% pada semester II 2010. Tingginya *capital loss* pada semester II tahun 2010, disebabkan turunnya nilai buku saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung dari Rp.1.000.000,- menjadi sebesar Rp.484.565,- atau sebesar 51,54%.

Penurunan nilai saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera ini berakibat pada penurunan *return total* dari investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rata-rata *return total* pertahun PT. Bumi Bangka

Belitung Sejahtera sebesar *capital loss* atau -12,63% dengan jumlah *total capital loss* sebesar -113,71%. Posisi akhir tahun 2010 terjadi *return total* atau *capital loss* sebesar 51,54%, ini menunjukkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.2.061.600.000,- dengan sisa investasi sebesar Rp.1.938.260.000,-. Gambaran ini bertolak belakang dengan Neraca Pemerintah Provinsi yang menunjukkan tidak adanya penurunan nilai investasi itu sendiri, karena apabila investasi yang dimiliki lebih dari 20%, maka investasi tersebut harus dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah tersebut.

Tabel 4.46  
*Return Total Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines*

Tahun	Nilai Investasi	Dividen (Rp)	Nilai Perlembar Saham (Rp)	Dividen Yield (%)	Capital Gains/Loss (%)	Return Total (%)
Smst II 2006	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2007	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2007	1.000.000.000	24.115.523,00	-	2,41%	-100,00%	-97,59%
Smst I 2008	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2008	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2009	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2009	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst I 2010	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Smst II 2010	1.000.000.000	-	-	0,00%	-100,00%	-100,00%
Jumlah	9.000.000.000	24.115.523	-	2,41%	-900,00%	-897,59%
Rata-rata	1.000.000.000	2.679.503	-	0,27%	-100,00%	-99,73%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Babel, diolah

Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Riau Air Lines sebagai upaya membantu jalur penerbangan wilayah Sumatera. Pemerintah Provinsi sendiri mengharapkan perusahaan ini dapat menjembatani rute penerbangan Pangkalpinang - Belitung. Pada tahun 2006, pihak pemerintah provinsi melakukan penyertaan modal pada perusahaan ini dengan investasi

sebesar Rp. 1 miliar. Hasil analisis data sebagaimana tercantum pada tabel 4.46 menunjukkan pada semester II 2007 terdapat aliran dividen PT. Riau Air Lines kepada pemerintah provinsi sebesar Rp. 24.115.523 atau *dividen yield* sebesar 2,41%, sedangkan *capital loss* terjadi setiap tahun sebesar 100% dan *return total* atau *capital loss* rata-rata pertahun sebesar -99,73%.

Kondisi ini disebabkan karena perusahaan tersebut tidak pernah menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan tidak adanya pengawasan dan pemantauan dari pihak pemerintah selaku pemegang saham. Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan penempatan tiga daerah tidak melakukan pengelolaan dan penatausahaan terhadap investasi daerah, sehingga menyebabkan daerah tidak mendapat manfaat baik ekonomi maupun sosial. Demikian halnya penyertaan modal pada beberapa BUMD lain yang terdapat di kabupaten/kota.

Perusahaan daerah dibentuk untuk mengembangkan perekonomian daerah dan menambah penerimaan daerah. Ironisnya, sampai dengan penelitian ini dilakukan perusahaan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota belum dapat membantu daerah menambah penerimaan daerah, tetapi saat ini menjadi *cost* bagi pemerintah daerah.

Tabel 4.47  
*Return Total Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Kota Pangkalpinang*

Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Deviden (Rp)	Harga Penutupan Perlembar Saham (Rp)	Deviden Yield (%)	Capital Gains/Loss (%)	Return Total (%)
Smst I 2007	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Smst II 2007	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Smst I 2008	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Smst II 2008	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Smst I 2009	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Smst II 2009	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Smst I 2010	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Smst II 2010	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%
Jumlah	65.734.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Rata-rata	8.216.750.000	0	0	0%	-100%	-100%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Investasi pemerintah terhadap BUMD PDAM Kota Pangkalpinang selain bertujuan untuk mendapatkan profit, dilakukan guna membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan Air bersih. Investasi sebesar Rp. 8.216.750.000,- sampai tahun 2010 tidak berpengaruh positif terdapat pendapatan asli daerah, karena perusahaan ini diwajarkan mengalami kerugian, namun pemerintah provinsi sendiri tidak pernah mendapatkan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Selain itu juga temukan bahwa perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Pangkalpinang ini tidak pernah menerbitkan saham, berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pangkalpinang yang mengatakan penyertaan modal tersebut dalam bentuk saham.

Rata-rata *dividen yield* setiap semesteran sebesar 0% menggambarkan tidak adanya aliran masuk yang diterima pihak provinsi dan *capital loss* sebesar -100%,

berarti pemerintah provinsi harus siap kehilangan dana sebesar 100% atau sebesar Rp.8.216.750.000.

Tabel. 4.48  
Return Total atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Kabupaten Belitung

Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Dividen (Rp)	Harga Penutupan Perlembar Saham (Rp)	Dividen Yield (%)	Capital Gains/Loss (%)	Return Total (%)
Semester I 2007	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2007	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2008	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2008	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2009	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2009	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester I 2010	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Semester II 2010	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%
Jumlah	5.850.000.000	0	0	0%	-100%	-100%
Rata-rata	731.250.000	0	0	0%	-100%	-100%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Ken.Babel. Tahun.

Hasil penelitian terhadap *return* total investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap perusahaan daerah kabupaten/kota, menunjukkan investasi pada perusahaan daerah Air minum Kabupaten Belitung ini pun belum dapat memberi sumbangan keuntungan kepada pemerintah provinsi. Sama halnya dengan investasi di beberapa perusahaan lain yang tidak menyampaikan laporan keuangan ke investor, sangat sulit bagi investor dalam hal ini Pemerintah Provinsi dalam menilai kesehatan perusahaan. Berdasarkan tabel *return* total penyertaan modal pada PDAM Belitung, menunjukkan terjadinya *capital loss* dari *return total* sebesar – 100% atau sebesar dana yang diinvestasikan yaitu sebesar Rp.731.250.000 pada PDAM Belitung.

b. *Return* yang diharapkan.

*Return* yang diharapkan atau *expected return* merupakan *return* yang diharapkan akan diperoleh dimasa mendatang. Adapun gambaran *return* yang

diharapkan dari penyertaan modal atau investasi pemerintah tergambar pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.49**  
*Return* yang diharapkan dari Giro Pemerintah  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Giro Akhir Tahun	Jasa Giro	<i>Return (%)</i>
Smt 1 2003	142.746.566,475	2.900.128,197	2,03%
Smt II 2003	84.482.293,902	3.293.056,618	3,90%
Smt 1 2004	166.358.012,161	2.816.273,799	1,69%
Smt II 2004	130.130.497,478	3.956.425,65	3,04%
Smt 1 2005	275.447.219,492	4.506.590,364	1,64%
Smt II 2005	188.381.173,841	6.322.627,242	3,36%
Smt 1 2006	357.208.446,666	7.002.961,160	1,96%
Smt II 2006	152.585.311,073	6.731.938,999	4,54%
Smt 1 2007	363.600.685,860	5.407.050,213	1,49%
Smt II 2007	254.159.813,434	5.778.688,940	2,27%
Smt 1 2008	249.447.648,956	3.600.562,433	1,44%
Smt II 2008	264.821.528,195	4.423.396,488	1,67%
Smt 1 2009	394.673.045,839	5.096.441,314	1,29%
Smt II 2009	186.770.468,087	5.715.207,930	2,92%
Smt 1 2010	252.678.880,753	5.853.492,837	1,66%
Smt II 2010	190.019.472,651	6.557.341,000	3,45%
Jumlah			38,35%
rata-rata			2,40%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Sebagaimana diperlihatkan pada tabel 4.49 tingkat *return* jasa giro dari tahun 2003 sampai 2010 berbeda. Tingkat suku bunga yang berlaku salah faktor pengukur pendapatan yang diterima sedangkan data historis penerimaan alat mendekteksi *return* yang diharapkan oleh investor. Hasil analisis menunjukkan *return* yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap dana yang disimpan di giro sebesar 2,4% dari simpanan. Rasio *expected return* masih rendah dibandingkan suku bunga bank Indonesia periode 3 Desember 2010 yaitu sebesar 6,50%.

*Return* terbesar yang diperoleh dari jasa giro sebesar 4,54% pada semester II tahun 2006, dan terendah sebesar 1,29% pada semester I tahun 2009. Tingginya *return* tersebut disebabkan adanya perubahan suku bunga Bank Indonesia. Suku Bunga Bank Indonesia pada 28 Juni 2006 sebesar 12,50%, dan suku bunga per 28 Desember 2006 sebesar 9,75%. Tingkat suku bunga rata-rata tahun 2006 sebesar 11,93%, dengan demikian selisih tingkat suku bunga rata-rata dengan *return* dari giro sebesar 7,39%.

Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat suku bunga giro yang diberikan oleh bank kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan suku bunga Bank Indonesia. Jika ditinjau dari saldo yang mengedap pada kas daerah atau giro, hal ini sangatlah merugikan pihak pemerintah, jika tidak dapat mengatur saldo yang minimal pada kas daerah atau tidak dapat memanfaatkan kelebihan kas, mengingat tingginya rasio kas (*cash ratio*) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau sebesar rata-rata 1.522,71% dan rata-rata rasio proposi kas di kas daerah sebesar 85,79% pertahun.

Tabel 4.50  
*Return* yang diharapkan dari Deposito Pemerintah  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jumlah Deposito	Bunga Deposito	Return
Sms I 2005	36.500.000.000	162.500.010	0,45%
Sms II 2005	36.500.000.000	1.330.836.777	3,65%
Sms I 2006	36.500.000.000	1.985.806.802	5,44%
Sms II 2006	136.500.000.000	4.465.410.121	3,27%
Sms I 2007	136.500.000.000	5.537.311.383	4,06%
Sms II 2007	136.500.000.000	4.296.616.604	3,15%
Sms I 2008	50.000.000.000	3.312.499.920	6,62%
Sms II 2008	50.000.000.000	5.749.999.770	11,50%
Sms I 2009	50.000.000.000	1.874.999.880	3,75%
Sms II 2009	50.000.000.000	1.874.999.880	3,75%
Sms I 2010	50.000.000.000	1.882.705.364	3,77%
Sms II 2010	50.000.000.000	1.880.133.876	3,76%
Jumlah			53,16%
Rata-rata			4,43%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Babel, diolah

Hasil penelitian sebagaimana digambarkan pada tabel 4.50 menunjukkan bahwa *return* yang diharapkan atau rata-rata *return* bunga deposito sebesar 4,43% atau sebesar 2,07% lebih kecil dibandingkan suku bunga Bank Indonesia. *Return realisasi* terbesar pada semester II tahun 2008 sebesar 11,50% dan terendah sebesar 0,45% pada semester I tahun 2005. Tingkat suku bunga rata-rata pada semester II tahun 2008 sebesar 10,05% dan sebesar 7,71% pada semester I 2005. Dilihat *return* yang diperoleh dari deposito pada semester II tahun 2008 lebih tinggi dari suku bunga Bank Indonesia, tetapi dilihat dari *return* rata-rata lebih rendah dari suku bunga Bank Indonesia. Hal ini disebabkan pengaruh tingkat bunga yang diberikan oleh bank serta nominal deposito.

Deposito merupakan salah satu investasi jangka pendek yang dilakukan guna memanfaatkan kelebihan kas. Selain memberi tingkat *return* yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga giro, deposito pun mudah untuk dikonversikan ke

kas. Analisis perbandingan *return* realisasi antara giro dan deposito mengambarkan bahwa tingkat *return* realisasi deposito lebih tinggi dibandingkan *return* giro, demikian pula hasil penelitian menunjukkan *expected return* deposito sebesar 4,43% atau lebih besar dibandingkan *return* yang diharapkan dari giro sebesar 2,40%.

**Tabel 4.51**  
*Return* yang diharapkan dari  
 Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumsel Babel

Tahun	Modal	Deviden (Rp)	Return (%)
Semester I 2003	1.000.000.000	-	-
Semester II 2003	1.000.000.000	80.938.427	8,10%
Semester I 2004	1.000.000.000	5.302.220	0,53%
Semester II 2004	2.000.000.000	93.407.208	4,67%
Semester I 2005	2.000.000.000	17.615.765	0,88%
Semester II 2005	3.000.000.000	119.403.176	3,98%
Semester I 2006	3.000.000.000	80.889.339	2,70%
Semester II 2006	5.000.000.000	179.482.931	3,59%
Semester I 2007	5.000.000.000	200.227.973	4,00%
Semester II 2007	5.000.000.000	418.698.818	8,37%
Semester I 2008	5.000.000.000	158.147.326	3,16%
Semester II 2008	8.000.000.000	668.363.227	8,35%
Semester I 2009	8.000.000.000	256.708.378	3,21%
Semester II 2009	8.000.000.000	1.052.651.681	13,16%
Semester I 2010	16.000.000.000	335.040.949	2,09%
Semester II 2010	16.000.000.000	2.115.422.860	13,22%
Jumlah	16.000.000.000	5.782.350.278	80,02%
X bar	1.000.000.000	361.396.892	5,00%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Tabel 4.51 menunjukkan adanya fluktuasi *return* yang diperoleh setiap tahun dari dividen Bank Sumsel-Babel Bangka Belitung. *Return* terbesar pada semester II tahun 2010 sebesar 13,22% dan *return* terendah sebesar 0,53% pada semester 1 tahun 2004. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa *return* yang diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5%.

*Return* terbesar terjadi pada semester II tahun 2010 disebabkan adanya kenaikan *earning pershare* Saham Bank Sumsel Babel dan penurunan PER. Tahun 2010 *earning persahre* nya sebesar Rp. 462.093,-, dan *price earning ratio* Saham Bank Sumsel Babel sebesar 4,62. *Return* semester pertama selalu lebih kecil dibandingkan semester II disebabkan Saham Bank Sumsel Babel hanya memberikan persekot dividen, karena tingkat laba bersih perusahaan pada awal semesteran belum diketahui.

Hasil penelitian terhadap beberapa perusahaan yang tidak membagikan keuntungan, *return* yang diharapkan sebagaimana ditiujukan pada tabel L.9 pada PT. Sumatera Shiping Lines, tabel L.10 PT. Sumatera Promotion Centre, tabel L.11. PT. PDAM Pangkalpinang dan tabel L.12. PT. PDAM Belitung. *Return* yang diharapkan Pemerintah atas penyaluran modal pada PT. Sumatera Shipping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre sebesar - 100% atau tidak dapat diharapkan, karena kedua perusahaan tersebut sudah tidak diketahui alamatnya. *Return* yang diharapkan dari Saham PT. PDAM Pangkalpinang dan Saham PT.PDAM Belitung sebesar 0%, karena walaupun tidak mendatangkan keuntungan, kedua perusahaan ini masih eksis dan bermanfaat bagi masyarakat dalam melayani kebutuhan air bersih. Adapun perhitungan *return* yang diharapkan tercantum pada lampiran.

Berbeda dengan hasil penelitian terhadap investasi pada PT. Riau Air Lines, sebagaimana tersaji pada tabel 4.52. Data historis menunjukkan bahwa *return* yang diharapkan dari penanaman modal pada PT. Riau Air Lines sebesar 0, 27%.

**Tabel 4.52**  
*Return* yang diharapkan dari  
 Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Lines

Tahun	Nilai saham	Deviden (Rp)	Return
Smt II 2006	1.000.000.000	0	0%
Smt I 2007	1.000.000.000	24.115.523,00	2,41%
Smt II 2007	1.000.000.000	0	0%
Smt I 2008	1.000.000.000	0	0%
Smt II 2008	1.000.000.000	0	0%
Smt I 2009	1.000.000.000	0	0%
Smt II 2009	1.000.000.000	0	0%
Smt I 2010	1.000.000.000	0	0%
Smt II 2010	1.000.000.000	0	0%
Jumlah			2,41%
x bar			0,27%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Tabel 4.52 menunjukkan gambaran *return* yang diperoleh dari Saham PT.Riau Air Lines dari Semester II Tahun 2006 sampai semester II tahun 2010. *Return* yang didapat atas investasi sebesar Rp. 1 miliar hanya sebesar Rp.24.115.523,- selama 9 semesteran. Dikabarkan perusahaan ini mengalami kerugian, sementara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah mendapatkan laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri, melalui surat Gubernur Lampung Nomor 575/0932.a/II.02/2011 tertanggal 30 Maret 2011, telah menarik dananya dari perusahaan tersebut.

*Return* yang diharapkan dari investasi ini sendiri sebesar 0,27%. Jika dana ini disinvestasikan, dan diinvestasikan pada Sertifikat Bank Indonesia, maka provinsi akan memperoleh *return* yang lebih tinggi dengan risiko sebesar 0, karena SBI merupakan investasi bebas risiko.

Tabel 4.53  
*Return* yang diharapkan dari  
 Penyertaan Modal Bumi Bangka Sejahtera

Tahun	Modal	Rugi perusahaan	<i>Return</i>
Sms II 2006	4.000.000.000	0	0
Sms I 2007	4.000.000.000	0	0
Sms II 2007	4.000.000.000	(92.077.436)	-2,30%
Sms I 2008	4.000.000.000	(92.077.436)	-2,30%
Sms II 2008	4.000.000.000	(451.448.157)	-11,29%
Sms I 2009	4.000.000.000	(451.448.157)	-11,29%
Sms II 2009	4.000.000.000	(699.729.827)	-17,49%
Sms I 2010	4.000.000.000	(699.729.827)	-17,49%
Sms II 2010	4.000.000.000	(2.061.739.183)	-51,54%
Jumlah	36.000.000.000	-4548250024	113,70%
X bar	4.000.000.000	-505361113,7	-12,63%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Tahun.

Tabel 4.53 menyajikan gambaran *return* atas penyertaan modal pada PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Rata-rata kerugian yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas penyertaan modal sebesar -12,63%, dengan kerugian terbesar pada semester II 2010 sebesar -51,54%.

Kerugian ini disebabkan investasi yang ditanamkan pada perusahaan daerah ini tidak mendatangkan profit. Sejak didirikan sampai tahun 2010, tidak ada perolehan pendapatan dari hasil usahanya. Selain itu perusahaan ini tidak pernah menunjukkan kiprahnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari *earning per share* dan *return on equity* berupa kerugian terus meningkat sejak tahun 2006 sampai tahun 2010. EPS tahun 2010 sebesar – Rp.340.502,- dan ROE sebesar – 0,70, serta diiringi penurunan nilai buku saham perusahaan yang sebelumnya Rp. 1 juta menjadi sebesar Rp. 484.565,- atau sebesar 51,54%. Dengan demikian terlihat bahwa investasi milik pemerintah

provinsi pada PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera pada tahun 2010 tersedia tinggal sebesar Rp. 1.938.260.000,-.

Hal ini menunjukan semakin rendahnya nilai diskonto perkiraan dividen kas semakin rendahnya nilai selembar saham. Pada saat EPS Bumi Bangka Belitung Sejahtera minus sebesar Rp23.019,- nilai buku sahamnya sebesar Rp.976.981, dan saat EPS sebesar – Rp.340.502,- nilai buku saham turun sebesar Rp.484.565,-.

**Tabel 4.54**  
*Return yang diharapkan dari  
 Penyertaan Modal Bank Syariah Babel*

Tahun	Modal	Dividen	Return
Sms II 2006	600.000.000	0	0%
Sms I 2007	600.000.000	0	0%
Sms II 2007	600.000.000	59.701.000	9,95%
Sms I 2008	1.600.000.000	65.671.100	4,10%
Sms II 2008	1.600.000.000	197.013.500	12,31%
Sms I 2009	3.600.000.000	103.979.400	2,89%
Sms II 2009	3.600.000.000	358.208.000	9,95%
Sms I 2010	3.600.000.000	268.656.000	7,46%
Sms II 2010	3.600.000.000	358.208.000	9,95%
Jumlah	3.600.000.000	1.411.437.000	56,62%
Rata-rata			6,29%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Saham BPR Syariah memberikan *return* tertinggi dibandingkan yang lain. Hasil olah data historis menunjukkan *return* yang diharapkan dari penyertaan modal pada Bank Syariah sebesar 6,3%. *Return* tertinggi atas investasi pada PT.BPR Syariah Babel sebesar 12,31% pada semester II tahun 2008 dan terendah sebesar 0% pada semester II 2006 dan semester I 2007.

Rendahnya *return* pada semester II 2006 dan semester I 2007 disebabkan, belum diterimanya dividen atas investasi pada PT. BPR Syariah Babel karena

investasi sebesar Rp.600.000.000,- belum mendapat pengesahan dari Bank Indonesia. Tinggi *return* yang diperoleh pada semester II tahun 2008 dikarenakan *dividen* yang dibagikan tahun 2008 lebih tinggi dari *earning per share* saham. Tahun 2008 dengan EPS sebesar Rp. 1.515 dan jumlah saham sebanyak 99.502 lembar, seharusnya pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat dividen sebesar Rp. 150.745.530,- tetapi dividen yang dibagikan sebesar Rp.197.013.500,-.

**Tabel 4.55**  
Pendapatan Investasi Jasa Giro, Bunga Deposito, Dividen serta Pendapatan Asli Daerah  
(dalam rupiah)

Tahun	Return Investasi			Pendapatan Asli Daerah
	Jasa giro	Bunga Deposito	Deviden	
Smst I 2003	2.900.128.197	-	-	33.282.709.149
Smst II 2003	3.293.056.618	-	80.988.427	38.497.409.103
Smst I 2004	2.816.273.799	-	5.302.220	47.629.321.576
Smst II 2004	3.956.425.657	-	93.407.208	66.832.308.663
Smst I 2005	4.06.590.864	162.500.010	17.615.765	84.295.163.632
Smst II 2005	6.322.627.342	1.330.836.777	119.403.176	104.009.209.974
Smst I 2006	7.002.964.160	1.985.806.802	80.889.339	94.138.534.917
Smst II 2006	6.931.938.999	4.465.410.121	179.482.931	104.034.776.924
Smst I 2007	5.407.050.213	5.537.311.383	224.343.496	93.991.211.979
Smst II 2007	5.778.688.940	4.296.616.604	478.399.818	109.550.690.495
Smst I 2008	3.600.562.433	3.312.499.920	223.818.426	135.202.364.757
Smst II 2008	4.423.396.488	5.449.999.770	865.376.727	158.982.203.452
Smst I 2009	5.096.441.314	1.874.999.880	360.687.778	108.577.379.085
Smst II 2009	5.715.207.930	1.874.999.880	1.410.859.681	138.222.465.872
Smst I 2010	5.853.492.837	1.882.705.364	603.696.949	148.697.126.191
Smst II 2010	6.557.341.000	1.880.136.876	2.473.630.860	179.425.353.888
Jumlah	80.162.186.789	34.053.823.387	7.217.902.801	1.645.368.229.657
Rata-rata	5.010.136.674	2.837.818.616	481.193.520	102.835.514.354

Sumber : Laporan Realisasi APBD Prov.Kep. Babel, diolah

Tabel 4.55 merumuskan jumlah jasa giro, bunga deposito dan dividen serta pendapatan asli daerah yang diterima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama enam belas semesteran. Perkembangan PAD dari tahun 2003 – 2010 terus meningkat, walaupun terdapat tahun dimana terjadinya penurunan jumlah pendapatan asli daerah. Rata-rata rasio penerimaan untuk jasa giro persemester sebesar Rp.5.010.136.674,-, deposito sebesar Rp. 2.837.818.616,- dan dividen sebesar Rp.481.193.520. Terlihat bahwa penerimaan dividen pertahun lebih rendah dibanding jasa giro dan bunga deposito, sementara tingkat *return* yang diharapkan dari dividen Saham Bank Sumsel Babel dan Saham BPR Syariah Babel lebih tinggi.

b. Risiko

Risiko timbul jika *return* ekspektasi berbeda dengan *return* realisasi. Risiko ini disebut juga risiko tidak sistematis karena variabilitasnya pengembalian saham tidak disebabkan oleh pergerakan pasar secara umum. Sedangkan risiko sistematis variabilitas pengembalian dipengaruhi pasar secara keseluruhan. *Return* aktual dan *varian* jasa giro digambarkan pada tabel 4.56. di bawah ini

Tabel 4.56  
Varian dan Standar Deviasi Jasa Giro Pemerintah Provinsi Kep. Babel

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
1	2	3	4
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	0,000014
Smst II 2003	3,90%	0,0150	0,000225
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	0,000050
Smst II 2004	3,04%	0,0064	0,000041
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	0,000058
Smst II 2005	3,36%	0,0096	0,000092
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	0,000019
Smst II 2006	4,54%	0,0214	0,000458
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	0,000083
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	0,000002
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	0,000092
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	0,000053
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	0,000123
Smst II 2009	2,92%	0,0052	0,000027
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	0,000055
Smst II 2010	3,45%	0,0105	0,000110
Jumlah			0,001503
Varians = σ <sup>2</sup> =			0,000100

Sumber : Diolah oleh Peneliti

$$\text{Varian return} = \sigma^2 = 0,000100$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{\frac{1}{2}} = 0,000100^{\frac{1}{2}} = 0,01 = 1\%$$

$$\text{Koefisien varian} = \frac{1\%}{2,41\%} = 0,415\%$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return* yang diharapkan dari simpanan giro sebesar 2,4% dengan melihat rata-rata dari *return* aktual sedangkan *varian* sebesar 0,00100. Risiko terhadap simpanan giro sebesar 1% yang diukur dari standar deviasi sedangkan koefisien *varian* sebesar 0,415%. Dari setiap rupiah dana yang disimpan pada kas daerah, diharapkan dapat memberi bunga sebesar 2,4% dengan risiko sebesar 1%.

Rendahnya *return* yang diharapkan dari jasa giro disebabkan rendahnya *return* realisasi yang diperoleh pemerintah provinsi setiap semesteran. *Varian return* sebesar 0,00100 atau 0,1% menunjukkan besarnya penyebaran distribusi probabilitas, sedangkan standar deviasi sebesar 1% menggambarkan risiko yang dihadapi pemerintah provinsi atas penempatan dana di giro. *Koefisien varian* merupakan ukuran risiko relatif yang menunjukkan risiko perunit *return* yang diharapkan. Untuk mendapat satu persen *return* giro, pemerintah provinsi harus menanggung risiko sebesar 0,415%. Dilihat dari hubungan risiko dan *expected return*, *deposit* dan *saving* yang dijamin pemerintah menduduki posisi keempat sebagai *government protection*. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Tabel 4.57  
*Varian dan standar deviasi Bunga Deposito*  
 Pemerintah Provinsi Kep. Babel

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
Smst I 2005	0,0045	(0,0398)	0,001584
Smst II 2005	0,0365	(0,0078)	0,000061
Smst I 2006	0,0544	0,0101	0,000102
Smst II 2006	0,0327	(0,0116)	0,000135
Smst I 2007	0,0406	(0,0037)	0,000014
Smst II 2007	0,0315	(0,0128)	0,000164
Smst I 2008	0,0662	0,0219	0,000480
Smst II 2008	0,1150	0,0707	0,004998
Smst I 2009	0,0375	(0,0068)	0,000046
Smst II 2009	0,0375	(0,0068)	0,000046
Smst I 2010	0,0377	(0,0066)	0,000044
Smst II 2010	0,0376	(0,0067)	0,000045
Jumlah			0,007718
Varians = $\sigma^2 =$			0,000702

Sumber : Diolah oleh Peneliti

$$\text{Varian return} = \sigma^2 = 0,000702$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{\frac{1}{2}} = 0,000702^{\frac{1}{2}} = 0,0265 = 2,65\%$$

$$\text{Koefisien korelasi} = \frac{2,65\%}{4,43\%} = 0,598\%$$

Tabel 4.57 menunjukkan *return* realisasi atas deposito berjangka milik Pemerintah Provinsi yang berada di beberapa bank di Pangkpinang, seperti bank Mandiri, Bank Sumsel-Babel dan BNI 46. Tingkat *return* tertinggi terjadi pada semester II tahun 2008 sebesar 11,50% dengan *expected return* sebesar 4,43%. Sementara itu tingkat keuntungan terendah sebesar 0,0045 pada semester I 2005. *Varian* deposito 0,000702 dengan *standar deviasi* (risiko) sebesar 2,65% dan *koefisien varian* sebesar 0,598%. Setiap rupiah dana yang dinvestasikan pada deposito diestimasikan akan memberikan *profit* sebesar 4,43% dengan risiko yang harus ditanggung sebesar 2,65%. Setiap 1% dari *return* yang diharapkan, pemerintah provinsi siap menanggung risiko sebesar 0,598%.

Tabel 4.58  
Varian dan standar deviasi saham PT. Bank Sumsel Babel

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
Sms I 2003	0,00%	(0,0500)	0,00250
Sms II 2003	8,10%	0,0310	0,00096
Sms I 2004	0,53%	(0,0447)	0,00200
Sms II 2004	4,67%	(0,0033)	0,00001
Sms I 2005	0,88%	(0,0412)	0,00170
Sms II 2005	3,98%	(0,0102)	0,00010
Sms I 2006	2,70%	(0,0230)	0,00053
Sms II 2006	3,59%	(0,0141)	0,00020
Sms I 2007	4,00%	(0,0100)	0,00010
Sms II 2007	8,37%	0,0337	0,00114
Sms I 2008	3,16%	(0,0184)	0,00034
Sms II 2008	8,35%	0,0335	0,00112
Sms I 2009	3,21%	(0,0179)	0,00032
Sms II 2009	13,16%	0,0816	0,00666
Sms I 2010	2,09%	(0,0291)	0,00085
Sms II 2010	13,22%	0,0822	0,00676
Jumlah			0,02528
Varian σ <sup>2</sup>			0,00169

Sumber : Laporan Realisasi APBD Perencanaan Prov.Kep.Babel, diolah

$$\text{Varian return} = \sigma^2 = 0,00169$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{\frac{1}{2}} = 0,00169^{\frac{1}{2}} = 0,0411 = 4,11\%$$

$$\text{Koefisien varian} = \frac{4,11\%}{5 \%} = 0,822\%$$

Hasil penelitian terhadap saham Bank Sumsel-Babel mengindikasikan bahwa *return* yang diharapkan (*expected return*) sebesar 5% dengan *varian* sebesar 0,00169 dan risiko sebesar 4,11%. Risiko yang harus ditanggung oleh investor untuk mendapat setiap 1% *return* sebesar 0,822%.

Meskipun laba bersih dan *earning per share* Bank Sumsel-Babel terus meningkat, tetapi jika dilihat dari tingkat *return* yang diharapkan lebih rendah dari sertifikat bank Indonesia yang bebas risiko. Ini menunjukkan rendahnya tingkat

keuntungan yang diharapkan Pemerintah Provinsi dibandingkan *opportunity cost* yang dikeluarkan.

Berbeda dengan perusahaan yang profit, perusahaan yang merugi dan tidak dapat membayar dividen kepada investor, seperti PT.Sumatera Shiping Lines, PT.Sumatera Promotion Centre, PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, PT.BUMD PDAM Pangkalpinang dan PT.BUMD PDAM Belitung. Baik *return* yang diharapkan, *varian*, standar deviasi dan *koefisien varian* menunjukkan hasil yang sama yaitu 0% atau nihil sebagaimana terlihat pada tabel 4.59, 4.60, 4.61 dan 4.62 serta 4.63.

Tabel 4.59  
*Varian* dan standar deviasi saham PT. Sumatera Shiping Lines

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E(R)	[R <sub>i</sub> - E(R)] <sup>2</sup>
sms II 2003	-100%	0%	0%
sms I 2004	-100%	0%	0%
sms II 2004	-100%	0%	0%
sms I 2005	-100%	0%	0%
sms II 2005	-100%	0%	0%
sms I 2006	-100%	0%	0%
sms II 2006	-100%	0%	0%
sms I 2007	-100%	0%	0%
sms II 2007	-100%	0%	0%
sms I 2008	-100%	0%	0%
sms II 2008	-100%	0%	0%
sms I 2009	-100%	0%	0%
sms II 2009	-100%	0%	0%
sms I 2010	-100%	0%	0%
sms II 2010	-100%	0%	0%
Jumlah			0%
Varians = $\sigma^2 =$			0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

$$\text{Varian Return} = \sigma^2 = 0\% = 0$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{1/2} = 0^{1/2} = 0\%$$

$$\text{Koefisien korelasi} = \frac{0\%}{-100\%} = 0\%$$

**Tabel 4.60**  
**Varian dan standar deviasi saham**  
**PT. Sumatera Promotion Centre**

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
sms II 2003	-100%	0%	0%
sms I 2004	-100%	0%	0%
sms II 2004	-100%	0%	0%
sms I 2005	-100%	0%	0%
sms II 2005	-100%	0%	0%
sms I 2006	-100%	0%	0%
sms II 2006	-100%	0%	0%
sms I 2007	-100%	0%	0%
sms II 2007	-100%	0%	0%
sms I 2008	-100%	0%	0%
sms II 2008	-100%	0%	0%
sms I 2009	-100%	0%	0%
sms II 2009	-100%	0%	0%
sms I 2010	-100%	0%	0%
sms II 2010	-100%	0%	0%
Jumlah			0%
Varians = σ <sup>2</sup> =			0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah

$$\text{Varian Return} = \sigma^2 = 0\% = 0$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{1/2} = 0^{1/2} = 0\%$$

$$\text{Koefisien korelasi} = \frac{0\%}{-100\%} = 0\%$$

Tabel 4.61  
*Varian* dan standar deviasi saham  
 PT. Riau Air Lines

Tahun	Return (Ri)	Ri - E (R)	[Ri - E (R)] <sup>2</sup>
Smt II 2006	0,00%	-0,0027	0,0000073
Smt I 2007	2,41%	0,0214	0,0004580
Smt II 2007	0,00%	-0,0027	0,0000073
Smt I 2008	0,00%	-0,0027	0,0000073
Smt II 2008	0,00%	-0,0027	0,0000073
Smt I 2009	0,00%	-0,0027	0,0000073
Smt II 2009	0,00%	-0,0027	0,0000073
Smt I 2010	0,00%	-0,0027	0,0000073
Smt II 2010	0,00%	-0,0027	0,0000073
Jumlah			0,0005163
Varians = $\sigma^2 =$			0,0000645

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Riau. Bab I diolah

$$\text{Varian Return} = \sigma^2 = 0,0000645$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{\frac{1}{2}} = 0,0000645^{\frac{1}{2}} = 0,0080 = 0,80\%$$

$$\text{Koefisien korelasi} = \frac{0,80\%}{0,27\%} = 2,96\%$$

Tabel 4.61 menggambarkan tentang kondisi *varian* dan standar deviasi dari PT.Riau Air Lines. Distribusi *return* menunjukkan selama sembilan semester, perusahaan penerbangan ini baru satu kali membayar dividen kepada pemerintah provinsi ~~riau~~ pada tahun 2007. Pemerintah provinsi sendiri belum berniat menarikkan dananya dari perusahaan yang sedang merugi ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa *return* realisasi saham PT. Riau Air Lines sebesar 2,41% dengan investasi sebesar Rp.1 miliar dan *return* ekspektasi sebesar 0,27% pada tingkat risiko 0,80%. Terlihat bahwa risiko yang dihadapi lebih besar dibandingkan *return* yang diharapkan. Hal ini berimpikasi buruk bagi pemerintah, selain *return* yang lebih rendah dari risiko dan kurang transparannya PT. Riau Air Lines terhadap pemegang saham, perusahaan ini pun tidak dapat membantu

Pemerintah Provinsi dalam melayani jalur penerbangan di wilayah Kepulaun Bangka Belitung.

Tabel 4.62  
*Varian dan Standar Deviasi Saham*  
 PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
Sms II 2006	0%	12,63%	1,60%
Sms I 2007	0%	12,63%	1,60%
Sms II 2007	-2,30%	10,33%	1,07%
Sms I 2008	-2,30%	10,33%	1,07%
Sms II 2008	-11,29%	1,34%	0,02%
Sms I 2009	-11,29%	1,34%	0,02%
Sms II 2009	-17,49%	-4,86%	0,24%
Sms I 2010	-17,49%	-4,86%	0,24%
Sms II 2010	-51,54%	-25,91%	15,14%
Jumlah			20,97%
Varians = $\sigma^2 =$			2,62%

Sumber : Diolah oleh Peneliti

$$\text{Varian Return} = \sigma^2 = 2,62\%$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{\frac{1}{2}} = 0,262^{\frac{1}{2}} = 0,1619 = 16,19\%$$

$$\text{Koefisien korelasi} = \frac{16,19\%}{-12,63\%} = -128,19\%$$

Tabel 4.62 mengambarkan *varian* dan standar deviasi atas investasi PT.BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera yang diperoleh sebagai akibat perbedaan *return* realisasi dengan *expected return*. *Expected return* atas investasi pada BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar -12,63%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tidak dapat mengharapkan *return* atas investasi pada PT.BUMD Bangka Belitung Sejahtera, karena *return* yang diharapkan sebesar -12,63% atau berupa kerugian. Hal ini pun tidak sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi pemerintah atas investasi

tersebut pemerintah provinsi sebesar 16,19%, karena selain setiap -1% atas kerugian perusahaan, pemerintah harus kehilangan sebesar -128,19%.

Tabel 4.63  
*Varian* dan standar deviasi saham  
 Bank Syariah Babel

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
Sms II 2006	0%	-6,30%	0,40%
Sms I 2007	0%	-6,30%	0,40%
Sms II 2007	10,00%	3,70%	0,14%
Sms I 2008	4,10%	-2,20%	0,05%
Sms II 2008	12,30%	6,00%	0,36%
Sms I 2009	2,90%	-3,40%	0,12%
Sms II 2009	10,00%	3,70%	0,14%
Sms I 2010	7,50%	1,20%	0,01%
Sms II 2010	10,00%	3,70%	0,14%
Jumlah			1,74%
Varians = σ <sup>2</sup> =			0,22%

Sumber : Diolah oleh Peneliti

$$Varian \ Return = \sigma^2 = 0,0022$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{\frac{1}{2}} = 0,0022^{\frac{1}{2}} = 0,0469 = 4,69\%$$

$$Koefisien \ korelasi = \frac{4,69\%}{5,3\%} = 0,744\%$$

Selain, giro, deposito, saham Bank Sumsel-Babel dan PT. Riau terdapat satu perusahaan lagi yang memberi prospek yang menguntungkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Dilihat dari *return* yang diharapkan sebagaimana sajian tabel 4.63 *return* aktual Saham Bank Syariah Babel ini sendiri berfluktuasi sejak semester dua 2006, tahun 2007 *return* realisasi sebesar 10% kemudian turun sebesar 4,10%, naik kembali sebesar 12,30% turun pada semester satu 2009 sebesar 2,90% naik kembali seperti semester dua 2007. Pada awal

semester berkurang menjadi sebesar 7,5% dilanjutkan sebesar 10% pada akhir tahun 2010.

*Varian* dan standar deviasi Saham PT. BPR Syariah sebesar 0,0022 dan risiko sebesar 4,69%. Sedangkan risiko relatif sebesar 0,744 artinya setiap 1% *return*, investor berani menanggung sebesar 4,69% risiko.

**Tabel 4.64**  
***Varian* dan Standar Deviasi Saham**  
**PDAM Kota Pangkalpinang**

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
Sms II 2007	0%	0%	0%
Sms I 2008	0%	0%	0%
Sms II 2008	0%	0%	0%
Sms I 2009	0%	0%	0%
Sms II 2009	0%	0%	0%
Sms I 2010	0%	0%	0%
Sms II 2010	0%	0%	0%
Jumlah			0%
Varians = σ <sup>2</sup> =			0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

$$\text{Varian Return} = \sigma^2 = \frac{0}{7,1} = 0$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{1/2} = 0^{1/2} = 0 = 0\%$$

$$\text{Koefisien korelasi} = \frac{0\%}{0\%} = 0\%$$

**Tabel 4.65**  
***Varian* dan Standar Deviasi Saham**  
**PDAM Kabupaten Belitung**

Tahun	Return (R <sub>i</sub> )	R <sub>i</sub> - E (R)	[R <sub>i</sub> - E (R)] <sup>2</sup>
Sms II 2007	0%	0%	0%
Sms I 2008	0%	0%	0%
Sms II 2008	0%	0%	0%
Sms I 2009	0%	0%	0%
Sms II 2009	0%	0%	0%
Sms I 2010	0%	0%	0%
Sms II 2010	0%	0%	0%
Jumlah			0%
Varians = σ <sup>2</sup> =			0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

$$Varian Return = \sigma^2 = 0$$

$$\text{Deviasi standar} = \sigma = (\sigma^2)^{\frac{1}{2}} = 0^{\frac{1}{2}} = 0 = 0\%$$

$$\text{Koefisien korelasi} = \frac{0\%}{0\%} = 0\%$$

Secara sistematis, tabel 4.66 menggambarkan *return* yang diharapkan dan risiko investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Return* dan risiko memiliki hubungan satu arah, semakin besar besar *return* yang diharapkan semakin besar pula risiko yang harus ditanggung oleh investor.

**Tabel 4.66**  
*Return* yang diharapkan, *Varian*, Deviasi Standar & Korelasi  
 Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

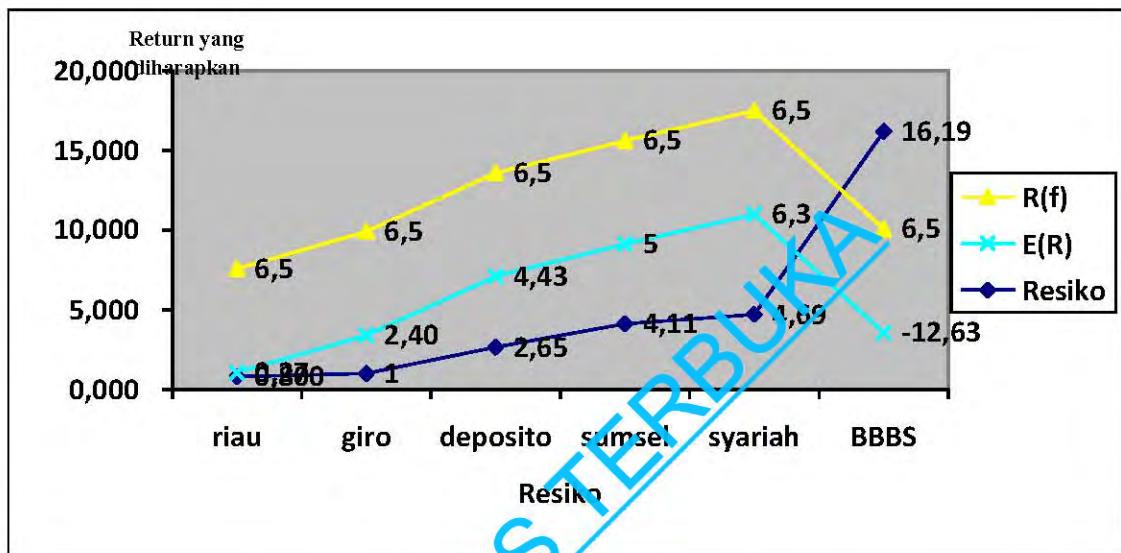
Jenis	E (R)	Varian $\sigma^2$	Deviasi Standar	Korelasi
Pendapatan Asli Daerah	12,37		16,5	
Giro	2,410	0,0100	1	0,415
Deposito	4,430	0,0702	2,65	0,598
Saham PT. Sumsel Babel	5,000	0,169	4,11	0,822
Saham PT. Sumatera Shiping Lines	(100)	0	0	0
Saham PT. Sumatera Promotion Centre	(100)	0	0	0
Saham PT Riau Airlines	0,270	0,00645	0,8	2,96
Saham Syariah Babel	6,300	0,22	4,69	0,744
Saham PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera	(12,63)	2,62	16,19	(128,19)
Saham PDAM Kota Pangkalpinang	0	0	0	0
Saham PDAM Kab Belitung	0	0	0	0

Sumber : Diolah Peneliti

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Hasil penelitian menunjukkan pada saat *return* yang diharapkan atas investasi 0%, risiko yang ditanggung sebesar 0%, pada saat *return* yang diharapkan saham Riau Air Lines sebesar 0,27%, risiko yang ditanggung sebesar 0,0080%, *return* yang diharapkan dari giro sebesar 2,40%, risiko sebesar 1%, *return* diharapkan deposito sebesar 4,43%, risiko sebesar 2,65%, *return* yang diharapkan sebesar saham BPD Sumsel-Babel sebesar 5%, dihadapkan risiko

sebesar 4,11%, dan pada saat *expected return* saham sebesar 6,3%, risiko sebesar 4,69%. Terbukti semakin besar *return* yang diharapkan investor, semakin besar risiko yang harus ditanggung tercermin dalam gambar 4.10 di bawah ini.



Gambar. 4.10

Hubungan *Return* dan Risiko yang diharapkan

Sumber : Diolah peneliti

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bunga bebas risiko dalam hal ini suku bunga Bank Indonesia memberikan *return* yang lebih tinggi dibandingkan dividen saham perusahaan, giro dan deposito. Saham Syariah Babel memberikan *return* tertinggi sebesar 6,3% atau masih di bawah dengan risiko sebesar 4,69%, sedangkan *risk free* sebesar 6,5% dengan risiko 0%. *Return* terendah sebesar – 100% atas penyertaan modal pada PT. Sumatera Shiping Lines dan PT. Sumatera Promotion Centre, dengan tingkat bebas risiko atau sebesar 0%. Ini menunjukkan kurang efektif, pemerintah daerah dalam menempatkan sumber dana yang dimiliki.

Jika ditinjau dari hubungan *return* dan risiko, terlihat yang pertama mempunyai *return* dan risiko terendah adalah saham riau Air Lines dengan *return* sebesar 0,27% dan risiko sebesar 0,80%. Kedua yaitu giro dengan *return* sebesar 2,41% dan risiko sebesar 1%. Ketiga deposito dengan *return* sebesar 4,43% dan risiko sebesar 2,65%. Keempat yaitu saham Bank Sumsel-Babel sebesar 5% dengan risiko sebesar 4,11% dilanjutkan oleh *return* PT. BPR Syariah Babel sebesar 6,3% dengan risiko sebesar 4,69%.

Dari keempat investasi tersebut terlihat bahwa semakin tinggi *return* yang diharapkan semakin besar risiko yang dihadapi. Namun pada penelitian ini, nampak terjadi perbedaan, dimana pada saat *return* yang diharapkan lebih rendah atas investasi sebesar -12,63% tingkat risiko semakin tinggi atau sebesar 16,19%. Demikian pula ketika *return* yang diharapkan sebesar -100%, risiko yang dihadapi sebesar 0%.

Gambaran *return* dan risiko tersebut menunjukkan masih lemahnya manajemen investasi yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan investasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan dan diinvestasi. Hal ini disebabkan dalam melakukan investasi, pemerintah provinsi kurang atau tidak mengetahui tujuan /motif dari investasi itu sendiri, apakah untuk meningkat pendapatan asli daerah (*profit oriented*) atau untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*benefit sosial*). Selain pemerintah provinsi mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan investasi, pemilihan strategi dan aset pembentukan portofolio serta pengukuran evaluasi kinerja investasi tersebut. Pemerintah provinsi sendiri dalam melakukan investasi, tidak

mengalami kegagalan sehingga berdampak pada rendahnya tingkat *return* yang diperoleh atau di bawah suku bunga bebas risiko, dan risiko yang ditanggung cukup tinggi.

c. Risiko Portofolio

1) Analisis *kovarian* dan *koefisien korelasi*

*Kovarian* menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kencendrungan untuk bergerak secara bersama-sama. *Koefisien korelasi* adalah ukuran statistik yang menggambarkan pergerakan relatif antara dua variabel.

Tabel 4.67 menunjukkan *return* realisasi dari investasi disertai *return* yang diharapan, *varian* dan standar deviasi masing-masing investasi.

Tabel 4.67  
*Return Giro, Deposito & Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi  
 Kepulauan Bangka Belitung Periode 2003 - 2010*

Tahun	Giro	Deposito	B.SS BB	SSL	SPC	BBBS	RAL	BSB	PDAM PKP	PDAM BLT
Sms I 2003	2,03%			-100%	-100%					
Sms II 2003	3,90%		8,10%	-100%	-100%					
Sms I 2004	1,69%		0,53%	-100%	-100%					
Sms II 2004	3,04%		4,67%	-100%	-100%					
Sms I 2005	1,64%	0,45%	0,88%	-100%	-100%					
Sms II 2005	3,36%	3,65%	3,98%	-100%	-100%					
Sms I 2006	1,96%	5,44%	2,70%	-100%	-100%					
Sms II 2006	4,54%	3,27%	3,59%	-100%	-100%	0%	0,00%	0,00%		
Sms I 2007	1,49%	4,06%	4,00%	-100%	-100%	0%	2,41%	0,00%		
Sms II 2007	2,27%	3,15%	8,37%	-100%	-100%	-2,30%	0,00%	10,00%	0%	0%
Sms I 2008	1,44%	6,62%	3,16%	-100%	-100%	-2,30%	0,00%	4,10%	0%	0%
Sms II 2008	1,67%	11,50%	8,35%	-100%	-100%	-1,10%	0,00%	12,30%	0%	0%
Sms I 2009	1,29%	3,75%	3,21%	-100%	-100%	-1,20%	0,00%	2,90%	0%	0%
Sms II 2009	2,92%	3,75%	13,16%	-100%	-100%	-17,49%	0,00%	10,00%	0%	0%
Sms I 2010	1,66%	3,77%	2,09%	-100%	-100%	-17,49%	0,00%	7,50%	0%	0%
Sms II 2010	3,45%	3,76%	13,22%	-100%	-100%	-51,54%	0,00%	10,00%	0%	0%
E (R)	2,41%	4,43%	5,00%	-100%	-100%	-12,63%	0,27%	6,30%	0%	0%
$\sigma^2$	0,0001	0,000702	0,00169	0	0	0,0262	0,0000645	0,0022	0	0
$\sigma$	0,01	0,0265	0,0411	0	0	0,1619	0,008	0,0469	0	0

Sumber : Diolah Peneliti

Tabel 4.67 menggambarkan *return* realisasi atas investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran *return* aktual terbesar setiap semester adalah sebagai berikut: semester pertama tahun 2003 atas jasa giro sebesar 2,03%, semester II tahun 2003 *return* terbesar atas dividen Bank Sumsel Babel sebesar 8,10%, semester I tahun 2004 atas jasa giro sebesar 1,69%, semester II tahun 2004 sebesar 4,67% atas dividen saham Bank Sumsel Babel, semester I tahun 2005 giro sebesar 1,64%, semester II tahun 2005 atas Saham Bank Sumsel Babel sebesar 3,98%, semester I 2006 atas deposito sebesar 5,44%, semester II tahun 2006 sebesar 4,54% atas giro, semester I tahun 2007 sebesar 4,06% atas deposito, semester II tahun 2007 sebesar 10% atas dividen Bank Syariah Babel, semester I tahun 2008 sebesar 6,62% atas deposito, semester II tahun 2008 sebesar 12,30%

atas dividen Syariah Babel, semester I tahun 2009 sebesar 3,75% atas deposito, semester II tahun 2009 sebesar 13,16% atas dividen Bank Sumsel Babel, semester I tahun 2010 sebesar 7,50% atas dividen Bank Syariah Babel dan sebesar 13,22% atas dividen Bank Sumsel Babel.

Kombinasi dari dua sekuritas dapat menghasilkan *kovarian* dan *koefisien korelasi* antar dua variabel. Penggabungan dua sekuritas tersebut dengan cara mengkali *varian* masing-masing sekuritas. Kombinasi dilakukan terhadap sepuluh sekuritas, dengan cara menggabungan setiap sekuritas secara acak. Gabungan dari masing-masing sekuritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang merupakan hasil perhitungan sebagaimana tercantum pada lampiran.

**Tabel 4.68**  
**Kovarian dan Korelasi Portofolio Sekuritas**  
**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Aset	Kovarian & Korelasi	Giro	Deposito	Sumsel	SSL	SPC	Riau	Syariah	BBBS	PDAM PKP	PDAM BLT
Giro	Kovarian	0,000100	-0,000048	0,000164	0	0	-0,0000131	-0,000012	-0,0003	0	0
Deposito	Kovarian	-0,000048	0,000700	0,000160	0	0	-0,00002	0,000270	0,000028	0	0
Sumsel	Kovarian	0,000164	0,000160	0,001690	0	0	-0,00004	0,006600	-0,0024	0	0
SSL	Kovarian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC	Kovarian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riau	Kovarian	-0,0000131	-0,00002	-0,00004	0	0	0,000060	-0,00004	0,0004	0	0
Syariah	Kovarian	-0,000012	0,000270	0,006600	0	0	-0,00004	0,001580	-0,0019	0	0
BBBS	Kovarian	-0,0003	0,000028	-0,0024	0	0	0,0004	-0,0019	0,0262	0	0
PDAMPKP	Kovarian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDAMBLT	Kovarian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Giro	Korelasi	1	-0,1811	0,3985	0	0	-0,16375	-0,02559	-0,185	0	0
Deposito	Korelasi	-0,1811	0,997	0,1469	0	0	-0,0943	0,217	0,0653	0	0
Sumsel	Korelasi	0,3985	0,1469	1	0	0	-0,12165	0,342396	-0,3607	0	0
SSL	Korelasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPC	Korelasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riau	Korelasi	-0,16375	-0,0943	-0,12165	0	0	0,9375	-0,1066	0,3088	0	0
Syariah	Korelasi	-0,02559	0,217	0,342396	0	0	-0,1066	0,718	-0,2502	0	0
BBBS	Korelasi	-0,185	0,0653	-0,3607	0	0	0,3088	-0,2502	1	0	0
PDAMPKP	Korelasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDAMBLT	Korelasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Diolah oleh Peneliti

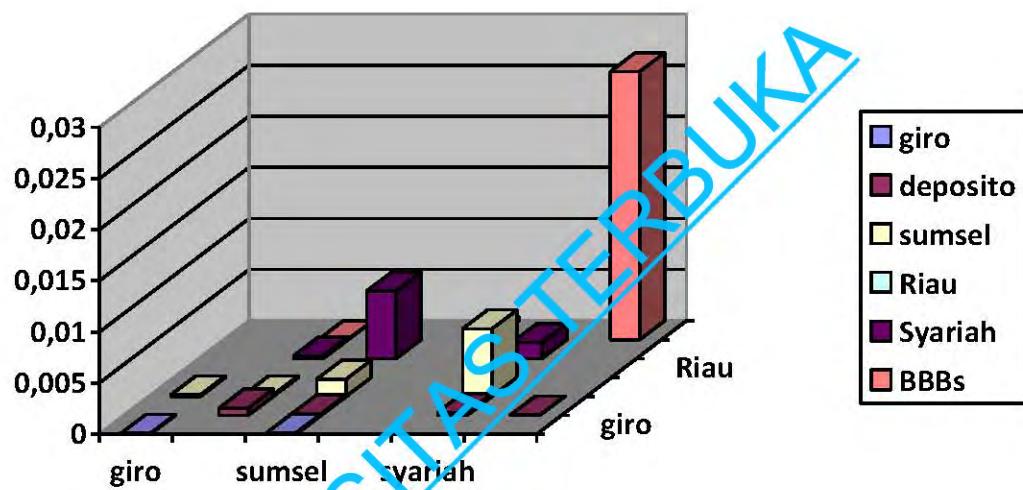
Sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 4.68 di atas, terdapat beberapa penggabungan portofolio yang menghasilkan *kovarian* positif yaitu penggabungan giro dengan giro, giro dengan Saham Bank Sumsel-Babel, deposito dengan deposito, deposito dengan Saham Bank Sumsel Babel, deposito dengan saham BPR Syariah-Babel, deposito dengan Saham BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Saham Bank Sumsel-Babel dengan Saham Bank Sumsel-Babel, Saham Bank Sumsel-Babel dengan saham Bank Syariah-Babel, Saham Riau Air Lines dan Saham Riau Air Lines, Saham Riau Air Lines dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Saham Bank Syariah-Babel dengan Saham Bank Syariah-

Babel, serta Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera. *Kovarian* positif menggambarkan jika bahwa pergerakan *return* sekuritas dimaksud cenderung bergerak kearah yang sama, di mana jika giro mengalami peningkatan, maka Saham Bank Sumsel Babel pun mengalami peningkatan dan demikian pula sekuritas lainnya seperti deposito dengan Saham Bank Sumsel Babel, Saham Bank Sumsel-Babel dengan Saham Bank Syariah-Babel, Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera.

Penggabungan antara dua sekuritas yang ~~sama~~ akan menghasilkan nilai *kovarian* yang positif, sebagaimana terlihat pada tabel 4.68 dimana penggabungan giro dengan giro menghasilkan *kovarian* positif sebesar 0,000100, penggabungan deposito dengan deposito menghasilkan *kovarian* sebesar 0,000700, penggabungan Saham Bank Sumsel Babel dengan Saham Bank Sumsel Babel menghasilkan *kovarian* positif sebesar 0,001690, penggabungan Saham Riau Air Lines dengan Saham Riau Air Lines menghasilkan *kovarian* positif sebesar 0,000060 dan penggabungan Saham Bank Syariah Babel dengan Saham Bank Syariah Babel menghasilkan *kovarian* positif sebesar 0,001580 serta penggabungan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera menghasilkan *kovarian* sebesar 0,0262.

Hasil penelitian menunjukkan diversifikasi terhadap sekuritas dengan nilai *kovarian* positif, maka hubungan *koefisien korelasinya* juga positif. Artinya jika kedua sekuritas tersebut dilakukan diversifikasi, maka tidak akan memberi manfaat terhadap pengurangan risiko. Sebagaimana ditunjuk pada tabel 4.68,

bahwa diversifikasi atas beberapa sekuritas menghasilkan hubungan *korelasi* positif sempurna atau sebesar 1. *Koefisien korelasi* positif sempurna diperoleh dengan cara menggabungan antara giro dengan giro, Saham Bank Sumsel Babel dengan Saham Bank Sumsel Babel serta penggabungan antara Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera.



Gambar 4.14  
Diversifikasi Sekuritas dengan *Koefisien korelasi* Positif Sempurna

Sumber : Dicari Peneliti

Sementara penggabungan giro dan deposito menghasilkan *kovarian* negatif sebesar  $-0,000048$  dan *koefisien korelasi* sebesar  $-0,18110$ . *Kovarian* menggambarkan bahwa diversifikasi giro dan deposito menunjukkan bahwa *return* keduanya bergerak menuju arah yang berlawanan. Jika *return* deposito naik, maka *return* giro akan turun atau sebaliknya. Hubungan koefisien *korelasi* negatif menggambarkan jika kedua sekuritas ini digabungkan maka akan dapat mengurangi risiko portofolio.

Hasil penelitian menunjukkan portofolio menunjukkan kecendrungan untuk bergerak menuju ke arah yang berkebalikan mempunyai nilai *kovarian* negatif. Adapun portofolio yang mempunyai nilai negatif adalah giro dengan deposito, giro dengan Saham Riau Air Lines, giro dengan Saham BPR Syariah Babel dan giro dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Selain itu penggabungan yang mempunyai nilai negatif yaitu deposito dan Saham Riau Air Lines, Saham Bank Sumsel-Babel dengan Saham Riau Air Lines, Saham Bank Sumsel-Babel dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Saham Riau Air Lines dengan Saham BPR Syariah-Babel, Saham BPR Syariah-Babel dengan Bumi Bangka Belitung Sejahtera.

Selain menghasilkan *kovarian* dan *koefisien korelasi* bersifat positif dan negatif, hasil penelitian menunjukkan adanya *kovarian* dan *koefisien korelasi* bernilai nol. *Kovarian* nol mengindikasikan bahwa pergerakan dua sekuritas bersifat independen satu dengan lainnya. Sedangkan *koefisein korelasi* bernilai nol, menunjukkan tidak adanya *korelasi* antar sekuritas dimaksud.

Pada tabel 4.68 menunjukkan bahwa diversifikasi yang dilakukan terhadap investasi perusahaan dengan tingkat risiko nol, menghasilkan *kovarian* dan *koefisien korelasi* nol. Seperti halnya penggabungan giro dengan Saham Sumatera Shiping Lines, Saham Sumatera Promotion Centre, penyertaan modal PDAM Pangkalpinang, dan penyertaan modal pada PDAM Belitung. Demikian juga penggabungan deposito, Saham BPD Sumsel Babel, Saham Riau Air Lines, Saham Syariah Babel, Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan Saham Sumatera Shiping Lines, Saham Sumatera Promotion Centre, penyertaan modal

pada PDAM Pangkalpinang dan penyertaan modal pada PDAM Belitung menghasilkan *kovarian* dan *koefisien korelasi* nol. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan sekuritas tersebut bersifat independen satu dengan lainnya dan diantara mereka tidak berkorelasi satu dengan lainnya.

*Kovarian* yang dihasilkan jika penggabungan giro dengan saham BPD Sumsel-Babel sebesar 0,000164. Menunjukkan bahwa *return* giro dan saham cenderung bergerak menuju kearah yang sama, tetapi berbeda ketika terjadi penggabungan antara giro dengan Syariah Babel, dimana *kovarian* sebesar -0,000012 atau pergerakan *return* saham dan giro menuju kearah yang berbalikan. Pada saat suku bunga naik orang cenderung menyimpan uang di bank, tetapi saat suku bunga lebih cendrung menginvestasikan dalam bentuk saham. *Koefisien korelasi* giro dan saham Bank Sumatra Selatan sebesar 0,3985, terdapat *korelasi* positif. Jika dilakukan penggabungan tidak akan dapat mengurangi risiko kedua sekuritas ini.

*Korelasi* positif sempurna terjadi ketika melakukan penggabungan antara giro dengan giro. Saham Bank Sumsel Babel dengan Saham Bank Sumsel Babel serta Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Kombinasi sekuritas giro dengan penyertaan modal pada PT.BUMD PDAM Pangkalpinang dan PT. BUMD PDAM Belitung menghasilkan *kovarian* dan *koefisien korelasi* nol. *Kovarian* nol mengindikasi bahwa pergerakan dua sekuritas tersebut bersifat independen satu dengan lain, sedangkan *korelasi* nol menggambarkan tidak ada pergerakan antara dua kombinasi sekuritas, baik

antara giro dengan penyertaan modal pada BUMD PDAM Pangkalpinang, maupun PDAM Belitung.

Penggabungan antara deposito dengan deposito, menghasilkan *kovarian* positif sebesar 0,00070. *Return* kedua asset ini cenderung bergerak dalam arah yang sama. Apabila kedua asset ini diversifikasi tidak akan menghilangkan risiko kedua asset ini, sebab *korelasi* yang dimiliki positif sempurna atau sebesar 0,997. Demikian halnya diversifikasi deposito dan sumsel babel dapat menyebabkan *return* cendrungan bergerak bersama-sama dalam arah yang sama. *Kovarian* yang didapat sebesar 0,00016 dan *korelasi* sebesar 0,1469, artinya diversifikasi ini tidak akan mengurangi risiko dari kedua sekuritas memiliki *korelasi* positif. *Kovarian* perkawinan antara deposito dan saham Sumatera Shiping Lines sebesar nol dan *korelasi* sebesar nol. *Kovarian* nol menunjukkan bahwa pergerakan kedua sekuritas ini bersifat independen sedangkan *korelasi* nol akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan.

Demikian juga hasil gabungan antara deposito dan saham Sumatera Promotion Center menghasilkan *kovarian* sebesar nol dan *korelasi* sebesar nol. *Kovarian* nol menunjukkan bahwa pergerakan kedua sekuritas ini bersifat independen sedangkan *korelasi* nol akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Diversifikasi deposito dan Saham Riau Air Lines, memberi dampak terhadap pengurangan risiko dengan *korelasi* negatif sebesar – 0,0943. Sebaliknya *kovarian* negatif sebesar – 0,00002 menggambarkan bahwa *return* deposito dan Saham Riau Air Lines bergerak menuju arah berlawanan.

Hasil penggabungan sekuritas deposito dan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera menghasilkan *kovarian* 0,000028 dan *koefisien korelasi* 0,0653. Jika keduanya digabungnya tidak memberi manfaat pengurangan risiko. Pergerakan deposito dan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera bersifat positif dan mempunyai pergerakan yang sama. Demikian juga dengan penggabungan sekuritas deposito dan Saham BPR Syariah Babel memiliki kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama menuju kearah yang sama. *Kovarian* diperoleh sebesar 0,00027 dengan *korelasi* sebesar 0,217. Diversifikasi deposito dan Saham BPR Syariah Babel menghasilkan hubungan positif. Jika dua sekuritas digabungkan tidak akan mengurangi risiko dari sekuritas tersebut.

Diversifikasi Saham BPD Sumsel-Babel menghasilkan *kovarian* sebesar 0,00169 dengan *koefisien korelasi* sebesar satu. Kedua sekuritas ini mempunyai kecenderungan bergerak secara bersama menuju arah yang sama. *Koefisien korelasi* satu berarti diversifikasi Saham BPD Sumsel Babel berkorelasi positif sempurna. Namun demikian *korelasi* ini tidak memberi manfaat terhadap pengurangan risiko. Sedangkan *kovarian* dan *korelasi* Saham Bank Sumsel-Babel dan Saham Sumatera Shipping Lines sama dengan nol artinya pergerakan sekuritas Saham Bank Sumsel-Babel dan Saham Sumatera Shipping Lines bersifat independen dan tidak berkorelasi satu dengan lainnya, demikian pula diversifikasi terhadap Saham Bank Sumsel-Babel dan Saham Sumatera Promotion Centre.

Hasil analisis menunjukkan diversifikasi sekuritas Saham Bank Sumsel Babel dan Saham Riau Air Lines sebesar - 0,00004 dan *koefisien korelasi* -0,12165. Pergerakan Saham Bank Sumsel Babel dan Saham Riau Air Lines

bersifat independen satu sama lain dan keduanya berkorelasi negatif sempurna. Jika kedua saham ini digabungkan akan dapat menghilangkan risiko dari masing-masing saham.

Diversifikasi antara Saham Sumsel-Babel dengan Saham Bumi Bangka Belitung sejahtera menghasilkan *kovarian* sebesar – 0,0024 dan *korelasi* sebesar – 0,3607. Ini menunjukkan pergerakan kedua saham tersebut mempunyai pergerakan yang berbalik arah. *Kovarian* yang dihasilkan atas diversifikasi saham Sumsel Babel dan Syariah sebesar 0,00066, dengan *koefisien korelasi* sebesar 0,342396. Hasil *kovarian* menunjukkan bahwa pergerakan saham Sumsel Babel dan Syariah Babel cenderung bersama dan menuju kearah yang sama. Kedua saham ini berkorelasi positif sempurna, jika keduanya digabungkan tidak akan mengurangi risiko masing-masing saham.

*Kovarian* dan *korelasi* atas diversifikasi Saham Bank Sumsel Babel dengan Penyertaan modal pada PDAM Pangkalpinang bernilai nol, menunjukkan keduanya tidak berkorelasi dan pergerakan bersifat independen. Hasil penelitian, bahwa penggunaan dua sekuritas, dimana salah satunya memiliki *return* aktual nol, maka *expected returnnya* dan standar deviasinya akan menghasilkan nilai nol. Demikian pula *kovarian* dan *koefisien korelasinya* akan bernilai nol, sebagaimana digambarkan pada tabel-tabel sebelumnya.

Diversifikasi sekuritas yang *kovarian* dan *korelasi* sama dengan nol adalah, Saham Bank Sumsel Babel dan penyertaan modal PDAM Belitung, Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham Sumatera Promotion Centre, Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham Riau Air Lines, Saham Sumatera Shiping

Lines dan Saham BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham BPR Syariah Babel, Saham Sumatera Shiping Lines dan penyertaan modal pada BUMD PDAM Pangkalpinang, dan Saham Sumatera Shiping Lines dan penyertaan modal BUMD PDAM Belitung. Demikian juga penggabungan antara Saham Sumatera Promotion Centre dan Saham Riau Air Lines, Saham Sumatera Promotion Centre dan Saham BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Saham Sumatera Promotion Centre dan Saham BPR Syariah Babel, Saham Sumatera Promotion Centre dan penyertaan modal pada PDAM Pangkalpinang serta Saham Sumatera Promotion Centre dan penyertaan modal pada PDAM Belitung.

*Kovarian dan korelasi* Saham Riau Air Lines dan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera, Saham Riau Air Lines dan penyertaan modal pada PDAM Pangkalpinang serta Saham Riau Air Lines dan penyertaan modal pada PDAM Belitung mengalami hal yang serupa, yaitu memiliki *kovarian* dan *korelasi* nol. Berbeda, dengan sebelumnya penelitian terhadap diversifikasi saham Riau Air Lines, menunjukkan *kovarian* sebesar 0,00006 dan *koefisien korelasi* sebesar 0,9375. *Kovarian* ini sangat kecil sekecil hampir mendekati angka nol. Walaupun demikian kondisi ini masih menunjukkan terjadinya kecendrungan pergerakan bersama menuju kearah yang sama, tetapi penggabungan pada sekuritas saham Riau Air Lines tidak akan mengurangi risiko saham tersebut, sebab *koefisien korelasi* sebesar 0,9375.

*Kovarian dan korelasi* atas diversifikasi Saham Riau Air Lines dan Saham BPR Syariah Babel menunjukkan bahwa kecendrungan kedua sekuritas itu

menuju arah yang berbalikan dan mempunyai *korelasi* negatif sempurna. Besaran *kovarian* dan *korelasi* Saham Riau Air Lines dan Saham BPS Syariah Babel - 0,00004 dan - 0,1066.

Berbeda dengan diversifikasi Saham Riau Air Lines dan Saham BPR Syariah menghasilkan *korelasi* negatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan pada sekuritas Saham BPR Syariah Babel menghasilkan *korelasi* positif sempurna dan pergerakan *return* saham cenderung menunjukkan ke arah yang sama dan bersama. *Kovarian* dan *korelasi* portofolio sekuritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersaji dalam tabel 4.70

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010, menunjukkan jumlah investasi Pemerintah Provinsi di beberapa perusahaan, baik perusahaan daerah dan perusahaan swasta sebesar Rp. 273.767.472.651,- Jumlah investasi tersebut sebagaimana tercantum pada tabel 4.69.

Tabel 4.69  
Alokasi Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama	Jumlah	Prosentase
1	Giro	190.019.472.651	0,6941
2	Deposito	50.000.000.000	0,1826
3	Saham pada Bank Sumsel -Babel	16.000.000.000	0,0584
4	Saham pada Sumatera Shipping Airlines	100.000.000	0,0004
5	Saham Sumatera Promotion Centre	100.000.000	0,0004
6	Saham Riau Airlines	1.000.000.000	0,0037
7	Saham Bangka Belitung Sejahtera	4.000.000.000	0,0146
8	Saham Bank Syariah Babel	3.600.000.000	0,0131
9	Penyertaan Modal pada PDAM Pangkalpinang	8.216.750.000	0,0300
10	Penyertaan Modal pada PDAM Kab Belitung	731.250.000	0,0027
	Jumlah	273.767.472.651	1,0000

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep.Babel, diolah.

*Return* harapan dari portofolio diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari masing-masing aset individual yang ada di portofolio. Proporsi jumlah dana berpengaruh terhadap *return* yang diharapkan portofolio. Hasil penelitian terhadap *return* yang diharapkan dari portofolio investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

**Tabel 4.70**  
**Return Yang Diharapkan dan Risiko Portofolio Sekuritas**  
**Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Aset	Expected Return & Risiko	Giro	Deposito	Sumsel	SSL	SPC	Riau	Syariah	BBBS	PDAMPKP	PDAMBLT
Giro	Rp	2,40	3,02	3,2	1,67	1,67	1,75	3,59	-2,2	1,67	1,67
Deposito	Rp	3,02	4,43	4,9	0,81	0,81	1,32	5,960	-9,51	0,81	0,81
Sumsel	Rp	3,20	4,9	5	0,29	0,29	0,55	6,22	-11,6	0,29	0,29
SSL	Rp	1,67	0,81	0,29	0	0	0,27	6,3	-12,62	0	0
SPC	Rp	1,67	0,81	0,29	0	0	0,27	6,3	-12,62	0	0
Riau	Rp	1,75	1,03	0,55	0,27	0,27	0,27	6,28	-12,58	0	0
Syariah	Rp	3,59	5,96	6,22	6,3	6,3	6,28	6,3	-12,38	-0,083	-0,083
BBBS	Rp	-2,2	-9,51	-11,6	-12,62	-12,62	-12,58	-12,38	-12,63	-0,18	-0,18
PDAMPKP	Rp	1,67	0,81	0,29	0	0	0	-0,083	-0,18	0	0
PDAMBLT	Rp	1,67	0,81	0,29	0	0	0	-0,083	-0,18	0	0
Giro	Risiko	1,388	0,771	0,820	0,694	0,694	0,694	5,905	23,519	0,694	0,694
Deposito	Risiko	0,771	0,967	0,571	0,484	0,484	0,484	6,006	23,670	0,484	0,484
Sumsel	Risiko	0,820	0,571	0,480	0,240	0,240	0,241	5,968	23,550	0,240	0,240
SSL	Risiko	0,694	0,484	0,240	0	0	0,003	5,882	23,637	0	0
SPC	Risiko	0,694	0,484	0,240	0	0	0,003	5,882	23,637	0	0
Riau	Risiko	0,694	0,484	0,241	0,003	0,003	0,006	5,882	23,638	0,003	0,003
Syariah	Risiko	5,905	6,006	5,968	5,882	5,882	5,882	10,90	22,880	5,882	5,882
BBBS	Risiko	23,52	23,67	23,55	23,64	23,64	23,64	22,89	47,28	23,64	23,64
PDAMPKP	Risiko	0,694	0,484	0,240	0	0	0,00300	5,882	23,637	0	0
PDAMBLT	Risiko	0,694	0,484	0,240	0	0	0,00300	5,882	23,637	0	0

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Babel, diolah.

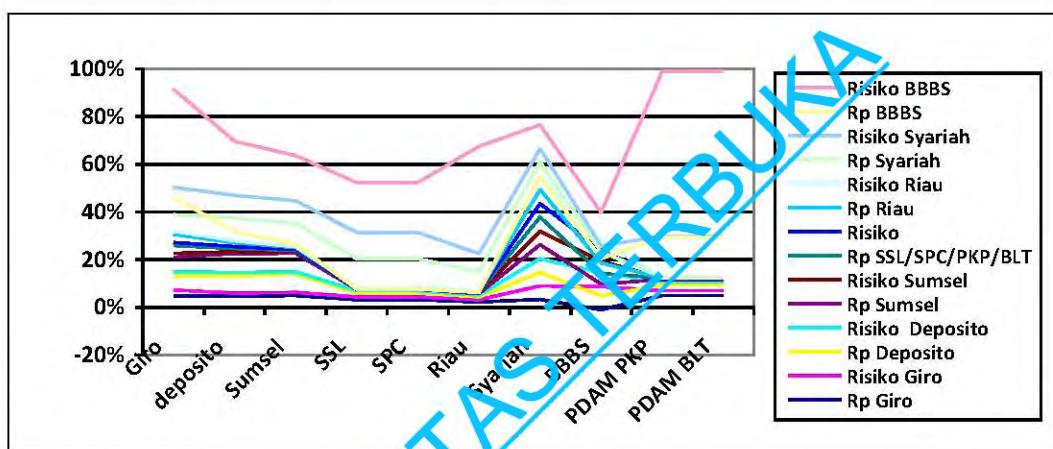
Tabel 4.70 menunjukkan *return* yang diharapkan dan risiko dari portofolio dari Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diversifikasi atas dua sekuritas yang sama menghasilkan *expected return* portofolio yang sama

*expected return* sekuritas tersebut, seperti giro dan giro, deposito dan deposito, Saham Sumsel Babel dan Saham Sumsel Babel, Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham Sumatera Shiping Lines, Saham Sumatera Promotion Centre dan Saham Sumatera Promotion Centre, Saham Riau Air Lines dan Saham Riau Air Lines, Saham Syariah Babel dan Saham Syariah Babel, Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera, penyertaan modal pada PDAM Pangkalpinang dan penyertaan modal Pangkalpinang, serta penyertaan modal PDAM Belitung dan penyertaan modal pada PDAM Belitung.

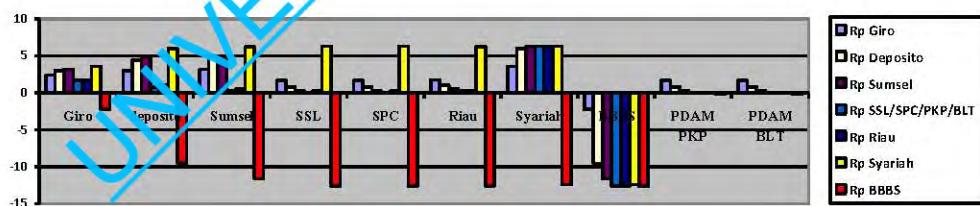
Diversifikasi pada sekuritas giro dengan *koefisien korelasi* sebesar 1 atau hubungan positif sempurna tidak memberi manfaat pengurangan risiko tetapi, akan meningkatkan risiko. Ini terjadi ketika diversifikasi antara giro dan giro, risiko giro yang semula sebesar 1% meringkat menjadi sebesar 1,388% ketika dilakukan diversifikasi dengan giro. Namun berbeda halnya ketika dilakukan diversifikasi antara Saham Sumsel Babel dengan Saham Sumsel Babel, *return portofolionya* tetap sebesar 5% tetapi risiko portofolio menurun atau sebesar 0,480%. Hal ini tidak berlaku pada portofolio saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera, yang *koefisien korelasi* 1% risikonya pun meningkat atau sebesar 47,275%.

Tingkat *expected return* portofolio tertinggi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada investasi Saham Syariah Babel sebesar 6,3% dan *expected return* terendah pada Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar -12,63%. Sebaliknya tingkat risiko portofolio tertinggi pada Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar 47,275% dan terendah sebesar 0% terdapat

pada portofolio beberapa sekuritas seperti Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham Sumatera Shiping Lines, Saham Sumatera Shiping Lines dan Sumatera Promotion Centre, Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham PDAM Pangkalpinang, Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham PDAM Belitung atau sebaliknya. Gambaran *Expected Return* dan Risiko Portofolio Investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergambar di bawah ini.



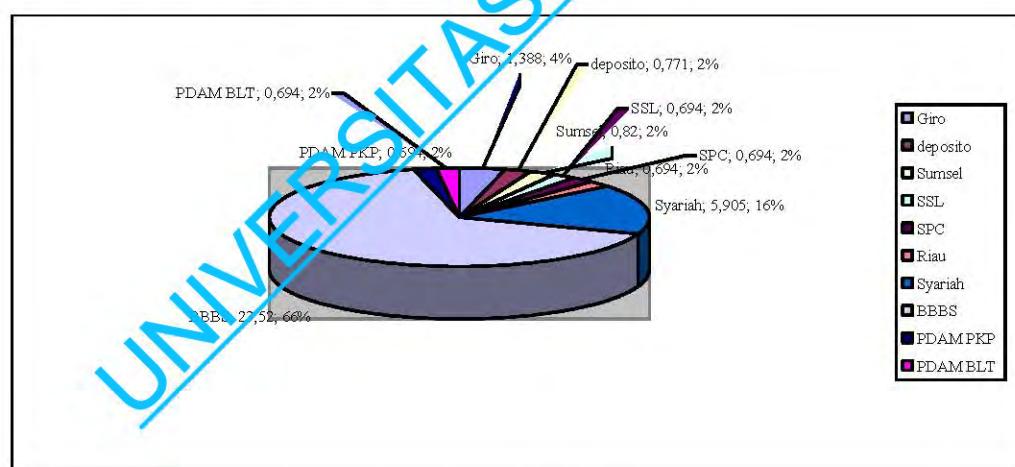
Gambar 4.12  
Diagram Garis *Expected Return* dan Risiko Portofolio



Gambar 4.13  
Diagram Batang *Expected Return* Portofolio

Gambar 4.16 Menunjukkan *return* yang diharapkan dan risiko portofolio atas investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dilihat dari urutannya, Portofolio Bumi Bangka Belitung Sejahtera memiliki *return* yang diharapkan terendah dibandingkan portofolio lain pada investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara tingkat *return* yang diharapkan

tertinggi yaitu diversifikasi Saham Syariah Babel, Saham Syariah Babel dan Saham Sumatera Shiping Lines, Saham Syariah Babel dan Saham Sumatera Promotion Centre sebesar 6,3%. Urutan kedua yaitu diversifikasi Saham Bank Sumsel dan Saham Riau Air Lines sebesar 6,28%. Ketiga yaitu penggabungan antara Saham Sumsel Babel dan Saham Syariah Babel sebesar 6,22%. Keempat diversifikasi Deposito dan Saham Syariah Babel sebesar 5,96%. Kelima diversifikasi deposito dan Saham Sumsel Babel sebesar 4,90%, keenam diversifikasi deposito sebesar 4,43%. Ketujuh portofolio giro dan Saham BPR Syariah Babel sebesar 3,59%, kedelapan, portofolio giro dan Saham Sumsel Babel sebesar 3,20%, kesembilan giro dan deposito sebesar 3,02% dan kesepuluh portofolio giro sebesar 2,40%.



Gambar 4.14  
Diagram Pie Risiko Portofolio Investasi Pemerintah Prov.Kep.Babel

Gambar 4.14, menunjukkan bahwa risiko portofolio terbesar ada pada Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera, kedua Saham Syariah Babel, ketiga giro, keempat Saham Bank Sumsel Babel, kelima deposito, sedangkan penyertaan modal PDAM Pangkalpinang, PDAM Belitung, Sumatera Shiping Lines,

Sumatera Promotion Centre menunjukkan tingkat risiko yang sama sebesar 0,694%. Risiko portofolio terkecil ada pada penyertaan modal pada PDAM Pangkalpinang, PDAM Belitung, Saham Sumatera Shipping Lines, Saham Sumatera Promotion Centre serta Saham Riau Air Lines.

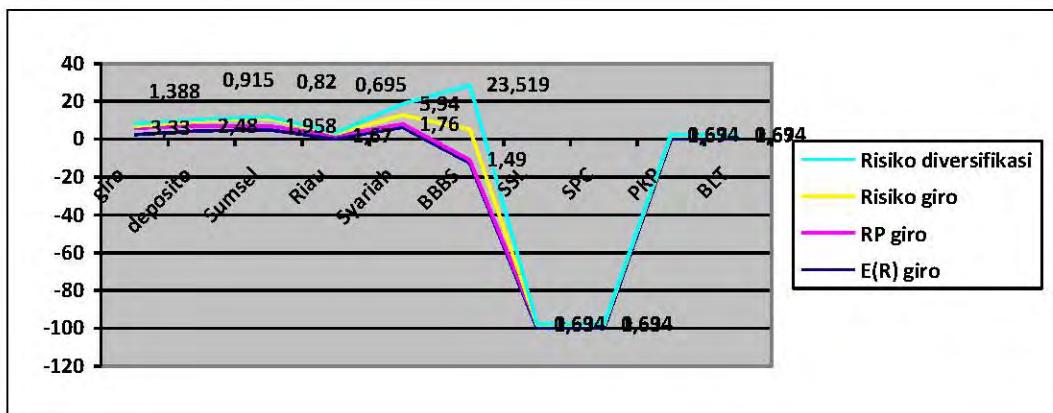
Setiap sekuritas yang digabungkan dengan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera dapat mengurangi kerugian atas *expected return* dan meningkatkan risiko sekuritas tersebut. Dalam keadaan normal *return* yang diharapkan dari sekuritas Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar -12,63%, ketika dilakukan diversifikasi terjadi penurunan terhadap kerugian *expected return*. Hasil penggabungan sekuritas Bumi Bangka Belitung Sejahtera dan Saham Sumatera Promotion Centre/Sumatera Shiping Lines menghasilkan tingkat *return* yang diharapkan sebesar -12,62%, dan penggabungan dengan Saham Riau Air Lines *return* yang diharapkan mengalami penurunan atau sebesar -12,58%. Ketika dilakukan diversifikasi dengan saham yang memiliki tingkat *return* yang diharapkan paling tinggi, terjadi penurunan yang tidak begitu besar atau sebesar -12,38%, sedangkan ketika dilakukan diversifikasi dengan saham dengan tingkat *return* yang diharapkan terendah atau giro, *expected return* mengalami penurunan menjadi -2,20%. Hal ini disebabkan karena giro memiliki bobot yang tinggi dibandingkan sekuritas yang lain.

Diversifikasi yang dilakukan pada sekuritas yang sama seperti giro, deposito, Saham Bank Sumsel Babel, Saham BPR Syariah Babel, Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera menghasilkan *return* portofolio yang tetap. Ketika *return* yang diharapkan atas sekuritas Saham Sumsel Babel sebesar 5%, *return*

portofolionya pun sebesar 5%, akan tetapi risiko portofolio mengalami penurunan atau sebesar dari 0,48%. Sebaliknya *return* yang diharapkan dari portofolio Saham Syariah Babel sebesar 6,3%, tetapi pada saat dilakukan diversifikasi terjadi peningkatan risiko sebesar 10,90%

Sementara penggabungan giro dengan giro menghasilkan *expected return* tertinggi sebesar 3,33% dengan risiko sebesar 1,388%, sedangkan *expected return* terendah yaitu diversifikasi antara Bumi Bangka Belitung Sejahtera dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar -12,63%, dimana penggabungan keduanya tidak dapat mengurangi risiko akan tetapi meningkatkan risiko portofolio sebesar 47,25% karena *koefisien korelasinya* sempurna atau 1%. Hal ini juga disebabkan BUMD ini mengalami kerugian, jika dilakukan penambahan modal pada perusahaan tersebut, pemerintah provinsi harus siap kehilangan atas biaya kesempatan sebesar 47,275%.

Tandelin menyalahgunakan bahwa *kovarian* positif menunjukkan kecenderungan dua sekuritas bergantung kearah yang sama dan *koefisien korelasi* positif tidak memberi manfaat pengurangan risiko. Diversifikasi sekuritas giro dan giro menghasilkan *expected return* sebesar 3,33% dan risiko sebesar 1% dengan *kovarian* giro dan giro sebesar 0,0001 dan *koefisien korelasi* sebesar 1. Hal ini dapat dibuktikan oleh gambar 4.15 di bawah ini.



Gambar 4.15  
Diagram Garis *Expected Return* dan Risiko Investasi  
serta *Expected Return* dan Risiko Portofolio

Gambar 4.15, menunjukkan ketika *expected return* giro sebesar 2,40%, deposito sebesar 4,43%, Saham Sumsel Babel sebesar 5%, Saham Riau Air Lines sebesar 0,27%, Saham BPR Syariah Babel 6,3% dan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar -12,63% serta Saham Sumatera Shiping Lines dan Saham Sumatera Promotion Centre sebesar -100% dan penyertaan modal PDAM Pangkalpinang dan penyertaan modal pada PDAM Belitung sebesar 0%. Ketika dilakukan diversifikasi terjadi peningkatan terhadap *expected return* portofolio giro sebesar 3,33%, tetapi terjadi penurunan terhadap portofolio yang lain seperti *expected return* portofolio giro dan deposito sebesar 2,48%, giro dan Saham Bank Sumsel Babel sebesar 1,958%, giro dan Saham Sumatera Shiping Lines sebesar 1,63%, giro dan Saham Sumatera Promotion Centre sebesar 1,63%, giro dengan Saham Riau Air Lines sebesar 1,67%, giro dengan Saham BPR Syariah Babel sebesar 1,76%, giro dan Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar 1,49% serta sebesar 1,67% giro dengan penyertaan modal PDAM Pangkalpinang dan penyertaan modal PDAM Belitung.

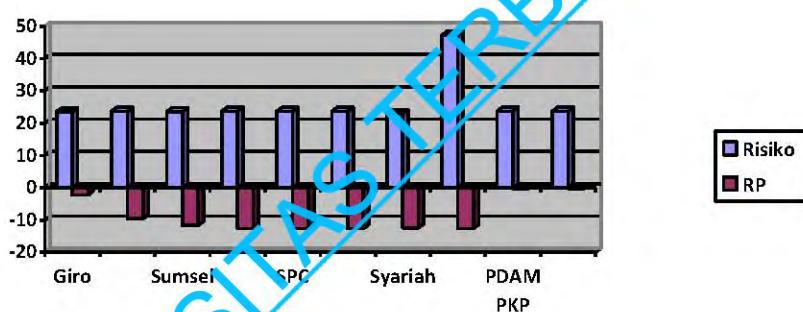
Hal, ini sedikit berbeda ketika *kovarian* diversifikasi portofolio dua sekuritas positif seharusnya keduanya bergerak bersama menuju arah yang sama dan dapat meningkatkan *return* dari portofolio kedua sekuritas tersebut. Pada prakteknya pengabungan giro dan Saham Bank Sumsel Babel dengan dengan *expected return* masing-masing sekuritas sebesar 2,40% dan 5% serta *kovarian* portofolio sebesar 0,000164, menghasilkan tingkat *return* yang diharapkan sebesar 1,958% atau lebih rendah yang disebabkan kurang optimalnya Pemerintah Provinsi dalam mengalokasikan dana investasi, dimana bobot sekuritas yang lebih tinggi *returnnya* (Saham Bank Sumsel Babel) lebih rendah dari bobotnya dari sekuritas yang *returnnya* lebih rendah (giro).

Demikian pula halnya dengan risiko portofolio dari kedua sekuritas tersebut (giro ; Saham Bank Sumsel Babel) seharusnya tidak terjadi pengurangan risiko karena *koefisien korelasinya* bersifat positif. Namun hasil penelitian menunjukkan diversifikasi kedua sekuritas tersebut, menyebabkan adanya penurunan risiko, dimana risiko giro dan Saham Bank Sumsel Babel sebelum diversifikasi sebesar 1% dan 4,11%, setelah diversifikasi menjadi sebesar 0,820%.

Sama hal dengan diversifikasi giro dan Saham Bank Sumsel Babel, Portofolio deposito dan deposito, deposito dan Saham Bank Sumsel Babel, deposito dan Saham Bank Syariah Babel, Saham Bank Sumsel Babel dan Saham Bank Sumsel Babel, Saham Bank Sumsel Babel dan Saham BPR Syariah Babel, Saham Riau Air Lines dan Saham Riau Air Lines, Saham BPR Syariah Babel dan Saham BPR Syariah Babel. Diversifikasi terhadap sekuritas ini tidak meningkatkan *return* yang diharapkan, sebaliknya dapat menurunkan *expected*

*return* portofolio. Namun demikian terjadi pengurangan risiko, walaupun *koefisien korelasinya* positif atau positif sempurna.

Pesan Markowitz jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang karena kalau keranjang tersebut jatuh maka semua telur yang ada dalam keranjang tersebut akan pecah, hal ini dapat buktikan ketika dilakukan investasi pada Bumi Bangka Belitung Sejahtera, dimana *retrun* yang diharapkan sebesar - 12,63% tetapi risiko yang harus ditanggung meningkat atau sebesar 47,275%. Ini tergambar pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.16  
Diagram Batang *Expected Return* dan Risiko Portofolio  
Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera

Gambar 4.16, menunjukkan tidak efektif Investasi pada Perusahaan Daerah Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Tingkat risiko yang dihadapi lebih tinggi dari tingkat *return* yang diharapkan. Ketika posisi *expected return* sebesar -2,2%, risiko yang harus ditanggung sebesar 23,52%, *expected return* sebesar -9,51%, risiko yang dihadapi sebesar 23,67%, *expected return* sebesar -11,6%, risiko yang harus ditanggulangi sebesar 23,55%. Puncak risiko terbesar ketika seluruh dana diinvestasikan pada Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera, hal ini

dapat menyebabkan kenaikan risiko sebesar 47,28% dengan tingkat *expected return* yang tetap atau sebesar 12,63%

Tabel 4.71  
Data *Return*, Standar Deviasi Saham

Aset	E(R)	Deviasi Standar	N
Giro	2,4	1	16
Deposito	4,43	2,65	12
Sumsel-Babel	5	4,11	16
Sumatera Shiping Lines	-100	0	16
Sumatera Promotion Centre	-100	0	16
Riau Airlines	0,27	0,008	9
BPR Syariah-Babel	6,3	4,69	9
Bumi Bangka Belitung Sejahtera	-12,63	16,19	9
PDAM Pangkalpinang	0	0	7
PDAM Belitung	0	0	7

Diolah oleh Peneliti

*Return* yang diharapkan dan risiko individual dari masing-masing sekuritas ditunjuk pada tabel 4.71. menunjukkan jumlah aliran kas *return*, berupa E(R) *expected return* dan deviasi standar menunjukkan risiko yang dihadapi. *Return* tertinggi sebesar 6,3% terdapat pada Saham PT. BPR Syariah Babel dan *return* terendah pada Saham PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera sebesar – 12,63%.

Tabel 4.72  
Alokasi Dana Setiap Asset dalam Portofolio

Portofolio	Giro	Deposito	Sumsel Babel	Syariah Babel	Riau	SSL	SPC	BBBS	PKP	BLT	Jumlah
Bobot	0,694	0,183	0,058	0,013	0,0037	0,0004	0,0004	0,0146	0,030	0,0027	1,000
Return	2,400	4,430	5,000	6,300	0,270	0	0	-12,63	0	0	5,770
	1,666	0,809	0,292	0,083	0,001	0	0	-0,184	0	0	2,666

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah.

Dalam berinvestasi, investor dalam memilih menginvestasikan dana pada berbagai aset, baik aset berisiko maupun aset yang bebas risiko atau kombinasi dari berbagai aset. Hal ini sangatlah tergantung preferensi dari investor. Dalam portofolio dikenal portofolio efisien dan portofolio optimal. Portofolio efisien menyediakan *return* maksimal dengan tingkat risiko tertentu, sedangkan portofolio optimal menawarkan risiko terendah dengan tingkat *return* tertentu.

Tabel 4.72 menunjukkan bobot dan *return* atas investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jika dilakukan diversifikasi atas investasi tersebut terlihat bahwa *expected return* mengalami penurunan, karena alokasi atas investasi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini disebabkan alokasi dana yang digunakan untuk investasi yang tingkat *return* yang diharapkan lebih tinggi, pada prakteknya lebih kecil dibandingkan investasi yang *expected return*nya rendah. Selain itu hal ini disebabkan terdapat investasi yang tidak mendatangkan *return* atau menyumbangkan *return* yang negatif bagi pemerintah provinsi. *Return* optimal yang diharapkan dari portofolio investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,666%.

Jika alokasi dana investasi Pemerintah Provinsi diubah pada sekuritas yang mendatangkan *return*, dapat ditunjuk pada tabel 4.73 dibawah ini.

Tabel 4.73  
Kombinasi Aset Portofolio

Kombinasi	WGCG	WDDD	WSBSBSB	WSYSYSY	E (Rp)
1	0,84%	0,44%	1,00%	2,21%	4,49%
2	1,32%	0,22%	0,75%	2,21%	4,50%
3	0,60%	1,11%	1,25%	1,58%	4,53%
4	0,48%	0,53%	2,90%	0,63%	4,54%
5	0,84%	0,89%	0,25%	2,52%	4,50%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Tabel 4.73 mengambarkan kombinasi sekuritas yang menghasilkan *return*, yang terdiri dari giro, deposito, Saham Bank Sumsel Babel, Saham BPR Syariah Babel, dimana kombinasi pertama, bobot giro sebesar 35%, deposito sebesar 10%, Saham Bank Sumsel Babel sebesar 20% dan Saham BPR Syariah Babel sebesar 35%. Kombinasi kedua, bobot sekuritas masing-masing sebanyak 55% giro, 5% deposito, 15% Saham Bank Sumsel Babel dan 35% Saham BPR Syariah Babel. Kombinasi ketiga, masing-masing sekuritas sebesar 25% dan kombinasi keempat, 20% giro, 12% deposito, 58% Saham Bank Sumsel Babel, dan 10% Saham BPR Syariah Babel. Kombinasi kelima, bobot sekuritas giro sebesar 35%, deposito 2%, Saham Bank Sumsel Babel 5% dan Saham BPR Syariah Babel 4%. Kombinasi dari masing-masing sekuritas, menunjukkan tingkat *expected return* yang tertinggi atau sebesar 4,5%.

Tabel 4.74  
Alokasi Kombinasi Asset Portofolio

Kombinasi	W GGG	WDDD	WSBSBSB	WSYSYSY	E (Rp)
E(R)	2,11	4,43	5,00	6,30	4,5
$\sigma^2$	1,00	2,65	4,11	4,69	
1	35,00	10,00	20,00	35,00	4,5
2	55,00	5,00	15,00	35,00	4,5
3	25,00	25,00	25,00	25,00	4,5
4	20,00	12,00	58,00	10,00	4,5
5	33,00	2,00	5,00	4,00	4,5

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

#### Koefisien korelasi (Kovarian)

- |   |                        |
|---|------------------------|
| Antara Giro dan Deposito                    | = -0,1811 (-0,000048)  |
| Antara Giro dan Saham Bank Sumsel Babel     | = 0,3985 (0,0001638)   |
| Antara Giro dan Saham BPR Syariah Babel     | = -0,02559 (-0,000012) |
| Antara Deposito dan Saham Bank Sumsel Babel | = 0,1469 (0,00016)     |

Antara Deposito dan Saham BPR Syariah Babel = 0,217 (0,00027)

Antara Saham Bank Sumsel Babel dan Saham Bank Syariah Babel = 0,342396

(0,00066)

*Eficient frontier* dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut :

$$\sigma^2 p = \sum_{i=1}^n W_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=j}^n \sum_{j=1}^n W_i W_j \sigma_{ij}$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 = & 0,01^2 W^2 Giro + 0,0265 W^2 Deposito + 0,0411^2 W^2 SumselBabel + 0,0469^2 \\ & W^2 Syariah Babel + 2WgiroWdeposito(-0,000048) + 2WgiroWSumselBabel \\ & 0,0001638 + 2WSumselBabelWSyariahBabel -0,000012 + \\ & 2WdepositoWSumselBabel 0,00016 + 2WdepositoWSyariahBabel 0,00027 \\ & + 2WSumselBabelWSyariahBabel 0,00066 \end{aligned}$$

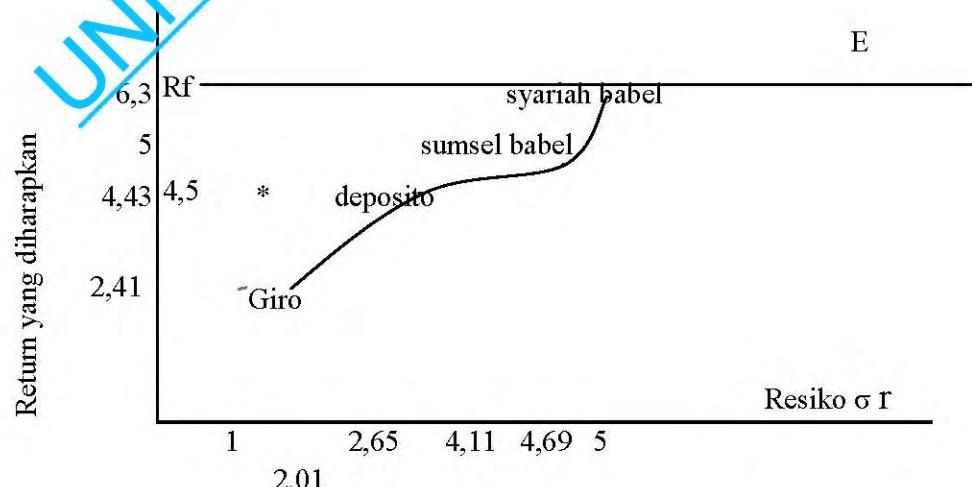
$$\sigma^2 = 0,0004377$$

$$\sigma = 0,0209$$

dengan kendala :

$$\begin{aligned} & 0,0241 Wgiro + 0,0443 Wdeposito + 0,05 WSumselBabel + 0,0630 WSyariahBabel \\ & = E^* \end{aligned}$$

$$Wgiro + Wdeposito + WSumselBabel + Wsyariah Babel$$



Gambar 4.17

*Efficient Frontier* Markowitz Portofolio

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep. Babel, diolah oleh Peneliti

Diversifikasi portofolio Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengurangi risiko investasi. *Return* rata-rata yang diperoleh dari investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi masih di bawah suku bunga bank Indonesia. Pada saat *return* yang diharapkan giro sebesar 2,40% maka risiko yang ditanggung oleh pemerintah provinsi sebesar 1, pada saat *return* deposito sebesar 4,43%, risiko sebesar 2,65%, dan *return* Saham Bank Sumsel Babel sebesar 5%, risiko dihadapi sebesar 4,11% dan ketika *return* yang diharapkan atas saham Syariah Babel sebesar 6,3% risiko kehilangan sebesar 4,69%.

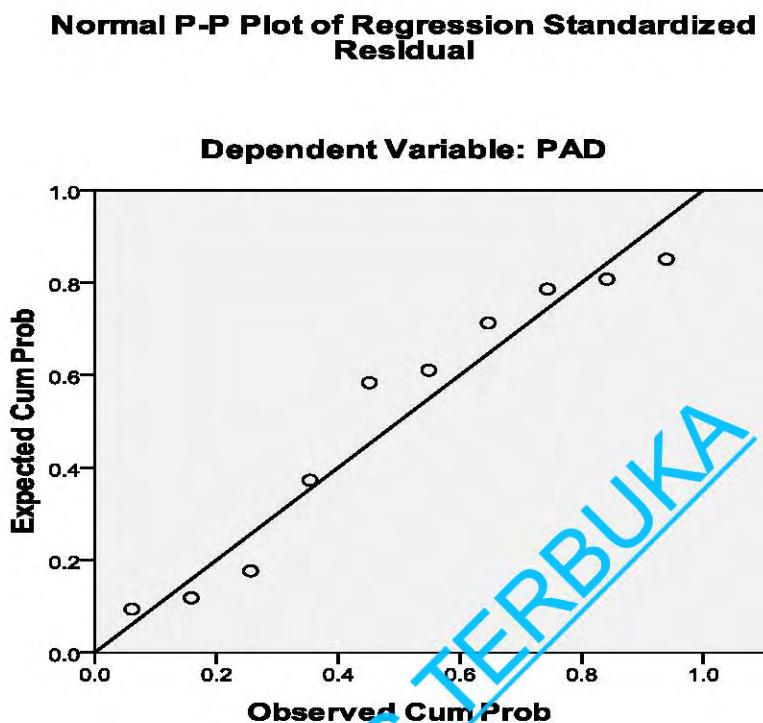
Namun demikian jika dilakukan diversifikasi *expected return* portofolio Pemerintah provinsi sebesar 4,5% dengan risiko 2,01%. *Return* ini masih di bawah *risk free*, posisi tanggal 3 Desember 2010 sebesar 6,5%.

## 7. Uji Asumsi Klasik

Mengingat penelitian menggunakan data sekunder, dalam menentukan ketetapan model perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Penyimpangan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan multikolineartitas yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent dan variabel dependen mempunyai distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan bantuan program SPSS dengan normal P-P Plot dapat ditunjukkan pada gambar 4.18 di bawah ini.



Gambar 4.18  
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 4.18 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

*b. Uji Autokorelasi*

Uji autokorelasi digunakan untuk mendekteksi ada tidaknya *autokorelasi*. Deteksi *autokorelasi* dilakukan dengan uji statistik Durbin-Watson. Autokorelasi tidak terjadi jika nilai  $0 < d < d_1$ . Hasil uji *autokorelasi* menunjukkan hasil sebagaimana tabel 4.75

Tabel 4.75  
Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.95 <sup>a</sup>	,009	-0.274	32,608,197,638.55	.294
a. Predictors: (Constant), Resiko, Return					
b. Dependent Variable: PAD					

Hasil uji *autokorelasi* menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 0,294. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan derajat kepercayaan 5%, jumlah sample 10 dan variabel bebas 2. Nilai dI 0,697 dan du sebesar 1,641 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi *autokorelasi* positif.

#### c. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.76  
Uji Multikolinearitas  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	75,682,410,079,15	13,637,567,590.76		5.55	0.001		
Return	17,343,044.81	260,126,346.25	-0.026	-0.067	0.949	0.954	1.049
Resiko	560,901,145.86	2,216,431,386.58	0.097	0.253	0.807	0.954	1.049

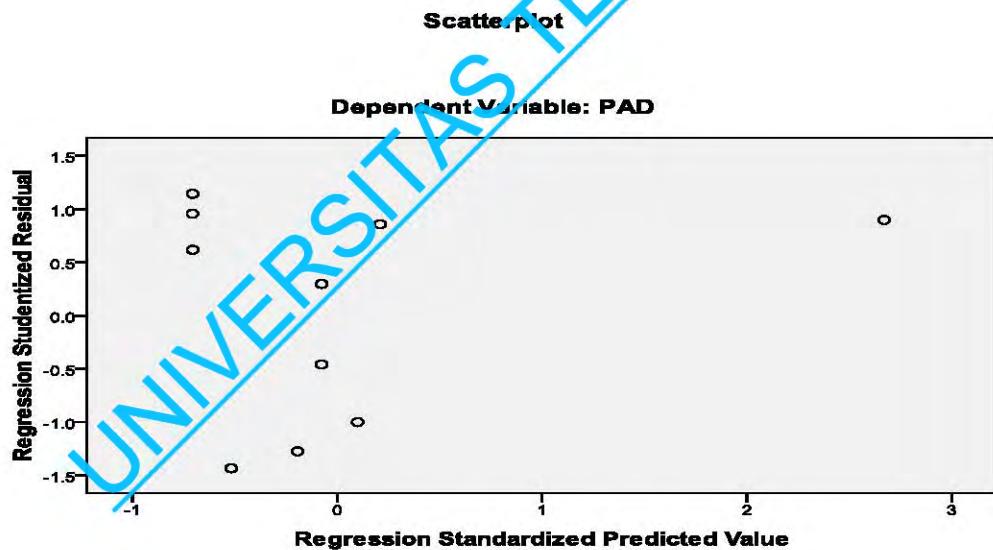
a. Dependent Variable: PAD

*Multikolinearitas* terjadi dimana beberapa variabel atau semua variabel bebas berkorelasi tinggi yang menyebabkan koefisien-koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai standar error menjadi tidak terhingga. *Multikolinearitas* dapat didektesi melalui VIF (*Variance Inflation Factor*) dan koefisien korelasi antarvariabel bebas. Jika nilai VIF kurang dari 10 maka didalam data dapat dikatakan tidak terdapat permasalahan multikolinearitas. Hasil uji

multikolinearitas menunjukkan nilai VIF sebesar 1,049 atau kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Tabel tersebut menunjukkan variabel *return* dan risiko tidak terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam regresi yang digunakan.

c. Uji *Heterokedastisitas*

Uji *heterokedastisitas* dalam penelitian ini dengan melihat grafik scatterplot antara nilai residu variabel dependen SRESID dengan nilai prediksi variabel independen ZPRED. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pola yang teratur dari garfik scatterplot sebagaimana ditunjuk pada gambar 4.19.



Gambar 4.19  
Uji *Heterokedastisitas*

d. Uji Regresi Berganda

Setelah dilakukan uji data dengan asumsi klasik selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian dilakukan untuk menguji apakah *return* dan risiko berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.77

Tabel 4.77  
Nilai R square hipotesis

Model Summary <sup>b</sup>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.95 <sup>a</sup>	0.009	-0.274
a. Predictors: (Constant), Resiko, Return			
b. Dependent Variable: PAD			

Nilai R square untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  adalah diantara nol dan satu. Hasil penelitian menunjukkan nilai R square sebesar 0,009 memiliki arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,9%. Dengan kata lain sebesar 0,9% penjelasan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel *return* dan risiko sedangkan sebesar 99,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Nilai R sebesar 0,95 menjelaskan hubungan *return* dan risiko terhadap pendapatan asli daerah sebesar 95% .

Nilai R disebut sebagai *koefisien korelasi* yang menerangkan tingkat hubungan antara variabel independen *return* dan risiko. Hasil pengujian hipotesis diketahui R sebesar 0,95, berarti hubungan *return* dan risiko terhadap pendapatan asli daerah 95%.

#### e. Uji Hipotesis Penelitian

Regresi berganda akan menunjukkan model dengan urutan tingkat signifikansi variabel independen terhadap varibel dependen. Regresi berganda untuk menguji hipotesis secara parsial dan simultan secara bersama-sama dengan model Y

$$= \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + ei$$

dimana :

$Y$  = Pendapatan asli daerah

$\alpha$  = konstanta

$b_1$  = koefisien regresi *return*

$b_2$  = koefisien regresi risiko

$X_1$  = *return*

$X_2$  = risiko

$e_i$  = kesalahan penganggu.

Tabel 4.78  
Nilai Hitung Signifikansi Hipotesis

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	68,260,000,000,000,000,000,000	2	34,130,000,000,000,000,000,000	,032	,969 <sup>a</sup>
Residual	7,443,000,000,000,000,000,000,000	7	1,063,000,000,000,000,000,000,000		
Total	7,511,000,000,000,000,000,000,000	9			

a. Predictors: (Constant), Resiko, Return

b. Dependent Variable: PAD

### 1) Uji Regresi simultan (uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dan terikat. Dari tabel 4.78 didapat nilai F hitung sebesar 0,032 dengan probabilitas 0,969<sup>a</sup> yang telah menguji pengaruh antara variabel independen (*return* dan risiko) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah), karena probabilitas lebih dari  $\alpha$  0,05 maka dapat dikatakan bahwa *return* dan risiko secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.79 di bawah ini :

Tabel 4.79  
Uji Hipotesis

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	75,680,000,000,000	13,640,000,000,000		5,550	,001
Return	-17,343,044,812,00	260,100,000,000	-,026	-,067	,949
Risiko	560,900,000,000	2,216,000,000,000	,097	,253	,807

a. Dependent Variable: PAD

## 2) Uji Regresi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan guna menguji hipotesis bahwa nilai rata-rata beberapa variabel akan berbeda secara signifikan untuk dua sampel kelompok independen.

Tabel 4.78 dapat dilihat bahwa koefisien dari *return* dan risiko tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2003-2010 karena tingkat signifikansi p value 0,969 lebih dari nilai 0,05. Demikian halnya ketika diuji secara parsial variabel *return* dan risiko terhadap pendapatan asli daerah ditemukan variabel *return* dan risiko tidak berpengaruh tingkat signifikansi p value lebih besar dari 0,05 sebagaimana tercantum pada tabel 4.79.

Dari koefisien regresi masing-masing variabel bebas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Konstanta ( $\alpha$ ) = 75.680.000.000.000 menunjukkan bahwa jika *return* dan risiko sama dengan nol, pendapatan asli daerah akan meningkat sebesar Rp.75.680.000.000.000

- b) Koefisien regresi  $b_1$  sebesar  $-17.343.044.812$ , menunjukkan bahwa hubungan variabel *return* dengan pendapatan asli daerah adalah negatif, artinya setiap kenaikan *return* akan diikuti penurunan PAD.
- c) Koefisien regresi  $b_2$  sebesar  $560.900.000.000$ , menunjukkan hubungan variabel risiko dengan Pendapatan asli daerah adalah positif, setiap kenaikan risiko akan diikuti oleh peningkatan PAD.

Hasil uji F menunjukkan tingkat signifikansi F sebesar 0,032 dengan tingkat probabilitas sig 0,969. Karena probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak dapat digunakan. Model yang digunakan

$$Y = 75.680.000.000.000 + (-0,26)X_1 + 0,27X_2$$

Hasil uji parsial (uji t hitung) dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

- a) Hasil pengujian pengaruh *return* terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan  $t = -0,949$  tidak signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,005 sehingga secara statistik *return* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka hipotesis  $H_1$  yang menyatakan *return* berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak dapat diterima.
- b) Hasil pengujian pengaruh risiko terhadap pendapatan asli daerah  $t$  sebesar  $0,807$  tidak signifikan atau lebih besar dari  $0,05$  sehingga secara statistik risiko secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, maka  $H_2$  yang menyatakan risiko berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tidak dapat diterima.

Secara konsep *return* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Ini diperkuat dengan penelitian Thesaurianto (2007) yang menyatakan transfer pemerintah pusat, pajak kendaraan bermotor dan investasi berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah. Demikian pula hasil penelitian Utomo (2007) dimana beta saham dan varian saham berpengaruh terhadap *return*. Sebaliknya Abidin (2009) yang menyatakan bahwa secara simultan faktor fundamental keuangan seperti *return on investment* (ROI), *earning per share* (EPS), *operating profit margin* (OPM), *book value* (BV), dan beta saham sebagai risiko sistematis tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan *cunsomer goods* yang terdaftar di BEI, sama halnya dengan penelitian Ulupuy (2005) dimana *current ratio*, *return on asset*, *debt to equity ratio* berpengaruh positif terhadap *return* saham, sebaliknya *total asset turn over* berpengaruh negatif terhadap *return* saham. Hasil penelitian ini sendiri berdasarkan uji statistik terlihat bahwa *return* dan risiko baik secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Sementara analisis proporsi menunjukkan rendahnya tingkat pendapatan hasil pengelolaan kekayaan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,27%, demikian pula halnya jasa giro memberi sumbangan rata-rata sebesar Rp.5.010.136.674,- per semester, deposito sebesar Rp. 2.837.818.616 per semester dan dividen sebesar Rp. 481.193.520.

Ketidakberpengaruhnya *return* dan risiko investasi, juga disebabkan oleh pajak daerah memiliki kontribusi yang dominan dibandingkan pendapatan lainnya. Pajak daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah sebesar

88,87%, sementara retribusi daerah sebesar 0,83%, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 0,38% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 9,92%. Ini menunjukkan belum optimalnya pemerintah provinsi dalam menggali potensi penerimaan selain pajak daerah.

Tingginya kontribusi pajak karena pajak daerah merupakan kontribusi yang bersifat wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa didasarkan undang-undang. Dalam hal ini pajak mengikat wajib pajak untuk membayar baik ditagih atau tidak, jika tidak membayar akan dikenakan sanksi. Sebaliknya rendahnya retribusi daerah disebabkan masih rendahnya kontraprestasi yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat. Ini menggambarkan masih rendahnya jasa yang dilayani oleh pemerintah provinsi, baik itu jasa umum, jasa usaha dan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Demikian pula hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terlihat masih sangat rendah.

Selain itu rendahnya *return* yang diperoleh dari investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disebabkan dari 3 buah sekuritas dan 8 perusahaan dan ternyata penyebarannya *return* tidak merata, ada yang berkontribusi dan ada yang tidak. Tidak jelasnya investasi, tingkat *expected return* yang rendah dan risiko yang tinggi serta rendahnya derajat kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli selama 8 tahun yang hanya sebesar 0,44%.

Perusahaan daerah dan swasta baik internal maupun eksternal hanya 2/8 perusahaan yang berkontribusi yaitu Bank Sumsel Babel dan Bank Syariah. Analisis *financial* perusahaan menunjukkan *earning per share* dan *return on equity*

Bank Sumsel Babel mempunyai lebih besar yaitu sebesar Rp. 462.093,- atau 0,22% serta Bank Syariah sebesar Rp. 1.311,- dan 0,12%. Pertumbuhan laba bersih Bank Syariah Babel lebih tinggi atau sebesar 43,8% tetapi tingkat *return* yang diberikan lebih rendah dari tingkat suku bunga Bank Indonesia. Sebaliknya BUMD Bumi Bangka Belitung mempunyai EPS dan ROE yang negatif dan risiko terbesar sebesar 16,19%. Ini disebabkan terdapat perbedaan karakteristik perusahaan, kepemilikan, budaya dan bidang usaha. Ini menunjukkan bahwa perusahaan baik swasta maupun daerah yang bergerak dibidang perbankan lebih baik, karena mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Gambaran ini menunjukkan masih lemahnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah baik dari sektor retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah. Semestinya pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal serta menyediakan pelayanan yang belum tersentuh oleh sektor swasta.

Pemerintah provinsi juga harus menyadari orientasi dari pembentukan BUMD sendiri untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan meningkatkan pendapatan pemerintah provinsi sendiri. Pemerintah provinsi sebaiknya melakukan disinvestasi terhadap investasi yang tidak memberi manfaat baik bagi

kepada masyarakat maupun keuntungan bagi pemerintah provinsi, terutama terhadap perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga pemerintah provinsi tidak dihadapi risiko bisnis, risiko suku bunga, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Sumber lain-lain pendapatan asli daerah, tidak hanya tergantung terdapat pendapatan jasa giro, tetapi dapat ditingkatkan melalui manajemen kas dengan memanfaatkan kelebihan kas untuk investasi jangka pendek melalui deposito, atau pembelian sertifikat bank Indonesia. Selain itu pemerintah provinsi dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu, sehingga dapat memperoleh pendapatan berupa komisi, potongan harga atau barang. Memproteksi agar pendapatan atas denda pajak, denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, agar dapat masuk ke kas daerah. Selain itu pemerintah provinsi dapat mengoptimalkan pendapatan atas fasilitas social dan fasilitas umum yang disediakan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. Peningkatan kapabilitas auditor dan berupaya agar setiap tuntutan ganti kerugian daerah dapat kembali atau disetor ke kas daerah dan tidak menjadi kadaluarsa.

Meningkatkan sumber-sumber lain selain pajak daerah diharapkan dapat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dalam hal ini tidak hanya *return pajak* daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tetapi juga *return* dan risiko atas investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### C. Ringkasan Hasil

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat dibuat ringkasan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk *return* dan risiko.

Kinerja keuangan pemerintah provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) sangat baik, hal ini dilihat dari proporsi aset tetap yang dimiliki cukup signifikan dibandingkan dengan aset lainnya dan rendahnya tingkat kewajiban sehingga ekuitas menjadi tinggi . Namun besarnya aset tetap tersebut belum menggambarkan nilai yang sebenarnya dan kurang didukung bukti kepemilikan. Ini disebabkan Pemerintah Provinsi belum menganut sistem periyutan aset. Disisi manajemen kas dan manajemen investasi masih sangatlah rendah. Ini ditunjukkan terlalu tingginya tingkat likuiditas sebagai akibat banyaknya jumlah kas di kas daerah (*idle cash*) dan rendahnya tingkat investasi yang dimiliki.

Proporsi pendapatan terbesar menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat, ditandai masih dominannya transfer dana perimbangan sebagai sumber penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah sendiri mempunyai porsi kedua setelah transfer dana perimbangan dengan sumber terbesar berasal dari pajak daerah. Lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menyebabkan rasio pengeluaran belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal, dimana belanja pegawai memiliki porsi terbesar. Rasio pertumbuhan menunjukan

kinerja keuangan pemerintah provinsi masih terlihat rendah. Hal ini terlihat tingginya tingkat pertumbuhan defisit dan pengeluaran pembiayaan pemerintah provinsi meskipun aset mengalami peningkatan setiap tahun. Aset lancar dan investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding aset tetap. Lemahnya penyusunan anggaran dan pengelolaan belanja yang ditunjukan. Meskipun varian atas pendapatan asli daerah dibanding realisasi rata-rata di atas target, namun mengalami penurunan di tahun 2009. Sementara tingkat penyerapan dana belanja tergolong rendah dan pada pos tertentu melampaui anggaran.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri mempunyai tingkat rasio likuiditas yang sangat tinggi, yang mempengaruhi kemampuan pemerintah provinsi dalam memperoleh pendapatan dan meningkatkan *return*. Terlalu tingginya kas pada kas daerah akan menjadi tidak produktif dan belum berjalanya manajemen kas, menyebabkan pemerintah provinsi lebih tergantung perolehan pendapatan atas jasa giro yang jelas mempunyai tingkat suku bunga yang paling rendah dibandingkan sekuritas lainnya. Dalam pengelolaan kewajiban pemerintah provinsi sangat baik, mengingat pengeluaran belanja masih dapat diatas tanpa harus melakukan pinjaman. Hal ini ditunjukan tingginya rasio *leverage*, rasio utang terhadap modal aset dan solvabilitas serta rendahnya rasio utang dan rasio utang terhadap ekuitas. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki tingkat kemandirian yang cukup tinggi, walaupun tidak seluruh aktivitas dapat dibiayai dari pendapatan asli daerah. Dilihat dari *earning performance ratio*

menunjukkan semakin rendahnya perform kinerja yang disebabkan terjadinya penurunan dimana kondisi surplus berubah menjadi defisit. Demikian pula derajat kontribusi BUMD sangatlah rendah, karena dari 8 perusahaan , hanya 25% perusahaan yang membagikan labanya kepada pemerintah provinsi.

Pemerintah sendiri dalam melakukan investasi tidak melakukan proses keputusan investasi dan tidak melakukan penilaian terhadap perusahaan emiten. Hal ini tergambar pemerintah provinsi hanya memiliki sebagian dari bukti investasi, perusahaan emiten tidak menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah provinsi selaku investor serta terjadinya disagio dalam pembelian saham. Analisis finansial hanya dapat dilakukan terhadap 3 buah perusahaan yaitu Bank Sumsel Babel, PT. BPR Syariah Babel dan PT. BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera. Hasil analisis menunjukkan pertumbuhan profitabilitas dan *earning per share* Bank Sumsel Babel lebih tinggi dari BPR Syariah Babel, namun tidak diikuti rasio kecukupan modal perusahaan. Dilihat dari rasio *price earning ratio* (PER) Bank Sumsel Babel mengalami penurunan, sebaliknya PER BPR Syariah Babel mengalami peningkatan. Profitabilitas BPR Syariah Babel mengalami peningkatan, tetapi EPS mengalami penurunan sebagai akibat banyaknya saham yang beredar. Analisis finansial BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera menunjukkan buruknya kinerja perusahaan. Sejak didirikan perusahaan ini terus merugi dan jumlah kerugian perusahaan terus meningkat yang disebabkan tidak berjalannya tata kelola perusahaan yang baik.

Dari seluruh investasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya 2 perusahaan yang menyumbangkan dividen. *Return* total atas penyertaan modal pada BPR Syariah lebih tinggi dibandingkan *return* total Bank Sumsel Babel. Ini dimungkinkan karena tingkat *dividen yield* dan *capital gain* BPR Syariah lebih tinggi dibandingkan Bank Sumsel Babel. Sedangkan *return* total pada PT. Sumatera Shiping Lines, PT. Sumatera Promotion Centre, BUMD PDAM Kota Pangkalpinang dan PDAM Kabupaten Belitung sebesar - 100%, yang menunjukkan pemerintah harus siap kehilangan sebesar modal yang disetor. Sementara *return* total BUMD Bumi Bangka Belitung Sejahtera menyumbang kerugian sebesar -12,63%, dan PT. Riau Airlines sebesar -99,73%. Semakin besar *return* yang diharapkan semakin tinggi pula risiko yang dihadapi perusahaan. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang menunjukkan *return* tertinggi pada penyertaan modal BTP Syariah Babel dan *return* terendah pada investasi Sumatera Shipng Lines dan Sumatera Promotion Centre dan *return* yang diharapkan tersebut masih dibawah suku bunga Bank Indonesia yang bebas risiko. Risiko tertinggi atas penyertaan modal pada Bumi Bangka Belitung dan terendah pada Sumatera Shiping Lines, Sumatera Promotion Centre, PDAM Pangkalpinang dan PDAM Belitung.

2. Pengaruh *return* dan risiko investasi terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *return* dan risiko dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 0,009%, sementara koefisien

korelasi hubungan *return* dan risiko terhadap pendapatan asli daerah sebesar 95%. Hasil uji F dan uji t, baik secara simultan dan parsial *return* dan risiko tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sehingga hipotesis 1 yang menyatakan *return* berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tidak dapat diterima, dan hipotesis 2 yang menyatakan risiko berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah tidak dapat diterima.

Meskipun secara konseptual *return* dan risiko berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, tetapi karena pajak daerah mempunyai kontribusi yang paling dominan dan rendahnya tingkat kontribusi atas *return* dan risiko menyebabkan secara statistik *return* dan risiko investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kinerja keuangan, menunjukkan dalam penyediaan sarana dan prasarana sangat baik, terlihat bahwa proporsi aset tetap cukup signifikan dibandingkan aset lainnya, meskipun aset tetap tersebut belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena tidak adanya sistem penyusutan. Sementara tingkat likuiditas dan solvabilitas cenderung *over likuid* atau *over solvabel* dan tingginya rasio *leverage*. Sumber Pendapatan asli daerah dengan terbesar berasal dari pajak daerah, tetapi disisi produktivitas relatif masih kurang optimal. Ini disebabkan kelemahan dalam perencanaan dan inefisiensi anggaran, kurang pemanfaatan aset oleh pemerintah provinsi, terlalu besarnya kas di kas daerah, tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap dana dari pemerintah pusat, dan terlalu tinggi biaya operasi dibandingkan belanja modal serta rendahnya daya serap dana yang disebabkan program dan kegiatan yang tidak berjalan. Terjadinya penurunan kinerja keuangan yang diakibatkan terjadinya defisit anggaran. Selain itu tata kelola perusahaan belum diimplementasikan secara baik, dan masih rendahnya perform kinerja pemerintah daerah, meskipun kemandiran cukup tinggi. Investasi dilaksanakan tanpa melalui proses keputusan investasi dan penilaian terhadap perusahaan emiten sehingga rendahnya derajat kontribusi yang diberikan BUMD. Dari penyertaan modal pemerintah provinsi hanya dua perdelapan

perusahaan emiten yang memberikan dividen dimana *expected return* dibawah tingkat suku bunga Bank Indonesia.

2. Pengaruh *return* dan risiko terhadap pendapatan asli daerah baik secara simultan dan parsial *return* dan risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini disebabkan rendahnya tingkat kontribusi *return* dan risiko investasi terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara pajak daerah mempunyai pengaruh yang dominan dibandingkan pendapatan lainnya terhadap pendapatan asli daerah.

## B. Saran

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan, saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Praktisi

Sebagai *public services* khususnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka untuk dapat memperbaiki perencanaan dengan memperkirakan dampak terbesar yang akan terjadi dimasa mendatang berdasarkan kondisi sekarang yang akan mempengaruhi masa akan datang dan melakukan efisien anggaran. Paling utama adalah mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal serta menyediakan pelayanan yang belum tersentuh oleh sektor swasta, pemanfaatan aset daerah, melakukan manajemen kas dengan melalui perencanaan anggaran, penentuan

aliran kas berupa keputusan operasional, keputusan belanja modal, keputusan kredit dan keputusan pembiayaan, disertai mobilasisasi kas dengan mempercepat penagihan, mengendalikan hutang, mengendalikan saldo bank dan investasi kelebihan kas serta pengelolaan float. Pemerintah provinsi sangat diharapkan dapat melakukan manajemen investasi dengan melakukan proses keputusan investasi, menilai perusahaan yang menjadi emiten melalui analisis financial perusahaan, memilih investasi dengan *return* yang optimal, dan melakukan disinvestasi terhadap investasi yang tidak memberi manfaat baik bagi masyarakat maupun keuntungan bagi pemerintah provinsi. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat menyusun *Good Government Governance* (GGG) dan mengimplementasikan sebagai tata kelola perusahaan, melakukan manajemen risiko dengan cara menidentifikasi risiko bentuk-bentuk risiko, menempatkan ukuran risiko dan alternatif serta menganalisis, memutuskan, melaksanakan, mengontrol serta mengevaluasi alternatif yang dipilih.

2. Bagi Teoritis

Guna pengembangan ilmu pengetahuan hendaknya dapat meneliti terhadap perusahaan yang telah memiliki GCG dan menambah/menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah serta mengidentifikasi risiko dan bentuk-bentuk risiko pemerintah daerah serta mengevaluasikan risiko tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J. (2009). Analisis faktor fundamental keuangan dan risiko sistimatik terhadap harga saham perusahaan customer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Algifari. (2000). *Analisis regresi – Teori dan kasus*. Yogyakarta: BPFE.
- Arief, S. (2006). *Metodologi penelitian ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsjad, Nurdjaman, Kusumanto, B. & Prawirosetoto, Y. (1992). *Keuangan negara*. Jakarta: Intermedia.
- Azhar, M.K.S. (2008). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan.
- Daniri, M.A. (2005). *Good corporate governance : Konsep dan penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia,
- Devano, S. & Rahayu, S.K. (2006). *Perpajakan : Konsep, teori dan isu*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Davey, K.J. (1988). *Pembangunan pemerintahan daerah, praktik-praktik internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga*. Terjemahan Amarullah, dkk. Jakarta: UI Press.
- Ekawati, E. (2009). *Manajemen keuangan*. Jakarta: Penerbit Univesitas Terbuka.
- Esterberg, K.G. (2002). *Qualitative methods in social research*. New York: MC. Graw. Hill.
- Fahmi, I. (2010). *Manajemen risiko: Teori, kasus dan solusi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ghozali, I. (2001). *Applikasi pengaruh multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2006). *Applikasi analisis dan multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika : Teori, konsep dan aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, D. (2003). *Basic econometrics. Fourth edition.* New York: Mc.Graw Hill Inc. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah.* Edisi Ke-3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Manajemen keuangan bisnis.* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanggraeni, D. (2010). *Pengelolaan risiko usaha.* Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Husnan, S. (2003). *Dasar-dasar teori portofolio dan analisis sekuritas.* Edisi Ke -3. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Indra, S. & Ivan, Y. (2006). *Penerapan good corporate governance: Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha.* Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ikhsan, M., Santosa, A. & Harmanti. (2007). *Administrasi keuangan publik.* Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Jogiyanto, H. (2000). *Teori portofolio dan analisis investasi.* Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto. (2008). *Teori portofolio dan analisis investasi.* Yogyakarta: BPFE.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Teknis penyusunan neraca awal pemerintah pusat.* Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Koswara, E. (2001). *Otonomi daerah untuk demokrasi dan kemandirian rakyat.* Jakarta: Yayasan Pariba.
- Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003-2010
- Laporan Keuangan PT. Bank Pekreditan Rakyat Syariah Bangka Belitung Periode 2006-2007
- Laporan Tahunan 2007 PT. Bank Sumsel Babel
- Laporan Tahunan 2008 PT. Bank Sumsel Babel
- Laporan Tahunan 2009 PT. Bank Sumsel Babel
- Laporan Tahunan 2010 PT. Bank Sumsel Babel

Laporan Semesteran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2003-2010.

Lam, J. (2010). *Enterprise risk management*. Jakarta: Penerbit BSMR

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012.

Lesmana, R & Surjanto, R. (2003). *Financial performance analyzing. Pedoman menilai kinerja keuangan untuk perusahaan Tbk, yayasan, BUMNN, BUMD dan organisasi lainnya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mansoer, F.W. (2005). *Metode penelitian bisnis*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Manullang, M. (1993). *Dasar-dasar keuangan negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Megantara, A., Iskandar, D. & Slamet, K. (2009). *Manajemen perbendaharaan pemerintahan : Aplikasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akutansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.

Murwanto, R., Isyafiah & Subkha. (2006). *Manajemen kas*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akutansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.

Musgrave, Richard, A. & Peggy, B.M. (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: Erlangga.

Nugroho, Y., Saragih, F. & Umanto. (2008). *Metode kuantitatif pendekatan pengambilan keputusan di bidang bisnis, sosial, dan ekonomi*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003-2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prasetya, G.E. (2004). *Penyusunan dan analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Prastisto, A. (2009). *Statistik Menjadi Mudah Dengan SPSS 17*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

Redjo, S.I., (1998). *Keuangan Pusat dan Daerah*. Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Pasca Sarjana Kerjasama Universitas Padjadjaran-IIP.

Reilly, F. & K.C, Brown. (2003). *Investment analysis and portfolio management* 7<sup>e</sup>. Thomson Learning.

Sakai, T. (2009). *Introduction to wave-seabed interaction. New coastal engineering in global environment*, ed. Sawaragi, T. (1363pp), 357-359.

Saltian, Y. (2006). Analisis perbandingan resiko dan tingkat pengembalian reksa dana syariah dan reksa dana konvensional. *Skripsi Sekolah Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*. Yogyakarta.

Santoso, B. (2003). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Edisi Ke-4. Bandung: PT.Refika Aditama.

Sawir, A. (2001). *Analisis kinerja keuangan dan perencanaan perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Shim, J.K. & Siegel, J.G. (1999). *Kamus istilah akuntansi*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo
- Shook, R.J. (2002). *Wall street dictionary, Kamus lengkap wall street*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soemitro, R. (1987). *Pengantar singkat hukum pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Sukrisno, A. (2005). Peranan internal audit departement, enterprises risk management, dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud dan implikasinya kepada peningkatan mutu lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Makalah disampaikan pada *Rapat Terbuka Senat Universitas Tarumanegara* tanggal 6 Agustus 2005. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiono, S. (2006). Analisis dan desain proses pembentukan portofolio yang optimal perusahaan yang go publik pada PT. Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 2(1), 20-28.
- Sumarsono, S. (2009). *Manajemen keuangan pemerintahan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Susilo, J. (2010). *Enam hari jago SPSS 17*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala.
- Tandelilin, E. (2008). *Manajemen investasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan investasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. (2007). *Analisis laporan keuangan daerah*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akutansi Negara.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Utomo, W. (2007). Analisis pengaruh beta dan varian *return* saham terhadap *return* saham. *Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Van, H.J & Wachowicz, J. (2005). *Fundamentals of financial management*. Jakarta: Salemba Empat.

Tabel 4.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003 s/d 2010

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan								
Pendapatan Asli Daerah								
Pendapatan Pajak Daerah	64.805,23	106.887,40	172.164,29	173.574,90	173.292,13	260.085,86	215.623,98	296.214,79
Pendapatan Retribusi Daerah	672,50	581,37	638,05	942,89	1.265,79	3.000,95	4.043,05	2.628,02
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	93,41	137,02			1.023,52	1.771,55	3.077,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang	6.302,41	6.899,46	15.365,01	23.655,51	28.983,98	30.074,23	25.361,26	26.201,88
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>71.780,14</b>	<b>114.461,64</b>	<b>188.304,37</b>	<b>198.173,30</b>	<b>203.541,90</b>	<b>294.184,56</b>	<b>246.799,84</b>	<b>328.122,02</b>
Pendapatan Transfer								
Transfer Pemerintah Pusat - Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	35.153,20	17.567,68	22.744,32	25.370,53	33.011,24	41.571,83	44.007,94	52.057,51
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	22.156,33	36.897,67	34.939,80	53.957,72	93.494,50	60.310,39	48.516,96
Dana Alokasi Umum	162.490,00	170.227,00	187.358,00	275.690,00	319.357,00	391.045,44	407.994,84	410.642,31
Dana Alokasi Khusus	5.900,00	-	-	-	-	19.826,10	45.563,00	8.071,80
<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana</b>	<b>203.543,20</b>	<b>209.951,01</b>	<b>246.999,99</b>	<b>336.000,33</b>	<b>406.325,96</b>	<b>545.937,87</b>	<b>557.876,17</b>	<b>519.288,58</b>
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya								
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	450,00
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	169,13	164,51
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169,13</b>	<b>614,51</b>
Lain-Lain Pendapatan yang sah	8.583,44	3.245,59	1.424,00					
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>8.583,44</b>	<b>3.245,59</b>	<b>1.424,00</b>					
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>283.906,78</b>	<b>327.658,24</b>	<b>436.728,36</b>	<b>534.173,63</b>	<b>609.867,86</b>	<b>840.122,43</b>	<b>804.845,14</b>	<b>848.025,11</b>
Belanja								
Belanja Operasi								
Belanja Pegawai	56.773,07	51.164,55	54.189,62	64.706,94	113.676,09	162.971,82	170.608,68	185.113,59
Belanja Barang	33.626,49	42.302,01	50.863,20	78.506,58	82.057,72	105.828,48	127.442,83	136.056,17
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	993,56	1.251,75
Belanja Hibah	-	-	-	-	47.385,39	123.412,33	156.610,56	26.406,95
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	73.634,87	45.847,67	28.700,83	17.946,77
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>90.399,56</b>	<b>93.466,56</b>	<b>105.052,82</b>	<b>143.213,52</b>	<b>316.754,07</b>	<b>438.060,30</b>	<b>484.356,46</b>	<b>366.775,23</b>

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Belanja Modal	95.043,67	90.220,15	-	-	-	-	-	-
Belanja Tanah	-	-	115.756,84	142.335,53	4.669,92	16.416,91	34.203,07	23.801,90
Belanja Peralatan & Mesin	-	-	-	-	21.923,21	42.816,72	13.033,98	14.337,61
Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-	25.203,74	52.782,61	61.210,57	146.600,52
Belanja Irigasi & Jaringan	-	-	-	-	137.530,90	117.899,07	127.146,45	128.492,63
Belanja Asset Tetap lainnya	-	-	-	-	5.181,65	5.275,92	2.525,98	129,34
Belanja Asset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>95.043,67</b>	<b>90.220,15</b>	<b>115.756,84</b>	<b>142.335,53</b>	<b>194.509,42</b>	<b>235.191,23</b>	<b>238.120,05</b>	<b>313.362,00</b>
Belanja Tak Terduga								
Belanja Tak Terduga	420,00	1.892,26	162,00	933,98	2.162,18	-	500,00	899,15
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>420,00</b>	<b>1.892,26</b>	<b>162,00</b>	<b>933,98</b>	<b>2.162,18</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>899,15</b>
Transfer								
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota &	55.080,39	95.380,26	119.271,85	176.898,78	122.999,56	102.097,45	131.284,77	181.679,37
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Bagi hasil Pendapatan ke</b>	<b>55.080,39</b>	<b>95.380,26</b>	<b>119.271,85</b>	<b>176.898,78</b>	<b>122.999,56</b>	<b>102.097,45</b>	<b>131.284,77</b>	<b>181.679,37</b>
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>240.943,62</b>	<b>280.959,23</b>	<b>340.243,51</b>	<b>463.381,81</b>	<b>636.425,23</b>	<b>775.348,98</b>	<b>854.261,28</b>	<b>862.715,75</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>42.963,16</b>	<b>46.699,01</b>	<b>96.484,85</b>	<b>70.791,82</b>	<b>(26.557,37)</b>	<b>64.773,45</b>	<b>(49.416,14)</b>	<b>(14.690,64)</b>
Pembiayaan								
Penggunaan SILPA	52.673,60	85.822,13	131.521,14	227.005,97	290.197,79	254.692,42	315.465,87	264.129,74
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	80,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>52.673,60</b>	<b>85.822,13</b>	<b>131.521,14</b>	<b>227.005,97</b>	<b>290.197,79</b>	<b>254.692,42</b>	<b>315.545,87</b>	<b>264.129,74</b>
Pengeluaran Pembiayaan								
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.300,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00	8.948,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	1.006,72
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Silpa Tahun berkenaan	8.514,62	131.521,14	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.814,62</b>	<b>132.521,14</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.948,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.006,72</b>
Pembiayaan Netto	<b>42.858,98</b>	<b>(46.699,01)</b>	<b>130.521,14</b>	<b>219.405,97</b>	<b>281.249,79</b>	<b>250.692,42</b>	<b>313.545,87</b>	<b>255.123,02</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<b>85.822,14</b>	-	<b>227.005,99</b>	<b>290.197,79</b>	<b>254.692,42</b>	<b>315.465,87</b>	<b>264.129,73</b>	<b>240.432,38</b>

Tabel L. 8  
Analisis Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003 s/d 2010

(dalam prosentase)

URAIAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Pendapatan								
Pendapatan Asli Daerah								
Pendapatan Pajak Daerah	64,94%	61,07%	0,82%	-0,16%	50,09%	-17,10%	37,38%	28,15%
Pendapatan Retribusi Daerah	-13,55%	9,75%	47,78%	34,25%	137,08%	34,73%	-35,00%	30,72%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0%	46,69%	-100%	0	0	73,08%	73,71%	13,35%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9,47%	122,70%	53,96%	22,53%	3,76%	-15,67%	3,31%	28,58%
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>59,46%</b>	<b>64,51%</b>	<b>5,24%</b>	<b>2,71%</b>	<b>44,53%</b>	<b>-16,11%</b>	<b>32,95%</b>	<b>27,61%</b>
Pendapatan Transfer								
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Dana Bagi Hasil Pajak	-50,03%	29,47%	11,55%	30,12%	25,93%	5,86%	18,29%	10,17%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0%	66,53%	-5,31%	54,43%	73,27%	-35,49%	-19,55%	19,13%
Dana Alokasi Umum	4,76%	10,06%	47,15%	15,84%	22,45%	4,33%	0,65%	15,03%
Dana Alokasi Khusus	-100%	0%	0%	0%	0%	130%	-82%	-7,50%
<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan</b>	<b>3,15%</b>	<b>17,65%</b>	<b>36,03%</b>	<b>20,93%</b>	<b>34,36%</b>	<b>2,19%</b>	<b>-6,92%</b>	<b>15,34%</b>
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya								
Dana Otonomi Khusus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Dana Penyesuaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-2,73%	0%
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>263,34%</b>	<b>37,62%</b>
Lain-Lain Pendapatan yang sah	-62%	-56%	-100%	0%	0%	0%	0%	-31,19%
Pendapatan Hibah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pendapatan Dana Darurat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pendapatan Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Jumlah lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>-62,19%</b>	<b>-56,13%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-31,19%</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>15,41%</b>	<b>33,29%</b>	<b>22,31%</b>	<b>14,17%</b>	<b>37,75%</b>	<b>-4,20%</b>	<b>5,37%</b>	<b>17,73%</b>
Belanja								
Belanja Operasi								
Belanja Pegawai	-9,88%	5,91%	19,41%	75,68%	43,37%	4,69%	8,50%	21,10%
Belanja Barang	25,80%	20,24%	54,35%	4,52%	28,97%	20,42%	6,76%	23,01%
Belanja Bunga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Belanja Subsidi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25,99%	3,71%
Belanja Hibah	0%	0%	0%	0,00%	160,44%	26,90%	-83,14%	14,89%
Belanja Bantuan Sosial	0%	0%	0%	0,00%	-37,74%	-37,40%	-37,47%	-16,09%
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>3,39%</b>	<b>12,40%</b>	<b>36,33%</b>	<b>121,18%</b>	<b>38,30%</b>	<b>10,57%</b>	<b>-24,28%</b>	<b>28,27%</b>

Tabel L.8 Lanjutan

URAIAN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Belanja Modal	-5,08%	-100,00%	0,00%	0%	0%	0%	0%	-15,01%
Belanja Tanah	0%	0%	22,96%	-96,72%	251,55%	108,34%	-30,41%	36,53%
Belanja Peralatan & Mesin	0%	0%	0%	100,00%	95,30%	-69,56%	10,00%	19,39%
Belanja Gedung & Bangunan	0%	0%	0%	100,00%	109,42%	15,97%	139,50%	52,13%
Belanja Irigasi & Jaringan	0%	0%	0%	100,00%	-14,27%	7,84%	1,06%	13,52%
Belanja Asset Tetap lainnya	0%	0%	0%	100,00%	1,82%	-52,12%	-94,88%	-6,45%
Belanja Asset Lainnya	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>-5,08%</b>	<b>28,30%</b>	<b>22,96%</b>	<b>-96,66%</b>	<b>20,92%</b>	<b>1,25%</b>	<b>31,60%</b>	<b>19,51%</b>
Belanja Tak Terduga								
Belanja Tak Terduga	350,54%	-91%	477%	132%	-100%	0%	80%	120,99%
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>350,54%</b>	<b>-91,44%</b>	<b>476,53%</b>	<b>131,50%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	<b>79,83%</b>	<b>120,99%</b>
Transfer								
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa	73,17%	25,05%	48,32%	-30,47%	-16,99%	28,59%	38,39%	23,72%
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Jumlah Transfer Bagi hasil Pendapatan ke Kab/Kota</b>	<b>73,17%</b>	<b>25,05%</b>	<b>48,32%</b>	<b>-30,47%</b>	<b>-16,99%</b>	<b>28,59%</b>	<b>38,39%</b>	<b>23,72%</b>
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>16,61%</b>	<b>21,10%</b>	<b>36,19%</b>	<b>37,34%</b>	<b>21,83%</b>	<b>10,18%</b>	<b>0,99%</b>	<b>20,61%</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>8,70%</b>	<b>106,61%</b>	<b>-26,63%</b>	<b>-137,51%</b>	<b>-343,90%</b>	<b>-176,29%</b>	<b>-70,27%</b>	<b>-91,33%</b>
Pembiasaan								
Penggunaan SILPA	62,93%	53,25%	72,60%	27,84%	-12,23%	23,86%	-16,27%	30,28%
Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>Jumlah Penerimaan Pembiasaan</b>	<b>62,93%</b>	<b>53,25%</b>	<b>72,60%</b>	<b>27,84%</b>	<b>-12,23%</b>	<b>23,89%</b>	<b>-16,29%</b>	<b>30,28%</b>
Pengeluaran Pembiasaan								
Pembentukan Dana Cadangan								
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-23,08%	0,00%	660,00%	17,74%	-55,30%	-50%	300%	121,34%
Pembayaran Pokok Pinjaman	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pemberian Pinjaman Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Silpa Tahun berkenaan	1444,65%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	206,38%
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiasaan</b>	<b>1250,24%</b>	<b>-99,25%</b>	<b>660,00%</b>	<b>17,74%</b>	<b>-55,30%</b>	<b>-50,00%</b>	<b>350,34%</b>	<b>296,25%</b>
<b>Pembiasaan Netto</b>	<b>-208,96%</b>	<b>-379,49%</b>	<b>68,10%</b>	<b>28,19%</b>	<b>-10,86%</b>	<b>25,07%</b>	<b>-18,63%</b>	<b>-70,94%</b>
<b>Sisa Lebih Pembiasaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	<b>27,84%</b>	<b>-12,23%</b>	<b>23,86%</b>	<b>-16,27%</b>	<b>-8,97%</b>	<b>-12,25%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah.

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003 s/d 2010

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan								
Pendapatan Asli Daerah								
Pendapatan Pajak Daerah	64.805,23	106.887,40	172.164,29	173.574,90	173.292,13	260.085,86	215.623,98	296.214,79
Pendapatan Retribusi Daerah	672,50	581,37	638,05	942,89	1.265,79	3.000,95	4.043,05	2.628,02
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	-	93,41	137,02			1.023,52	1.771,55	3.077,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.302,41	6.899,46	15.365,01	23.655,51	28.983,98	30.074,23	25.361,26	26.201,88
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>71.780,14</b>	<b>114.461,64</b>	<b>188.304,37</b>	<b>198.173,30</b>	<b>203.541,90</b>	<b>294.184,56</b>	<b>246.799,84</b>	<b>328.122,02</b>
Pendapatan Transfer								
Transfer Pemerintah Pusat - Dana	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	35.153,20	17.567,68	22.744,32	25.370,53	33.011,24	41.571,83	44.007,94	52.057,51
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	22.156,33	36.897,67	34.939,80	53.957,72	93.494,50	60.310,39	48.516,96
Dana Alokasi Umum	162.490,00	170.227,00	187.358,00	275.690,00	319.357,00	391.045,44	407.994,84	410.642,31
Dana Alokasi Khusus	5.900,00	-	-	-		19.826,10	45.563,00	8.071,80
<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana</b>	<b>203.543,20</b>	<b>209.951,01</b>	<b>246.999,99</b>	<b>336.000,33</b>	<b>406.325,96</b>	<b>545.937,87</b>	<b>557.876,17</b>	<b>519.288,58</b>
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya								
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	450,00
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	169,13	164,51
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	-	-	-	-	-	-	<b>169,13</b>	<b>614,51</b>
Lain-Lain Pendapatan yang sah	8.583,44	3.245,59	1.424,00					
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>8.583,44</b>	<b>3.245,59</b>	<b>1.424,00</b>					
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>283.906,78</b>	<b>327.658,24</b>	<b>436.728,36</b>	<b>534.173,63</b>	<b>609.867,86</b>	<b>840.122,43</b>	<b>804.845,14</b>	<b>848.025,11</b>
Belanja								
Belanja Operasi								
Belanja Pegawai	56.173,07	51.164,55	54.189,62	64.706,94	113.676,09	162.971,82	170.608,68	185.113,59
Belanja Barang	37.626,49	42.302,01	50.863,20	78.506,58	82.057,72	105.828,48	127.442,83	136.056,17
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	993,56	1.251,75
Belanja Hibah	-	-	-	-	47.385,39	123.412,33	156.610,56	26.406,95
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	73.634,87	45.847,67	28.700,83	17.946,77
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>90.399,56</b>	<b>93.466,56</b>	<b>105.052,82</b>	<b>143.213,52</b>	<b>316.754,07</b>	<b>438.060,30</b>	<b>484.356,46</b>	<b>366.775,23</b>

Tabel 4.20 Lanjutan

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Belanja Modal	95.043,67	90.220,15	-	-	-	-	-	-
Belanja Tanah	-	-	115.756,84	142.335,53	4.669,92	16.416,91	34.203,07	23.801,90
Belanja Peralatan & Mesin	-	-	-	-	21.923,21	42.816,72	13.033,98	14.337,61
Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-	25.203,74	52.782,61	61.210,57	146.600,52
Belanja Irigasi & Jaringan	-	-	-	-	137.530,90	117.899,07	127.146,45	128.492,63
Belanja Asset Tetap lainnya	-	-	-	-	5.181,65	5.275,92	2.525,98	129,34
Belanja Asset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>95.043,67</b>	<b>90.220,15</b>	<b>115.756,84</b>	<b>142.335,53</b>	<b>194.509,42</b>	<b>235.191,23</b>	<b>238.120,05</b>	<b>313.362,00</b>
Belanja Tak Terduga								
Belanja Tak Terduga	420,00	1.892,26	162,00	933,98	2.162,18	-	500,00	899,15
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>420,00</b>	<b>1.892,26</b>	<b>162,00</b>	<b>933,98</b>	<b>2.162,18</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>899,15</b>
Transfer								
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota &	55.080,39	95.380,26	119.271,85	176.898,78	122.999,56	102.097,45	131.284,77	181.679,37
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Bagi hasil Pendapatan ke</b>	<b>55.080,39</b>	<b>95.380,26</b>	<b>119.271,85</b>	<b>176.898,78</b>	<b>122.999,56</b>	<b>102.097,45</b>	<b>131.284,77</b>	<b>181.679,37</b>
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>240.943,62</b>	<b>280.959,23</b>	<b>340.243,51</b>	<b>463.381,81</b>	<b>636.425,23</b>	<b>775.348,98</b>	<b>854.261,28</b>	<b>862.715,75</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>42.963,16</b>	<b>46.699,01</b>	<b>95.484,85</b>	<b>70.791,82</b>	<b>(26.557,37)</b>	<b>64.773,45</b>	<b>(49.416,14)</b>	<b>(14.690,64)</b>
Pembiayaan								
Penggunaan SILPA	52.673,60	85.822,13	131.521,14	227.005,97	290.197,79	254.692,42	315.465,87	264.129,74
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	-	-	-	80,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>52.673,60</b>	<b>85.822,13</b>	<b>131.521,14</b>	<b>227.005,97</b>	<b>290.197,79</b>	<b>254.692,42</b>	<b>315.545,87</b>	<b>264.129,74</b>
Pengeluaran Pembiayaan								
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.300,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00	8.948,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	1.006,72
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Silpa Tahun berkenaan	8.514,62	131.521,14	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.814,62</b>	<b>132.521,14</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.948,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.006,72</b>
Pembiayaan Netto	42.858,98	(46.699,01)	130.521,14	219.405,97	281.249,79	250.692,42	313.545,87	255.123,02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	85.822,14	-	227.005,99	290.197,79	254.692,42	315.465,87	264.129,73	240.432,38

Tabel L. 6  
 Analisis Proporsi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2003 s/d 2010

(dalam prosentase)

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Pendapatan									
Pendapatan Asli Daerah									
Pendapatan Pajak Daerah	90,28%	93,38%	91,43%	87,59%	85,14%	88,41%	87,37%	90,28%	89,23%
Pendapatan Retribusi Daerah	0,94%	0,51%	0,34%	0,48%	0,62%	1,02%	1,64%	0,80%	0,79%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	0,00%	0,08%	0,07%	0%	0%	0,35%	0,72%	0,94%	0,27%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	17,93%	39,27%	67,56%	93,24%	87,80%	72,34%	57,63%	50,33%	60,76%
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>25,28%</b>	<b>34,93%</b>	<b>43,12%</b>	<b>37,10%</b>	<b>33,37%</b>	<b>35,02%</b>	<b>30,66%</b>	<b>38,69%</b>	<b>34,77%</b>
Pendapatan Transfer									
Transfer Pemerintah Pusat - Dana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak	17,27%	8,37%	9,21%	7,55%	8,12%	7,61%	7,89%	10,02%	9,51%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0%	10,55%	14,94%	10,40%	13,28%	17,13%	10,81%	9,34%	10,81%
Dana Alokasi Umum	57,23%	51,95%	42,90%	51,61%	52,36%	46,55%	50,69%	48,42%	50,22%
Dana Alokasi Khusus	2,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,63%	8,17%	1,55%	2,03%
<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana</b>	<b>71,69%</b>	<b>64,08%</b>	<b>56,56%</b>	<b>62,90%</b>	<b>66,63%</b>	<b>64,98%</b>	<b>69,31%</b>	<b>61,24%</b>	<b>64,67%</b>
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya									
Dana Otonomi Khusus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73,23%	9,15%
Dana Penyesuaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	26,77%	15,85%
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,01%</b>
Lain-Lain Pendapatan yang sah	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	37,50%
Pendapatan Hibah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Pendapatan Dana Darurat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Pendapatan Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
<b>Jumlah lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>3,02%</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,33%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0,54%</b>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>							
Belanja									
Belanja Operasi									
Belanja Pegawai	62,80%	54,74%	51,58%	45,18%	35,89%	37,20%	35,22%	50,47%	46,64%
Belanja Barang	37,20%	45,26%	48,42%	54,82%	25,91%	24,16%	26,31%	37,10%	37,40%
Belanja Bunga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Belanja Subsidi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,21%	0,34%	0,07%
Belanja Hibah	0%	0%	0%	0%	14,96%	28,17%	32,33%	7,20%	10,33%
Belanja Bantuan Sosial	0%	0%	0%	0%	23,25%	10,47%	5,93%	4,89%	5,57%
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>37,52%</b>	<b>33,27%</b>	<b>30,88%</b>	<b>30,91%</b>	<b>49,77%</b>	<b>56,50%</b>	<b>56,70%</b>	<b>42,51%</b>	<b>42,26%</b>

Tabel L.6 Lanjutan

<b>URAIAN</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>Rata-rata</b>
Belanja Modal	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25,00%
Belanja Tanah	0%	0%	100,00%	100,00%	2,40%	6,98%	14,36%	7,60%	28,92%
Belanja Peralatan & Mesin	0%	0%	0%	0%	11,27%	18,21%	5,47%	4,58%	4,94%
Belanja Gedung & Bangunan	0%	0%	0%	0%	12,96%	22,44%	25,71%	46,78%	13,49%
Belanja Irigasi & Jaringan	0%	0%	0%	0%	70,71%	50,13%	53,40%	41,00%	26,90%
Belanja Asset Tetap lainnya	0%	0%	0%	0%	2,66%	2,24%	1,06%	0,04%	0,75%
Belanja Asset Lainnya	0%	0%	0%	0%					0,00%
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>39,45%</b>	<b>32,11%</b>	<b>34,02%</b>	<b>30,72%</b>	<b>30,56%</b>	<b>30,33%</b>	<b>27,87%</b>	<b>36,32%</b>	<b>32,67%</b>
Belanja Tak Terduga									
Belanja Tak Terduga	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	87,50%
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,20%</b>
Transfer									
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota &	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Jumlah Transfer Bagi hasil Pendapatan ke</b>	<b>22,86%</b>	<b>33,95%</b>	<b>35,05%</b>	<b>38,18%</b>	<b>19,33%</b>	<b>13,17%</b>	<b>15,37%</b>	<b>21,06%</b>	<b>24,87%</b>
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>50,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,50%</b>	<b>24,39%</b>	<b>-10,43%</b>	<b>20,53%</b>	<b>-18,71%</b>	<b>-6,11%</b>	<b>12,78%</b>
Pembiayaan									
Penggunaan SILPA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
Pencairan Dana Cadangan									0,00%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang							0,03%		0,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah									0,00%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman									0,00%
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>123%</b>	<b>-184%</b>	<b>101%</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>	<b>102%</b>	<b>101%</b>	<b>104%</b>	<b>69,04%</b>
Pengeluaran Pembiayaan									
Pembentukan Dana Cadangan									0,00%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13,25%	0,75%	100%	100%	100%	100%	100%	88,82%	75,35%
Pembayaran Pokok Pinjaman									11,18%
Pemberian Pinjaman Daerah									0,00%
Silpa Tahun berkenaan	86,75%	99,25%							23,25%
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>22,90%</b>	<b>-283,78%</b>	<b>0,77%</b>	<b>3,46%</b>	<b>3,18%</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,64%</b>	<b>3,53%</b>	<b>-30,96%</b>
Pembiayaan Netto	49,94%	0%	57,50%	75,61%	110,43%	79,47%	118,71%	106,11%	74,72%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,50%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah.

**Tabel L.1  
PROVINSI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN**

Nomor urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Perubahan	Realisasi	Rp	%
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan Retribusi daerah				
1.1.3	yang dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah				
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer pemerintah Pusat - dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak				
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.2	Dana Penyesuaian				
1.2.2.3	Dana Alokasi Umum				
1.2.2.4	Dana Alokasi Khusus				
1.2.2.5	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
1.2.2.6	Dana Otonomi Khusus				
1.2.2.7	Dana Penyesuaian				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah				
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.3.3	Pendapatan lainnya				
	Jumlah				
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERAS				
2.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.2	Belanja Barang				
2.1.3	Belanja Bunga				
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.5	Belanja Hibah				
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan				
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga				
	Jumlah				

Tabel L.1 Lanjutan

Nomor urut	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
2.4	TRANSFER				
2.4.1	Bagi Hasil pajak ke kabupaten/Kota				
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota				
	Surplus / (Defisit)				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Piutang Daerah				
	Jumlah				
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah				
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah				
	Pembiayaan Neto				
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)				

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006

## Lampiran 9

**Tabel L.9**  
*Return* yang diharapkan dari  
 Penyertaan Modal PT. Sumatera Shiping Lines

Tahun	Penyertaan Modal	Deviden (Rp)	<i>Return</i>
sms II 2003	100.000.000	0	-100%
sms I 2004	100.000.000	0	-100%
sms II 2004	100.000.000	0	-100%
sms I 2005	100.000.000	0	-100%
sms II 2005	100.000.000	0	-100%
sms I 2006	100.000.000	0	-100%
sms II 2006	100.000.000	0	-100%
sms I 2007	100.000.000	0	-100%
sms II 2007	100.000.000	0	-100%
sms I 2008	100.000.000	0	-100%
sms II 2008	100.000.000	0	-100%
sms I 2009	100.000.000	0	-100%
sms II 2009	100.000.000	0	-100%
sms I 2010	100.000.000	0	-100%
sms II 2010	100.000.000	0	-100%
Jumlah			-1500%
X bar			-100%

Laporan Realisasi APPD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

## Lampiran 10

**Tabel L.10**  
*Return* yang diharapkan dari  
 Penyertaan Modal pada PT. Sumatera Promotion Centre

Tahun	Penyertaan Modal	Deviden (Rp)	Return
sms II 2003	100.000.000	0	0%
sms I 2004	100.000.000	0	0%
sms II 2004	100.000.000	0	0%
sms I 2005	100.000.000	0	0%
sms II 2005	100.000.000	0	0%
sms I 2006	100.000.000	0	0%
sms II 2006	100.000.000	0	0%
sms I 2007	100.000.000	0	0%
sms II 2007	100.000.000	0	0%
sms I 2008	100.000.000	0	0%
sms II 2008	100.000.000	0	0%
sms I 2009	100.000.000	0	0%
sms II 2009	100.000.000	0	0%
sms I 2010	100.000.000	0	0%
sms II 2010	100.000.000	0	0%
Jumlah			0%
X bar			0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep. Babel, diolah

**Tabel L.11**  
*Return* yang diharapkan dari Penyertaan Modal  
 pada PDAM Kota Pangkalpinang

Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Deviden (Rp)	Return (%)
Sms II 2007	8.216.750.000	0	0%
Sms I 2008	8.216.750.000	0	0%
Sms II 2008	8.216.750.000	0	0%
Sms I 2009	8.216.750.000	0	0%
Sms II 2009	8.216.750.000	0	0%
Sms I 2010	8.216.750.000	0	0%
Sms II 2010	8.216.750.000	0	0%
Jumlah			0%
x bar			0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

## Lampiran 11

**Tabel L.12**  
*Return yang diharapkan dari Penyertaan Modal  
 pada PDAM Kabupaten Belitung*

Tahun	Jumlah Penyertaan Modal (Rp)	Dividen (Rp)	Return (%)
Sms II 2007	731.250.000	0	0%
Sms I 2008	731.250.000	0	0%
Sms II 2008	731.250.000	0	0%
Sms I 2009	731.250.000	0	0%
Sms II 2009	731.250.000	0	0%
Sms I 2010	731.250.000	0	0%
Sms II 2010	731.250.000	0	0%
Jumlah	5.118.750.000	0	0%
x bar	731.250.000	0	0%

Sumber : Laporan Realiasi APBD Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah

**Tabel L.13**  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro dan Giro  
 Kovarian dan Koefisien Korelasi*

Tahun	Giro	Giro- E(R)	Giro	Giro- E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	2,03%	(0,0037)	0,001%
Smst II 2003	3,90%	0,0150	3,90%	0,0150	0,023%
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	1,69%	(0,0071)	0,005%
Smst II 2004	3,04%	0,0064	3,04%	0,0064	0,004%
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	1,64%	(0,0076)	0,006%
Smst II 2005	3,36%	0,0096	3,36%	0,0096	0,009%
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	1,96%	(0,0044)	0,002%
Smst II 2006	4,54%	0,0214	4,54%	0,0214	0,046%
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	1,49%	(0,0091)	0,008%
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	2,27%	(0,0013)	0,000%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	1,44%	(0,0096)	0,009%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	1,67%	(0,0073)	0,005%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	1,29%	(0,0111)	0,012%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	2,92%	0,0052	0,003%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	1,66%	(0,0074)	0,005%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	3,45%	0,0105	0,011%
Jumlah	38,35%		0,2769		0,150%
E (R)	2,40%		0,0231	$\sigma$ Giro , Giro	0,010%

Sumber : Laporan Realiasi APBD Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ giro, giro}) = 0,000100 = 0,010\%$$

Korelasi

$$P(\text{giro}, \text{giro}) = \frac{0,000100}{0,01 \times 0,01} = 1$$

Lampiran 12

**Tabel L.14**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro dan Deposito**

Tahun	Giro	Giro- E(R)	Deposito	Deposito-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,0203	(0,0037)			0,000000
Smst II 2003	0,0390	0,0150			0,000000
Smst I 2004	0,0169	(0,0071)			0,000000
Smst II 2004	0,0304	0,0064			0,000000
Smst I 2005	0,0164	(0,0076)	0,0045	(0,0398)	0,000302
Smst II 2005	0,0336	0,0096	0,0365	(0,0078)	-0,000075
Smst I 2006	0,0196	(0,0044)	0,0544	0,0101	-0,000044
Smst II 2006	0,0454	0,0214	0,0327	(0,0116)	-0,000248
Smst I 2007	0,0149	(0,0091)	0,0406	(0,0037)	0,000034
Smst II 2007	0,0227	(0,0013)	0,0315	(0,0128)	0,000017
Smst I 2008	0,0144	(0,0096)	0,0662	0,0219	-0,000210
Smst II 2008	0,0167	(0,0073)	0,1150	0,0707	-0,000516
Smst I 2009	0,0129	(0,0111)	0,0375	(0,0068)	0,000075
Smst II 2009	0,0292	0,0052	0,0375	(0,0068)	-0,000035
Smst I 2010	0,0166	(0,0074)	0,0377	(0,0066)	0,000049
Smst II 2010	0,0345	0,0105	0,0376	(0,0067)	-0,000070
Jumlah	0,3835		0,5317		-0,000723
E (R)	0,0240		0,0443	$\sigma$ Giro , Deposito	(0,000048)

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Kovarian ( $\sigma$  giro, Deposito) = - 0,000048

Korelasi

$$P \text{ Giro , Deposito} = \frac{-0,000048}{0,01 \times 0,0265} = -0,1811$$

## Lampiran 13

Tabel L.15  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro dan Saham Bank Sumsel Babel*

Tahun	Giro	Giro- E(R)	Sumsel	Sumsel-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,0203	(0,0037)	-	(0,0500)	0,000185
Smst II 2003	0,0390	0,0150	0,0810	0,0310	0,000465
Smst I 2004	0,0169	(0,0071)	0,0053	(0,0447)	0,000317
Smst II 2004	0,0304	0,0064	0,0467	(0,0033)	-0,000021
Smst I 2005	0,0164	(0,0076)	0,0088	(0,0412)	0,000313
Smst II 2005	0,0336	0,0096	0,0398	(0,0102)	-0,000098
Smst I 2006	0,0196	(0,0044)	0,0270	(0,0230)	0,000101
Smst II 2006	0,0454	0,0214	0,0359	(0,0141)	-0,000302
Smst I 2007	0,0149	(0,0091)	0,0400	(0,0100)	0,000091
Smst II 2007	0,0227	(0,0013)	0,0837	0,0317	-0,000044
Smst I 2008	0,0144	(0,0096)	0,0316	(0,0184)	0,000177
Smst II 2008	0,0167	(0,0073)	0,0835	0,0335	-0,000245
Smst I 2009	0,0129	(0,0111)	0,0321	(0,0179)	0,000199
Smst II 2009	0,0292	0,0052	0,1316	0,0816	0,000424
Smst I 2010	0,0166	(0,0074)	0,0209	(0,0291)	0,000215
Smst II 2010	0,0345	0,0105	0,1322	0,0822	0,000863
Jumlah	0,3835		0,8001		0,002457
E (R)	0,0240		0,0500	$\sigma$ Giro , Sumsel	0,0001638

Sumber : Diolah oleh Peneliti

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ giro, Sumsel-Babel}) = 0,0001638$$

Korelasi

$$P \text{ giro , sumsel} = \frac{0,0001638}{0,01 \times 0,0411} = 0,3985$$

## Lampiran 14

**Tabel L.16**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro & Saham Shiping Lines**

Tahun	Giro	Giro- E(R)	SSL	SSL-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	0%	0%	0%
Smst II 2003	3,90%	0,0150	0%	0%	0%
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	0%	0%	0%
Smst II 2004	3,04%	0,0064	0%	0%	0%
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	0%	0%	0%
Smst II 2005	3,36%	0,0096	0%	0%	0%
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	0%	0%	0%
Smst II 2006	4,54%	0,0214	0%	0%	0%
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	0%	0%	0%
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	0%	0%	0%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	0%	0%	0%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	0%	0%	0%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	0%	0%	0%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	0%	0%	0%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	0%	0%	0%
Jumlah	38,35%		0,0000		0%
E (R)	2,40%		0% σ Giro , SSL		0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Kovarian ( $\sigma$  giro, sumsel) = 0

Korelasi

$$P \text{ giro , sumsel} = \frac{0}{0,01 \times 0} = 0$$

## Lampiran 15

Tabel L.17  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro & Saham Sumatera Promotion Centre*

Tahun	Giro	Giro- E(R)	SPC	SPC-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	0%	0%	0%
Smst II 2003	3,90%	0,0150	0%	0%	0%
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	0%	0%	0%
Smst II 2004	3,04%	0,0064	0%	0%	0%
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	0%	0%	0%
Smst II 2005	3,36%	0,0096	0%	0%	0%
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	0%	0%	0%
Smst II 2006	4,54%	0,0214	0%	0%	0%
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	0%	0%	0%
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	0%	0%	0%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	0%	0%	0%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	0%	0%	0%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	0%	0%	0%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	0%	0%	0%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	0%	0%	0%
Jumlah	38,35%		0,0000		0%
E (R)	2,40%		0% σ Giro , SPC		0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep. Babel, diolah

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ giro, SPC}) = 0$$

Korelasi

$$P \text{ giro , SPC} = \frac{0}{0,01 \times 0} = 0$$

## Lampiran 16

**Tabel L.18**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro & Saham Riau Airlines**

Tahun	Giro	Giro- E(R)	Riau	Riau-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	0%	-	0,00%
Smst II 2003	3,90%	0,0150	0%	-	0,00%
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	0%	-	0,00%
Smst II 2004	3,04%	0,0064	0%	-	0,00%
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	0%	-	0,00%
Smst II 2005	3,36%	0,0096	0%	-	0,00%
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	0%	-	0,00%
Smst II 2006	4,54%	0,0214	0,00%	-0,0027	-0,01%
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	2,41%	0,0214	-0,02%
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	0,00%	-0,0027	0,00%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	0,00%	-0,0027	0,00%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	0,00%	-0,0027	0,00%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	0,00%	-0,0027	0,00%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	0,00%	-0,0027	0,00%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	0,00%	-0,0027	0,00%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	0,00%	-0,0027	0,00%
Jumlah	38,35%		2,41%		-0,0196%
E (R)	2,40%		0,27% $\sigma$ Giro , Riau		-0,0013%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ giro, riau}) = -0,0000131$$

Korelasi

$$P \text{ giro , riau} = \frac{-0,0000131}{0,01 \times 0,008} = -0,16375$$

## Lampiran 17

Tabel L. 19  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro & Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera*

Tahun	Giro	Giro- E(R)	BBBS	BBBS-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,0203	(0,0037)	0%	0%	0%
Smst II 2003	3,90%	0,0150	0%	0%	0%
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	0%	0%	0%
Smst II 2004	3,04%	0,0064	0%	0%	0%
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	0%	0%	0%
Smst II 2005	3,36%	0,0096	0%	0%	0%
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	0%	0%	0%
Smst II 2006	4,54%	0,0214	0%	12,63%	0,27%
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	0%	12,63%	-0,11%
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	-2,30%	10,33%	-0,01%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	-2,30%	10,33%	-0,10%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	-11,29%	1,34%	-0,01%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	-11,29%	1,34%	-0,01%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	-17,49%	-4,86%	-0,03%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	-17,49%	-4,86%	0,04%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	-51,54%	-38,91%	-0,41%
Jumlah	38,35%		113,70%		-0,38%
E (R)	2,40%		-12,63%	$\sigma$ Giro , BBBS	-0,03%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ giro, BBBS}) = -0,0003$$

Korelasi

$$\text{P giro , BBBS} = \frac{-0,03\%}{1\% \times 16,19\%} = -0,185$$

## Lampiran 18

Tabel L.20  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro & Saham BPR Syariah Babel*

Tahun	Giro	Giro- E(R)	B.Syariah	B.Syariah-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	-	-	-
Smst II 2003	3,90%	0,0150	-	-	-
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	-	-	-
Smst II 2004	3,04%	0,0064	-	-	-
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	-	-	-
Smst II 2005	3,36%	0,0096	-	-	-
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	-	-	-
Smst II 2006	4,54%	0,0214	0%	(0,0631)	-0,14%
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	0%	(0,0631)	0,06%
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	10,00%	0,0369	0,00%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	4,10%	(0,0221)	0,02%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	12,30%	0,0599	-0,04%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	2,90%	(0,0341)	0,04%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	10,00%	0,0369	0,02%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	7,50%	0,0119	-0,01%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	10,00%	0,0369	0,04%
Jumlah	38,35%		56,80%		-0,0179%
E (R)	2,40%		6,31% σ Giro , Syariah		-0,0012%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Kovarian ( $\sigma$  Giro, Syariah) = - 0,000012

Korelasi

$$P \text{ Giro , Syariah} = \frac{-0,000012}{0,01 \times 0,469} = -0,02559$$

**Tabel L.21**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro & Penyertaan Modal PDAM Pangkalpinang**

Tahun	Giro	Giro- E(R)	PDAM-PKP	PDAM-PKP-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	-	-	-
Smst II 2003	3,90%	0,0150	-	-	-
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	-	-	-
Smst II 2004	3,04%	0,0064	-	-	-
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	-	-	-
Smst II 2005	3,36%	0,0096	-	-	-
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	-	-	-
Smst II 2006	4,54%	0,0214	-	-	-
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	-	-	-
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	0%	0%	0%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	0%	0%	0%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	0%	0%	0%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	0%	0%	0%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	0%	0%	0%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	0%	0%	0%
Jumlah	38,35%		0%		0%
E (R)	2,40%		0% σ Giro , PDAM PKP		0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ giro, PDAM PKP}) = 0$$

Korelasi

$$P \text{ giro , PDAMPKP} \frac{0}{0,01 \times 0} = 0$$

## Lampiran 20

**Tabel L.22**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Giro & Penyertaan Modal PDAM Belitung**

Tahun	Giro	Giro- E(R)	PDAM-BLT	PDAM.BLT-E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	2,03%	(0,0037)	-	-	0%
Smst II 2003	3,90%	0,0150	-	-	0%
Smst I 2004	1,69%	(0,0071)	-	-	0%
Smst II 2004	3,04%	0,0064	-	-	0%
Smst I 2005	1,64%	(0,0076)	-	-	0%
Smst II 2005	3,36%	0,0096	-	-	0%
Smst I 2006	1,96%	(0,0044)	-	-	0%
Smst II 2006	4,54%	0,0214	-	-	0%
Smst I 2007	1,49%	(0,0091)	-	-	0%
Smst II 2007	2,27%	(0,0013)	0%	0%	0%
Smst I 2008	1,44%	(0,0096)	0%	0%	0%
Smst II 2008	1,67%	(0,0073)	0%	0%	0%
Smst I 2009	1,29%	(0,0111)	0%	0%	0%
Smst II 2009	2,92%	0,0052	0%	0%	0%
Smst I 2010	1,66%	(0,0074)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,45%	0,0105	0%	0%	0%
Jumlah	38,35%		-		0%
E (R)	2,40%		-	$\sigma$ Giro , PDAM BLT	0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Kovarian ( $\sigma$  Giro, PDAM BLT) = 0

Korelasi

$$\text{P giro , PDAM BLT } \frac{0}{0,01 \times 0} = 0$$

## Lampiran 21

**Tabel L.23**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito & Deposito**

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	Sumsel-Babel	Sumsel_Babel -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)	0,45%	(0,0398)	0,158%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)	3,65%	(0,0078)	0,006%
Smst I 2006	5,44%	0,0101	5,44%	0,0101	0,010%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)	3,27%	(0,0116)	0,013%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)	4,06%	(0,0037)	0,001%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	3,15%	(0,0128)	0,016%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	6,62%	0,0219	0,048%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	11,50%	0,0707	0,500%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	3,75%	(0,0068)	0,005%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	3,75%	(0,0068)	0,005%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	3,77%	(0,0066)	0,004%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	3,76%	(0,0067)	0,004%
Jumlah	53,17%		53,17%		0,772%
E (R)	4,43%		4,43%		0,070%

Diolah oleh Peneliti

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ deposito}, \text{deposito}) = 0,00070$$

Korelasi

$$P(\text{deposito}, \text{deposito}) = \frac{0,00070}{0,0265 \times 0,0265} = 0,997$$

## Lampiran 22

**Tabel L.24**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito & Saham Sumsel Babel**

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	Sumsel-Babel	Sumsel_Babel -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003			0,00%	(0,0500)	0,00%
Smst II 2003			8,10%	0,0310	0,00%
Smst I 2004			0,53%	(0,0447)	0,00%
Smst II 2004			4,67%	(0,0033)	0,00%
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)	0,88%	(0,0412)	0,16%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)	3,98%	(0,0102)	0,01%
Smst I 2006	5,44%	0,0101	2,70%	(0,0230)	-0,02%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)	3,59%	(0,0141)	0,02%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)	4,00%	(0,0100)	0,00%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	8,37%	0,0337	-0,04%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	3,16%	(0,0184)	-0,04%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	8,35%	0,0335	0,24%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	3,21%	(0,0179)	0,01%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	12,16%	0,0816	-0,06%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	2,09%	(0,0291)	0,02%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	13,22%	0,0822	-0,055%
Jumlah	53,17%		80,01%		0,243%
E (R)	4,43%		5,00%	$\sigma$ Deposito , Sumsel Babel	0,016%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ deposito, Sumsel-Babel}) = 0,00016$$

Korelasi

$$P \text{ deposito, Sumsel-Babel} = \frac{0,00016}{0,0265 \times 0,0411} = 0,1469$$

## Lampiran 23

Tabel L.25  
Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito dengan Sumatera Shiping Lines

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	Shiping	Shiping -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003			0%	0%	0%
Smst II 2003			0%	0%	0%
Smst I 2004			0%	0%	0%
Smst II 2004			0%	0%	0%
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)	0%	0%	0%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)	0%	0%	0%
Smst I 2006	5,44%	0,0101	0%	0%	0%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)	0%	0%	0%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)	0%	0%	0%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	0%	0%	0%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	0%	0%	0%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	0%	0%	0%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	0%	0%	0%
Jumlah	53,17%		0%		0%
E (R)	4,43%		0% σ Deposito , Shiping		0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah

Kovarian ( $\sigma$  deposito, Shiping) = 0

Korelasi

$$P \text{ deposito, Shiping} = \frac{0}{0,0265 \times 0} = 0$$

## Lampiran 24

Tabel L.26  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito dengan Sumatera Promotion Centre*

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	SPC	SPC -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003			0%	0%	0%
Smst II 2003			0%	0%	0%
Smst I 2004			0%	0%	0%
Smst II 2004			0%	0%	0%
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)	0%	0%	0%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)	0%	0%	0%
Smst I 2006	5,44%	0,0101	0%	0%	0%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)	0%	0%	0%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)	0%	0%	0%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	0%	0%	0%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	0%	0%	0%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	0%	0%	0%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	0%	0%	0%
Jumlah	53,17%		0%		0%
E (R)	4,43%		0%	σ Deposito , SPC	0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ deposito, SPC}) = 0$$

Korelasi

$$P \text{ deposito, SPC} = \frac{0}{0,0265 \times 0} = 0$$

## Lampiran 25

**Tabel L.27**  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito dan Riau Airlines*

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	Riau	Riau -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)			0%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)			0%
Smst I 2006	5,44%	0,0101			0%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)	0,00%	-0,27%	0,00%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)	2,41%	2,14%	-0,01%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	0,00%	-0,27%	0,00%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	0,00%	-0,27%	-0,01%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	0,00%	-0,27%	-0,02%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	0,00%	-0,27%	0,00%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	0,00%	-0,27%	0,00%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	0,00%	-0,27%	0,00%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	0,00%	-0,27%	0,00%
Jumlah	53,17%		2,41%		-0,02%
E (R)	4,43%		0,27% σ Deposito , Riau		-0,002%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ deposito, Riau}) = -0,00002$$

Korelasi

$$P \text{ deposito, SPC} = \frac{-0,00002}{0,0265 \times 0,008} = -0,0943$$

## Lampiran 26

Tabel L.28  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera*

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	BBBS	BBBS -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003					
Smst II 2003					
Smst I 2004					
Smst II 2004					
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)			0%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)			0%
Smst I 2006	5,44%	0,0101			0%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)	0%	0,1263	-0,15%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)	0%	0,1263	-0,05%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	-2,30%	0,1033	-0,13%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	-2,30%	0,1033	0,23%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	-11,29%	0,0134	0,09%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	-11,29%	0,0134	-0,01%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	-17,49%	(0,0486)	0,03%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	-17,49%	(0,0486)	0,03%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	-51,54%	(0,3891)	0,26%
Jumlah	53,17%		-114%		0,31%
E (R)	4,43%		-12,63%	$\sigma$ Deposito , BBBS	0,028%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Kovarian ( $\sigma$  deposito, BBBS) = 0,00028

Korelasi

$$\frac{0,00028}{0,0265 \times 0,1619} = 0,0653$$

## Lampiran 27

**Tabel L.29**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito dan Bank Syariah Babel**

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	Bank Syariah	Syariah -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)	-	-	-
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)	-	-	-
Smst I 2006	5,44%	0,0101	-	-	-
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)	-	-	-
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)	-	-	-
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	10,00%	0,0369	-0,047%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	4,10%	(0,0221)	-0,048%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	12,30%	0,0599	0,423%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	2,90%	(0,0341)	0,023%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	10,00%	0,0569	-0,025%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	7,50%	0,0119	-0,008%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	10,00%	0,0369	-0,025%
Jumlah	53,17%		56,80%		0,293%
E (R)	4,43%		6,31%	$\sigma$ Deposito , Syariah	0,027%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ deposito, Syariah}) = 0,00027$$

Korelasi

$$P \text{ deposito, Syariah} = \frac{0,00027}{0,0265 \times 0,0469} = 0,217$$

## Lampiran 28

Tabel L.30  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito dan PDAM Pangkalpinang*

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	PDAM PKP	PDAM.PKP -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003					
Smst II 2003					
Smst I 2004					
Smst II 2004					
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)			0%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)			0%
Smst I 2006	5,44%	0,0101			0%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)			0%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)			0%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	0%	0%	0%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	0%	0%	0%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	0%	0%	0%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	0%	0%	0%
Jumlah	53,17%		0%		0%
E (R)	4,43%		0%	$\sigma$ Deposito , PDAM.PKP	0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian} (\sigma \text{ deposito}, \text{PDAM Pangkalpinang}) = 0$$

Korelasi

$$\text{P deposito, PDAM Pangkalpinang} \quad \frac{0}{0,0265 \times 0} = 0$$

## Lampiran 29

**Tabel L.31**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Deposito dan PDAM Belitung**

Tahun	Deposito	Deposito- E(R)	PDAM BLT	PDAM.BLT -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2005	0,45%	(0,0398)			0%
Smst II 2005	3,65%	(0,0078)			0%
Smst I 2006	5,44%	0,0101			0%
Smst II 2006	3,27%	(0,0116)			0%
Smst I 2007	4,06%	(0,0037)			0%
Smst II 2007	3,15%	(0,0128)	0%	0%	0%
Smst I 2008	6,62%	0,0219	0%	0%	0%
Smst II 2008	11,50%	0,0707	0%	0%	0%
Smst I 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst II 2009	3,75%	(0,0068)	0%	0%	0%
Smst I 2010	3,77%	(0,0066)	0%	0%	0%
Smst II 2010	3,76%	(0,0067)	0%	0%	0%
Jumlah	53,17%		0%		0%
E (R)	4,43%		0%	$\sigma$ Deposito , PDAM BLT	0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel

Kovarian ( $\sigma$  deposito, PDAM Belitung) = 0

Korelasi

$$P \text{ deposito, PDAM Belitung} = \frac{0}{0,0265 \times 0} = 0$$

## Lampiran 30

**Tabel L.32**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Sumsel-Babel dan Sumsel Babel**

Tahun	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	(0,0500)	0,00%	(0,0500)	0,25%
Smst II 2003	8,10%	0,0310	8,10%	0,0310	0,10%
Smst I 2004	0,53%	(0,0447)	0,53%	(0,0447)	0,20%
Smst II 2004	4,67%	(0,0033)	4,67%	(0,0033)	0,00%
Smst I 2005	0,88%	(0,0412)	0,88%	(0,0412)	0,17%
Smst II 2005	3,98%	(0,0102)	3,98%	(0,0102)	0,01%
Smst I 2006	2,70%	(0,0230)	2,70%	(0,0230)	0,05%
Smst II 2006	3,59%	(0,0141)	3,59%	(0,0141)	0,02%
Smst I 2007	4,00%	(0,0100)	4,00%	(0,0100)	0,01%
Smst II 2007	8,37%	0,0337	8,37%	0,0337	0,11%
Smst I 2008	3,16%	(0,0184)	3,16%	(0,0184)	0,03%
Smst II 2008	8,35%	0,0335	8,35%	0,0335	0,11%
Smst I 2009	3,21%	(0,0179)	3,21%	(0,0179)	0,03%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	13,16%	0,0816	0,67%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	2,09%	(0,0291)	0,08%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	13,22%	0,0822	0,68%
Jumlah	80,01%		80,01%		2,53%
E (R)	6,67%		8,89%	$\sigma$ Sumsel;Sumsel	0,169%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma_{\text{sumsel,sumsel}}) = 0,00169$$

$$\begin{aligned} \text{Korelasi} \\ \rho_{\text{sumsel,sumsel}} &= \frac{0,00169}{0,0411 \times 0,0411} = 1 \end{aligned}$$

## Lampiran 31

Tabel L.33  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Sumsel-Babel dan Sumatera Shiping Airlines*

Tahun	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	Sumatera Shiping	Sumatera Shiping -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	(0,0500)	-100%	0%	0%
Smst II 2003	8,10%	0,0310	-100%	0%	0%
Smst I 2004	0,53%	(0,0447)	-100%	0%	0%
Smst II 2004	4,67%	(0,0033)	-100%	0%	0%
Smst I 2005	0,88%	(0,0412)	-100%	0%	0%
Smst II 2005	3,98%	(0,0102)	-100%	0%	0%
Smst I 2006	2,70%	(0,0230)	-100%	0%	0%
Smst II 2006	3,59%	(0,0141)	-100%	0%	0%
Smst I 2007	4,00%	(0,0100)	-100%	0%	0%
Smst II 2007	8,37%	0,0337	-100%	0%	0%
Smst I 2008	3,16%	(0,0184)	-100%	0%	0%
Smst II 2008	8,35%	0,0335	-100%	0%	0%
Smst I 2009	3,21%	(0,0179)	-100%	0%	0%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	-100%	0%	0%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	-100%	0%	0%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	-100%	0%	0%
Jumlah	80,01%		-1200%		0%
E (R)	6,67%		-100%	$\sigma$ Sumsel,Shiping	0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ Sumsel, Shiping}) = 0$$

Korelasi

$$P \text{ Sumsel, Shiping} = \frac{0}{0,0265 \times 0} = 0$$

## Lampiran 32

Tabel L.34  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Sumsel-Babel dan Sumatera Promotion Centre*

1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	(0,0500)	0%	0%	0%
Smst II 2003	8,10%	0,0310	0%	0%	0%
Smst I 2004	0,53%	(0,0447)	0%	0%	0%
Smst II 2004	4,67%	(0,0033)	0%	0%	0%
Smst I 2005	0,88%	(0,0412)	0%	0%	0%
Smst II 2005	3,98%	(0,0102)	0%	0%	0%
Smst I 2006	2,70%	(0,0230)	0%	0%	0%
Smst II 2006	3,59%	(0,0141)	0%	0%	0%
Smst I 2007	4,00%	(0,0100)	0%	0%	0%
Smst II 2007	8,37%	0,0337	0%	0%	0%
Smst I 2008	3,16%	(0,0184)	0%	0%	0%
Smst II 2008	8,35%	0,0335	0%	0%	0%
Smst I 2009	3,21%	(0,0179)	0%	0%	0%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	0%	0%	0%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	0%	0%	0%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	0%	0%	0%
Jumlah	80,01%		0%		0%
E (R)	6,67%		0%	$\sigma_{\text{SumselBabel, SPC}}$	0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ Sumsel, SPC}) = 0$$

Korelasi

$$P \text{ Sumsel, SPC} = \frac{0}{0,0411 \times 0} = 0$$

## Lampiran 33

**Tabel L.35**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Sumsel-Babel dan Riau Airlines**

Tahun	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	Riau	Riau -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	(0,0500)			0%
Smst II 2003	8,10%	0,0310			0%
Smst I 2004	0,53%	(0,0447)			0%
Smst II 2004	4,67%	(0,0033)			0%
Smst I 2005	0,88%	(0,0412)			0%
Smst II 2005	3,98%	(0,0102)			0%
Smst I 2006	2,70%	(0,0230)			0%
Smst II 2006	3,59%	(0,0141)	0,00%	(0,0027)	0,004%
Smst I 2007	4,00%	(0,0100)	2,41%	0,0214	-0,021%
Smst II 2007	8,37%	0,0337	0,00%	(0,0027)	-0,009%
Smst I 2008	3,16%	(0,0184)	0,00%	(0,0027)	0,005%
Smst II 2008	8,35%	0,0335	0,00%	(0,0027)	-0,009%
Smst I 2009	3,21%	(0,0179)	0,00%	(0,0027)	0,005%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	0,00%	(0,0027)	-0,022%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	0,00%	(0,0027)	0,008%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	0,00%	(0,0027)	-0,022%
Jumlah	80,01%		2,41%		-0,062%
E (R)	6,67%		0,27%	$\sigma$ SumselBabel, Riau	-0,004%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Kovarian ( $\sigma$  Sumsel Babel, Riau) = -0.00004

Korelasi

$$P \text{ SumselBabel,Riau} = \frac{-0,00004}{0,0411 \times 0,008} = -0,12165$$

**Tabel L.36**  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Sumsel Babel  
 dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera*

Tahun	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	BBBS	BBBS -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	-5,00%			0%
Smst II 2003	8,10%	3,10%			0%
Smst I 2004	0,53%	-4,47%			0%
Smst II 2004	4,67%	-0,33%			0%
Smst I 2005	0,88%	-4,12%			0%
Smst II 2005	3,98%	-1,02%			0%
Smst I 2006	2,70%	-2,30%			0%
Smst II 2006	3,59%	-1,41%	0%	12,63%	-0,18%
Smst I 2007	4,00%	-1,00%	0%	12,63%	-0,13%
Smst II 2007	8,37%	3,37%	-2,30%	10,33%	0,35%
Smst I 2008	3,16%	-1,84%	-2,30%	10,33%	-0,19%
Smst II 2008	8,35%	3,35%	-11,29%	1,34%	0,04%
Smst I 2009	3,21%	-1,79%	-11,29%	1,34%	-0,02%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	-17,49%	-4,86%	-0,40%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	-17,49%	-4,86%	0,14%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	-51,54%	-38,91%	-3,20%
Jumlah	80,01%		-1,1370		-3,58%
E (R)	5,00%		-12,63%	$\sigma_{\text{SumselBabel, BBBS}}$	-0,24%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

Kovarian ( $\sigma_{\text{sumselbabel, BBBS}}$ ) = -0,24%

Korelasi.

$$\rho_{\text{SumselBabel, BBBS}} = \frac{-0,24\%}{4,11\% \times 16,19\%} = -0,3607$$

## Lampiran 35

Tabel L.37  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Sumsel Babel dan BPR Syariah Babel*

Tahun	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	Syariah	Syariah -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	(0,0500)			0%
Smst II 2003	8,10%	0,0310			0%
Smst I 2004	0,53%	(0,0447)			0%
Smst II 2004	4,67%	(0,0033)			0%
Smst I 2005	0,88%	(0,0412)			0%
Smst II 2005	3,98%	(0,0102)			0%
Smst I 2006	2,70%	(0,0230)			0%
Smst II 2006	3,59%	(0,0141)			0%
Smst I 2007	4,00%	(0,0100)			0%
Smst II 2007	8,37%	0,0337	10,00%	0,0369	0,12%
Smst I 2008	3,16%	(0,0184)	4,10%	(0,0221)	0,04%
Smst II 2008	8,35%	0,0335	12,30%	0,0599	0,20%
Smst I 2009	3,21%	(0,0179)	2,90%	(0,0341)	0,06%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	10,00%	0,0369	0,30%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	7,50%	0,0119	-0,03%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	10,00%	0,0369	0,30%
Jumlah	80,01%		56,80%		1,00%
E (R)	5,00%		6,31%	$\sigma$ SumselBabel, Syariah	0,066%

Sumber : Diolah oleh Peneliti

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ Sumsel Babel, Syariah}) = 0.00066$$

Korelasi

$$P \text{ SumselBabel,Syariah} = \frac{0,00066}{0,0411 \times 0,0469} = 0,342396$$

## Lampiran 36

Tabel L.38  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Sumsel Babel dengan PDAM Pangkalpinang*

Tahun	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	PDAM PKP	PDAM PKP -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	(0,0500)			0%
Smst II 2003	8,10%	0,0310			0%
Smst I 2004	0,53%	(0,0447)			0%
Smst II 2004	4,67%	(0,0033)			0%
Smst I 2005	0,88%	(0,0412)			0%
Smst II 2005	3,98%	(0,0102)			0%
Smst I 2006	2,70%	(0,0230)			0%
Smst II 2006	3,59%	(0,0141)			0%
Smst I 2007	4,00%	(0,0100)			0%
Smst II 2007	8,37%	0,0337	0%	0%	0%
Smst I 2008	3,16%	(0,0184)	0%	0%	0%
Smst II 2008	8,35%	0,0335	0%	0%	0%
Smst I 2009	3,21%	(0,0179)	0%	0%	0%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	0%	0%	0%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	0%	0%	0%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	0%	0%	0%
Jumlah	80,01%		0%		0%
E (R)	5,00%		0% $\sigma$ SumselBabel, PDAM PKP		0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian} (\sigma \text{ Sumsel Babel, PDAM Pangkalpinang}) = 0$$

Korelasi

$$P \text{ SumselBabel,PDAM Pangkalpinang} = \frac{0}{0,0411 \times 0} = 0$$

**Tabel L.39**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Bank Sumsel-Babel**  
**dengan Saham PDAM Belitung**

Tahun	Sumsel-Babel	Sumsel.Babel- E(R)	PDAM BLT	PDAM BLT -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2003	0,00%	(0,0500)			0%
Smst II 2003	8,10%	0,0310			0%
Smst I 2004	0,53%	(0,0447)			0%
Smst II 2004	4,67%	(0,0033)			0%
Smst I 2005	0,88%	(0,0412)			0%
Smst II 2005	3,98%	(0,0102)			0%
Smst I 2006	2,70%	(0,0230)			0%
Smst II 2006	3,59%	(0,0141)			0%
Smst I 2007	4,00%	(0,0100)			0%
Smst II 2007	8,37%	0,0337	0%	0%	0%
Smst I 2008	3,16%	(0,0184)	0%	0%	0%
Smst II 2008	8,35%	0,0335	0%	0%	0%
Smst I 2009	3,21%	(0,0179)	0%	0%	0%
Smst II 2009	13,16%	0,0816	0%	0%	0%
Smst I 2010	2,09%	(0,0291)	0%	0%	0%
Smst II 2010	13,22%	0,0822	0%	0%	0%
Jumlah	80,01%		0%		0%
E (R)	5,00%		0%	$\sigma$ SumselBabel, PDAM BLT	0%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ Sumsel Babel, PDAM Belitung}) = 0$$

Korelasi

$$P \text{ SumselBabel,PDAM Belitung} = \frac{0}{0,0411 \times 0} = 0$$

## Lampiran 38

## Kovarian dan Koefisien Korelasi Nol

Kovarian ( $\sigma$  Shiping, Shiping) = 0

Korelasi

$$P_{\text{Shiping}, \text{Shiping}} = \frac{0}{0 \times 0} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  Shiping, SPC) = 0

Korelasi

$$P_{\text{Shiping}, \text{SPC}} = \frac{0}{0 \times 0} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  Shiping, Riau) = 0

Korelasi

$$P_{\text{Shiping}, \text{SPC}} = \frac{0}{0 \times 0,008} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  Shiping, Bumi Bangka Belitung Sejahtera) = 0

Korelasi

$$P_{\text{Shiping}, \text{Bumi Bangka Belitung Sejahtera}} = \frac{0}{0 \times 0,1619} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  Shiping, Syariah) = 0

Korelasi

$$P_{\text{Shiping}, \text{Syariah}} = \frac{0}{0 \times 0,0469} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  Shiping, PDAM Pangkalpinang) = 0

Korelasi

$$P_{\text{Shiping}, \text{PDAM Pangkalpinang}} = \frac{0}{0 \times 0} = 0$$

## Lanjutan

Kovarian ( $\sigma$  Shiping, PDAM Belitung) = 0

Korelasi

$$P \text{ Shiping,PDAM Belitung} = \frac{0}{0 \times 0} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  SPC, Riau) = 0

Korelasi

$$P \text{ SPC,Riau} = \frac{0}{0 \times 0,008} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  SPC, Bumi Bangka Belitung Sejahtera) = 0

Korelasi

$$P \text{ SPC,Bumi Bangka Belitung Sejahtera} = \frac{0}{0 \times 0,1619} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  SPC, Syariah) = 0

Korelasi

$$P \text{ SPC,Syariah} = \frac{0}{0 \times 0,0469} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  SPC, PDAM Pangkalpinang) = 0

Korelasi

$$P \text{ SPC,PDAM Pangkalpinang} = \frac{0}{0 \times 0} = 0$$

Kovarian ( $\sigma$  SPC, PDAM Belitung) = 0

Korelasi

$$P \text{ SPC,PDAM Belitung} = \frac{0}{0 \times 0} = 0$$

**Tabel L.40**  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Riau Airlines dan Riau Airlines*

Tahun	Riau	Riau - E(R)	Riau	Riau - E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst II 2006	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Smst I 2007	2,41%	0,0214	2,41%	0,0214	0,05%
Smst II 2007	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Smst I 2008	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Smst II 2008	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Smst I 2009	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Smst II 2009	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Smst I 2010	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Smst II 2010	0,00%	(0,0027)	0,00%	(0,0027)	0,00%
Jumlah	2,41%		2,41%		0,05%
E (R)	0,27%		0,27%	σ Riau , Riau	0,006%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, tahun.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ Riau, Riau}) = 0,00006$$

Korelasi

$$P \text{ Riau,Riau} = \frac{0,00006}{0,0080 \times 0,0080} = 0,9375$$

## Lampiran 40

Tabel L.41  
*Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Riau Airlines dan BPR Syariah*

Tahun	Riau Airlines	Riau Airlines- E(R)	B.Syariah Babel	B.Syariah Babel -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst II 2006	0,00%	(0,0027)	0%	0,00%	0,00%
Smst I 2007	2,41%	0,0214	0%	0,00%	0,00%
Smst II 2007	0,00%	(0,0027)	10,00%	3,69%	-0,01%
Smst I 2008	0,00%	(0,0027)	4,10%	-2,21%	0,01%
Smst II 2008	0,00%	(0,0027)	12,30%	5,99%	-0,02%
Smst I 2009	0,00%	(0,0027)	2,90%	-3,41%	0,01%
Smst II 2009	0,00%	(0,0027)	10,00%	3,69%	-0,01%
Smst I 2010	0,00%	(0,0027)	7,50%	1,19%	0,00%
Smst II 2010	0,00%	(0,0027)	10,00%	3,69%	-0,01%
Jumlah	2,41%		56,80%		-0,03%
E (R)	0,27%		6,31%	$\sigma$ Riau / B.Syariah	-0,004%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ Riau, Syariah-Babel}) = -0,00004$$

Korelasi

$$P \text{ Riau, Syariah-Babel} = \frac{-0,00004}{0,0080 \times 0,0469} = -0,1066$$

## Lampiran 41

Tabel L.42  
Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Riau Airlines dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera

Tahun	Riau Airlines	Riau Airlines- E(R)	BBBS	BBBS -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst II 2006	0,00%	(0,0027)	0%	12,63%	-0,03%
Smst I 2007	2,41%	0,0214	0%	12,63%	0,27%
Smst II 2007	0,00%	(0,0027)	-2,30%	10,33%	-0,03%
Smst I 2008	0,00%	(0,0027)	-2,30%	10,33%	-0,03%
Smst II 2008	0,00%	(0,0027)	-11,29%	1,34%	0,00%
Smst I 2009	0,00%	(0,0027)	-11,29%	1,34%	0,00%
Smst II 2009	0,00%	(0,0027)	-17,49%	-4,86%	0,01%
Smst I 2010	0,00%	(0,0027)	-17,49%	-4,86%	0,01%
Smst II 2010	0,00%	(0,0027)	-51,54%	-38,91%	0,11%
Jumlah	2,41%		-1,1370		0,30%
E (R)	0,27%		-12,63%	σ Riau; BBBS	0,04%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov.Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ Riau}, \text{BBBS}) = 0,0004$$

Korelasi

$$\rho \text{ Riau, BBBS} = \frac{0,0004}{0,0080 \times 0,1619} = 0,3088$$

## Lampiran 42

**Tabel L.43**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham BPR Syariah dan BPR Syariah**

Tahun	B.Syariah Babel	B.Syariah Babel -E(R)	B.Syariah Babel	B.Syariah Babel -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst II 2007	10,00%	0,0369	10,00%	0,0369	0,14%
Smst I 2008	4,10%	(0,0221)	4,10%	(0,0221)	0,05%
Smst II 2008	12,30%	0,0599	12,30%	0,0599	0,36%
Smst I 2009	2,90%	(0,0341)	2,90%	(0,0341)	0,12%
Smst II 2009	10,00%	0,0369	10,00%	0,0369	0,14%
Smst I 2010	7,50%	0,0119	7,50%	0,0119	0,01%
Smst II 2010	10,00%	0,0369	10,00%	0,0369	0,14%
Jumlah	56,80%		56,80%		0,95%
E (R)	6,31%		6,31%	$\sigma$ B.Syariah , B.Syariah	0,158%

Sumber : Diolah oleh Peneliti

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ B.Syariah-Babel, Syariah-Babel}) = 0,00158$$

Korelasi

$$\rho \text{ Syariah-Babel, Syariah-Babel} = \frac{0,00158}{0,0469 \times 0,0469} = 0,718$$

Tabel L.44

*Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham BPR Syariah dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera*

Tahun	B.Syariah Babel'	B.Syariah Babel -E(R)	BBBS	BBBS -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2006			0%	12,63%	0,00%
Smst II 2006			0%	12,63%	0,00%
Smst II 2007	10,00%	0,0369	-2,30%	10,33%	0,38%
Smst I 2008	4,10%	(0,0221)	-2,30%	10,33%	-0,23%
Smst II 2008	12,30%	0,0599	-11,29%	1,34%	0,08%
Smst I 2009	2,90%	(0,0341)	-11,29%	1,34%	-0,05%
Smst II 2009	10,00%	0,0369	-17,49%	-4,86%	-0,18%
Smst I 2010	7,50%	0,0119	-17,49%	-4,86%	-0,06%
Smst II 2010	10,00%	0,0369	-51,54%	-38,91%	-1,44%
Jumlah	56,80%		-1,1370		-1,49%
E (R)	6,31%		-12,63%	$\sigma$ B.Syariah-Babel, BBBS	-0,19%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ B.Syariah-Babel, BBBS}) = -0,0019$$

Korelasi

$$\rho \text{ Syariah-Babel, BBBS} = \frac{-0,0019}{0,0469 \times 0,1619} = -0,2502$$

**Tabel L.45**  
**Kovarian dan Koefisien Korelasi Saham Bumi Bangka Belitung Sejahtera**  
**dan Bumi Bangka Belitung Sejahtera**

Tahun	BBBS	BBBS -E(R)	BBBS	BBBS -E(R)	3 x 4
1	2	3	4	5	6
Smst I 2006	0%	12,63%	0%	12,63%	1,60%
Smst II 2006	0%	12,63%	0%	12,63%	1,60%
Smst II 2007	-2,30%	10,33%	-2,30%	10,33%	1,07%
Smst I 2008	-2,30%	10,33%	-2,30%	10,33%	1,07%
Smst II 2008	-11,29%	1,34%	-11,29%	1,34%	0,02%
Smst I 2009	-11,29%	1,34%	-11,29%	1,34%	0,02%
Smst II 2009	-17,49%	-4,86%	-17,49%	-4,86%	0,24%
Smst I 2010	-17,49%	-4,86%	-17,49%	-4,86%	0,24%
Smst II 2010	-51,54%	-38,91%	-51,54%	-38,91%	15,14%
Jumlah	-1,1370		-1,1370		20,97%
E (R)	-12,63%		-12,63% $\sigma$ BBBS, BBBS		2,62%

Sumber : Laporan Realisasi APBD Pemerintah Prov. Kep.Babel, diolah.

$$\text{Kovarian } (\sigma \text{ BBBS, BBBS}) = 2,62\% = 0,0262$$

Korelasi

$$\rho_{\text{BBBS, BBBS}} = \frac{0,0262}{0,1619 \times 0,1619} = 1$$

Tabel. L.46  
*Return Portofolio Investasi Pemerintah Provinsi Kep. Babel*

Return Portofolio	E(R)	Bobot	2 x 3	E(R)	Bobot	5 x 6	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
Rp giro ; giro	2,40%	0,6941	0,016658	2,40%	0,3059	0,0073416	2,40%
Rp giro ; deposito	2,40%	0,6941	0,016658	4,43%	0,3059	0,01355137	3,02%
Rp giro ; Sumsel Babel	2,40%	0,6941	0,016658	5,00%	0,3059	0,015295	3,20%
Rp giro ; SSL	2,40%	0,6941	0,016658	0,00%	0,3059	0	1,67%
Rp giro ; SPC	2,40%	0,6941	0,016658	0,00%	0,3059	0	1,67%
Rp giro ; Riau	2,40%	0,6941	0,016658	0,27%	0,3059	0,00082593	1,75%
Rp giro ; Syariah	2,40%	0,6941	0,016658	6,30%	0,3059	0,0192717	3,59%
Rp giro ; BBBS	2,40%	0,6941	0,016658	-12,63%	0,3059	-0,0386352	-2,20%
Rp giro ; PKP	2,40%	0,6941	0,016658	0,00%	0,3059	0	1,67%
Rp giro ; Belitung	2,40%	0,6941	0,016658	0,00%	0,3059	0	1,67%
Rp deposito ; deposito	4,43%	0,1826	0,008089	4,43%	0,8174	0,03621082	4,43%
Rp deposito ; Sumsel	4,43%	0,1826	0,008089	5,00%	0,8174	0,04087	4,90%
Rp deposito ; SSL	4,43%	0,1826	0,008089	0,00%	0,8174	0	0,81%
Rp deposito ; SPC	4,43%	0,1826	0,008089	0,00%	0,8174	0	0,81%
Rp deposito ; Riau	4,43%	0,1826	0,008089	0,27%	0,8174	0,00220698	1,03%
Rp deposito ; Syariah	4,43%	0,1826	0,008089	6,30%	0,8174	0,0514962	5,96%
Rp deposito ; BBBS	4,43%	0,1826	0,008089	-12,63%	0,8174	-0,1032376	-9,51%
Rp deposito ; PKP	4,43%	0,1826	0,008089	0,00%	0,8174	0	0,81%
Rp deposito ; Belitung	4,43%	0,1826	0,008089	0,00%	0,8174	0	0,81%
Rp, Sumsel ; Sumsel	5,00%	0,0584	0,00292	5,00%	0,9416	0,04708	5,00%
Rp, Sumsel ; SSL	5,00%	0,0584	0,00292	0,00%	0,9416	0	0,29%
Rp, Sumsel ; SPC	5,00%	0,0584	0,00292	0,00%	0,9416	0	0,29%
Rp, Sumsel ; Riau	5,00%	0,0584	0,00292	0,27%	0,9416	0,00254232	0,55%
Rp, Sumsel ; Syariah	5,00%	0,0584	0,00292	6,30%	0,9416	0,0593208	6,22%
Rp, Sumsel ; BBBS	5,00%	0,0584	0,00292	-12,63%	0,9416	-0,1189241	-11,60%
Rp, Sumsel ; PKP	5,00%	0,0584	0,00292	0%	0,9416	0	0,29%
Rp, Sumsel ; Belitung	5,00%	0,0584	0,00292	0%	0,9416	0	0,29%
Rp SSL ; SSL	0,00%	0,0004	0	0%	0,9996	0	0,00%
Rp SSL ; SPC	0,00%	0,0004	0	0%	0,9996	0	0,00%
Rp SSL ; Riau	0,00%	0,0004	0	0,27%	0,9996	0,00269892	0,27%
Rp SSL ; Syariah	0,00%	0,0004	0	6,30%	0,9996	0,0629748	6,30%
Rp SSL ; BBBS	0,00%	0,0004	0	-12,63%	0,9996	-0,1262495	-12,62%
Rp SSL ; Pangkalpinang	0,00%	0,0004	0	0,00%	0,9996	0	0,00%
Rp SSL ; Belitung	0,00%	0,0004	0	0,00%	0,9996	0	0,00%
Rp SPC ; SPC	0,00%	0,0004	0	0%	0,9996	0	0,00%
Rp SPC ; Riau	0,00%	0,0004	0	0,27%	0,9996	0,00269892	0,27%
Rp SPC ; Syariah	0,00%	0,0004	0	6,30%	0,9996	0,0629748	6,30%
Rp SPC ; BBBS	0,00%	0,0004	0	-12,63%	0,9996	-0,1262495	-12,62%
Rp SPC ; Pangkalpinang	0,00%	0,0004	0	0,00%	0,9996	0	0,00%
Rp SPC ; Belitung	0,00%	0,0004	0	0,00%	0,9996	0	0,00%

Tabel L.46 lanjutan

Return Portofolio	E(R)	Bobot	2 x 3	E(R)	Bobot	5 x 6	Rp
Rp Riau ; Riau	0,27%	0,0037	0,0000100	0,27%	0,9963	0,00269	0,27%
Rp Riau ; Syariah	0,27%	0,0037	0,0000100	6,30%	0,9963	0,0627669	6,28%
Rp Riau ; BBBS	0,27%	0,0037	0,0000100	-12,63%	0,9963	-0,125833	-12,58%
Rp Riau ; Pangkalpinang	0,27%	0,0037	0,0000100	0,00%	0,9963	0	0,00%
Rp Riau; Belitung	0,27%	0,0037	0,0000100	0,00%	0,9963	0	0,00%
Rp Syariah ; Syariah	6,30%	0,0131	0,0008253	6,30%	0,9869	0,0621747	6,30%
Rp Syariah ; BBBS	6,30%	0,0131	0,0008253	-12,63%	0,9869	-0,124645	-12,38%
Rp Syariah ; Pangkalpinang	6,30%	0,0131	0,0008253	0,00%	0,9869	0	0,08%
Rp Syariah; Belitung	6,30%	0,0131	0,0008253	0,00%	0,9869	0	0,08%
Rp BBBS ; BBBS	-12,63%	0,0146	(0,0018440)	-12,63%	0,9854	-0,124456	-12,63%
Rp BBBS ; Pangkalpinang	-12,63%	0,0146	(0,0018440)	0%	0,9854	0	-0,18%
Rp BBBS ; Belitung	-12,63%	0,0146	(0,0018440)	0%	0,9854	0	-0,18%
Rp Pangkalpinang ; Pangkalpinang	0%	0,0146	0	0%	0,9854	0	0,00%
Rp Pangkalpinang ; Belitung	0%	0,0146	0	0%	0,9854	0	0,00%
Rp Belitung : Belitung	0%	0,0146	0	0%	0,9854	0	0,00%

UNIVERSITAS TERBUKA

## Lampiran 47

Descriptives<sup>a,b,c,d,e,f</sup>

		Statistic	Std. Error
Risiko			
PAD ,00	Mean	75563736147.5 000	8731427484.50 000
	95% Confidence Interval for Mean	35379569109.6 198	-
	Lower Bound	186507041404. 6198	
		Upper Bound	
	5% Trimmed Mean	.	
	Median	75563736147.5 000	
	Variance	1524756518341 64000000.000	
	Std. Deviation	12348103167.4 5710	
	Minimum	6.68E+010	
	Maximum	8.43E+010	
Range		17462854969.0 0	
Interquartile Range		.	
Skewness		.	
Kurtosis		.	

- a. PAD is constant when Risiko = ,01. It has been omitted.
- b. PAD is constant when Risiko = ,00. It has been omitted.
- c. PAD is constant when Risiko = 2,65. It has been omitted.
- d. PAD is constant when Risiko = 4,11. It has been omitted.
- e. PAD is constant when Risiko = 4,69. It has been omitted.
- f. PAD is constant when Risiko = 16,19. It has been omitted.

## Lampiran 47 lanjutan

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,095 <sup>a</sup>	,009	-,274	3,26082E10	,294

a. Predictors: (Constant), Resiko, Return

b. Dependent Variable: PAD

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6,826E19	2	3,413E19	,032	,969 <sup>a</sup>
	Residual	7,443E21	7	1,063E21		
	Total	7,511E21	9			

a. Predictors: (Constant), Resiko, Return

b. Dependent Variable: PAD

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,568E10	1,304E10		5,550	,001	
	Return	-17343044,812	2,601E8	-,026	-,067	,949	,954
	Resiko	5,609E8	2,216E9	,097	,253	,807	,954

a. Dependent Variable: PAD

Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Return	Resiko
1	1	1,700	1,000	,16	,10	,12
	2	,945	1,342	,00	,48	,30
	3	,355	2,189	,84	,42	,57

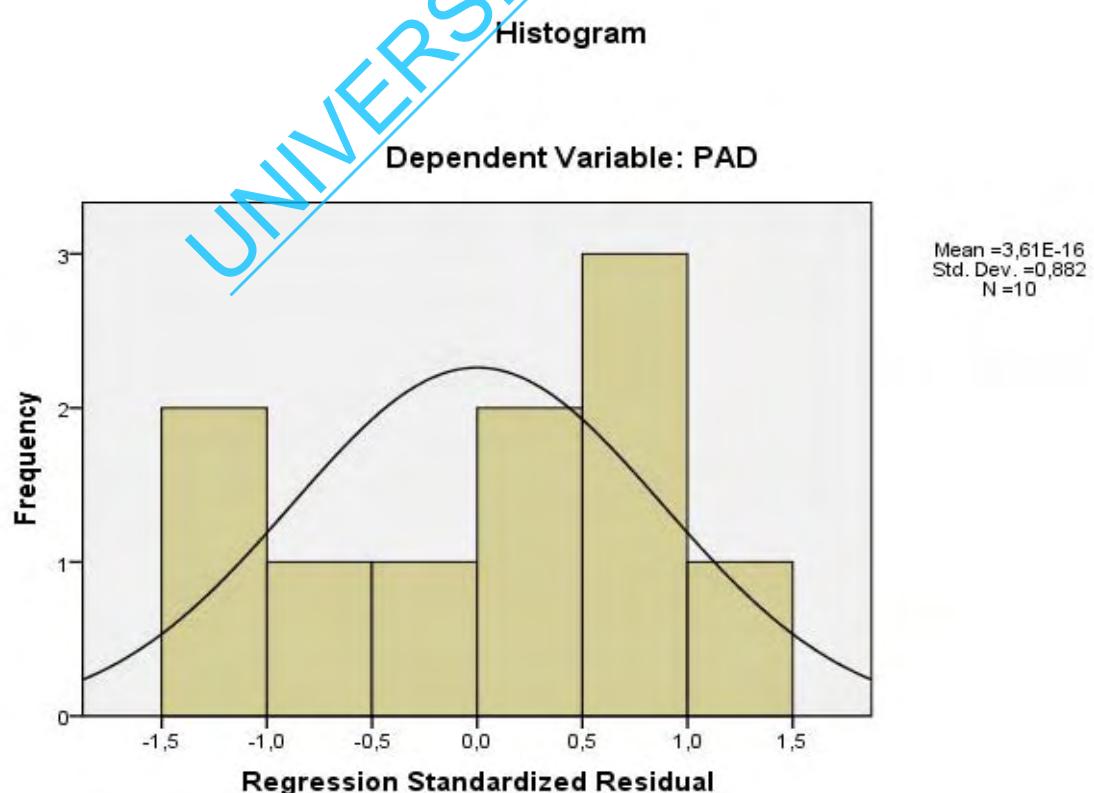
a. Dependent Variable: PAD

## Lampiran 47 lanjutan

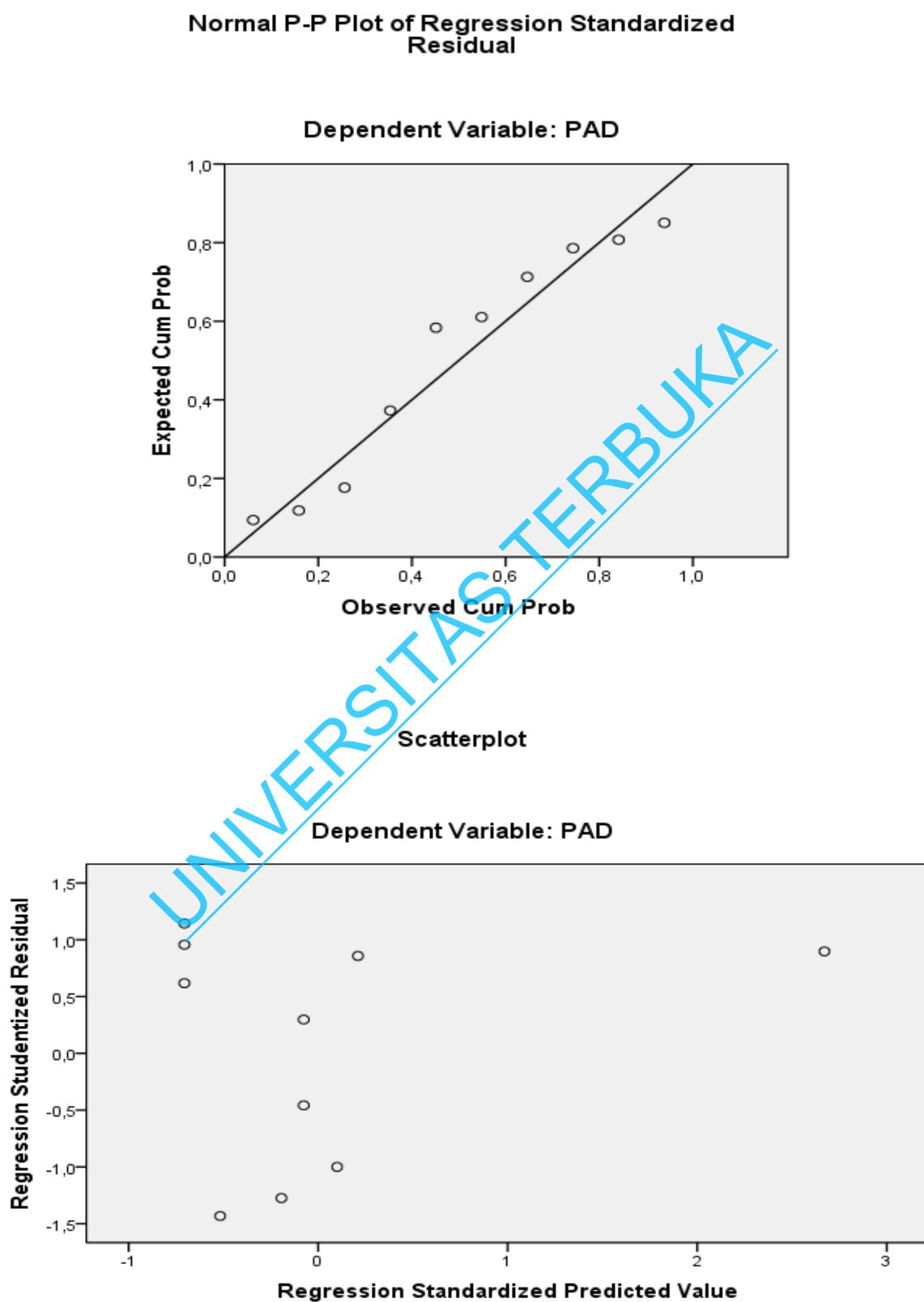
**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7,5682E10	8,4982E10	7,7626E10	2,75402E9	10
Std. Predicted Value	-,706	2,671	,000	1,000	10
Standard Error of Predicted Value	1,210E10	3,097E10	1,675E10	6,545E9	10
Adjusted Predicted Value	5,5032E8	8,7884E10	6,9290E10	2,51571E10	10
Residual	-4,29190E10	3,38683E1	,00001	2,87577E10	10
		0			
Std. Residual	-1,316	1,039	,000	,882	10
Stud. Residual	-1,433	1,143	,061	1,005	10
Deleted Residual	-5,08441E10	9,35882E1	8,33626E9	4,56914E10	10
	0				
Stud. Deleted Residual	-1,578	1,174	,036	1,036	10
Mahal. Distance	,339	7,219	1,800	2,293	10
Cook's Distance	,027	2,477	,307	,763	10
Centered Leverage Value	,038	,802	,200	,255	10

a. Dependent Variable: PAD



## Lampiran 47 lanjutan



Tabel L. 4

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 31 Desember 2003 s/d 2010

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan								
Pendapatan Asli Daerah								
Pendapatan Pajak Daerah	64.805,23	106.887,40	172.164,29	173.574,90	173.292,13	260.085,86	215.623,98	296.214,79
Pendapatan Retribusi Daerah	672,50	581,37	638,05	942,89	1.265,79	3.000,95	4.043,05	2.628,02
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	93,41	137,02	-		1.023,52	1.771,55	3.077,33
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.302,41	6.899,46	15.365,01	23.655,51	28.983,98	30.074,23	25.361,26	26.201,88
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>71.780,14</b>	<b>114.461,64</b>	<b>188.304,37</b>	<b>198.173,36</b>	<b>203.541,90</b>	<b>294.184,56</b>	<b>246.799,84</b>	<b>328.122,02</b>
Pendapatan Transfer								
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak	35.153,20	39.724,01	59.641,99	60.310,33	86.968,95	41.571,83	44.007,94	52.057,51
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	93.494,50	60.310,39	48.516,96
Dana Alokasi Umum	162.490,00	170.227,00	181.358,00	275.690,00	319.357,00	391.045,44	407.994,84	410.642,31
Dana Alokasi Khusus	5.900,00	-	-	-	-	19.826,10	45.563,00	8.071,80
<b>Jumlah Pendapatan Transfer - Dana Perimbangan</b>	<b>203.543,20</b>	<b>209.951,01</b>	<b>246.999,99</b>	<b>336.000,33</b>	<b>406.325,95</b>	<b>545.937,87</b>	<b>557.876,17</b>	<b>519.288,58</b>
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya								
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	450,00
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	169,13	164,51
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169,13</b>	<b>614,51</b>
Lain-Lain Pendapatan yang sah	8.583,44	3.245,59	1.424,00					
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah lain-lain pendapatan yang sah</b>	<b>8.583,44</b>	<b>3.245,59</b>	<b>1.424,00</b>					
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>283.906,78</b>	<b>327.658,24</b>	<b>436.728,36</b>	<b>534.173,63</b>	<b>609.867,85</b>	<b>840.122,43</b>	<b>804.845,14</b>	<b>848.025,11</b>
Belanja								
Belanja Operasi								
Belanja Pegawai	56.773,07	51.164,55	54.189,62	64.706,94	113.676,09	162.971,82	170.608,68	185.113,59
Belanja Barang	33.626,49	42.302,01	50.863,20	78.506,58	82.057,72	105.828,48	127.442,83	136.056,17
Belanja Bunga			-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi			-	-	-	-	993,56	1.251,75
Belanja Hibah			-	-	47.385,39	123.412,33	156.610,56	26.406,95
Belanja Bantuan Sosial			-	-	73.634,87	45.847,67	28.700,83	17.946,77
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>90.399,56</b>	<b>93.466,56</b>	<b>105.052,82</b>	<b>143.213,52</b>	<b>316.754,07</b>	<b>438.060,30</b>	<b>484.356,46</b>	<b>366.775,23</b>

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Belanja Modal	95.043,67	90.220,15		115.756,84	142.335,53	4.669,92	16.416,91	34.203,07
Belanja Tanah				-	-	21.923,21	42.816,72	13.033,98
Belanja Peralatan & Mesin			-	-	-	25.203,74	52.782,61	14.337,61
Belanja Gedung & Bangunan			-	-	-	137.530,90	117.899,07	61.210,57
Belanja Irigasi & Jaringan			-	-	-	5.181,65	5.275,92	128.492,63
Belanja Asset Tetap lainnya			-	-	-		2.525,98	129,34
Belanja Asset Lainnya			-	-	-			-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>95.043,67</b>	<b>90.220,15</b>	<b>115.756,84</b>	<b>142.335,53</b>	<b>104.509,42</b>	<b>235.191,23</b>	<b>238.120,05</b>	<b>313.362,00</b>
Belanja Tak Terduga								
Belanja Tak Terduga	420,00	1.892,26	162,00	933,98	2.162,18	-	500,00	899,15
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>420,00</b>	<b>1.892,26</b>	<b>162,00</b>	<b>933,98</b>	<b>2.162,18</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>899,15</b>
Transfer								
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa	55.080,39	95.380,26	119.271,85	176.898,78	122.999,56	102.097,45	131.284,77	181.679,37
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-		-	-	-	-	-
<b>Jumlah Transfer Bagi hasil Pendapatan ke Kab/Kota</b>	<b>55.080,39</b>	<b>95.380,26</b>	<b>119.271,85</b>	<b>176.898,78</b>	<b>122.999,56</b>	<b>102.097,45</b>	<b>131.284,77</b>	<b>181.679,37</b>
<b>Total Belanja dan Transfer</b>	<b>240.943,62</b>	<b>280.959,23</b>	<b>340.243,51</b>	<b>463.381,81</b>	<b>636.425,23</b>	<b>775.348,98</b>	<b>854.261,28</b>	<b>862.715,75</b>
<b>Surplus / Defisit</b>	<b>42.963,16</b>	<b>46.699,01</b>	<b>96.484,85</b>	<b>70.791,82</b>	<b>(26.557,38)</b>	<b>64.773,45</b>	<b>(49.416,14)</b>	<b>(14.690,64)</b>
Pembiayaan								
Penggunaan SILPA	52.673,60	85.822,13	131.521,14	227.005,97	290.197,79	254.692,42	315.465,87	264.129,74
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-	80,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>52.673,60</b>	<b>85.822,13</b>	<b>131.521,14</b>	<b>227.005,97</b>	<b>290.197,79</b>	<b>254.692,42</b>	<b>315.545,87</b>	<b>264.129,74</b>
Pengeluaran Pembiayaan								
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.300,00	1.000,00	1.000,00	7.600,00	8.948,00	4.000,00	2.000,00	8.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	1.006,72
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Silpa Tahun berkenaan	8.514,62	131.521,14	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>9.814,62</b>	<b>132.521,14</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.948,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.006,72</b>
Pembiayaan Netto	<b>42.858,98</b>	<b>(46.699,01)</b>	<b>130.521,14</b>	<b>219.405,97</b>	<b>281.249,79</b>	<b>250.692,42</b>	<b>313.545,87</b>	<b>255.123,02</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	<b>85.822,14</b>	<b>-</b>	<b>227.005,99</b>	<b>290.197,79</b>	<b>254.692,41</b>	<b>315.465,87</b>	<b>264.129,73</b>	<b>240.432,38</b>

Lampiran 5

Tabel L.5  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Neraca  
Per 31 Desember Tahun 2003 s/d 2010

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	TAHUN							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Asset								
Asset Lancar								
Kas di Kas Daerah	84.482,29	130.130,50	188.381,17	152.585,32	254.159,81	314.821,53	245.779,47	240.019,47
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.339,84	1.390,64	2.124,80	1.112,47	550,21	-	18.350,27	412,88
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	700,01	644,34	0,29	-
Investasi Jangka Pendek	-	-	36.500,00	136.500,00	-	-	-	-
Biaya dibayar dimuka	-	-	-	-	-	14.087,00	18.744,63	17,69
Piutang Pajak	-	353,59	598,11	-	-	9.622,84	-	-
Piutang Retribusi	-	9,98	46,72	49,77	393,98	1.792,39	87,28	90,15
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	191,48	54,54	42,44	259,28
Bagian Lancar Tuntutan Perpendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	19.849,18	18.689,54
Piutang Lainnya	-	6.150,00	15.776,58	8.468,68	2.868,77	120,44	40,22	-
Persediaan	-	286,41	103,61	-	1.997,65	319,37	3.082,17	1.658,12
Jumlah Asset Lancar	85.822,13	132.171,15	233.904,41	306.024,14	266.461,84	344.210,78	306.056,17	261.187,35
Investasi Jangka Panjang								
Investasi Non Permanen								
Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi dana bergulir/KUPEM	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	4.942,93	4.926,09	4.926,09
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	4.942,93	4.926,09	4.926,09
Investasi Permanen								
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.300,00	2.300,00	3.200,00	10.800,00	19.748,00	23.748,00	24.845,44	31.996,57
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Investasi Permanen	1.300,00	2.300,00	3.200,00	10.800,00	19.748,00	23.748,00	24.845,44	31.996,57
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.300,00	2.300,00	3.200,00	10.800,00	19.748,00	28.690,93	29.771,53	36.922,66

Tabel L.5. Lanjutan

URAIAN	TAHUN							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Asset Tetap								
Tanah	495.654,25	500.025,65	505.591,22	510.146,05	514.773,01	531.189,92	561.386,47	589.044,06
Peralatan & Mesin	-	31.717,59	6.953,35	86.371,64	108.294,86	148.973,95	161.661,95	169.318,14
Gedung & Bangunan	233.282,12	241.658,98	303.682,70	331.056,97	340.935,70	410.000,15	413.143,10	523.517,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	256.581,94	319.724,71	362.820,51	462.567,91	566.561,39	705.723,29	795.595,30	884.360,49
Asset Tetap Lainnya	55.606,64	34.261,48	75.328,69	7.742,03	11.300,12	16.576,08	18.953,07	19.334,17
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	23.565,73	12.334,46	2.970,09	31.651,76	-	92.679,76	199.352,38
Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Asset Tetap	1.041.124,95	1.150.954,14	1.266.710,93	1.400.854,69	1.591.496,77	1.812.463,39	2.043.419,65	2.384.926,24
Dana Cadangan								
Dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Asset Lainnya								
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	266,03	231,71	201,29	169,69
Tuntutan Perbenbendaharaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
Asset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
Asset lain-lain	-	-	-	-	1.686,52	1.686,52	1.686,52	10.687,96
Jumlah Asset Lainnya	-	-	-	-	1.952,55	1.918,23	1.887,81	10.857,65
Jumlah Asset	1.128.247,08	1.285.425,29	1.503.815,34	1.717.678,83	1.881.659,16	2.187.283,33	2.381.135,16	2.395.783,89
Kewajiban								
Kewajiban Jangka Pendek								
Uang Perhitungan Fihak Ketiga (PK)	-	11.009,85	-	-	-	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	19.104,16	18.211,41	6.010,07	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Obligasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	1.952,20	-	-	-	35.279,59	24.724,41	41.178,79
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	12.962,05	19.104,16	18.211,41	6.010,07	35.279,59	24.724,41	41.178,79

Tabel L.5. Lanjutan

URAIAN	TAHUN							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kewajiban Jangka Panjang								
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban	-	12.962,05	19.104,16	18.211,41	6.010,07	35.279,59	24.724,41	41.178,79
Ekuitas Dana								
Ekuitas Dana Lancar	1.128.247,08	1.272.463,21	1.484.711,21	290.197,79	254.692,42	315.465,87	264.129,74	240.432,35
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	-	-	-	-	717,63	-	0,29	
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	15.826,35	9.054,14	28.425,54	38.843,98	19.096,87
Cadangan Piutang	-	-	-	-	1.997,65	319,37	3.082,16	1.658,12
Cadangan Persediaan	-	-	-	(18.211,41)	(6.010,07)	(35.279,59)	(24.724,41)	(41.178,79)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	1.128.247,08	1.272.463,21	1.484.711,21	287.812,73	260.451,77	308.931,19	281.331,76	220.008,55
Ekuitas Dana Investasi								
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	10.800,00	19.748,00	28.690,93	29.771,52	36.922,65
Diinvestasikan dalam Asset Tetap	-	-	-	1.400.854,69	1.593.496,77	1.812.463,39	2.043.419,65	2.384.926,25
Diinvestasikan dalam Asset Lainnya	-	-	-	-	1.952,55	1.918,23	1.887,81	10.857,66
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	1.411.654,69	1.615.197,32	1.843.072,55	2.075.078,98	2.432.706,56
Ekuitas Dana Cadangan								
Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Dana	1.128.247,08	1.272.463,21	1.484.711,21	1.699.467,42	1.875.649,09	2.152.003,74	2.356.410,74	2.652.715,11
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	1.128.247,08	1.285.425,26	1.503.815,37	1.717.678,83	1.881.659,16	2.187.283,33	2.381.135,15	2.693.893,90

Sumber : Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lampiran 7

Tabel L.7  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 Analisis Horizontal Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 Per 31 Desember Tahun 2003 s/d 2010

(dalam prosentase)

URAIAN	TAHUN							Rata-rata
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Asset								
Asset Lancar								
Kas di Kas Daerah	35,08%	30,92%	-23,46%	39,96%	9,27%	-28,09%	-2,40%	10,18%
Kas di Bendahara Pengeluaran	3,65%	34,55%	-91,00%	-102,18%	0,00%	100,00%	-4344,46%	-628,49%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	-3,64%	-222086,21%	0,00%	-31713,55%
Investasi Jangka Pendek	0,00%	100,00%	73,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,75%
Biaya dibayar dimuka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	24,85%	-105861,73%	-15105,27%
Piutang Pajak	100,00%	40,88%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	34,41%
Piutang Retribusi	100,00%	78,64%	6,13%	87,57%	78,02%	-1953,61%	3,18%	-228,61%
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0%	0%	0%	100,00%	-251,08%	-28,51%	83,63%	-13,71%
Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	-6,20%	13,40%
Piutang Lainnya	0%	100,00%	61,02%	-86,29%	-195,20%	-2281,91%	-199,45%	-371,69%
Persediaan	100,00%	-176,46%	0,00%	100,00%	-525,50%	89,64%	0,00%	-58,90%
Jumlah Asset Lancar	35,07%	43,49%	17,82%	14,16%	15,74%	12,85%	10,90%	21,43%
Investasi Jangka Panjang								
Investasi Non Permanen								
Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Investasi dalam Surat Utang Negara	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Investasi dana berulir/KUPEM	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Investasi Non Permanen Lainnya	0%	0%	0%	0%	100,00%	-0,34%	0,00%	14,24%
Jumlah Investasi Non Permanen	0%	0%	0%	0%	0,23%	0,21%	0,21%	0,09%
Investasi Permanen								
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	43,48%	28,13%	70,37%	45,31%	16,84%	4,42%	22,35%	32,98%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Investasi Permanen Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Investasi Permanen	43,48%	28,13%	70,37%	45,31%	16,84%	4,42%	22,35%	32,98%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	43,48%	28,13%	70,37%	45,31%	31,17%	3,63%	19,37%	34,49%

Tabel L.7 Lanjutan

URAIAN	TAHUN							Rata-rata
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Asset Tetap								
Tanah	0,87%	1,10%	0,89%	0,90%	3,09%	5,38%	4,70%	2,42%
Peralatan & Mesin	100,00%	-356,15%	91,95%	20,24%	27,31%	7,85%	4,52%	-14,90%
Gedung & Bangunan	3,47%	20,42%	8,27%	2,90%	16,84%	0,76%	21,08%	10,54%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	19,75%	11,88%	21,56%	18,36%	9,72%	11,30%	10,04%	16,09%
Asset Tetap Lainnya	-62,30%	54,52%	-872,98%	31,49%	31,83%	12,54%	1,97%	-114,71%
Konstruksi dalam Penggerjaan	100,00%	-91,06%	-315,29%	94,25%	0%	100,00%	53,51%	-8,37%
Akumulasi Penyusutan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Asset Tetap	9,54%	9,14%	9,58%	12,09%	12,08%	11,30%	14,32%	11,15%
Dana Cadangan								
Dana cadangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Asset Lainnya								
Tagihan Penjualan Angsuran	0%	0%	0%	100%	-14,81%	-15,11%	-18,62%	7,35%
Tuntutan Perbenbendaharaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Tuntutan Ganti Rugi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Asset Tak Berwujud	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Asset lain-lain	0%	0%	0%	100%	0%	0%	84,22%	26,32%
Jumlah Asset Lainnya	0%	0%	0%	100%	-1,79%	-1,61%	82,61%	25,60%
Jumlah Asset	12,23%	14,52%	12,45%	8,71%	13,97%	8,14%	0,61%	10,09%
Kewajiban								
Kewajiban Jangka Pendek								
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14,29%
Utang Bunga	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Utang Pajak	0	100%	-4,90%	-203,01%	0%	0%	0%	-15,42%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Pemerintah Pusat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lembaga Keuangan Bukan Bank	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri Obligasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%
Utang Jangka Pendek Lainnya	100%	0%	0%	0%	100%	-42,69%	39,96%	28,18%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	100,00%	32,15%	-4,90%	-203,01%	82,96%	-42,69%	39,96%	0,64%

Tabel L.7 Lanjutan

URAIAN	TAHUN							Rata-rata
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Kewajiban Jangka Panjang								
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bank	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bukan Bank	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Utang Jangka Panjang Lainnya	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Kewajiban	100%	32,15%	-4,90%	-203,01%	82,96%	-42,69%	39,96%	0,64%
Ekuitas Dana								
Ekuitas Dana Lancar	11,33%	14,30%	0%	0%	0%	0%	0%	3,66%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0%	0%	100%	-13,94%	19,26%	-19,44%	-9,86%	10,86%
Pendapatan yang ditangguhkan	0%	0%	0%	100,00%	0,00%	100%	0,00%	28,57%
Cadangan Piutang	0%	0%	100%	-74,80%	68,15%	26,82%	-103,40%	2,40%
Cadangan Persediaan	0%	0%	0%	100%	-525,50%	89,64%	-85,88%	-60,25%
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	0%	0%	100%	-203,01%	82,96%	-42,69%	39,96%	-3,25%
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	11,33%	14,30%	-415,86%	-10,51%	15,69%	-9,81%	-27,87%	-60,39%
Ekuitas Dana Investasi								
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0%	0%	100%	45,31%	31,17%	3,63%	19,37%	28,50%
Diinvestasikan dalam Asset Tetap	0%	0%	100%	12,09%	12,08%	11,30%	14,32%	21,40%
Diinvestasikan dalam Asset Lainnya	0%	0%	0%	100%	-1,79%	-1,61%	82,61%	25,60%
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	0%	0%	100%	12,60%	12,36%	11,18%	14,70%	21,55%
Ekuitas Dana Cadangan								
Diinvestasikan dalam dana cadangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Jumlah Ekuitas Dana	11,33%	14,30%	12,64%	9,39%	12,84%	8,67%	11,17%	11,48%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12,23%	14,52%	12,45%	8,71%	13,97%	8,14%	11,61%	11,66%

Sumber : Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## NERACA

Per 31 Desember Tahun 2003 s/d 2010

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	Analisis Proporsi (dalam %)							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Asset								
Asset Lancar								
Kas di Kas Daerah	98,44%	98,46%	80,54%	49,86%	95,38%	91,46%	80,31%	91,90%
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,56%	1,05%	0,91%	0,36%	0,21%	0,00%	6,00%	0,16%
Kas di Bendahara Penerimaan	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	0,19%	0,00%	0,00%
Investasi Jangka Pendek	0%	0,00%	15,60%	44,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Biaya dibayar dimuka	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,09%	6,12%	0,01%
Piutang Pajak	0%	0,27%	0,26%	0,00%	0,00%	2,80%	0,00%	0,00%
Piutang Retribusi	0%	0,01%	0,02%	0,02%	0,15%	0,52%	0,03%	0,03%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan								
Angsuran	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,02%	0,01%	0,10%
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,49%	7,16%
Piutang Lainnya	0%	0,00%	2,63%	5,16%	3,18%	0,83%	0,04%	0,02%
Persediaan	0%	0,22%	0,04%	0,00%	0,75%	0,09%	1,01%	0,63%
Jumlah Asset Lancar	7,61%	10,28%	15,55%	17,82%	14,16%	15,74%	12,85%	9,70%
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah Investasi Non Permanen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,21%	0,18%
Investasi Permanen								
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah Investasi Permanen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	82,77%	83,45%	86,66%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,12%	0,18%	0,21%	0,03%	1,05%	1,31%	1,25%	1,37%
Asset Tetap								
Tanah	47,61%	43,44%	39,91%	36,42%	32,30%	29,31%	27,47%	24,70%
Peralatan & Mesin	0,00%	2,76%	0,55%	6,17%	6,80%	8,22%	7,91%	7,10%
Gedung & Bangunan	22,41%	21,00%	22,97%	23,63%	21,40%	22,62%	20,22%	21,95%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	24,64%	27,78%	28,64%	33,02%	35,55%	38,94%	38,93%	37,08%
Asset Tetap Lainnya	5,34%	2,98%	5,95%	0,55%	0,71%	0,91%	0,93%	0,81%
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00%	2,05%	0,97%	0,21%	3,24%	0,00%	4,54%	8,36%
Akumulasi Penyusutan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jumlah Asset Tetap	92,28%	89,54%	84,23%	81,56%	84,69%	82,86%	85,82%	88,53%
Asset Lainnya								
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,62%	0,00%	0,00%	1,56%
Tuntutan Perbenbendaharaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Asset lain-lain	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,38%	87,92%	89,34%	98,44%
Jumlah Asset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	0,08%	0,40%
Jumlah Asset	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Kewajiban								
Kewajiban Jangka Pendek								
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PKF)	0,00%	84,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Pajak	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00%	15,06%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	#DIV/0!	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah Kewajiban	0,00%	1,01%	1,27%	1,06%	0,32%	1,61%	1,04%	1,53%
Ekuitas Dana								
Ekuitas Dana Lancar	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)	0,00%	0,00%	0,00%	100,83%	97,79%	14,42%	93,89%	109,28%
Pendapatan yang ditangguhkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Cadangan Piutang	0,00%	0,00%	0,00%	5,50%	3,48%	1,30%	13,81%	8,68%
Cadangan Persediaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	0,01%	1,10%	0,75%
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	0,00%	0,00%	0,00%	-6,33%	-2,31%	-1,61%	-8,79%	-18,72%
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	100,00%	100,00%	100,00%	16,94%	13,89%	14,36%	11,94%	8,29%
Ekuitas Dana Investasi								
Diiinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00%	0,00%	0,00%	0,77%	1,22%	1,56%	1,43%	1,52%
Diinvestasikan dalam Asset Tetap	0,00%	0,00%	0,00%	99,23%	98,66%	98,34%	98,47%	98,04%
Diinvestasikan dalam Asset Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,10%	0,09%	0,45%
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	0,00%	0,00%	0,00%	83,06%	86,11%	85,64%	88,06%	91,71%
Jumlah Ekuitas Dana	100,00%	98,99%	98,73%	98,94%	99,68%	98,39%	98,96%	98,47%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diolah.

**Tabel L.2**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota**  
**Neraca**

Per 31 Desember Thn n dan Tahun n-1

<b>URAIAN</b>	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Asset		
Asset Lancar		
<b>Kas</b>		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
<b>Investasi Jangka Pendek</b>		
<b>Piutang</b>		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Dana Bagi Hasil		
Piutang Dana Alokasi Umum		
Piutang Dana Alokasi Khusus		
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Daerah		
Piutang Lain-lain		
<b>Persediaan</b>		
Jumlah Asset Lancar		
Investasi Jangka Panjang		
Investasi Non Permanen		
Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dana bergulir		
Investasi Non Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Non Permanen		
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pembangunan		
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan		
Investasi Permanen Lainnya		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
Asset Tetap		
Tanah		
Tanah		
Peralatan & Mesin		
Alat-alat Berat		
Alat-alat Angkutan		
Alat bengkel		
Alat Pertanian dan Peternakan		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
Alat Studio dan Alat Komunikasi		

Tabel 2.2 Lanjutan

URAIAN	(Rp)	(Rp)
Alat Ukur		
Alat-alat Kedokteran		
Alat laboratorium		
Alat Keamanan		
<b>Gedung dan Bangunan</b>		
Gedung & Bangunan		
Bangunan Monumen		
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air (Irigasi)		
Instalasi		
Jaringan		
<b>Asset Tetap Lainnya</b>		
Buku dan Perpustakaan		
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan		
Hewan/Ternak dan Tumbuhan		
<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>		
Akumulasi Penyusutan		
<b>Jumlah Asset Tetap</b>		
<b>Dana Cadangan</b>		
Dana cadangan		
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		
<b>Asset Lainnya</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Asset Tak Berwujud		
Asset lain-lain		
<b>Jumlah Asset Lainnya</b>		
<b>Jumlah Asset</b>		
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga		
Utang Bunga		
Utang Pajak		
Negeri		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
Utang Dalam Negeri		
Utang Luar Negeri		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		
<b>Jumlah Kewajiban</b>		

Tabel L.2 Lanjutan

URAIAN	(Rp)	(Rp)
<b>Ekuitas Dana</b>		
<b>Ekuitas Dana Lancar</b>		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		
Cadangan Piutang		
Cadangan Persediaan		
pembayaran utang jangka pendek		
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		
Ekuitas Dana Investasi		
Panjang		
Diinvestasikan dalam Asset Tetap		
Diinvestasikan dalam Asset Lainnya		
pembayaran utang jangka panjang		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		
Ekuitas Dana Cadangan		
Diinvestasikan dalam dana cadangan		
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		
Jumlah Ekuitas Dana		
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13